



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien guna mencapai organisasi yang menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pembentukannya, perlu menyusun peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Proses Bisnis antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian adalah diagram yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian terdiri atas:
 - a. peta proses;
 - b. peta sub-proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus mengacu kepada Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PROSES BISNIS ANTAR UNIT
ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

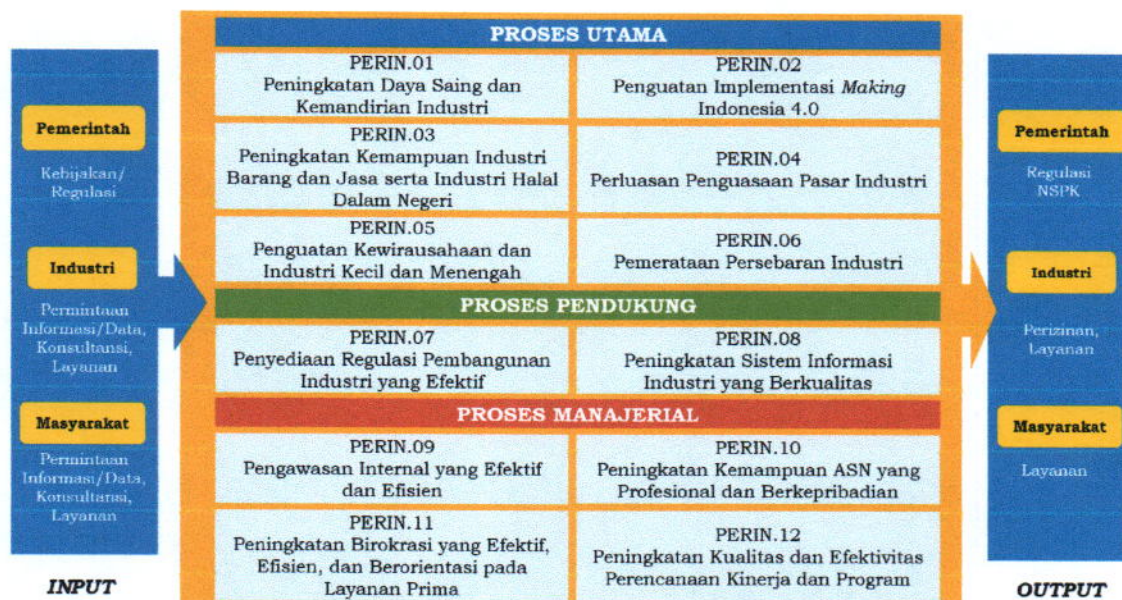
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. Peta Proses

Peta proses terdiri atas 3 (tiga) komponen induk, yaitu:

1. proses utama;
2. proses pendukung; dan
3. proses manajerial,

sebagaimana tergambar dalam peta proses sebagai berikut.



Proses utama merupakan proses yang meliputi bisnis utama (*core business*) dan menciptakan aliran nilai utama Kementerian Perindustrian. Proses utama mempunyai kontribusi terhadap peran secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Perindustrian (pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis). Dalam peta proses terdapat 6 (enam) proses utama, yaitu:

1. PERIN.01 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri;
2. PERIN.02 Penguatan Implementasi *Making* Indonesia 4.0;
3. PERIN.03 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri;
4. PERIN.04 Perluasan Penguasaan Pasar Industri;
5. PERIN.05 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah; dan
6. PERIN.06 Pemerataan Persebaran Industri.

Proses pendukung merupakan proses penopang secara langsung terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama. Dalam peta proses terdapat 2 (dua) proses pendukung, yaitu:

1. PERIN.07 Penyediaan Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif; dan
2. PERIN.08 Peningkatan Sistem Informasi Industri yang Berkualitas.

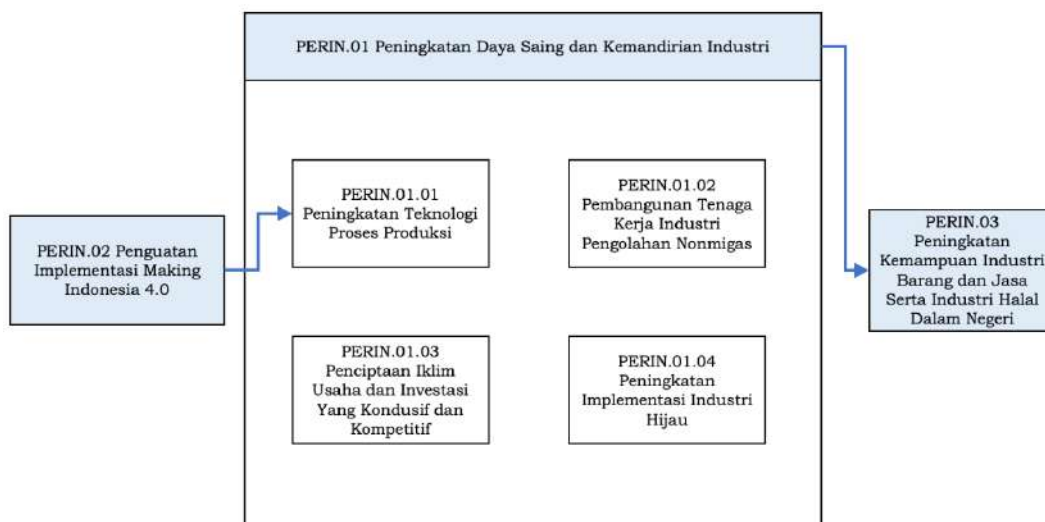
Proses manajerial merupakan proses yang mengelola operasional atau mengendalikan suatu sistem sebagai dukungan manajemen dan pengawasan untuk memastikan bahwa proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik. Dalam peta proses terdapat 4 (empat) proses manajerial, yaitu:

1. PERIN.09 Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
2. PERIN.10 Peningkatan Kemampuan ASN yang Profesional dan Berkepribadian;
3. PERIN.11 Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
4. PERIN.12 Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Kinerja dan Program.

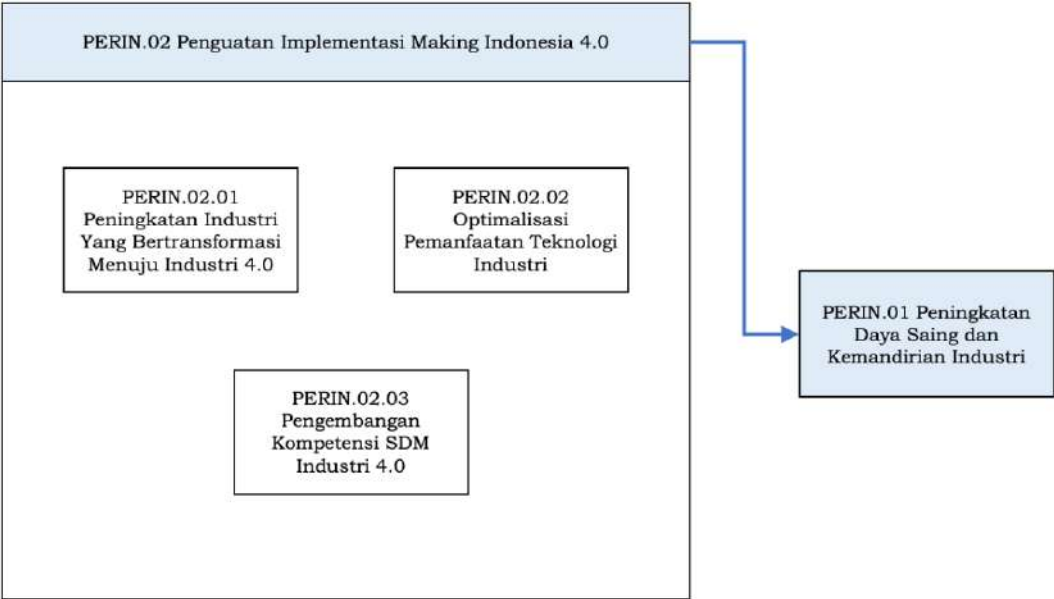
B. Peta Sub-proses

Peta sub-proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan serangkaian aktivitas sebagai bagian dari proses dan memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses induknya. Peta sub-proses menggambarkan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

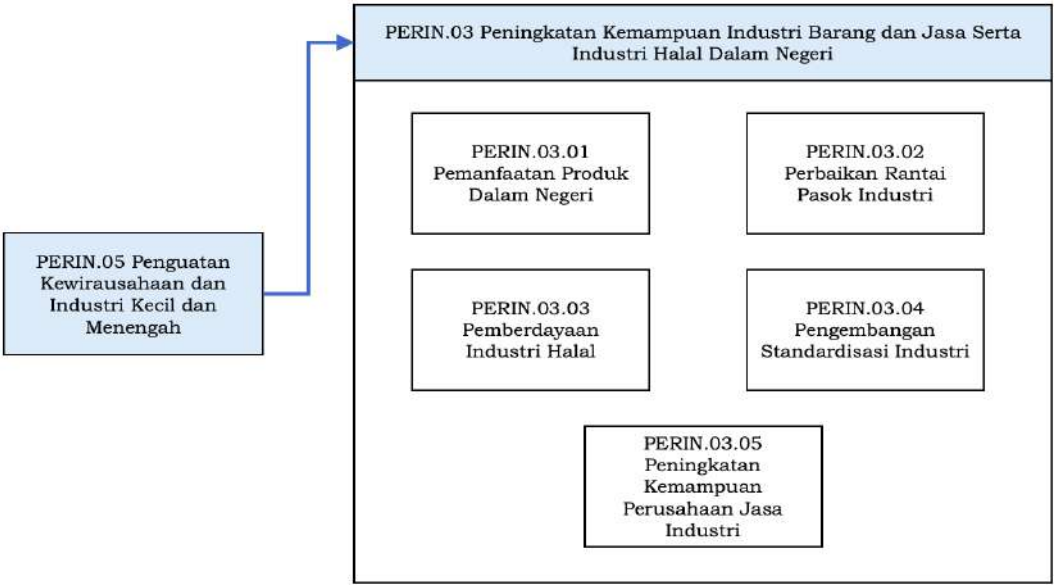
1. PERIN.01 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri terdiri atas sub-proses:
 - a. PERIN.01.01 Peningkatan Teknologi Proses Produksi;
 - b. PERIN.01.02 Pembangunan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas;
 - c. PERIN.01.03 Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif dan Kompetitif; dan
 - d. PERIN.01.04 Peningkatan Implementasi Industri Hijau,sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



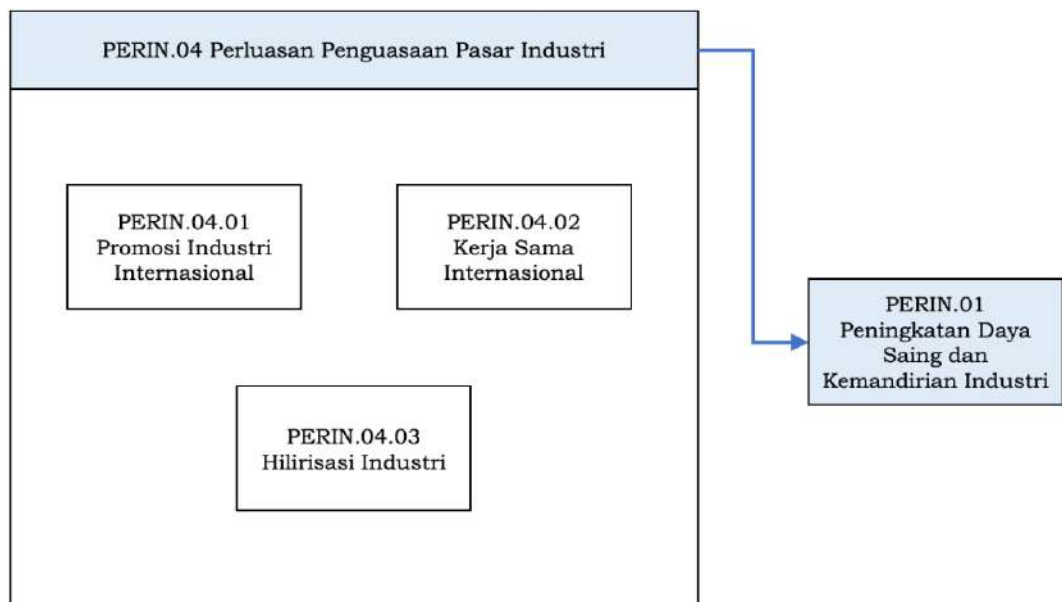
2. PERIN.02 Penguatan Implementasi *Making* Indonesia 4.0 terdiri atas sub-proses:
 - a. PERIN.02.01 Peningkatan Industri yang Bertransformasi Menuju Industri 4.0;
 - b. PERIN.02.02 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri; dan
 - c. PERIN.02.03 Pengembangan Kompetensi SDM Industri 4.0,sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



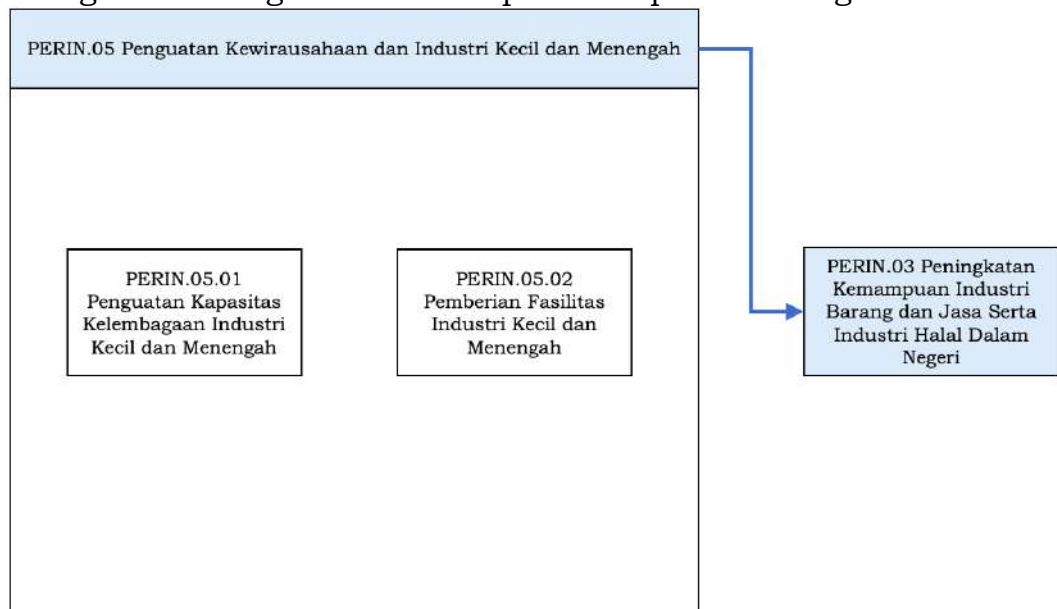
3. PERIN.03 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri terdiri atas sub-proses:
- a. PERIN.03.01 Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;
 - b. PERIN.03.02 Perbaikan Rantai Pasok Industri;
 - c. PERIN.03.03 Pemberdayaan Industri Halal;
 - d. PERIN.03.04 Pengembangan Standardisasi Industri; dan
 - e. PERIN.03.05 Peningkatan Kemampuan Perusahaan Jasa Industri,
- sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



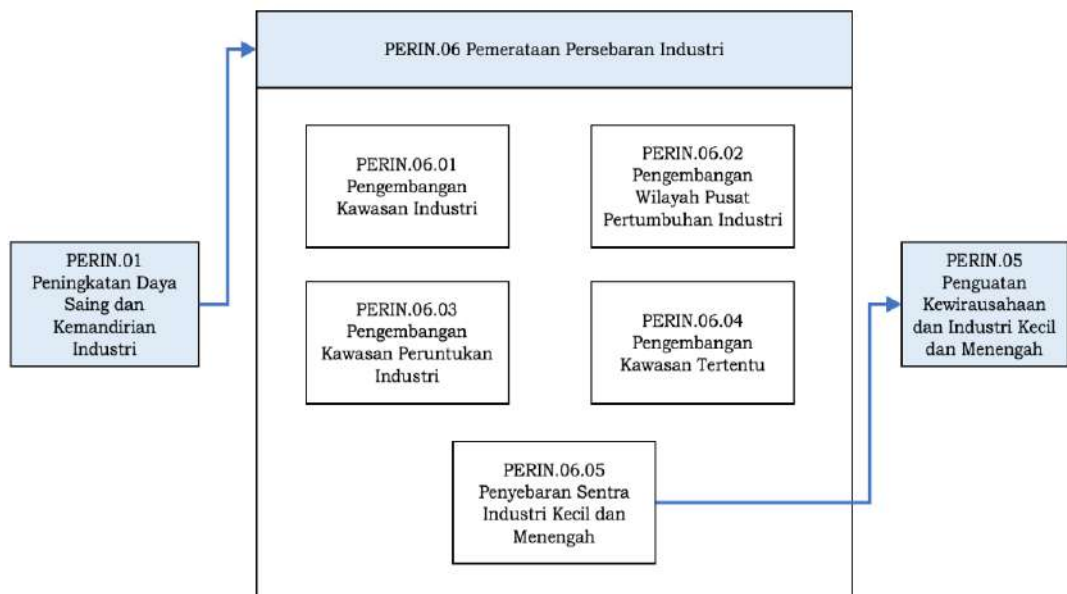
4. PERIN.04 Perluasan Penguasaan Pasar Industri terdiri atas sub-proses:
- a. PERIN.04.01 Promosi Industri Internasional;
 - b. PERIN.04.02 Kerja Sama Internasional; dan
 - c. PERIN.04.03 Hilirisasi Industri,
- sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



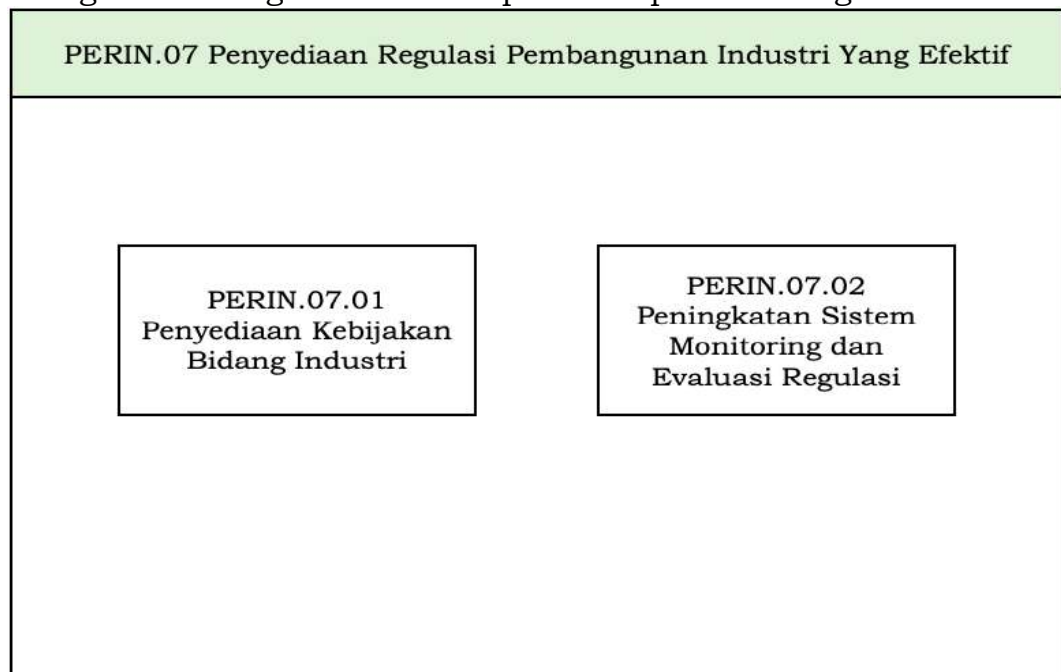
5. PERIN.05 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah terdiri atas sub-proses:
- PERIN.05.01 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah; dan
 - PERIN.05.02 Pemberian Fasilitas Industri Kecil dan Menengah, sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



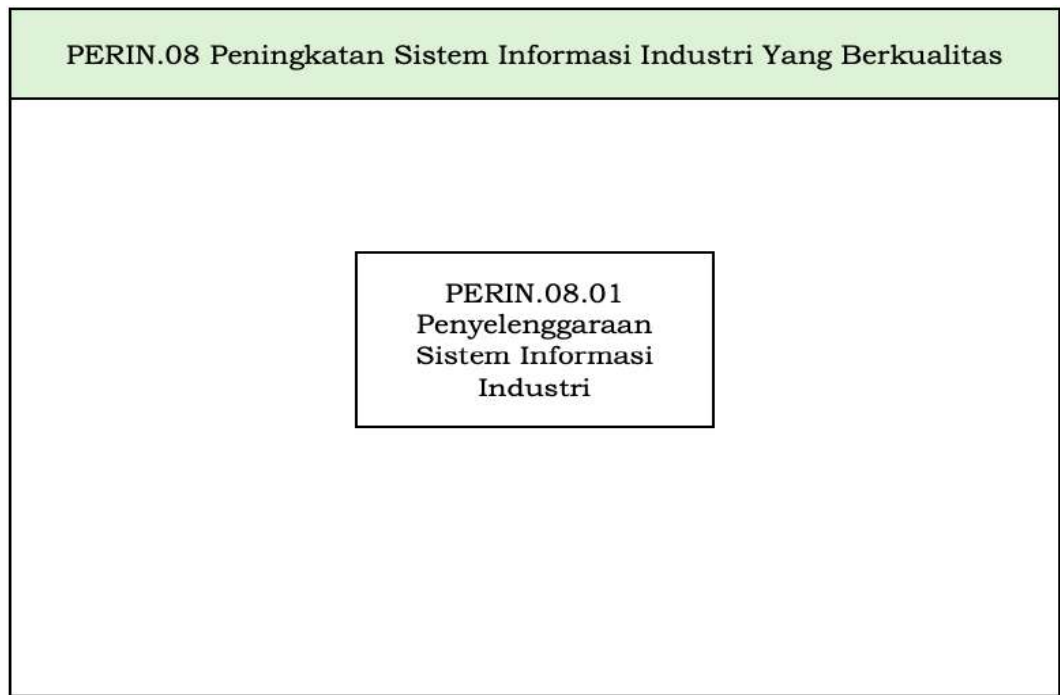
6. PERIN.06 Pemerataan Persebaran Industri terdiri atas sub-proses:
- PERIN.06.01 Pengembangan Kawasan Industri;
 - PERIN.06.02 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
 - PERIN.06.03 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - PERIN.06.04 Pengembangan Kawasan Tertentu; dan
 - PERIN.06.05 Penyebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah, sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



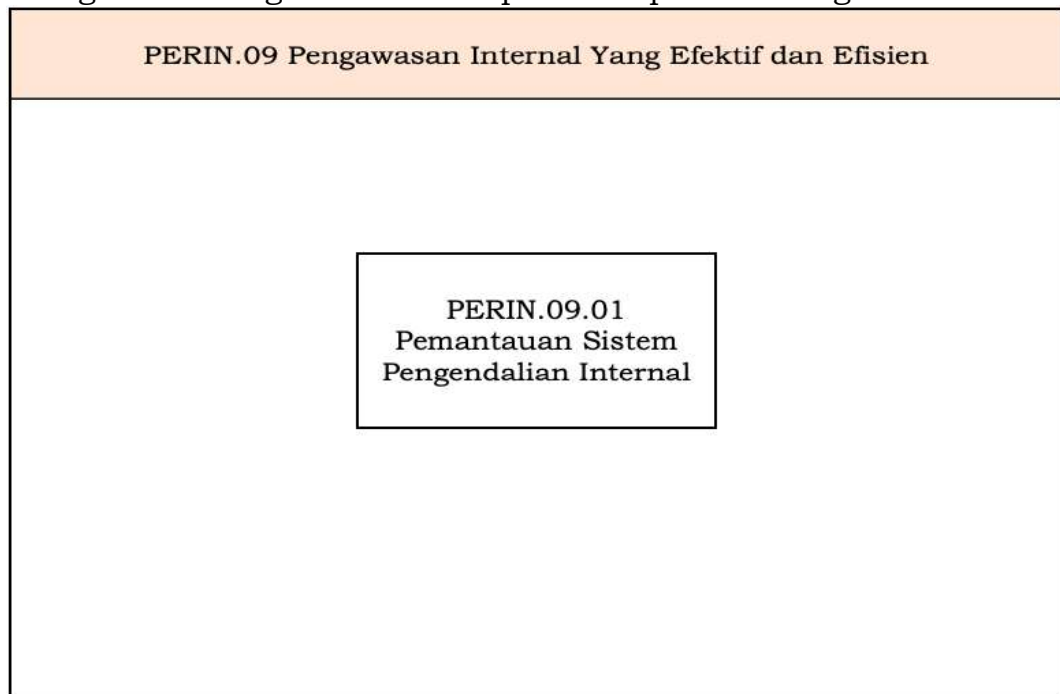
7. PERIN.07 Penyediaan Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif terdiri atas sub-proses:
- a. PERIN.07.01 Penyediaan Kebijakan Bidang Industri; dan
 - b. PERIN.07.02 Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Regulasi,
- sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



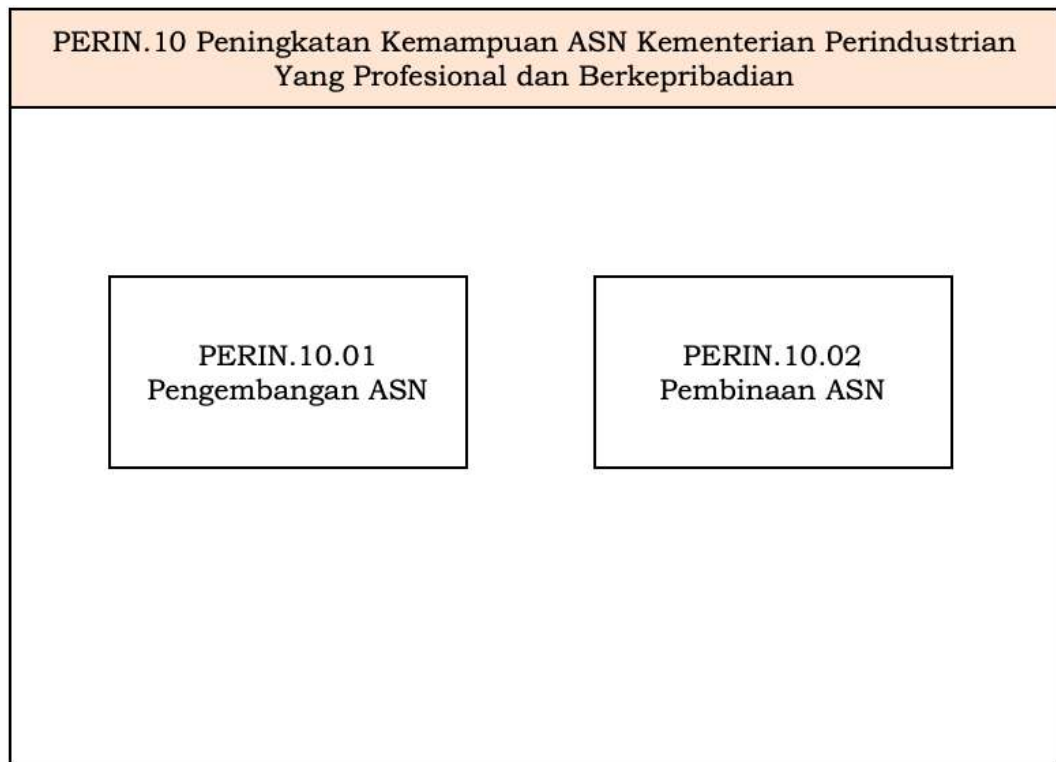
8. PERIN.08 Peningkatan Sistem Informasi Industri Yang Berkualitas terdiri atas sub-proses:
- PERIN.08.01 Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri,
- sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



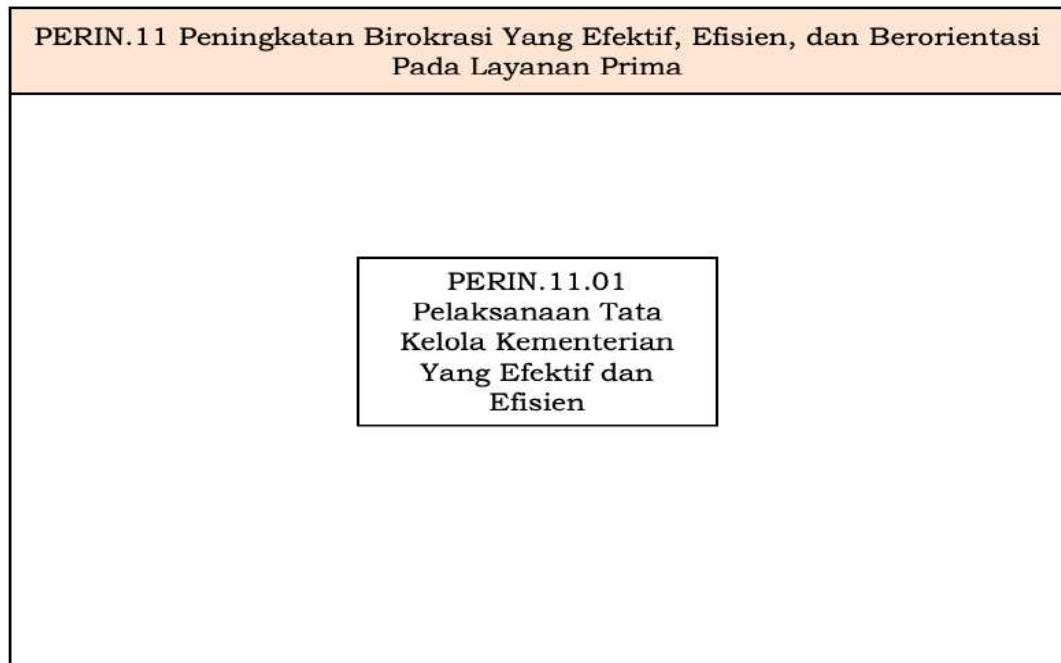
9. PERIN.09 Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien terdiri atas sub-proses:
PERIN.09.01 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal, sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



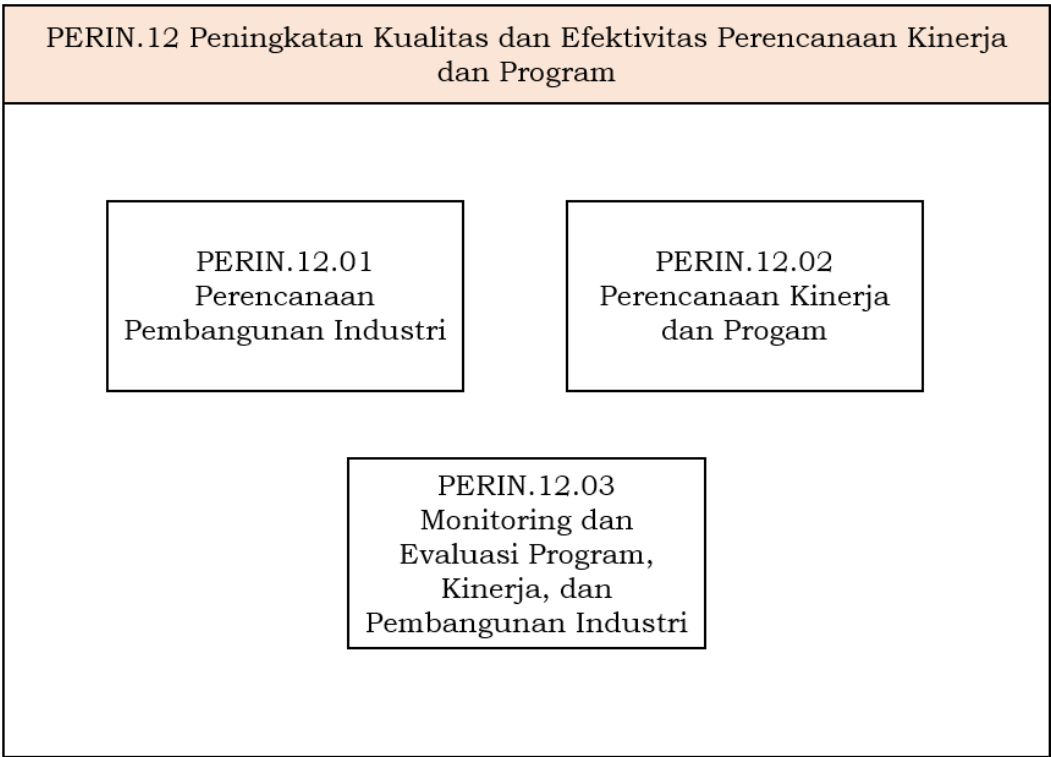
10. PERIN.10 Peningkatan Kemampuan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berkepribadian terdiri atas sub-proses:
a. PERIN.10.01 Pengembangan ASN; dan
b. PERIN.10.02 Pembinaan ASN,
sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



11. PERIN.11 Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima terdiri atas sub-proses:
PERIN.11.01 Pelaksanaan Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien, sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



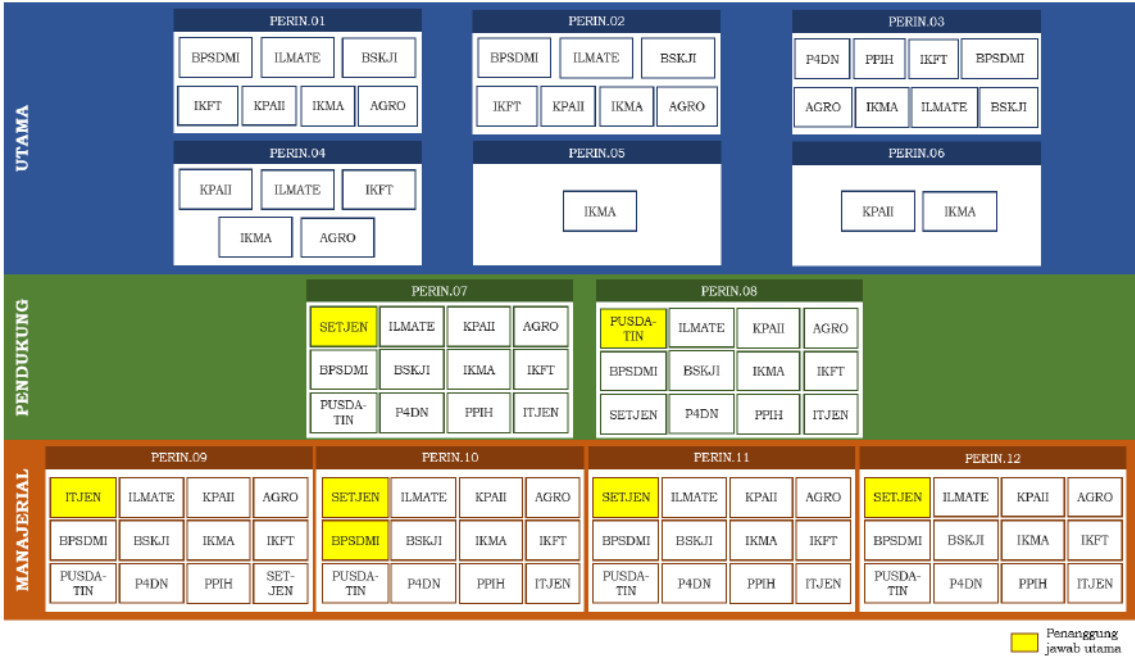
12. PERIN.12 Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Kinerja dan Program terdiri atas sub-proses:
- PERIN.12.01 Perencanaan Pembangunan Industri;
 - PERIN.12.02 Perencanaan Kinerja dan Program;
 - PERIN.12.03 Monitoring dan Evaluasi Program, Kinerja, dan Pembangunan Industri,
- sebagaimana tergambar dalam peta sub-proses sebagai berikut:



C. Peta Relasi

Peta relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses.

Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terlibat dalam setiap proses sebagaimana tergambar dalam peta relasi sebagai berikut:



- Keterangan:
1. AGRO adalah Direktorat Jenderal Industri Agro;
 2. IKFT adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 3. ILMATE adalah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 4. IKMA adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 5. KPAII adalah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
 6. SETJEN adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;

7. ITJEN adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
8. BSKJI adalah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
9. BPSDMI adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri ;
10. PUSDATIN adalah Pusat Data dan Informasi;
11. P4DN adalah Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
12. PPIH adalah Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

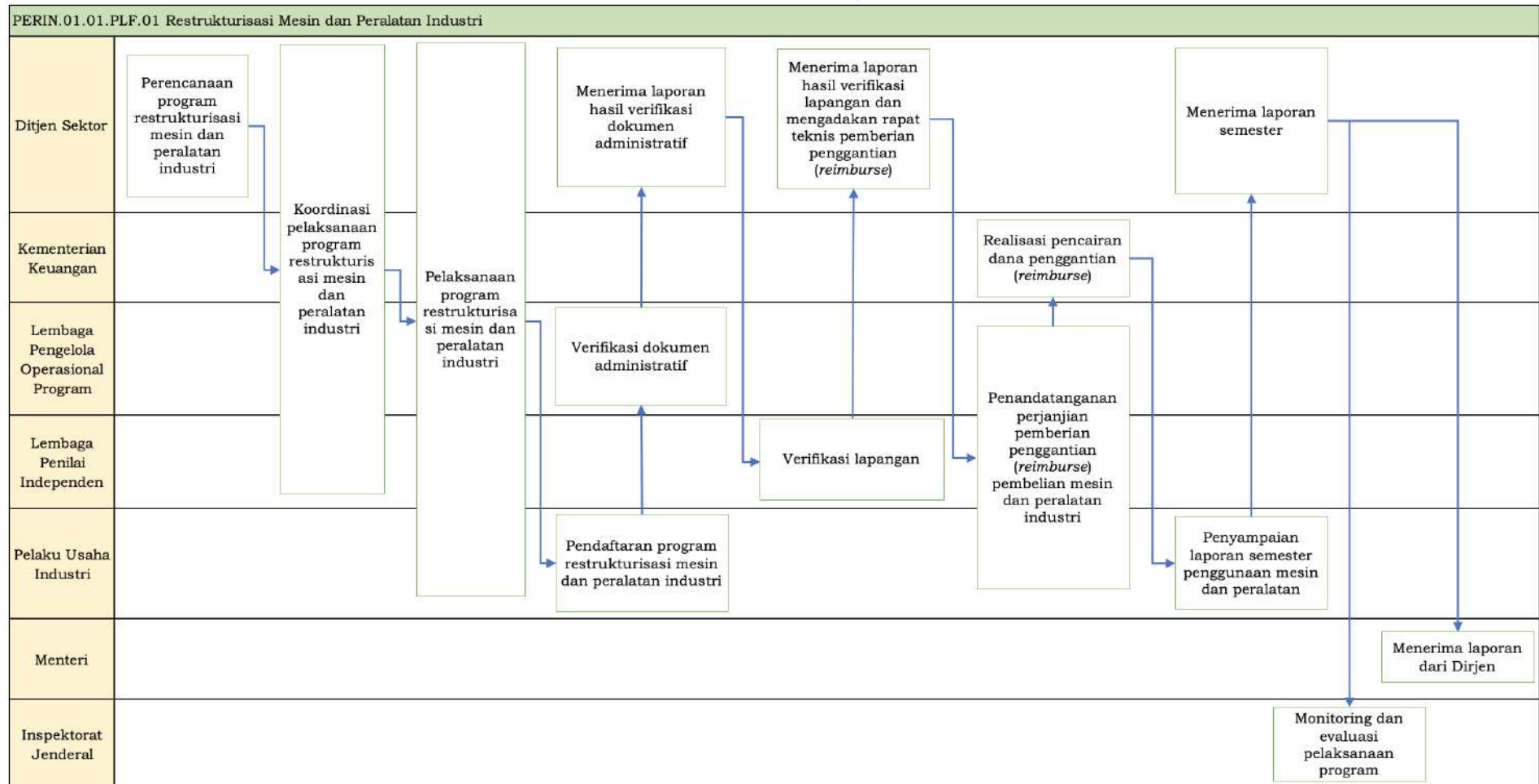
D. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja klerikal. Peta lintas fungsi didasarkan pada peta sub-proses dan peta relasi. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) peta lintas fungsi dari 12 (dua belas) peta sub-proses dengan keterangan singkatan sebagai berikut:

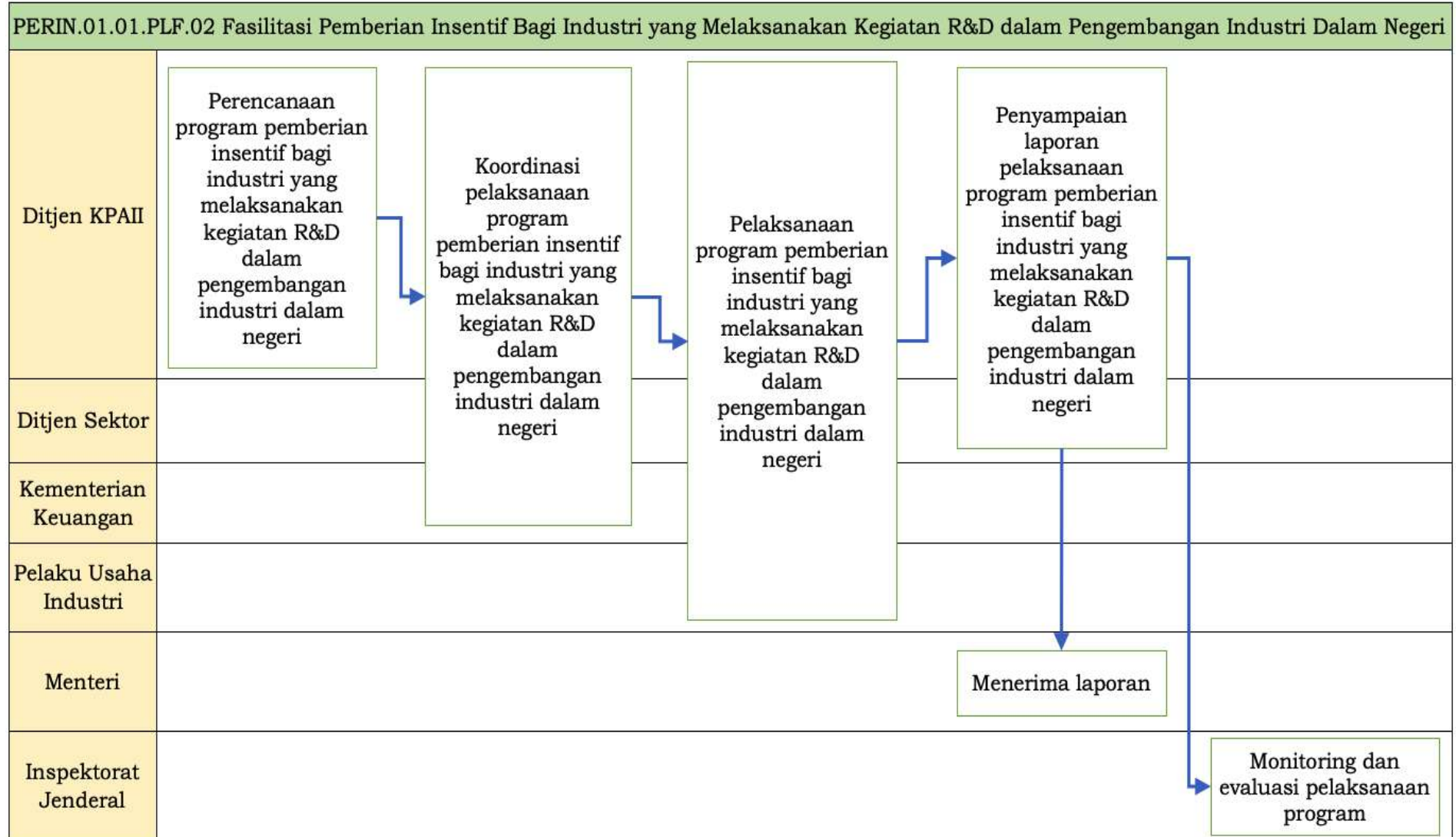
1. Menteri adalah Menteri Perindustrian;
2. Ditjen Sektor adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
3. Ditjen KPPII adalah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
4. Ditjen IKMA adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
5. Pusat P3DN adalah Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Gambar peta lintas fungsi sebagai berikut:

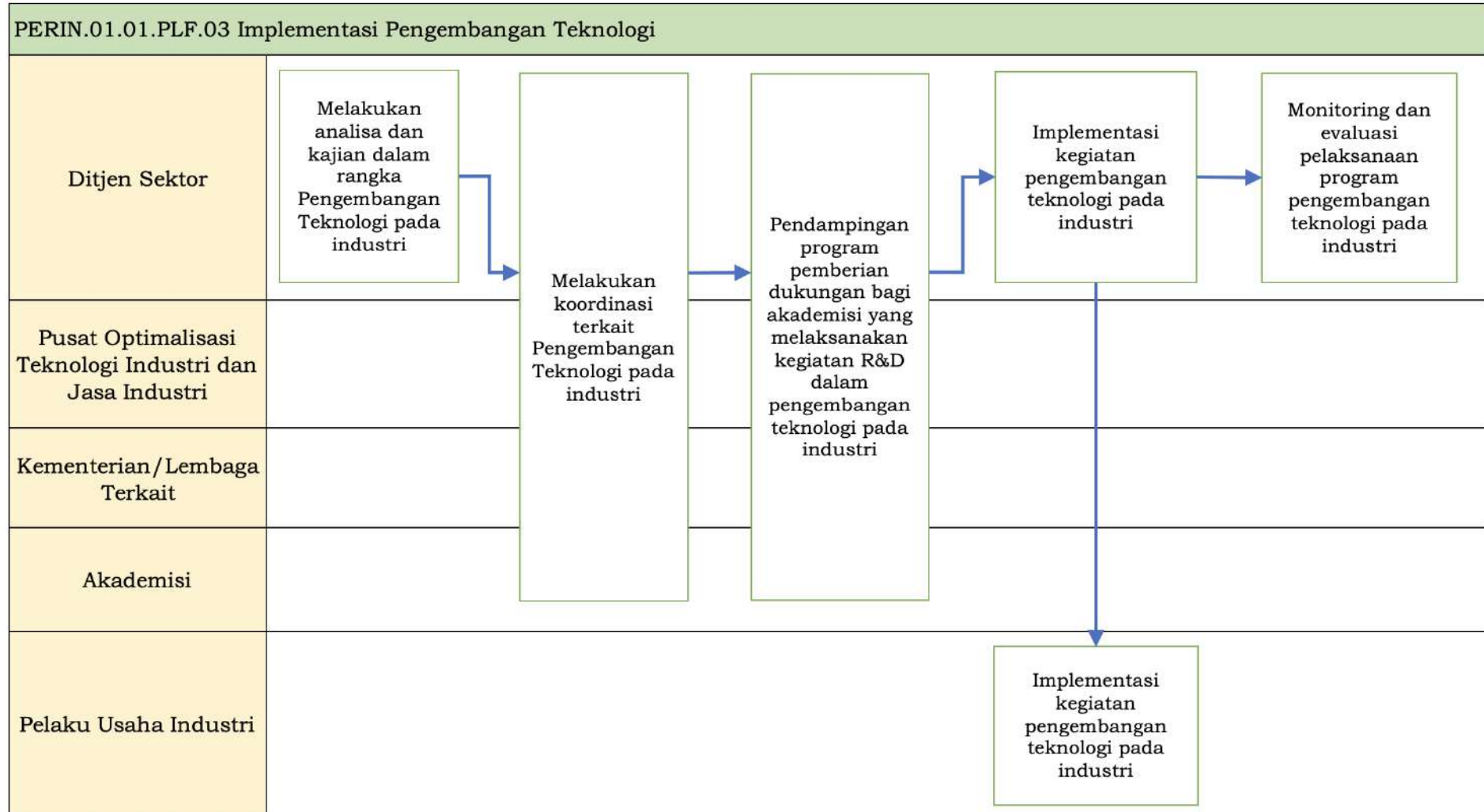
1. Sub-proses PERIN.01.01 Peningkatan Teknologi Proses Produksi terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:
 - a. PERIN.01.01.PLF.01 Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri;



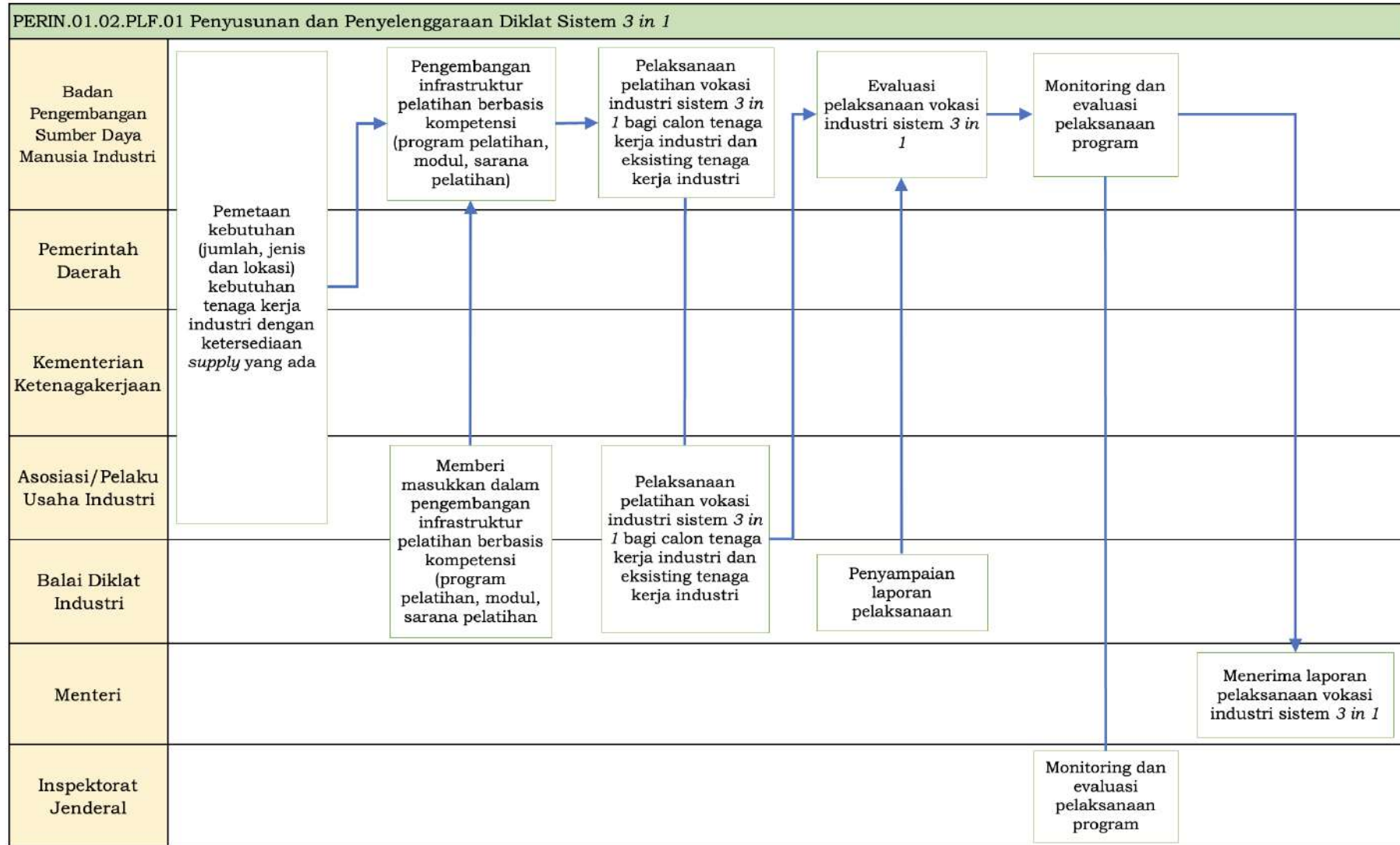
- b. PERIN.01.01.PLF.02 Fasilitasi Pemberian Insentif Bagi Industri yang Melaksanakan Kegiatan *Research and Development* (R&D) dalam Pengembangan Industri Dalam Negeri; dan



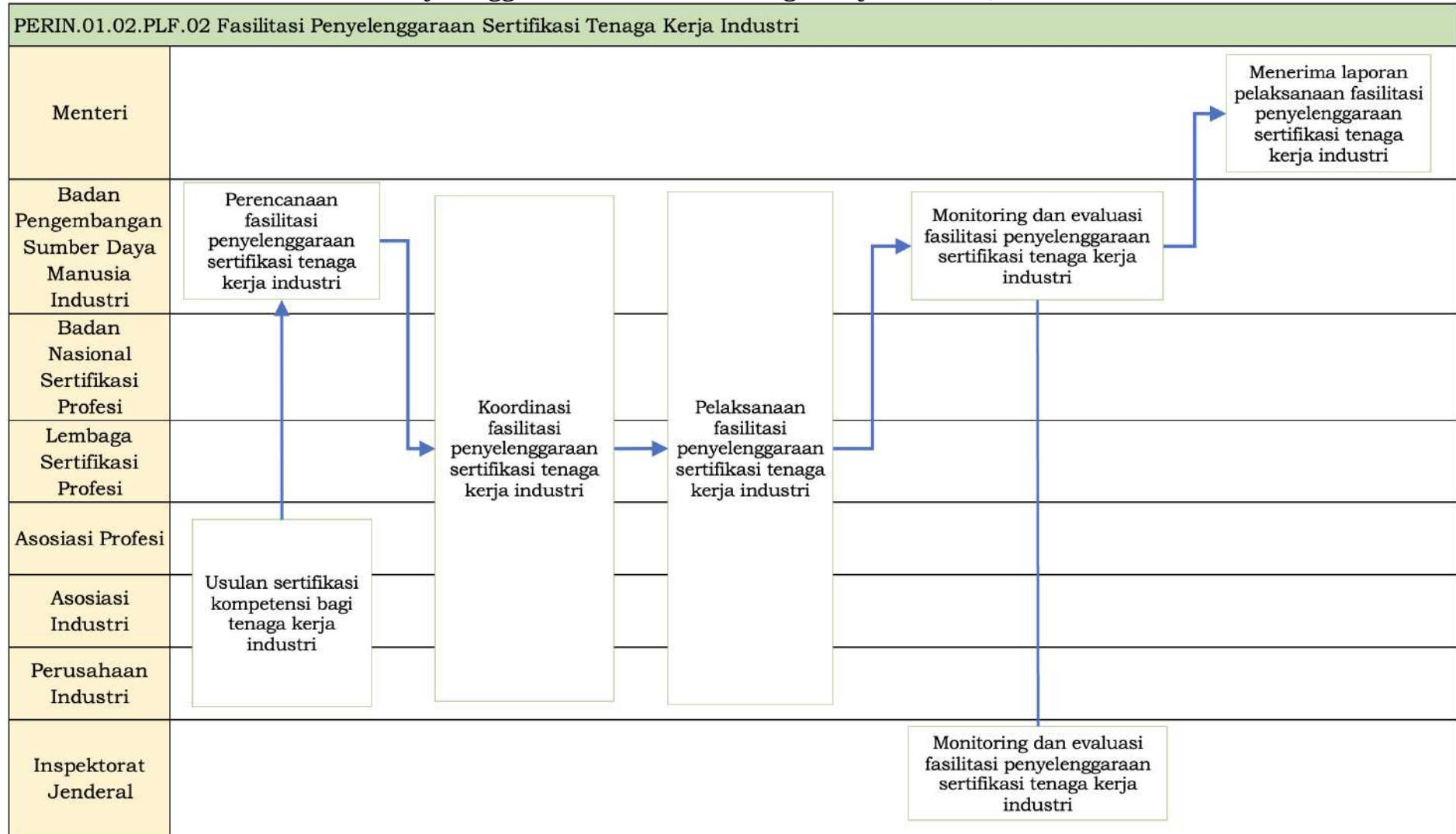
c. PERIN.01.01.PLF.03 Implementasi Pengembangan Teknologi.



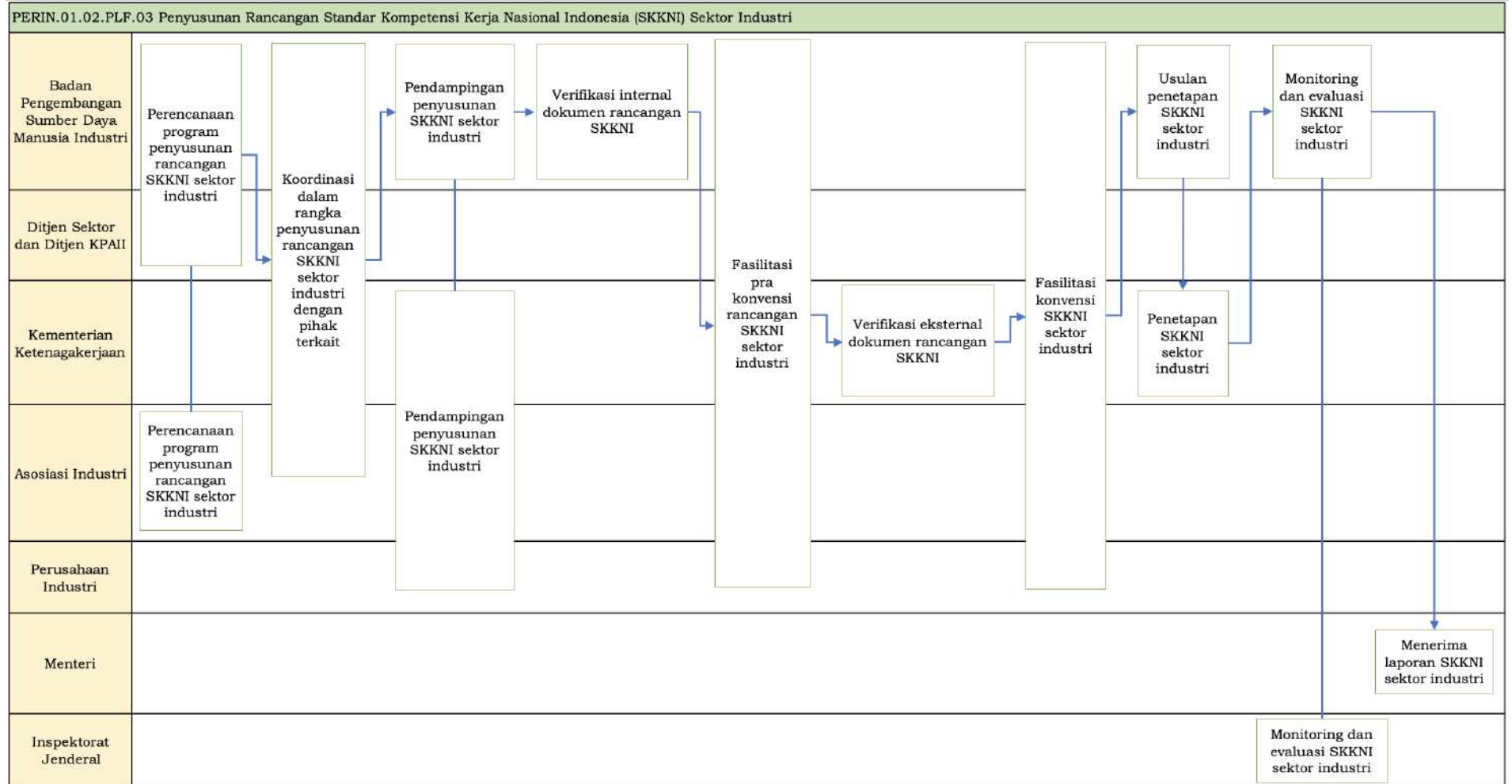
2. Sub-proses PERIN.01.02 Pembangunan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:
 - a. PERIN.01.02.PLF.01 Penyusunan dan Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1;



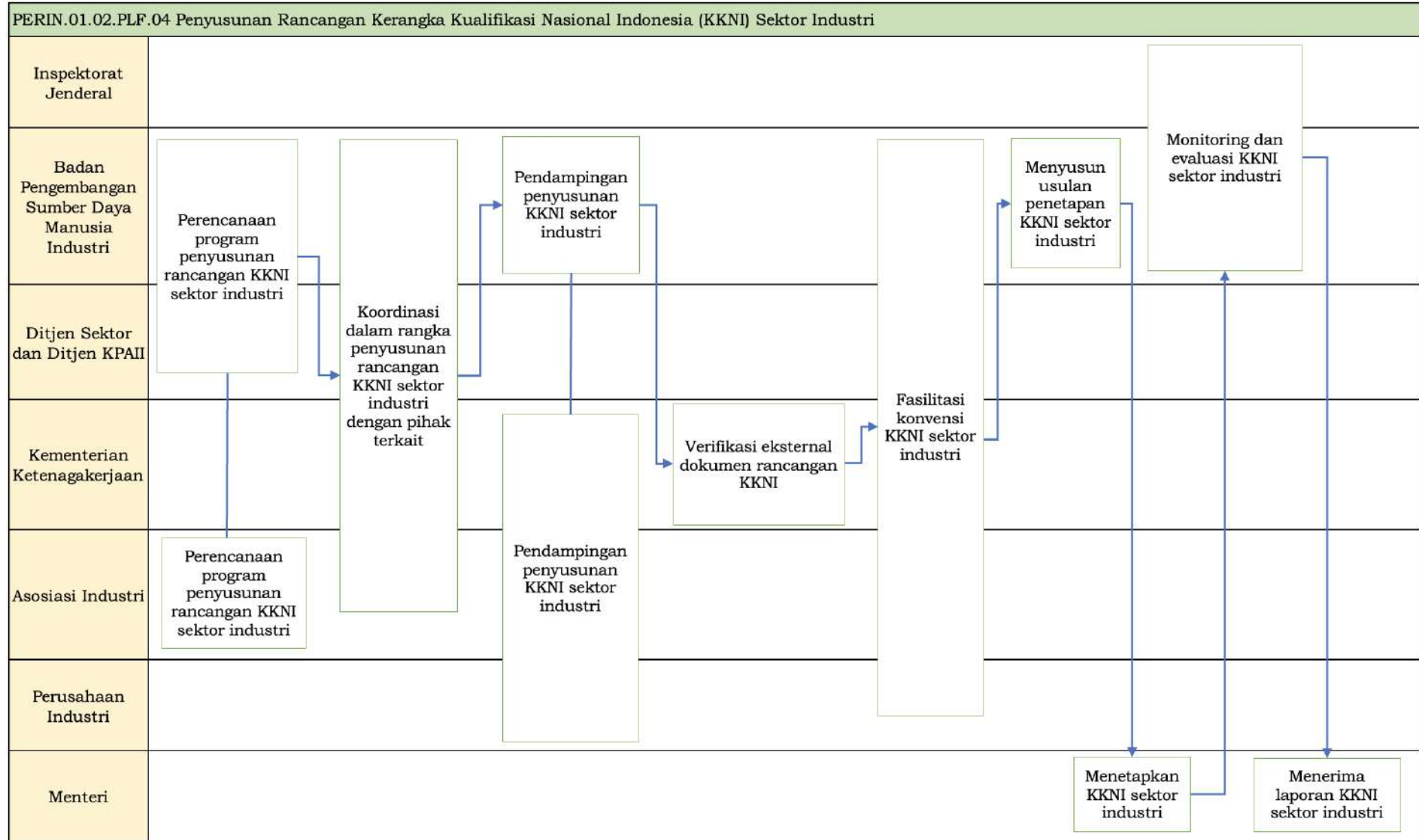
b. PERIN.01.02.PLF.02 Fasilitas Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri;



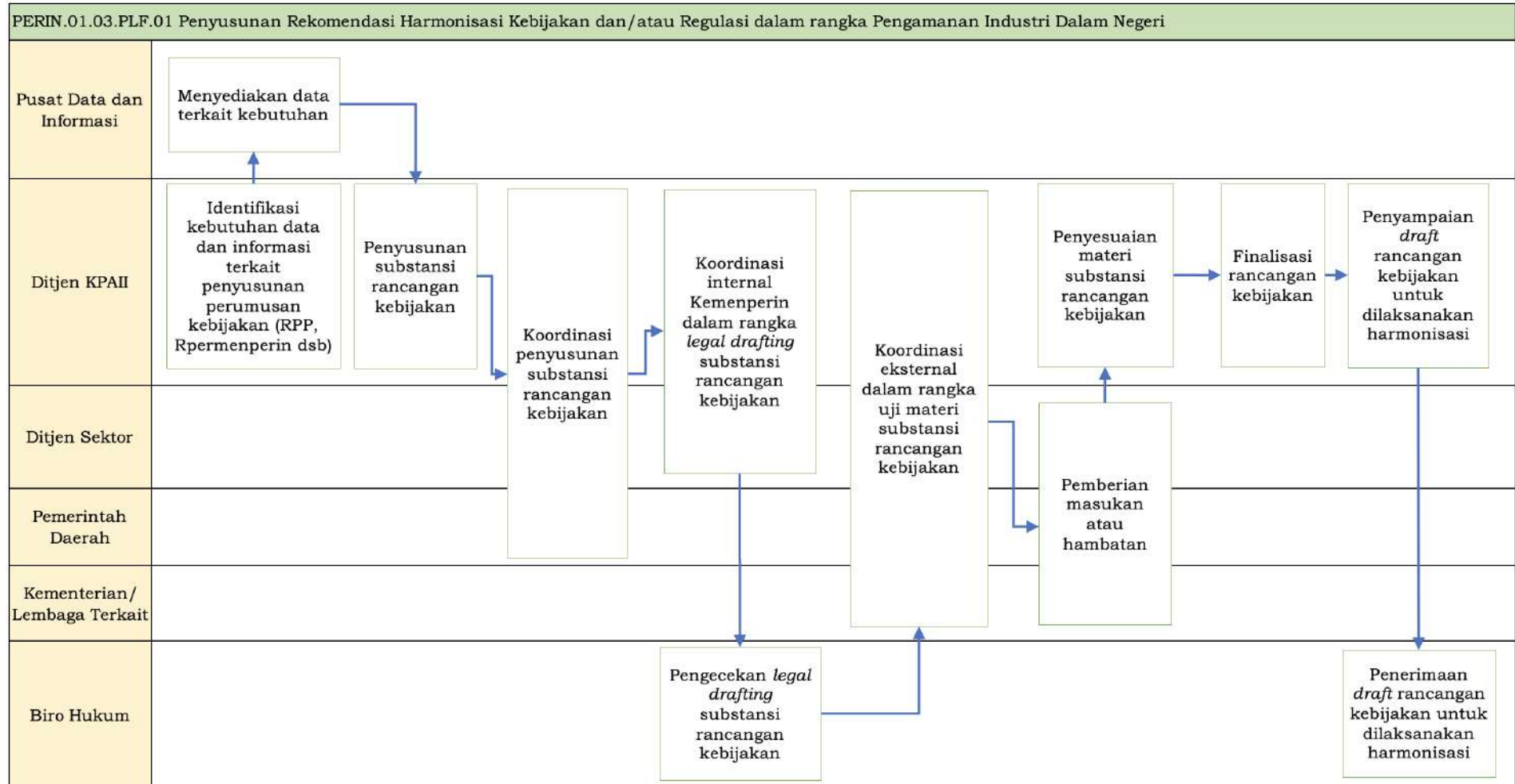
c. PERIN.01.02.PLF.03 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri; dan



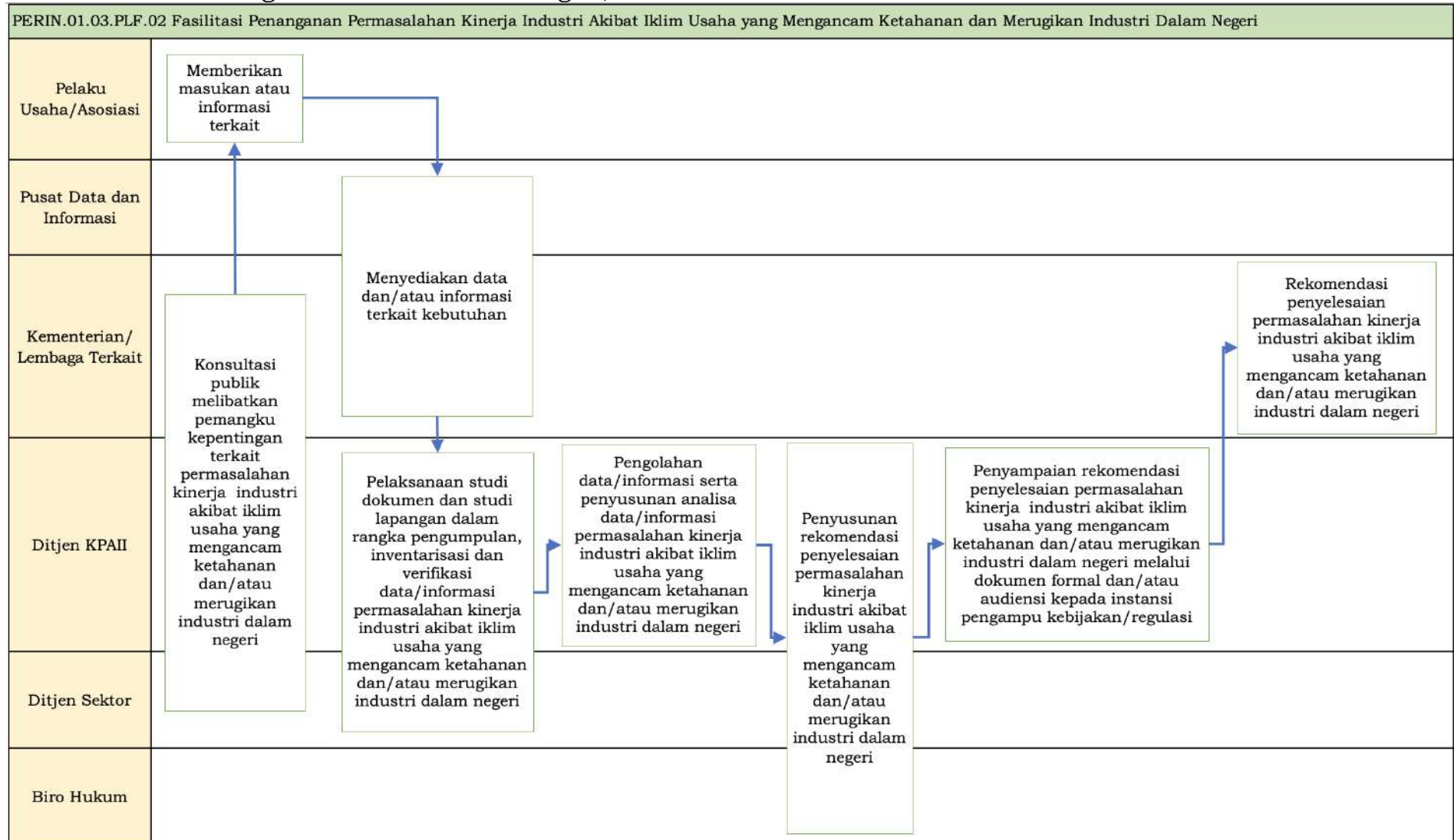
d. PERIN.01.02.PLF.04 Penyusunan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sektor Industri.



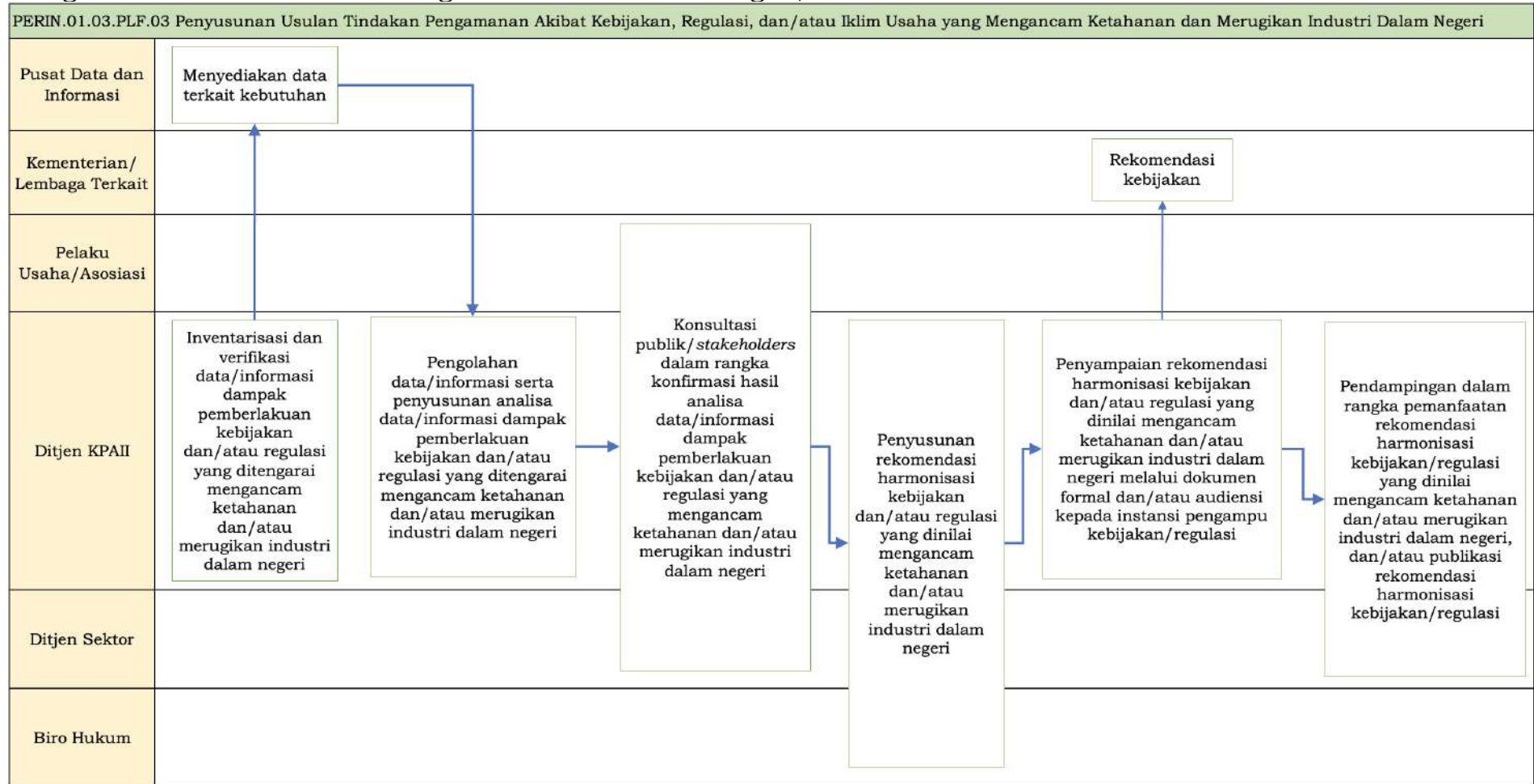
3. Sub-proses PERIN.01.03 Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif dan Kompetitif terdiri atas 12 (dua belas) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.01.03.PLF.01 Penyusunan Rekomendasi Harmonisasi Kebijakan dan/atau Regulasi dalam rangka Pengamanan Industri Dalam Negeri;



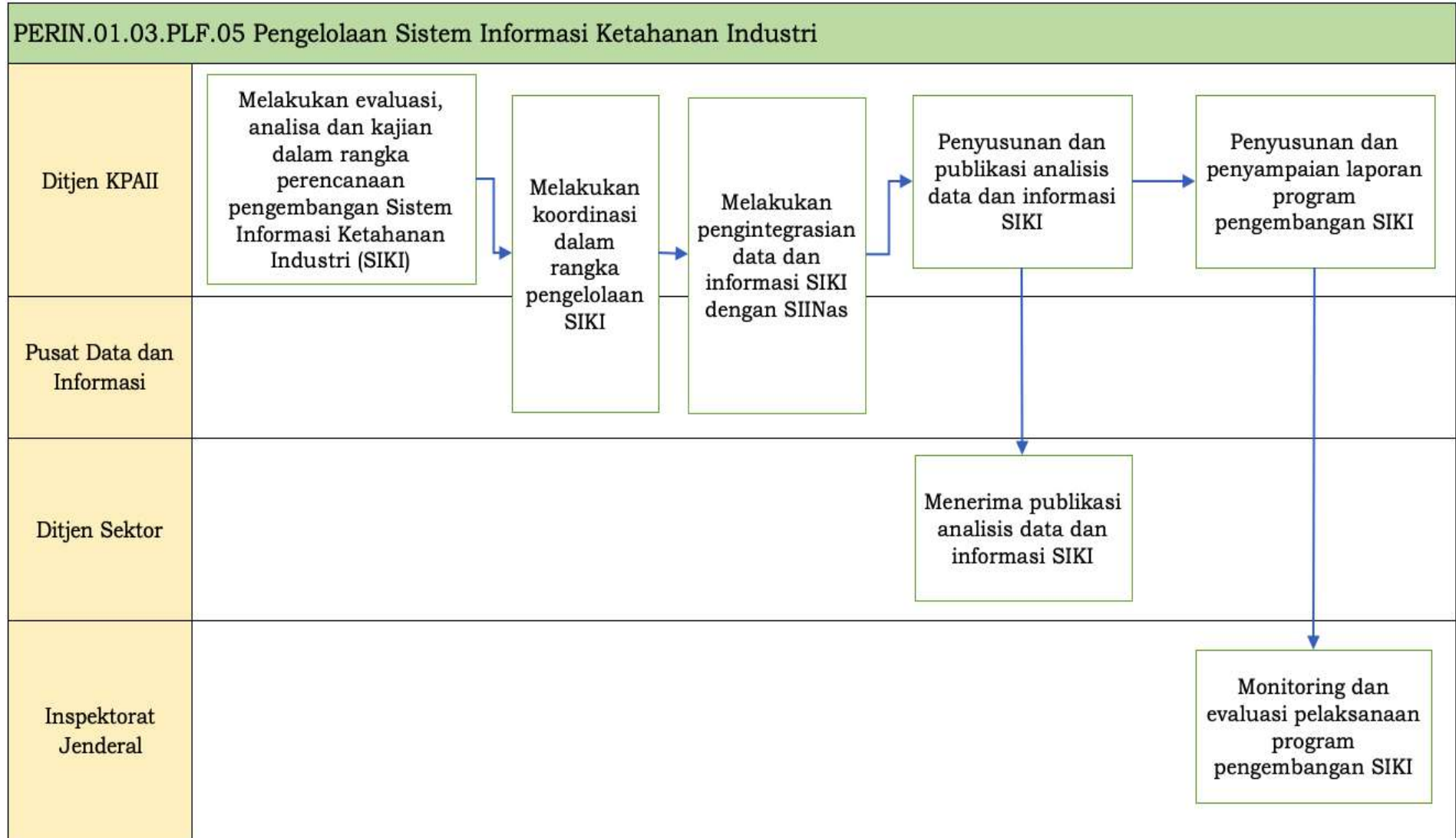
- b. PERIN.01.03.PLF.02 Fasilitas Penanganan Permasalahan Kinerja Industri Akibat Iklim Usaha yang Mengancam Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri;



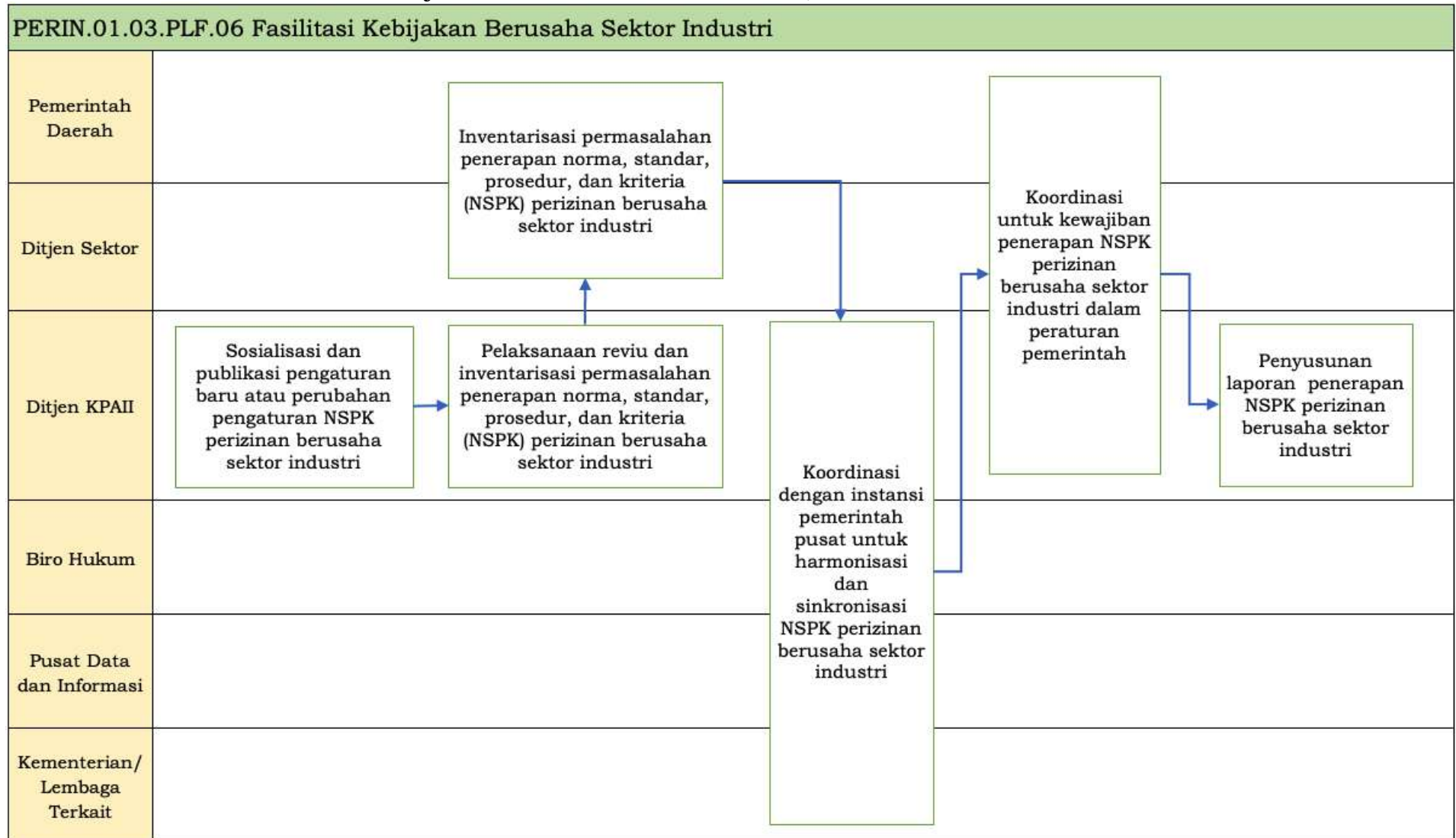
c. PERIN.01.03.PLF.03 Penyusunan Usulan Tindakan Pengamanan Akibat Kebijakan, Regulasi, dan/atau Iklim Usaha yang Mengancam Ketahanan dan Merugikan Industri Dalam Negeri;



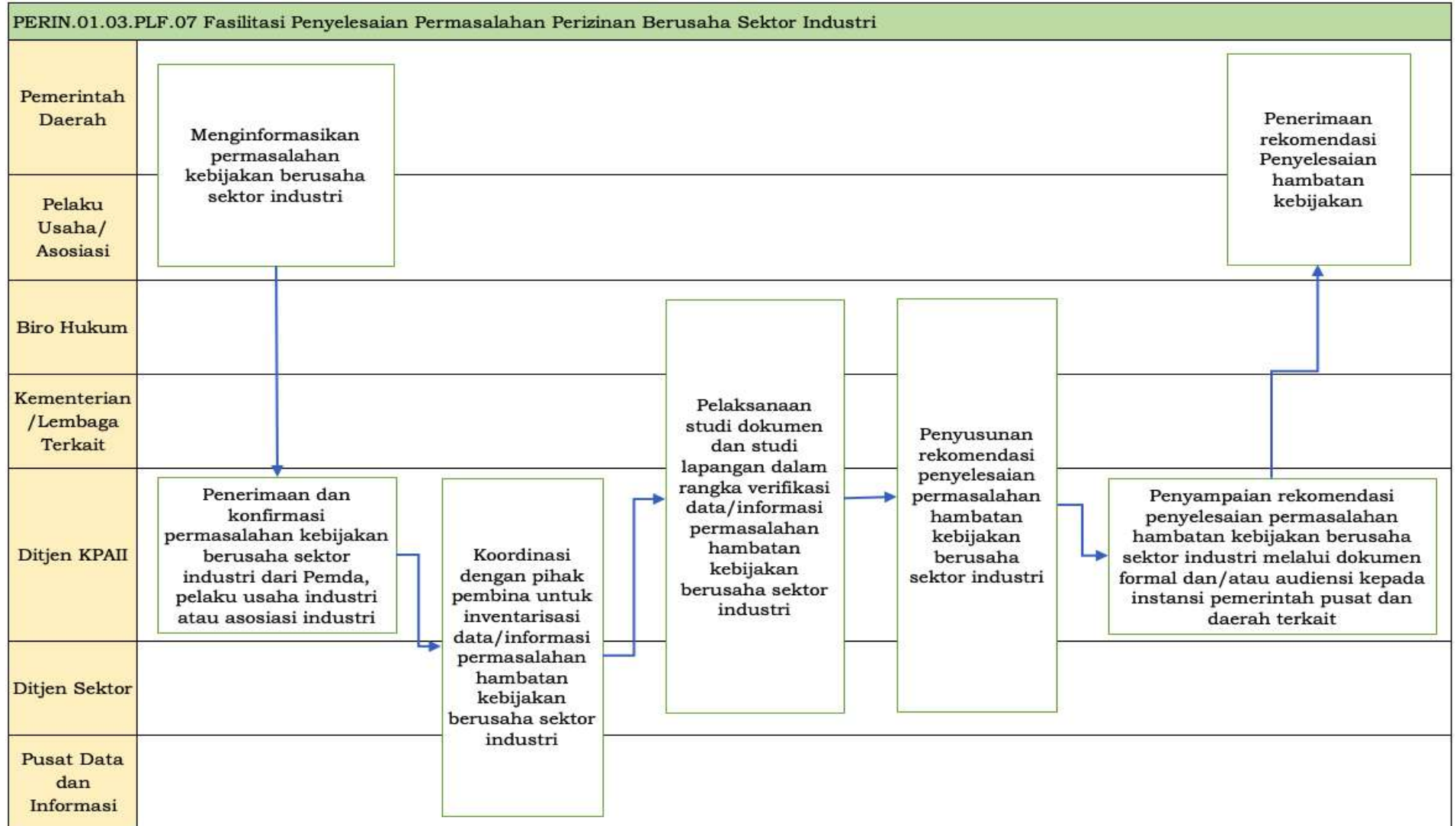
e. PERIN.01.03.PLF.05 Pengelolaan Sistem Informasi Ketahanan Industri;



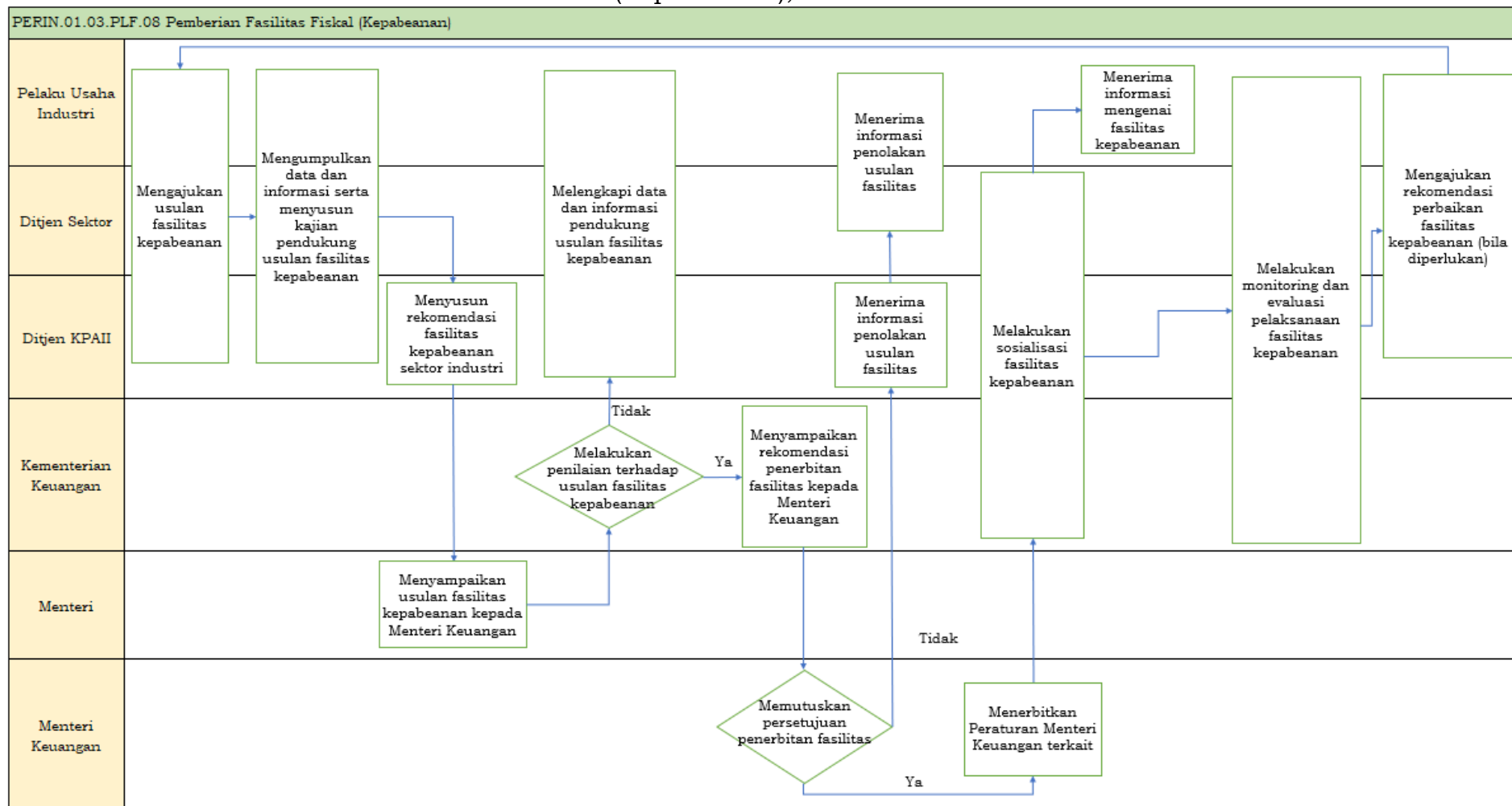
f. PERIN.01.03.PLF.06 Fasilitas Kebijakan Berusaha Sektor Industri;



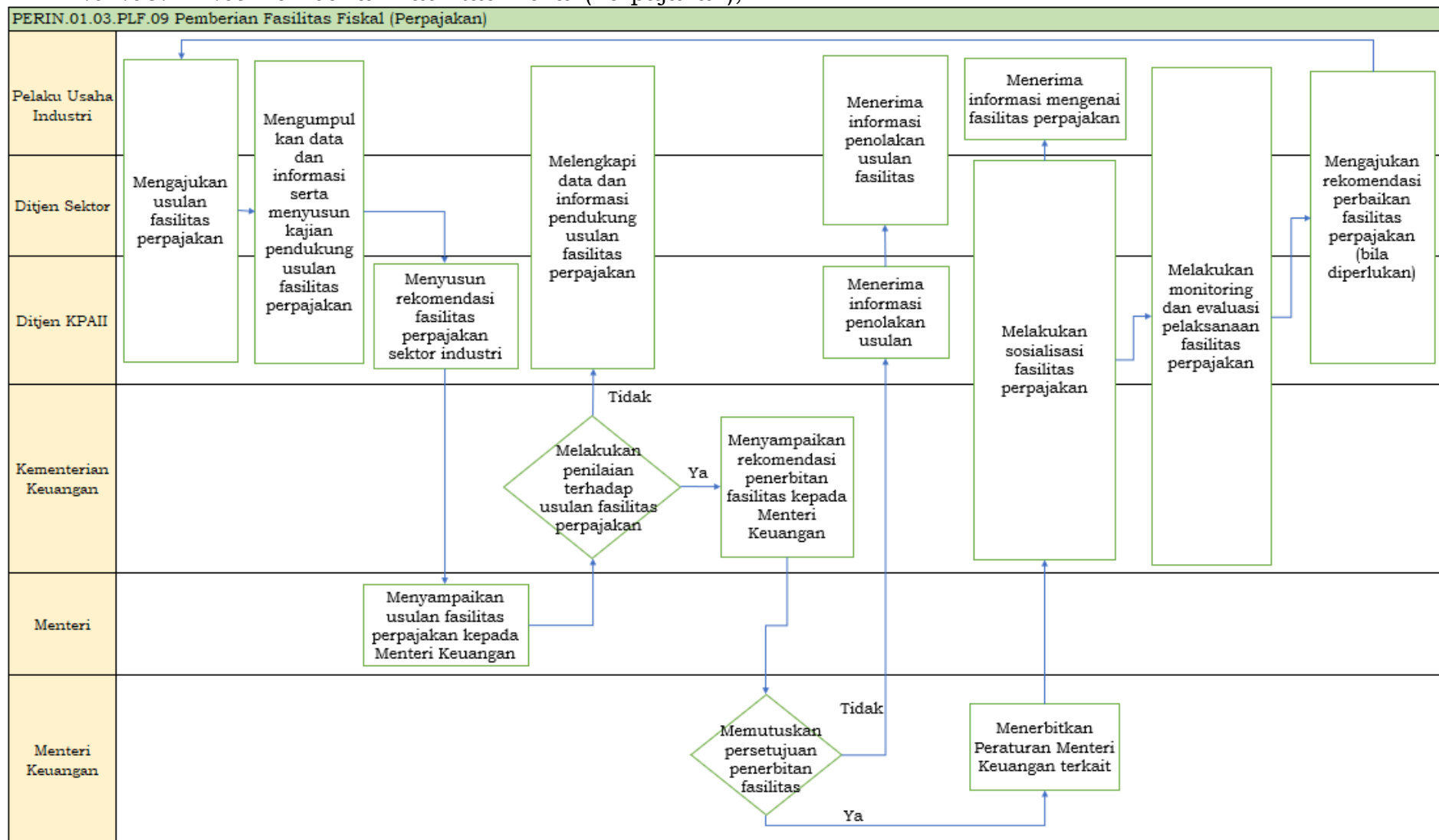
g. PERIN.01.03.PLF.07 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha Sektor Industri;



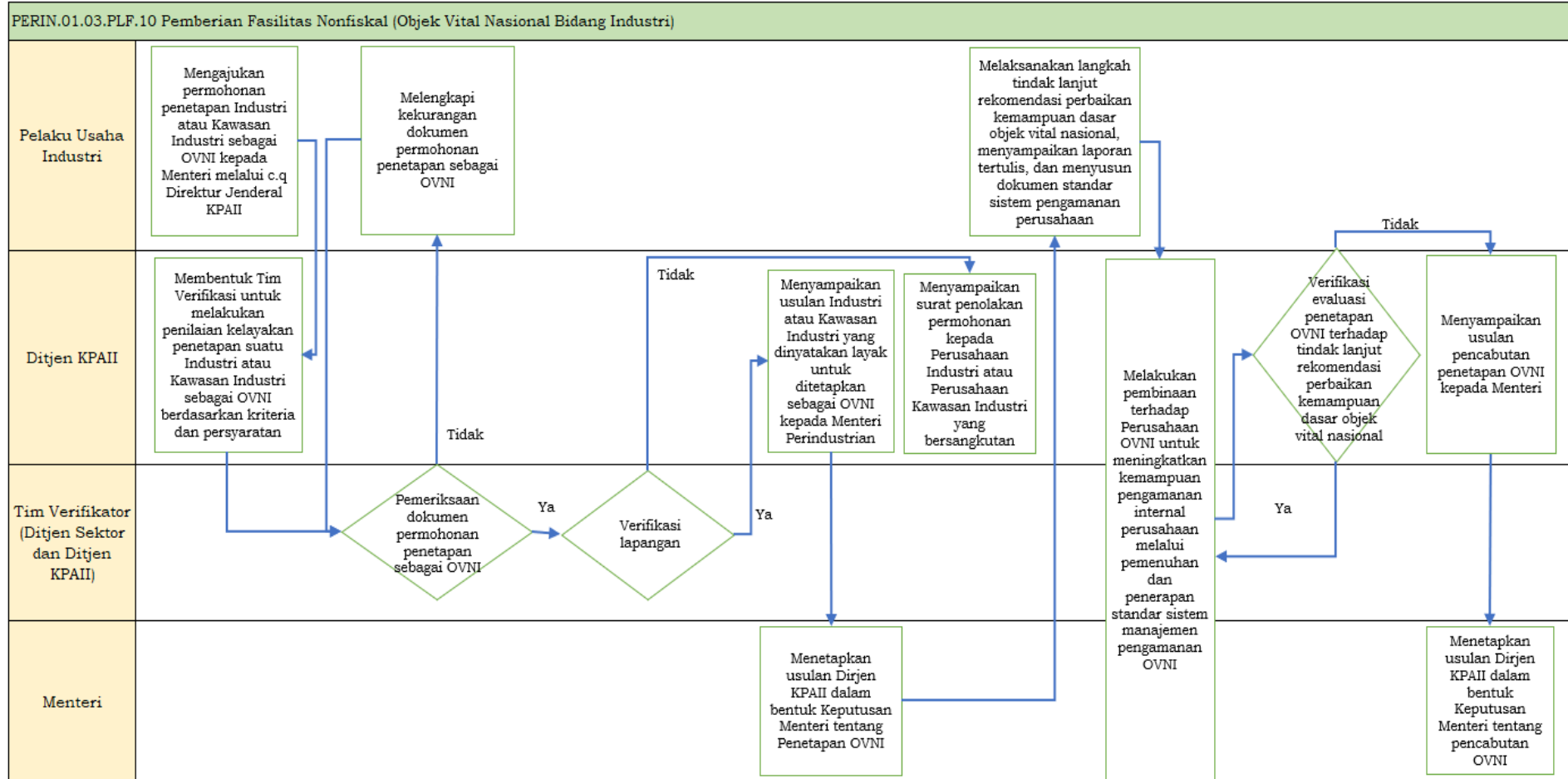
h. PERIN.01.03.PLF.08 Pemberian Fasilitas Fiskal (Kepabeanan);



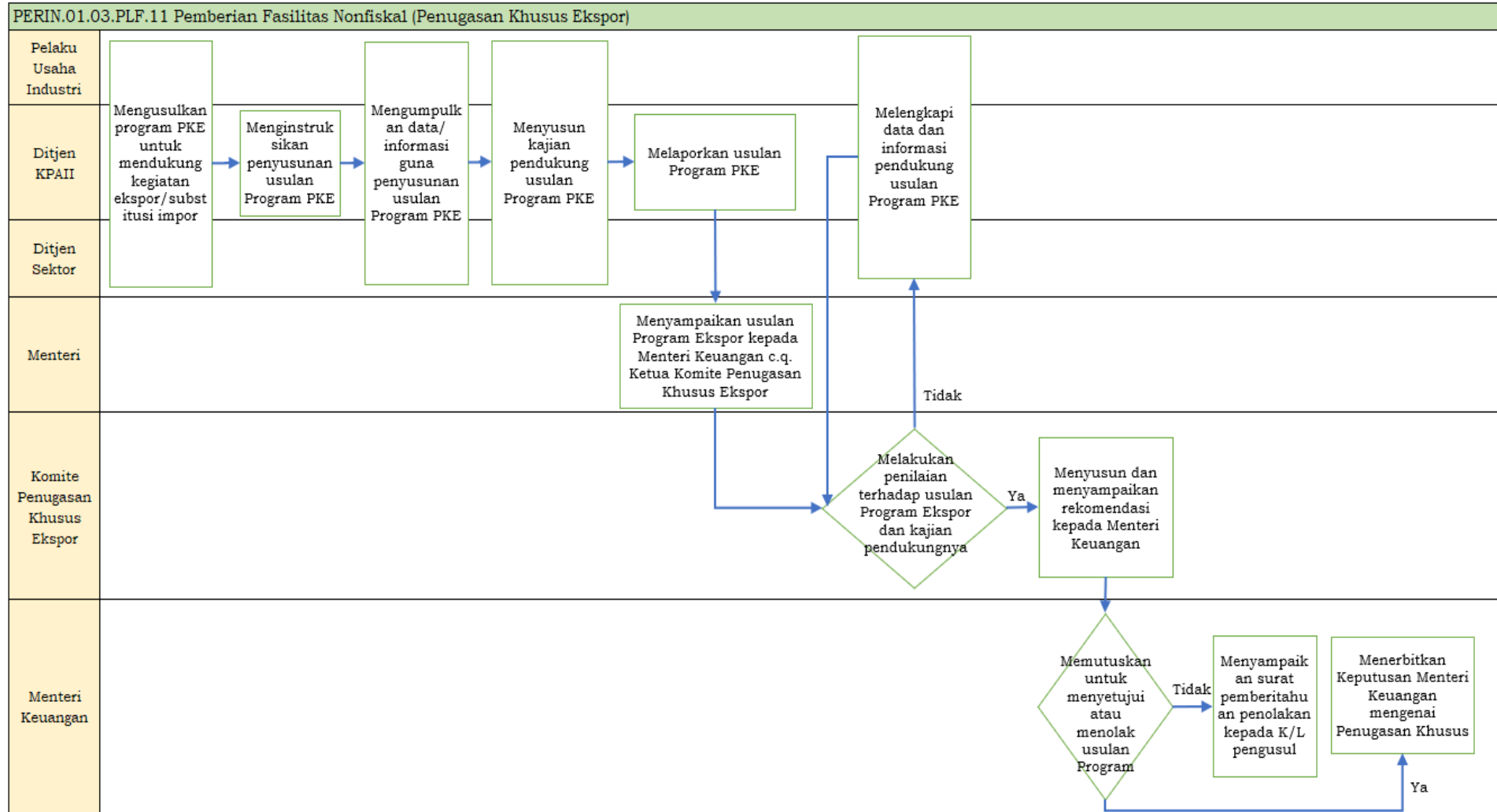
i. PERIN.01.03.PLF.09 Pemberian Fasilitas Fiskal (Perpajakan);



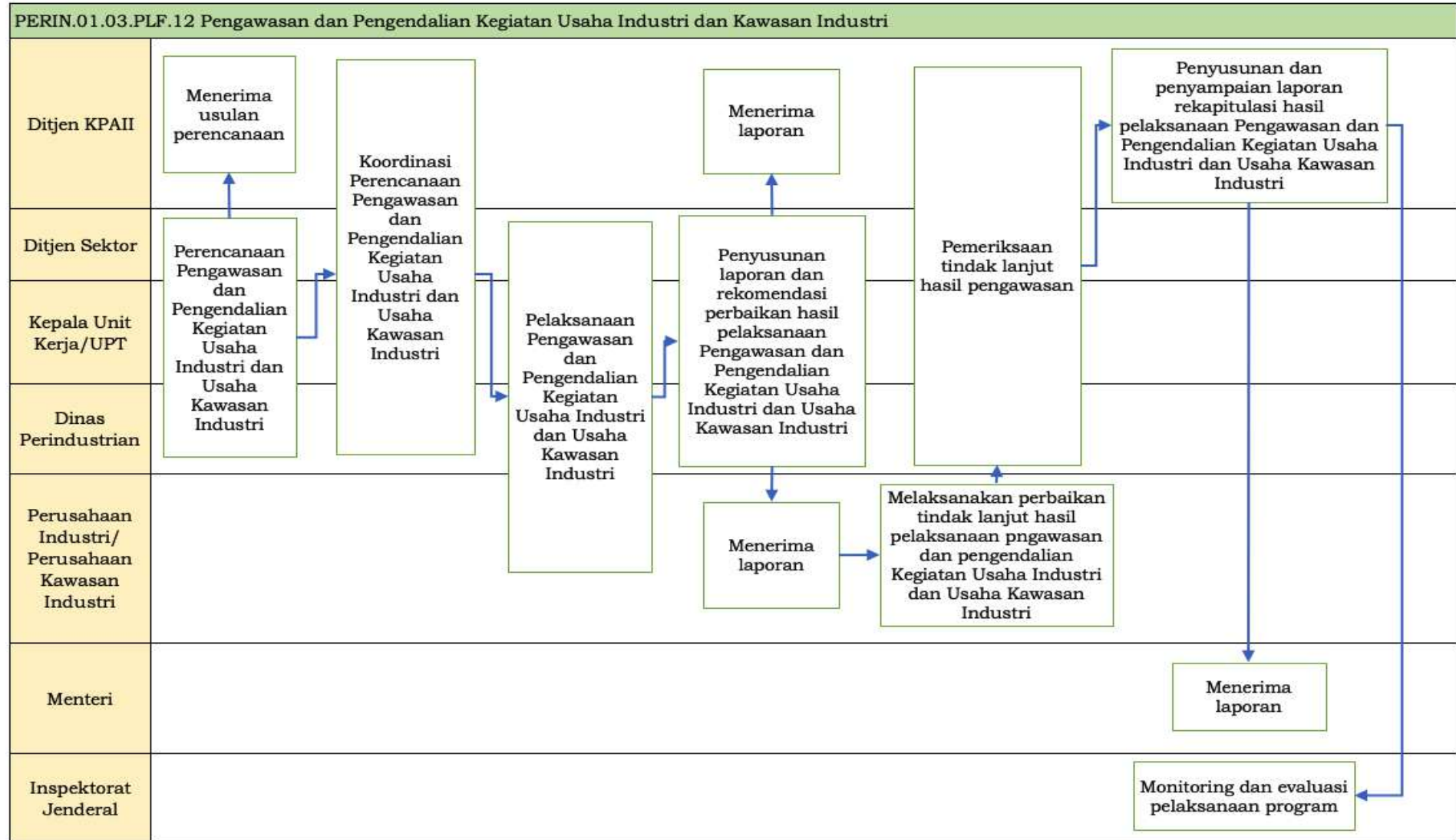
j. PERIN.01.03.PLF.10 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Objek Vital Nasional Bidang Industri);



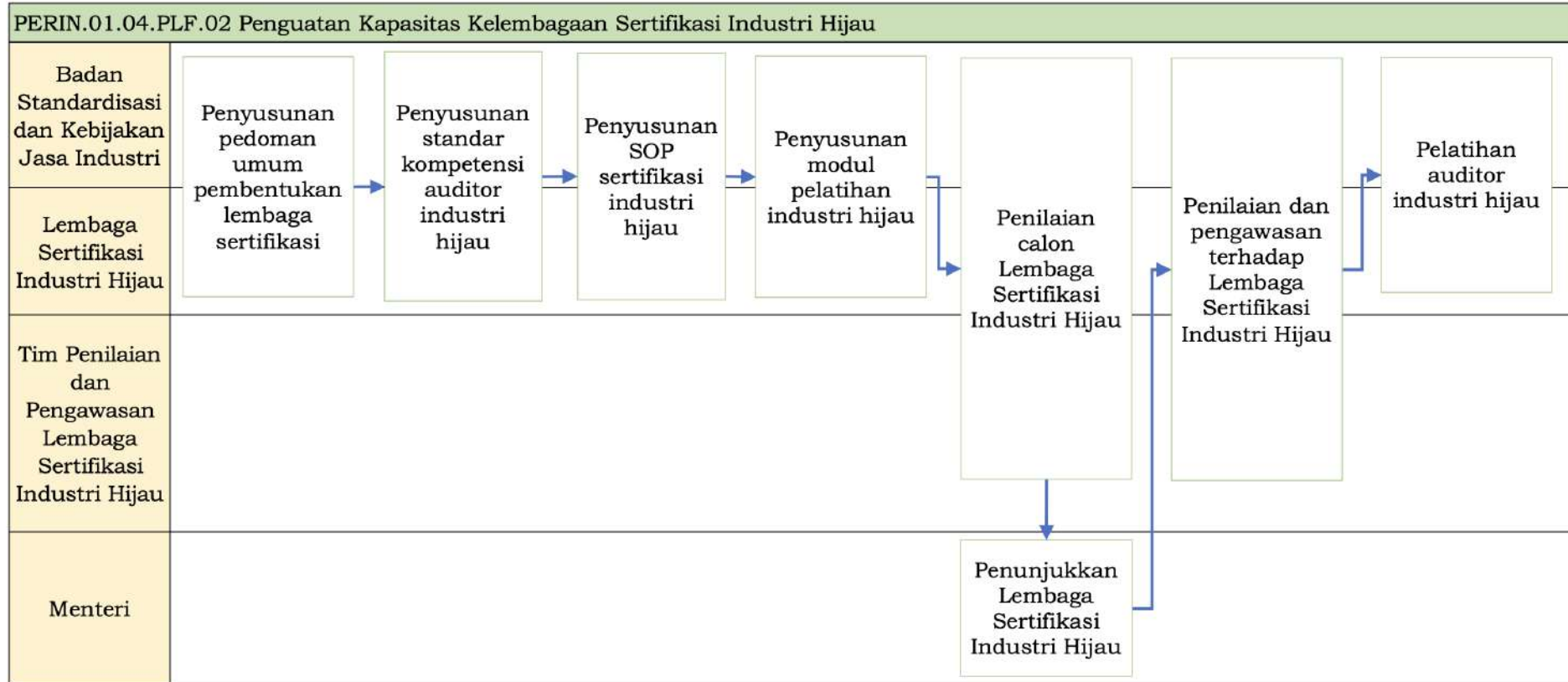
k. PERIN.01.03.PLF.11 Pemberian Fasilitas Nonfiskal (Penugasan Khusus Ekspor); dan



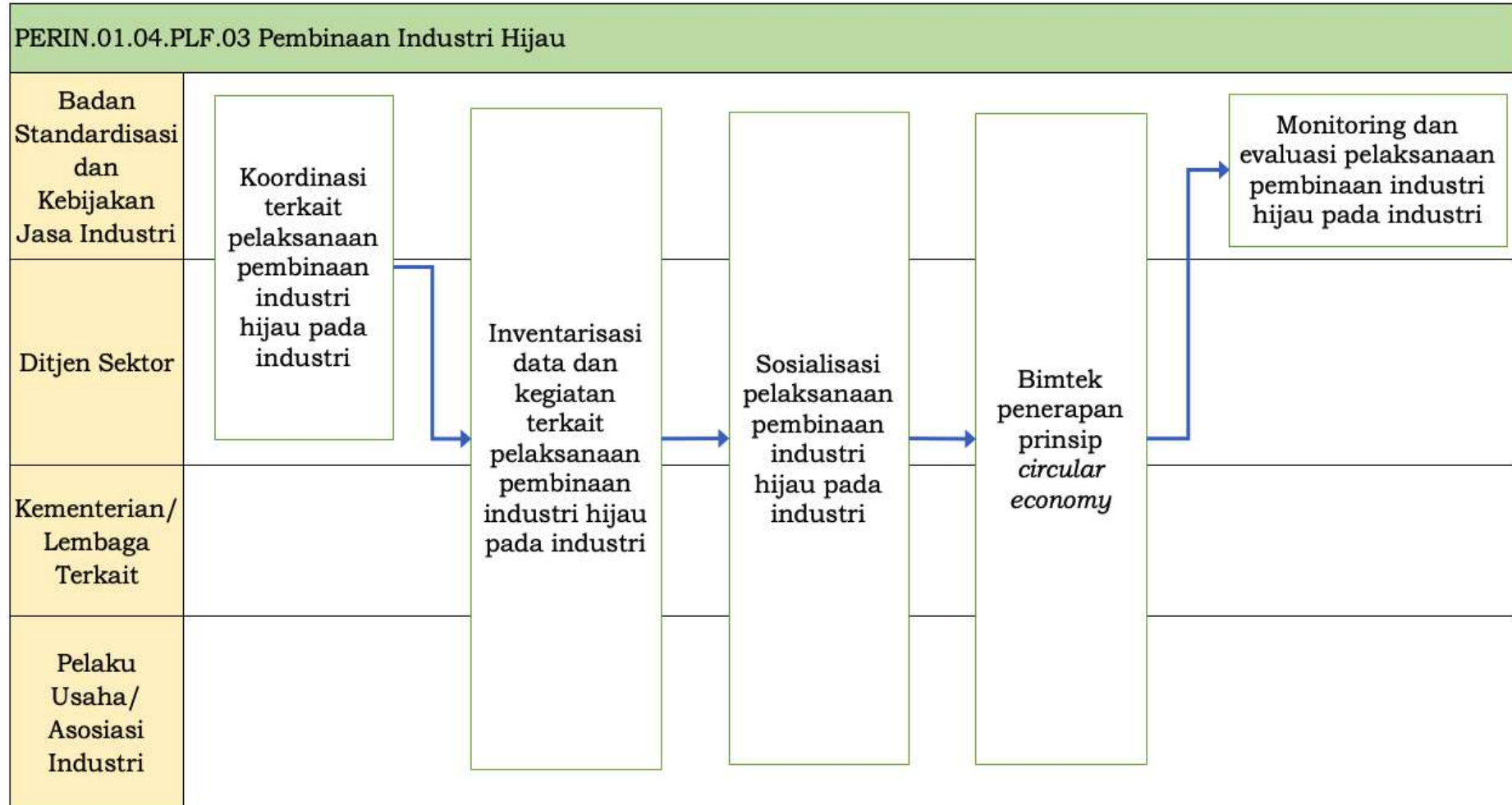
1. PERIN.01.03.PLF.12 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kawasan Industri.



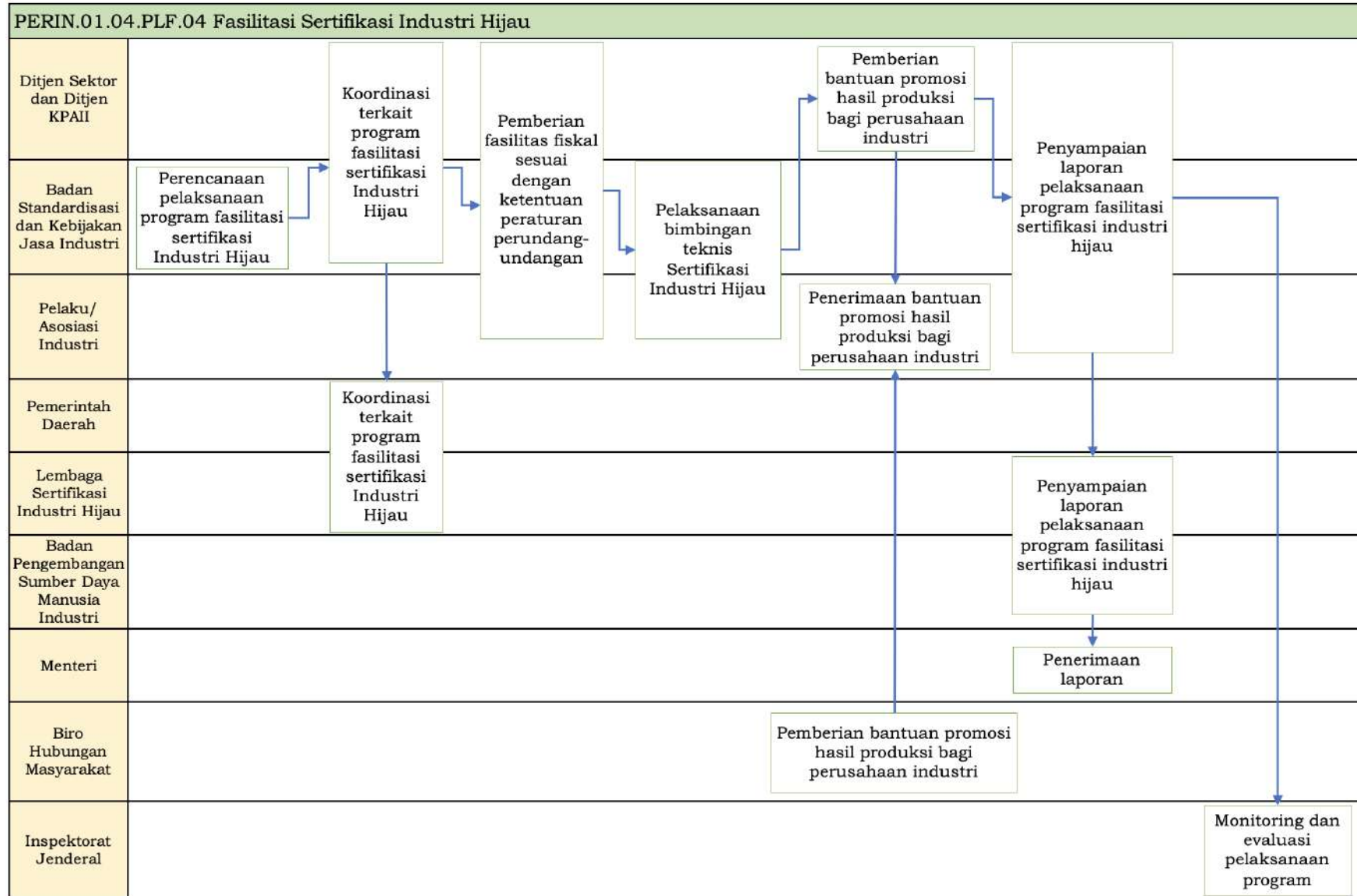
b. PERIN.01.04.PLF.02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sertifikasi Industri Hijau;



c. PERIN.01.04.PLF.03 Pembinaan Industri Hijau; dan

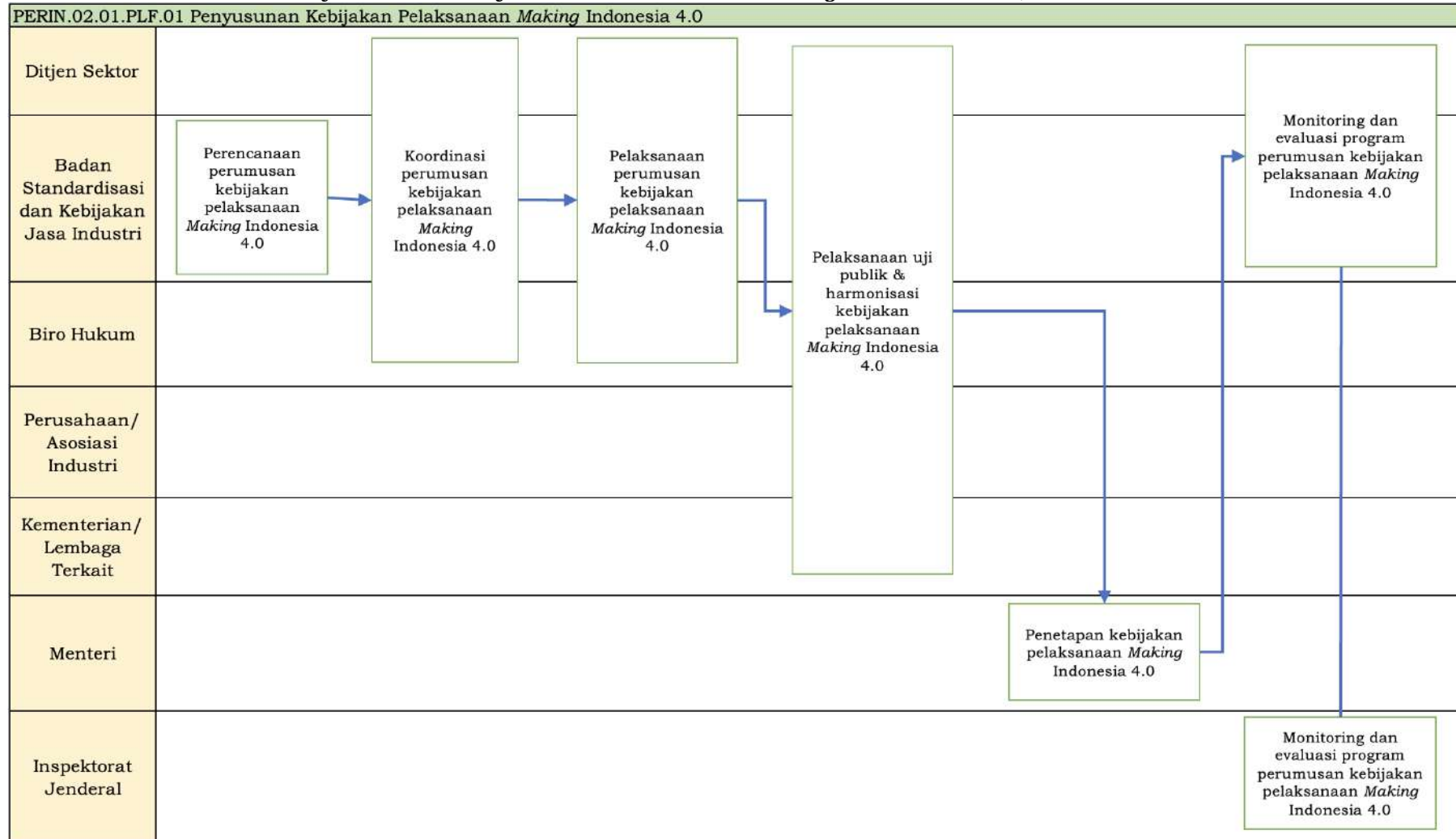


d. PERIN.01.04.PLF.04 Fasilitas Sertifikasi Industri Hijau.

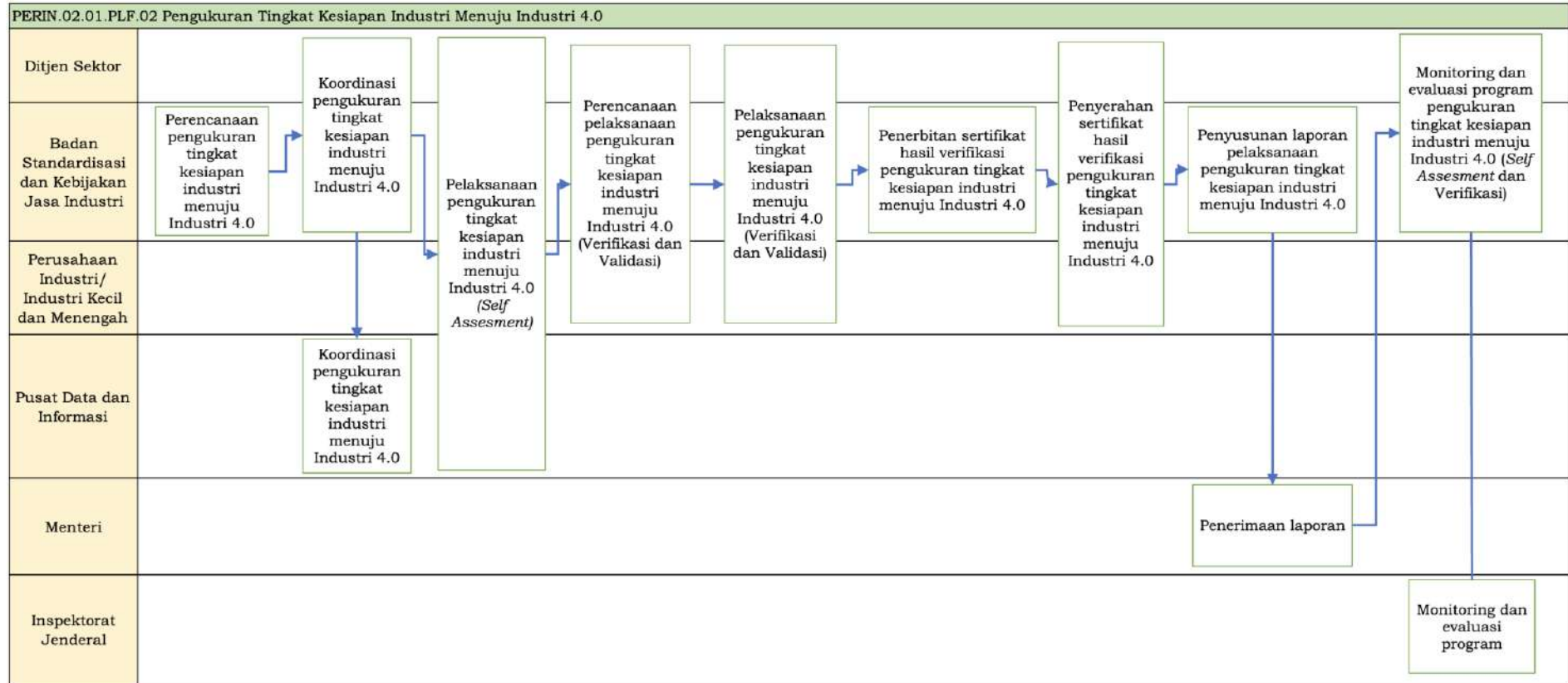


5. Sub-proses PERIN.02.01 Peningkatan Industri Yang Bertransformasi Menuju Industri 4.0 terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:

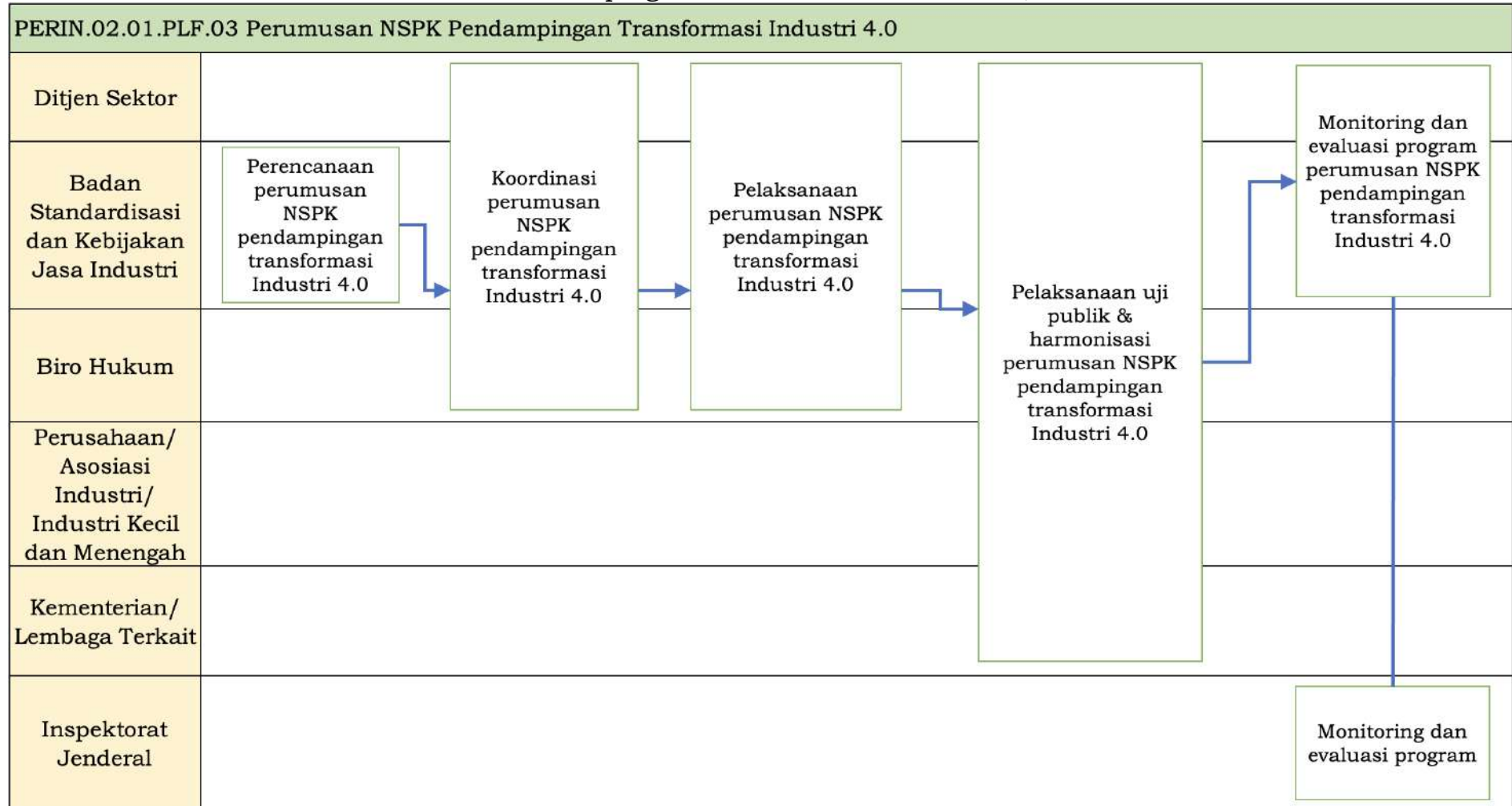
- a. PERIN.02.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan *Making* Indonesia 4.0;



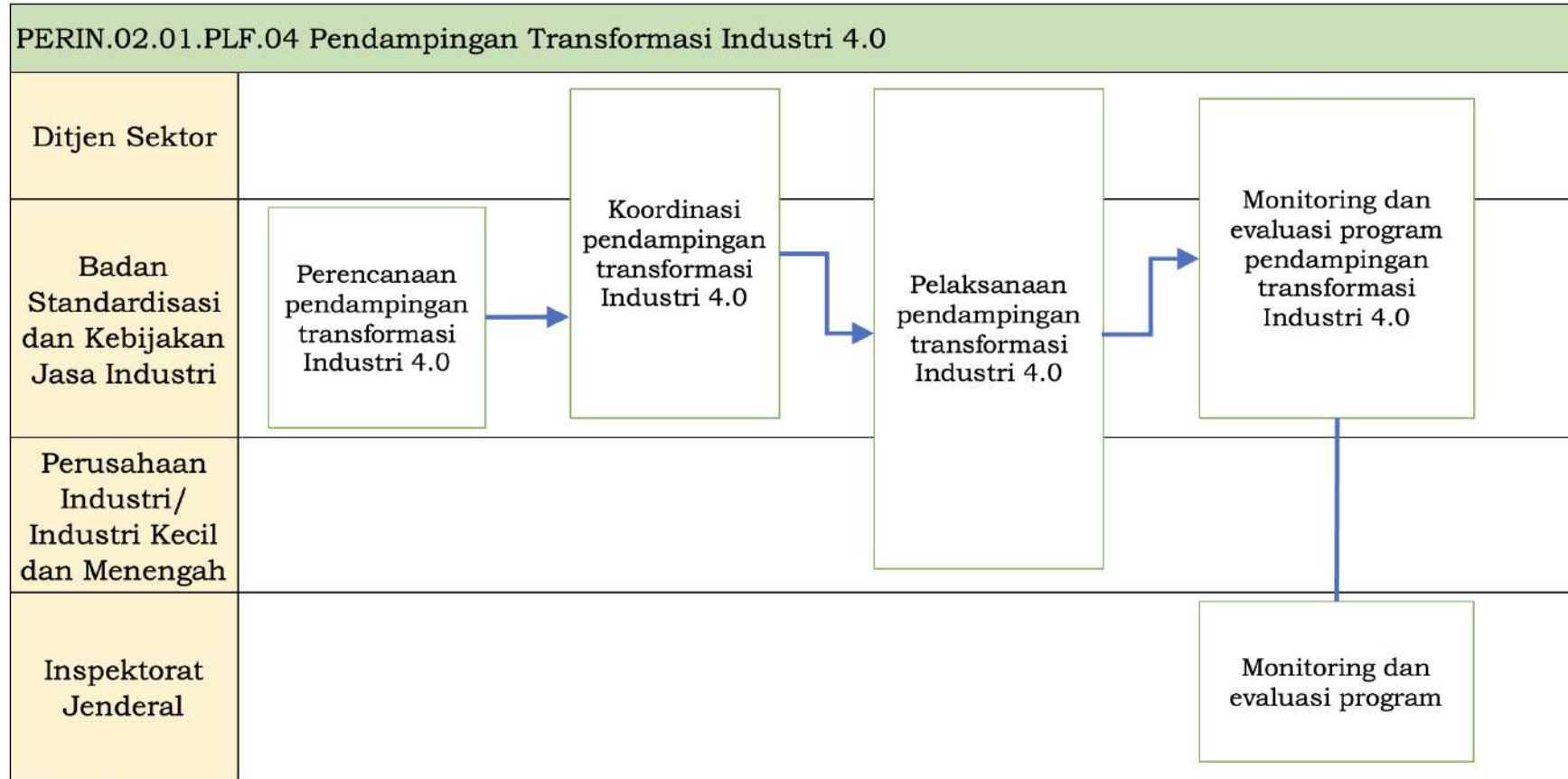
b. PERIN.02.01.PLF.02 Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri Menuju Industri 4.0;



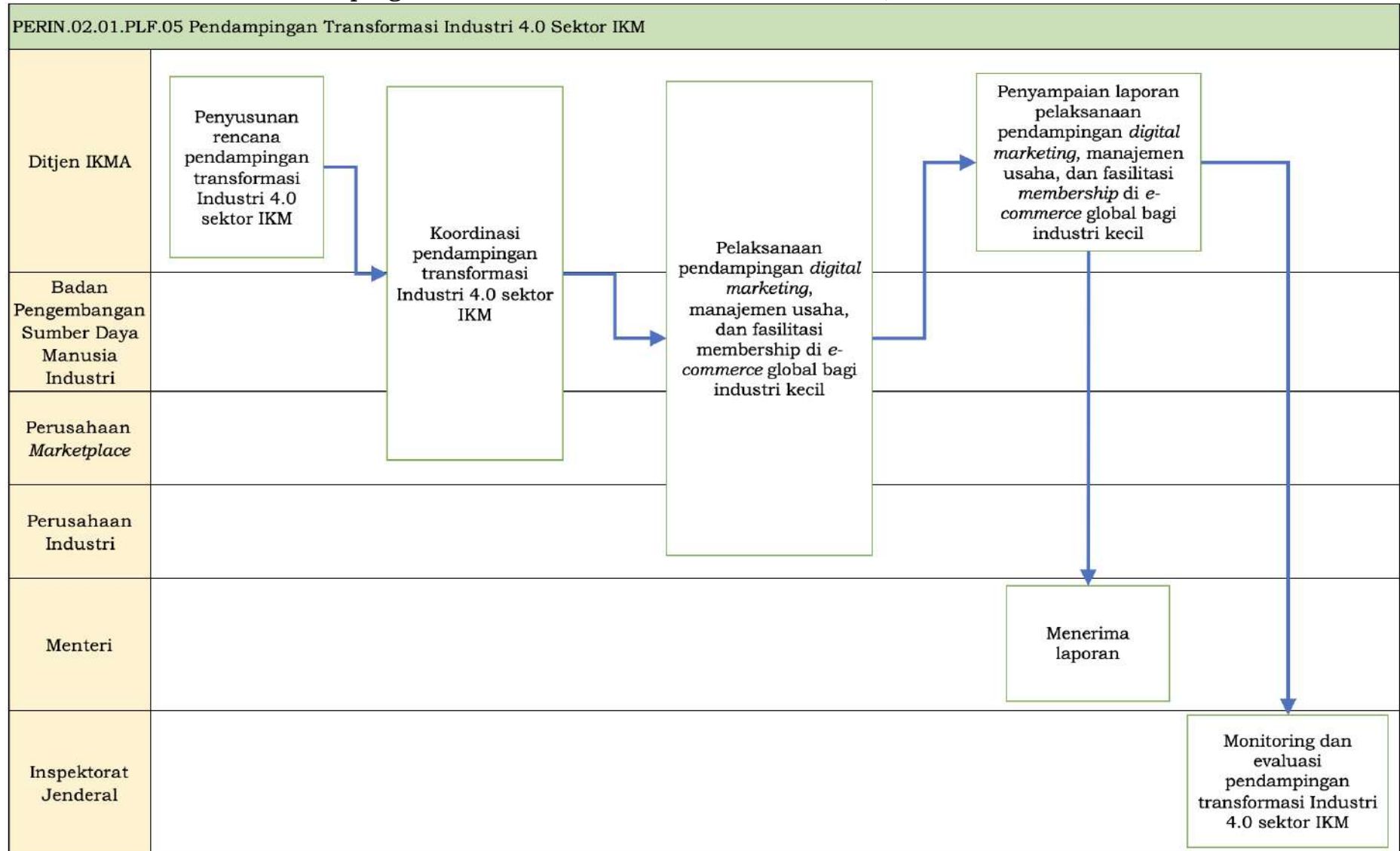
c. PERIN.02.01.PLF.03 Perumusan NSPK Pendampingan Transformasi Industri 4.0;



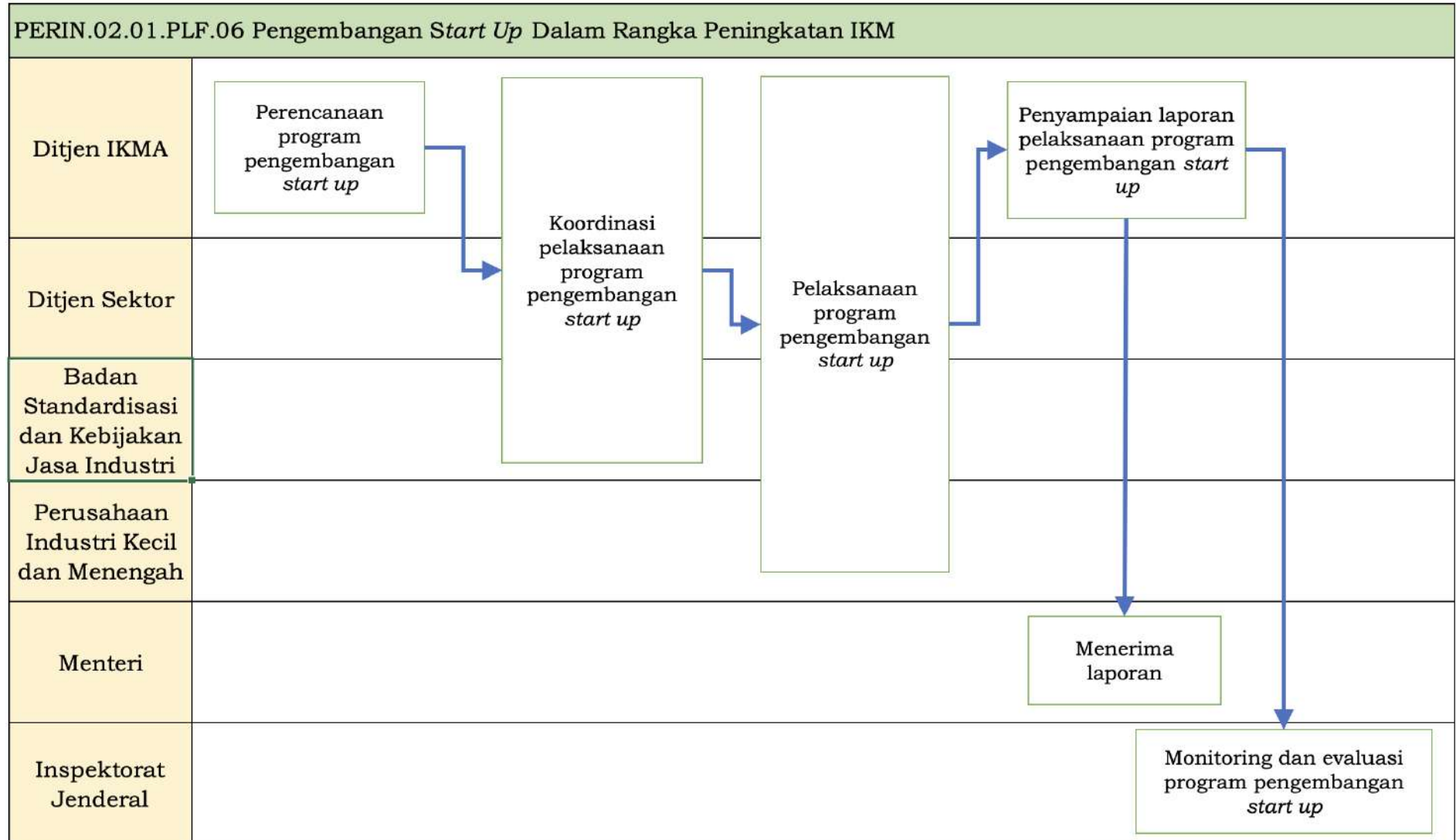
d. PERIN.02.01.PLF.04 Pendampingan Transformasi Industri 4.0;



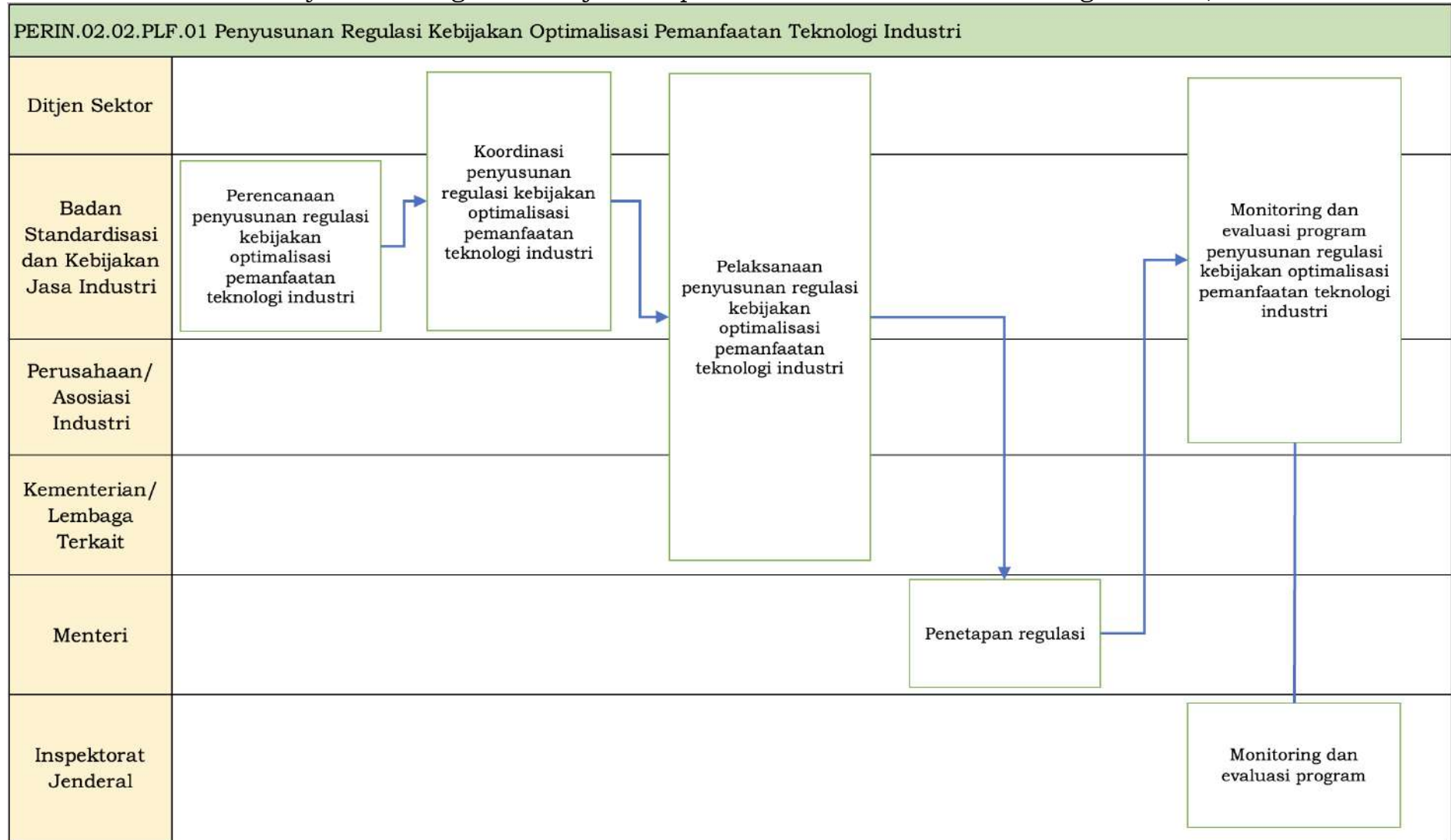
e. PERIN.02.01.PLF.05 Pendampingan Transformasi Industri 4.0 Sektor IKM; dan



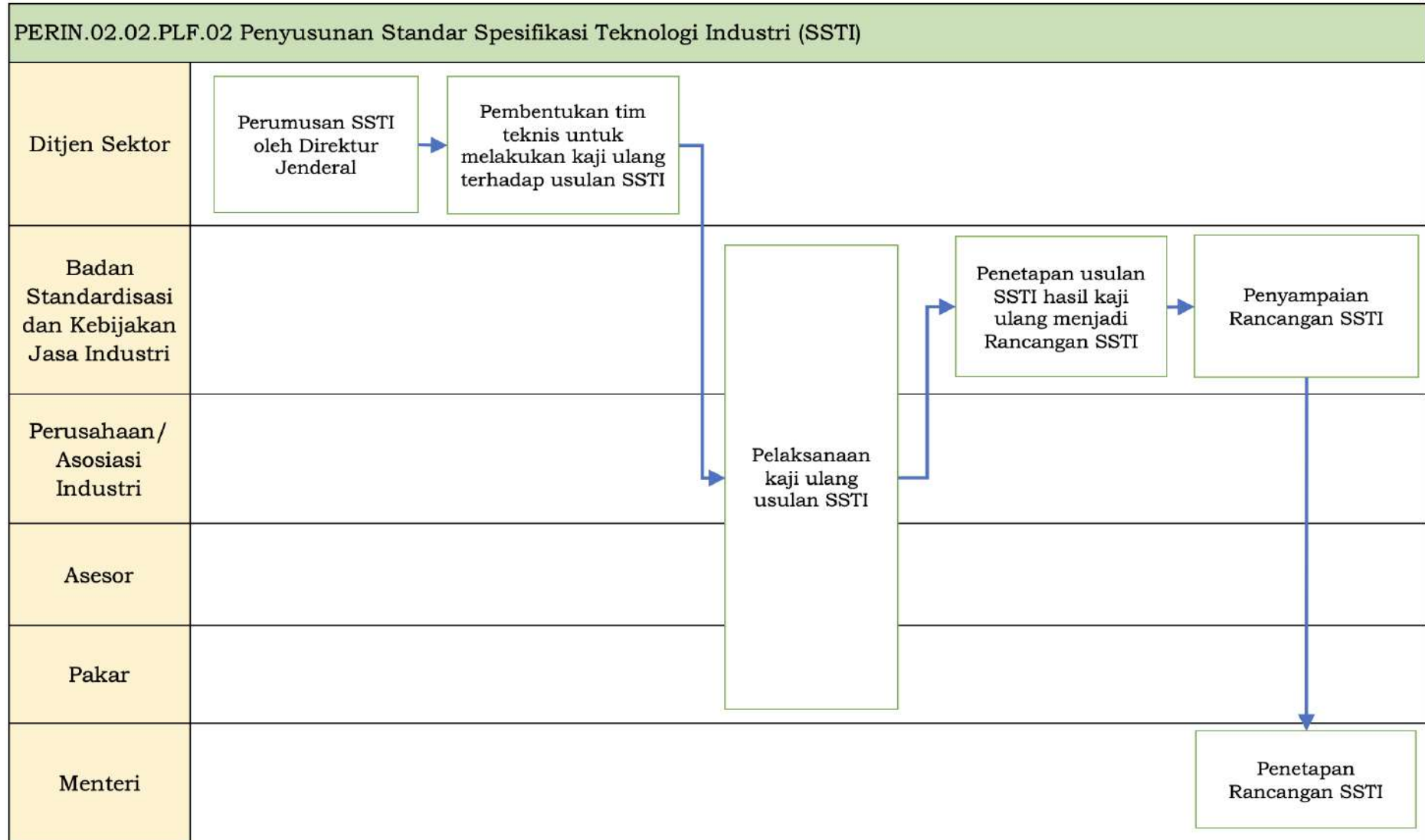
f. PERIN.02.01.PLF.06 Pengembangan *Start Up* Dalam Rangka Peningkatan IKM.



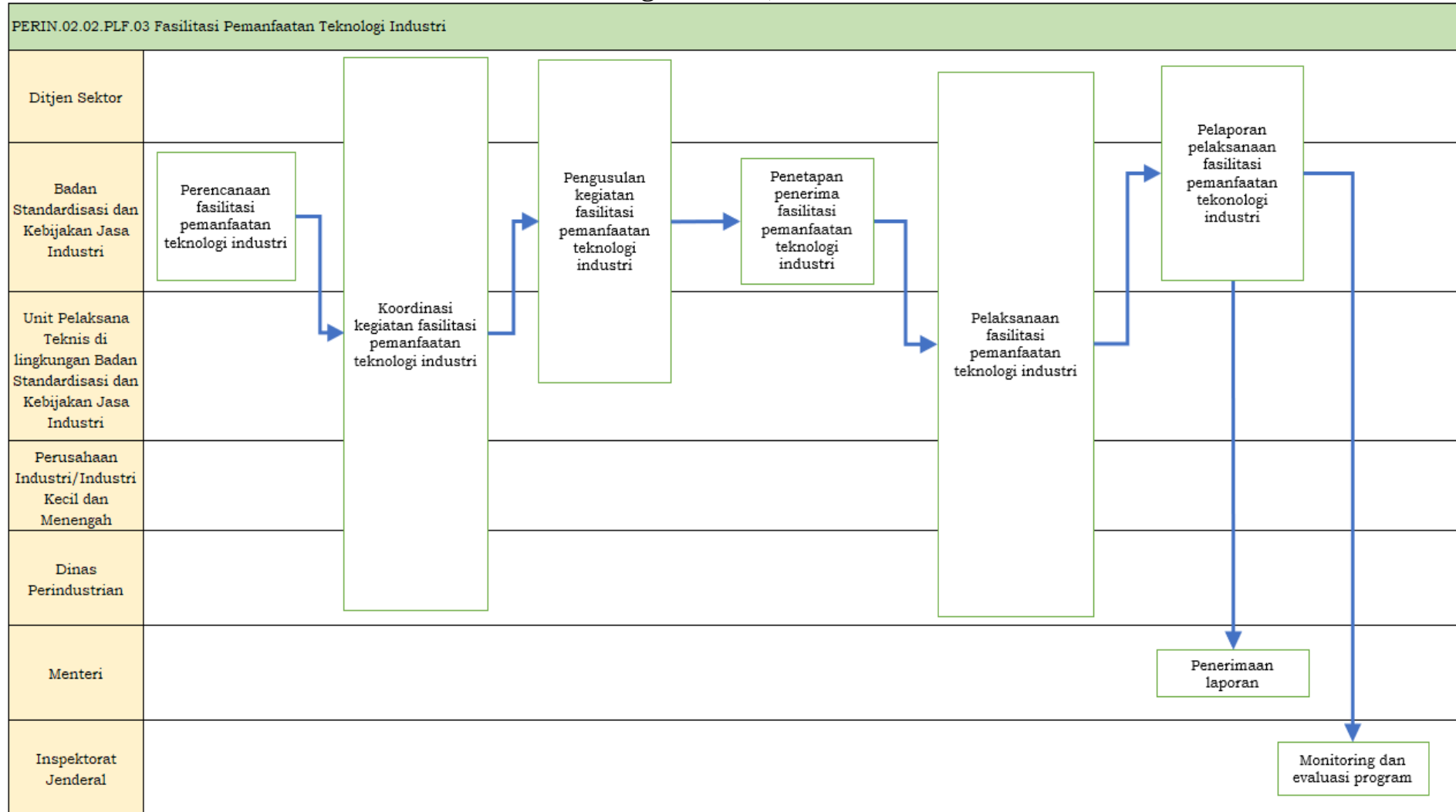
6. Sub-proses PERIN.02.02 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri terdiri atas 5 (lima) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.02.02.PLF.01 Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;



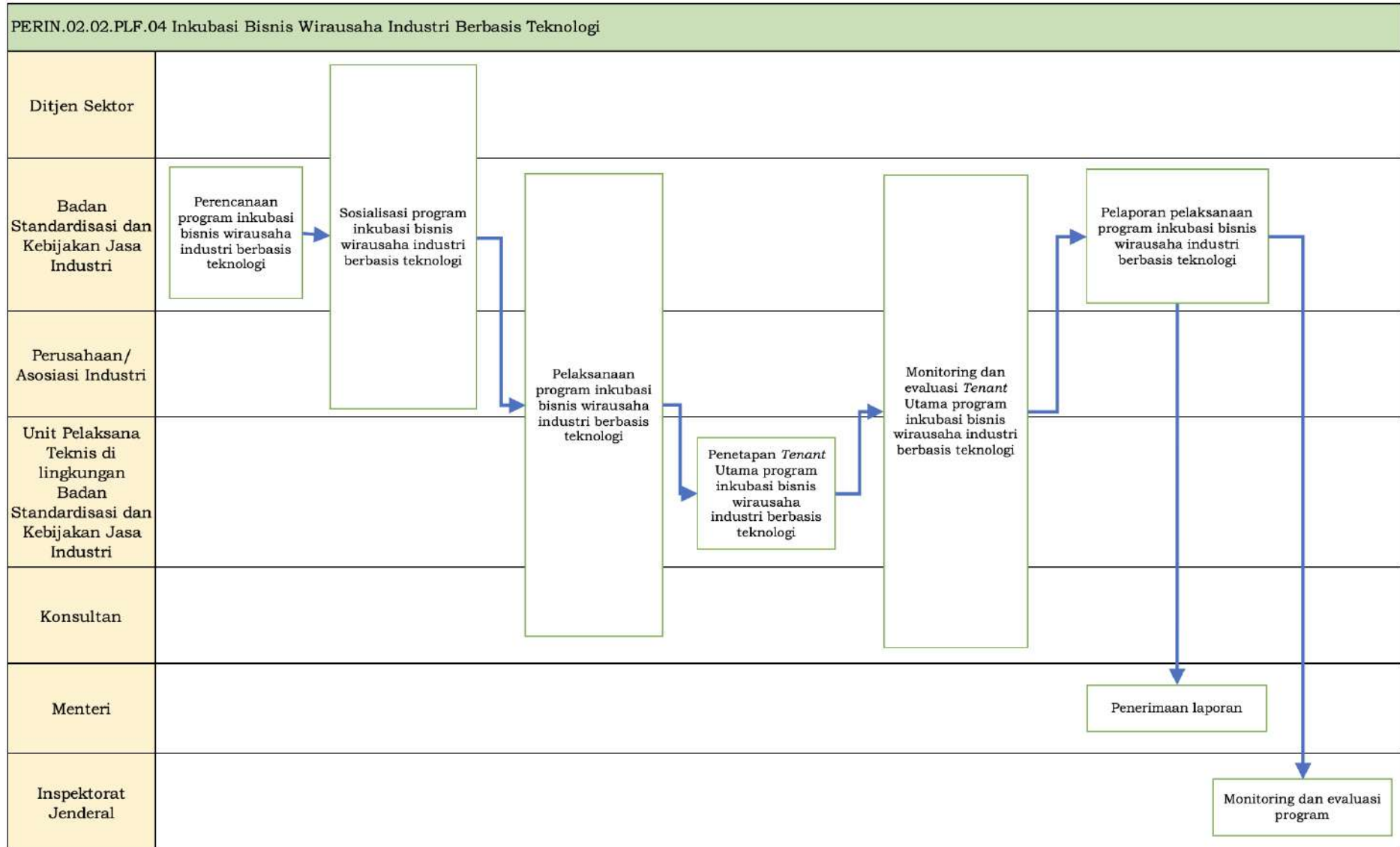
b. PERIN.02.02.PLF.02 Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri (SSTI);



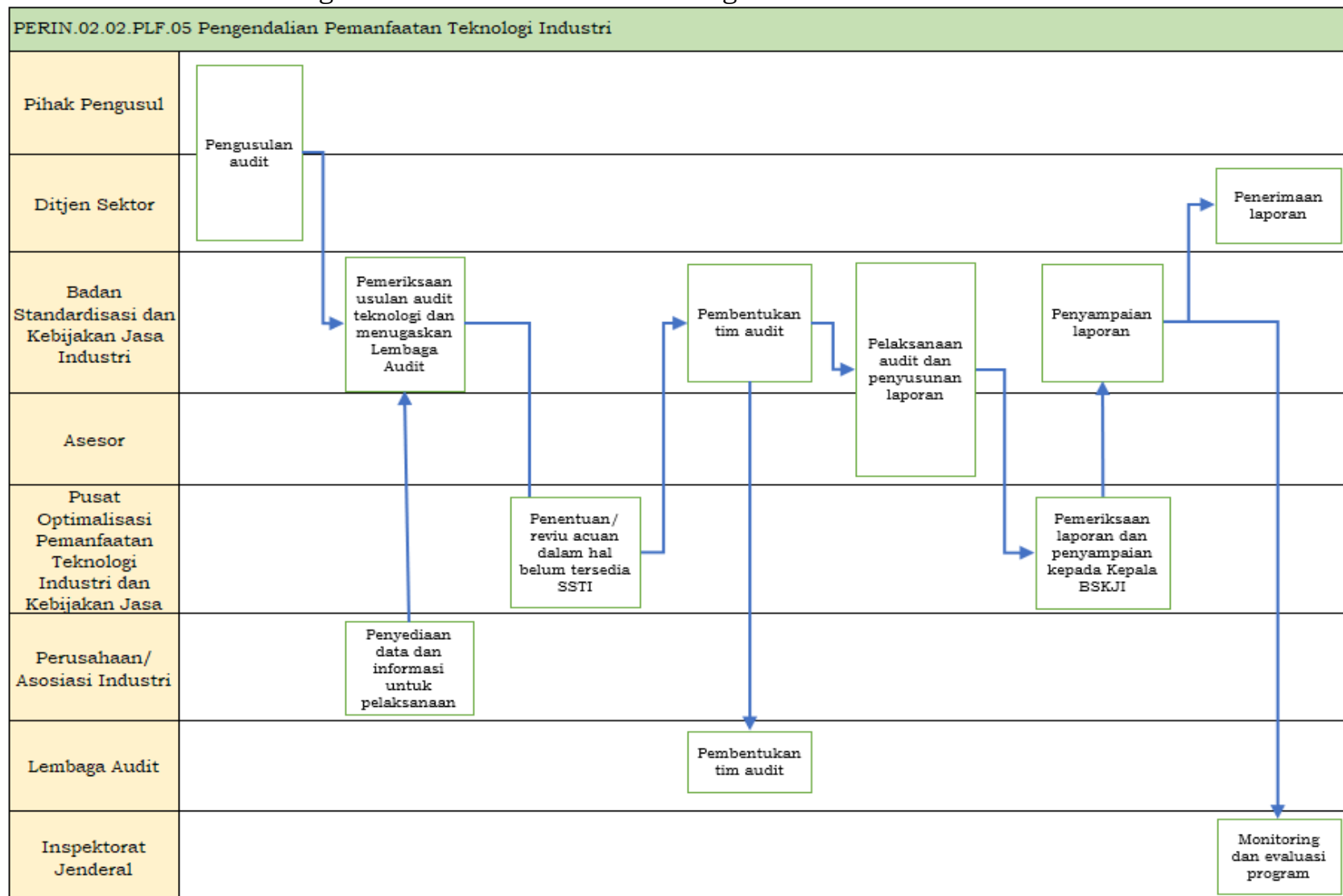
c. PERIN.02.02.PLF.03 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Industri;



d. PERIN.02.02.PLF.04 Inkubasi Bisnis Wirausaha Industri Berbasis Teknologi; dan

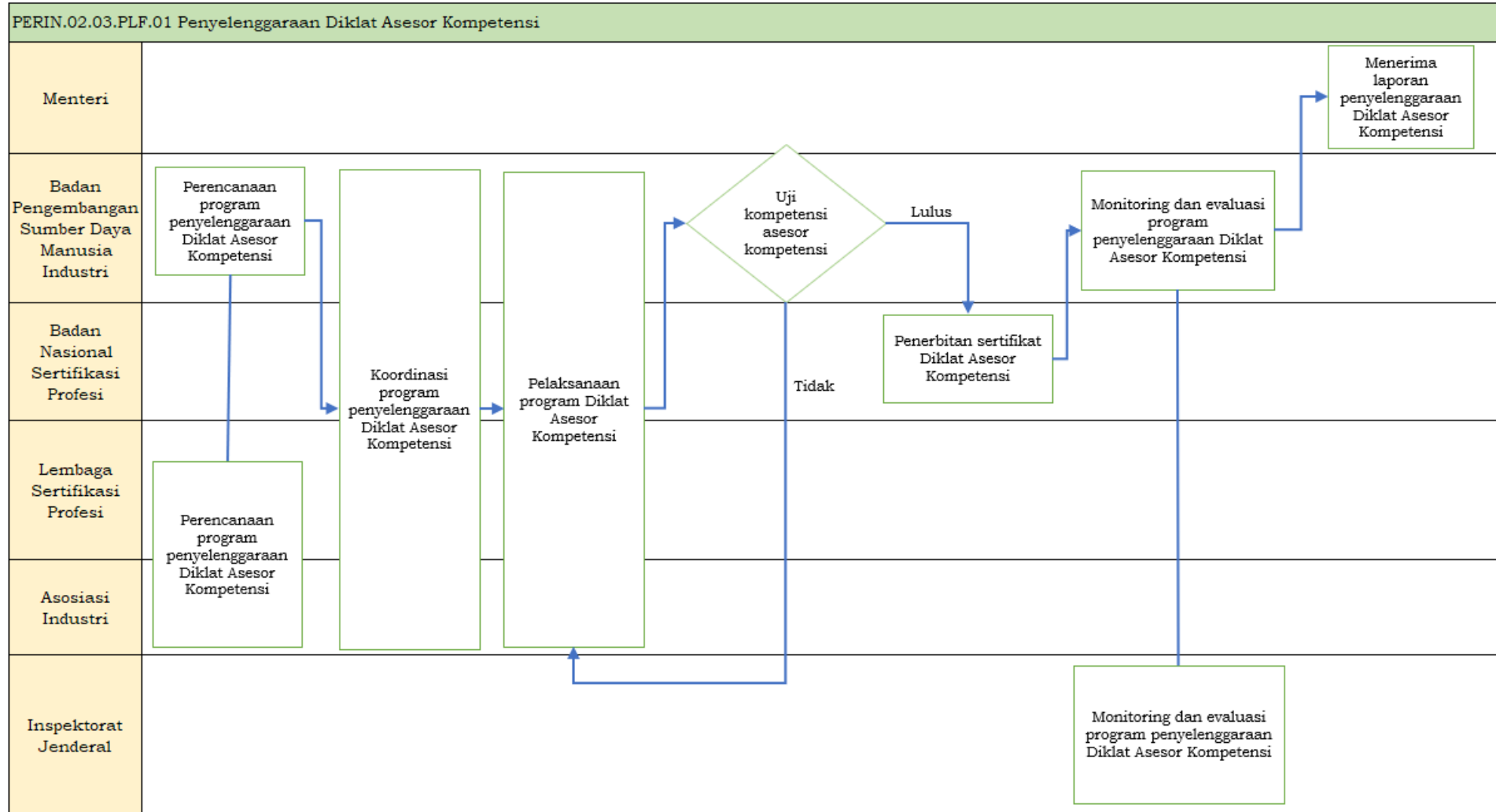


e. PERIN.02.02.PLF.05 Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Industri.

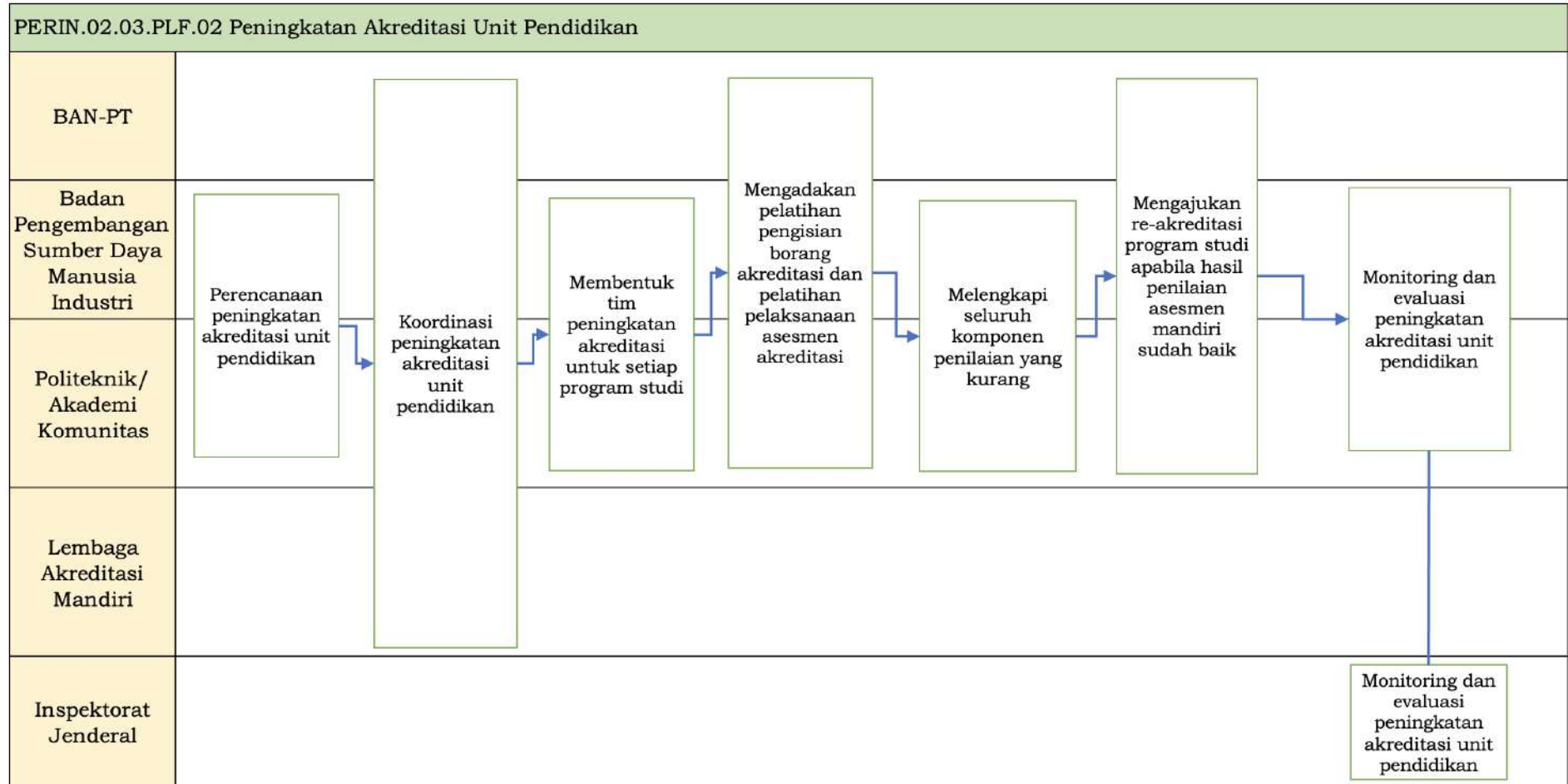


7. Sub-proses PERIN.02.03 Pengembangan Kompetensi SDM Industri 4.0 terdiri atas 9 (sembilan) peta lintas fungsi sebagai berikut:

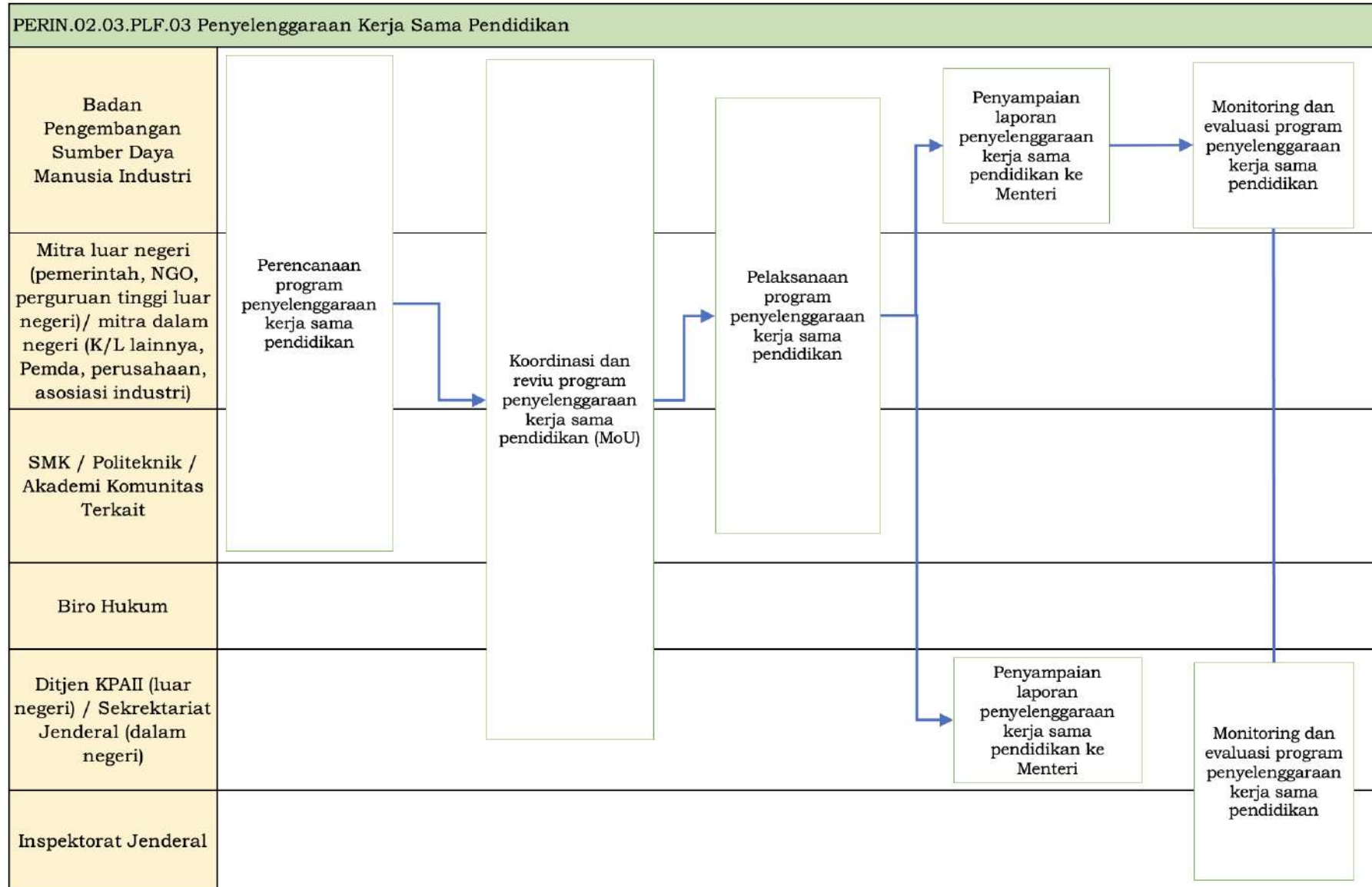
a. PERIN.02.03.PLF.01 Penyelenggaraan Diklat Asesor Kompetensi;



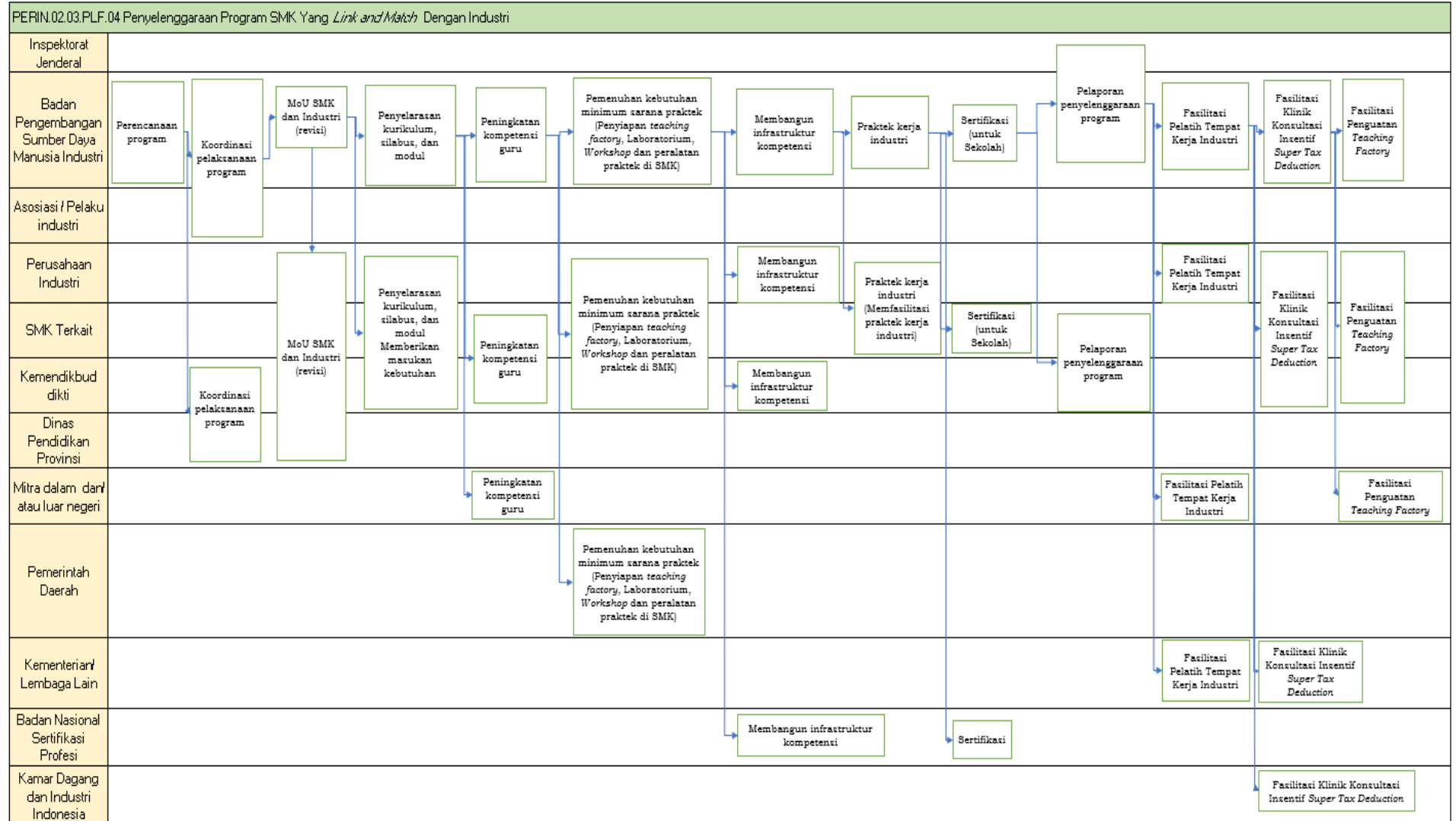
b. PERIN.02.03.PLF.02 Peningkatan Akreditasi Unit Pendidikan;



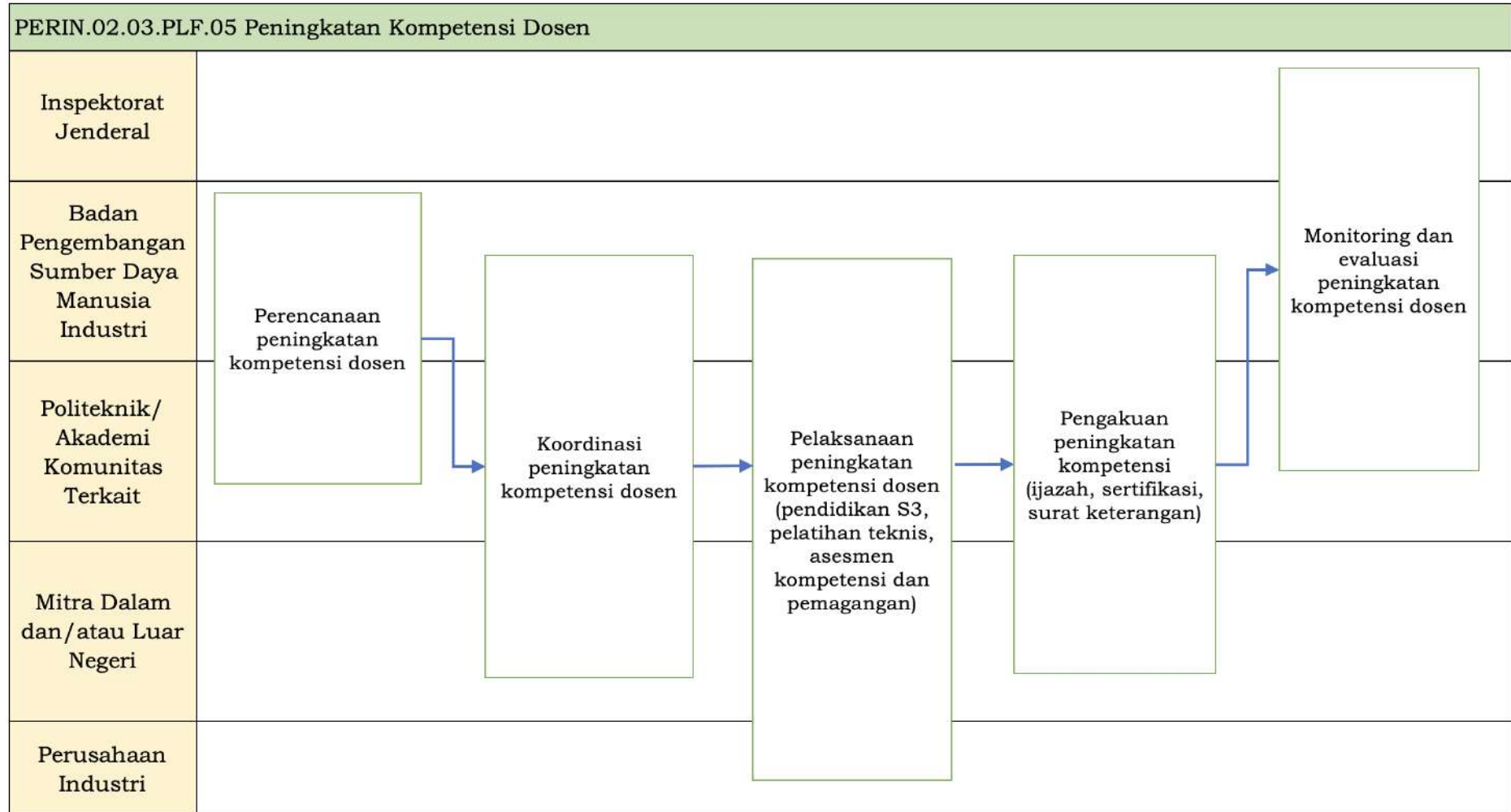
c. PERIN.02.03.PLF.03 Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan;



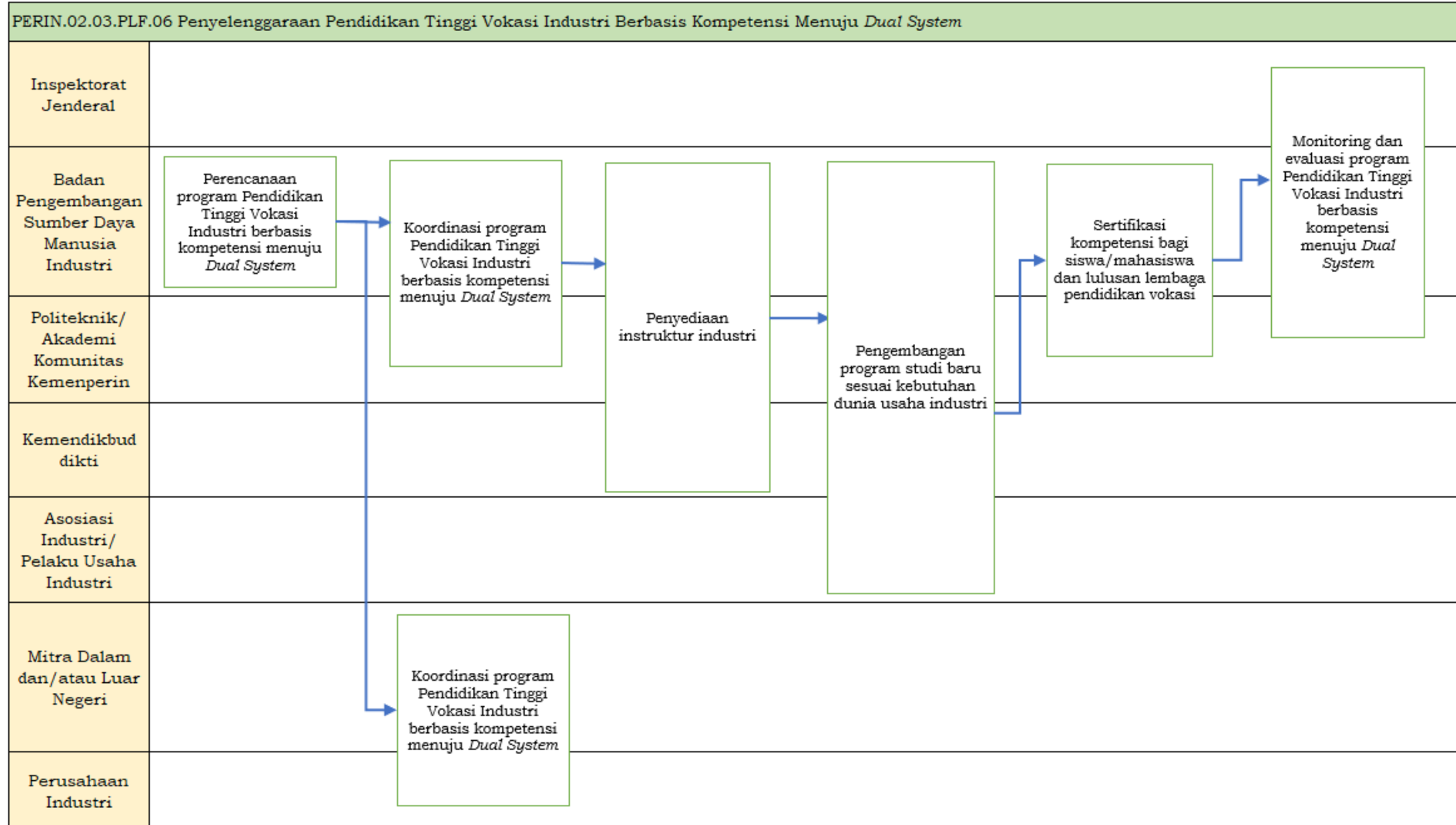
d. PERIN.02.03.PLF.04 Penyelenggaraan Program SMK yang *Link and Match* dengan Industri;



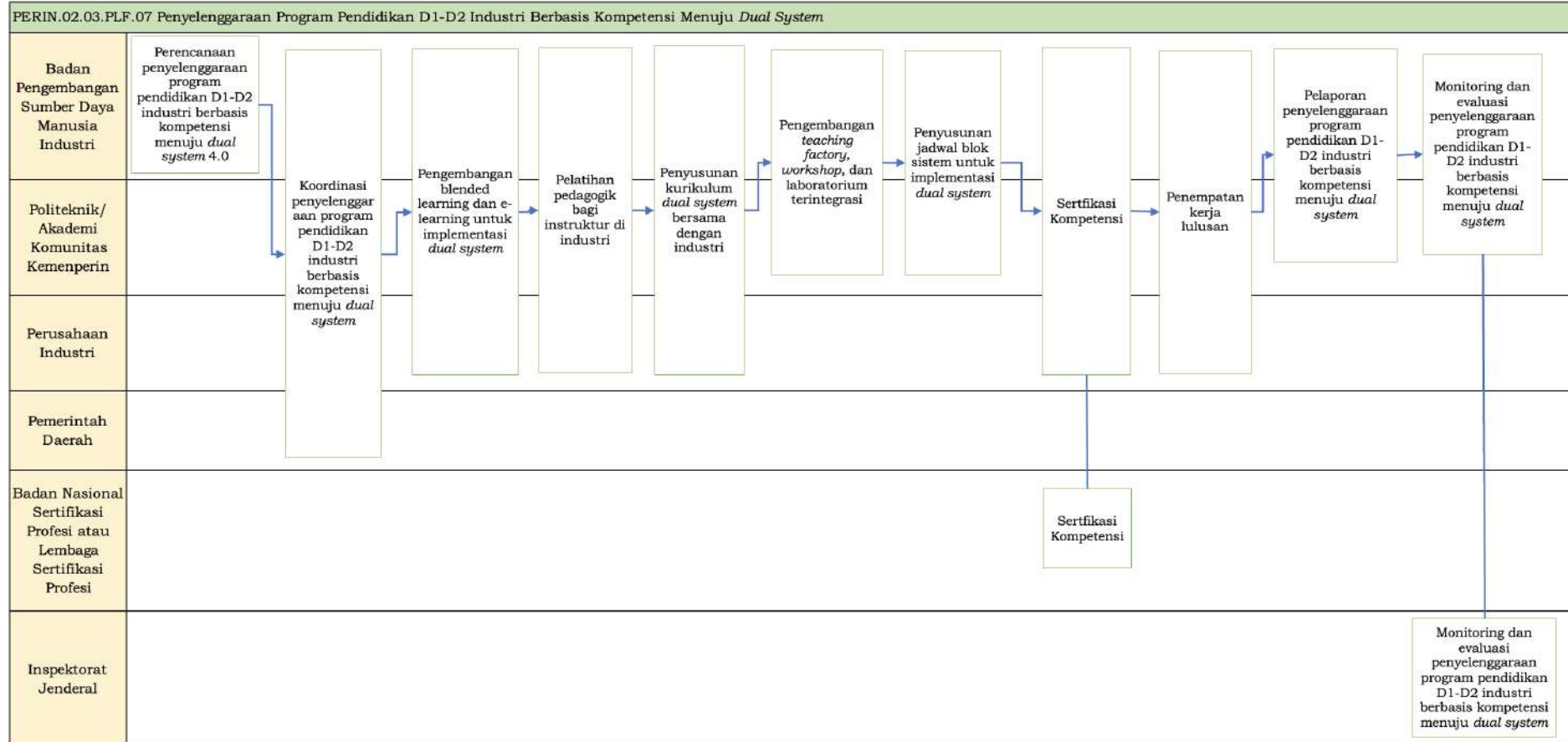
e. PERIN.02.03.PLF.05 Peningkatan Kompetensi Dosen;



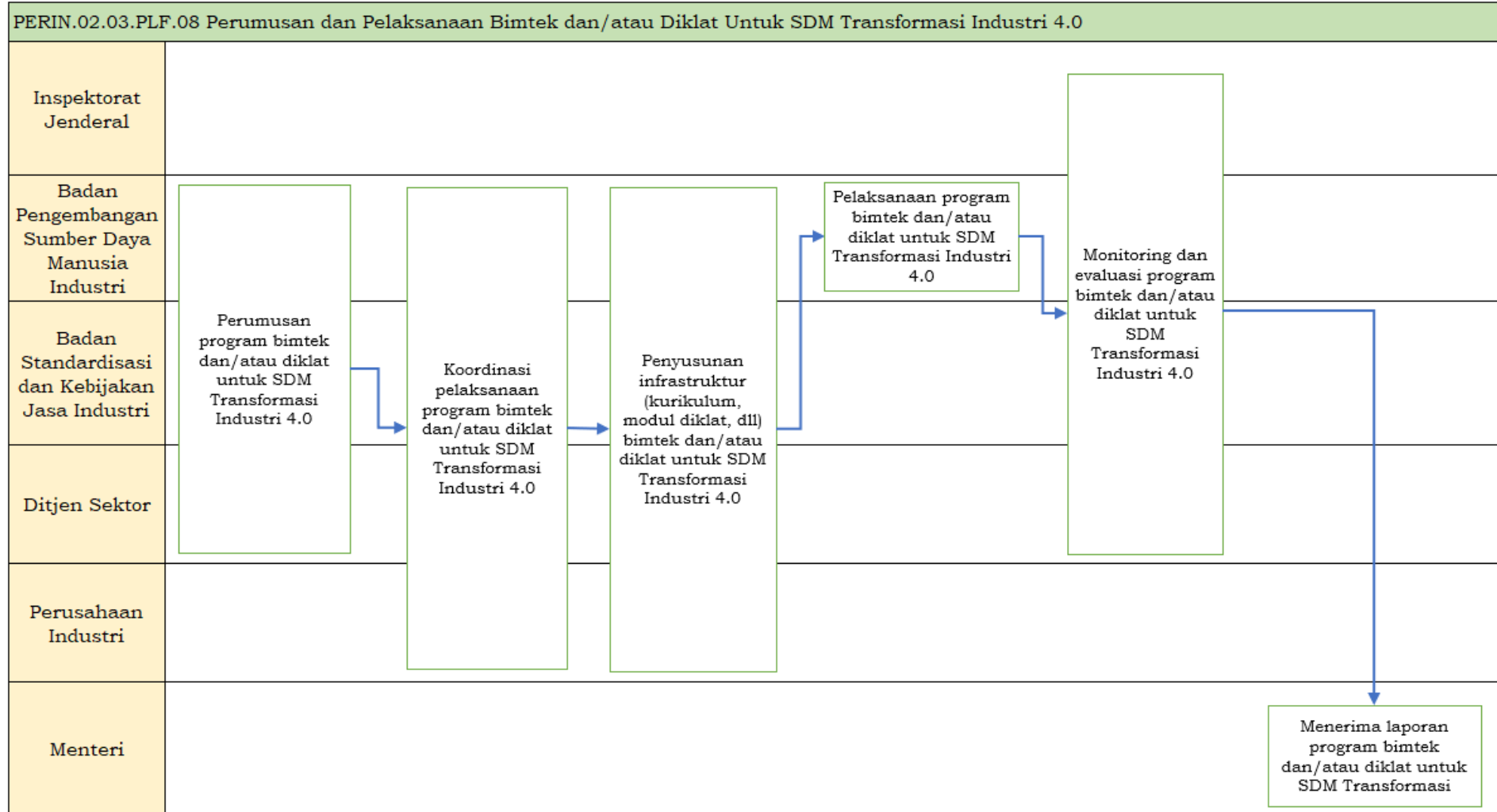
f. PERIN.02.03.PLF.06 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju *Dual System*;



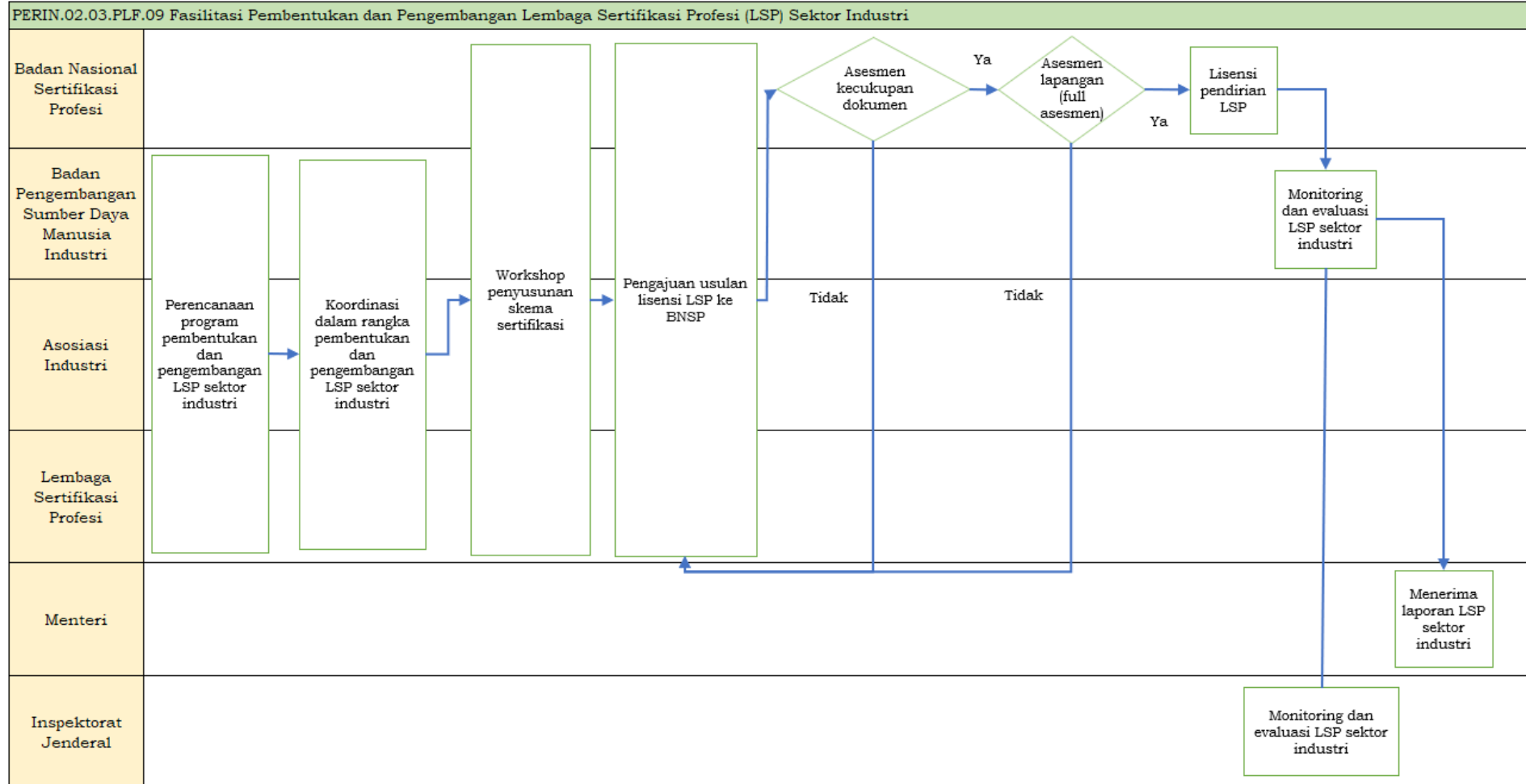
g. PERIN.02.03.PLF.07 Penyelenggaraan Program Pendidikan D1-D2 Industri Berbasis Kompetensi Menuju *Dual Sistem*;



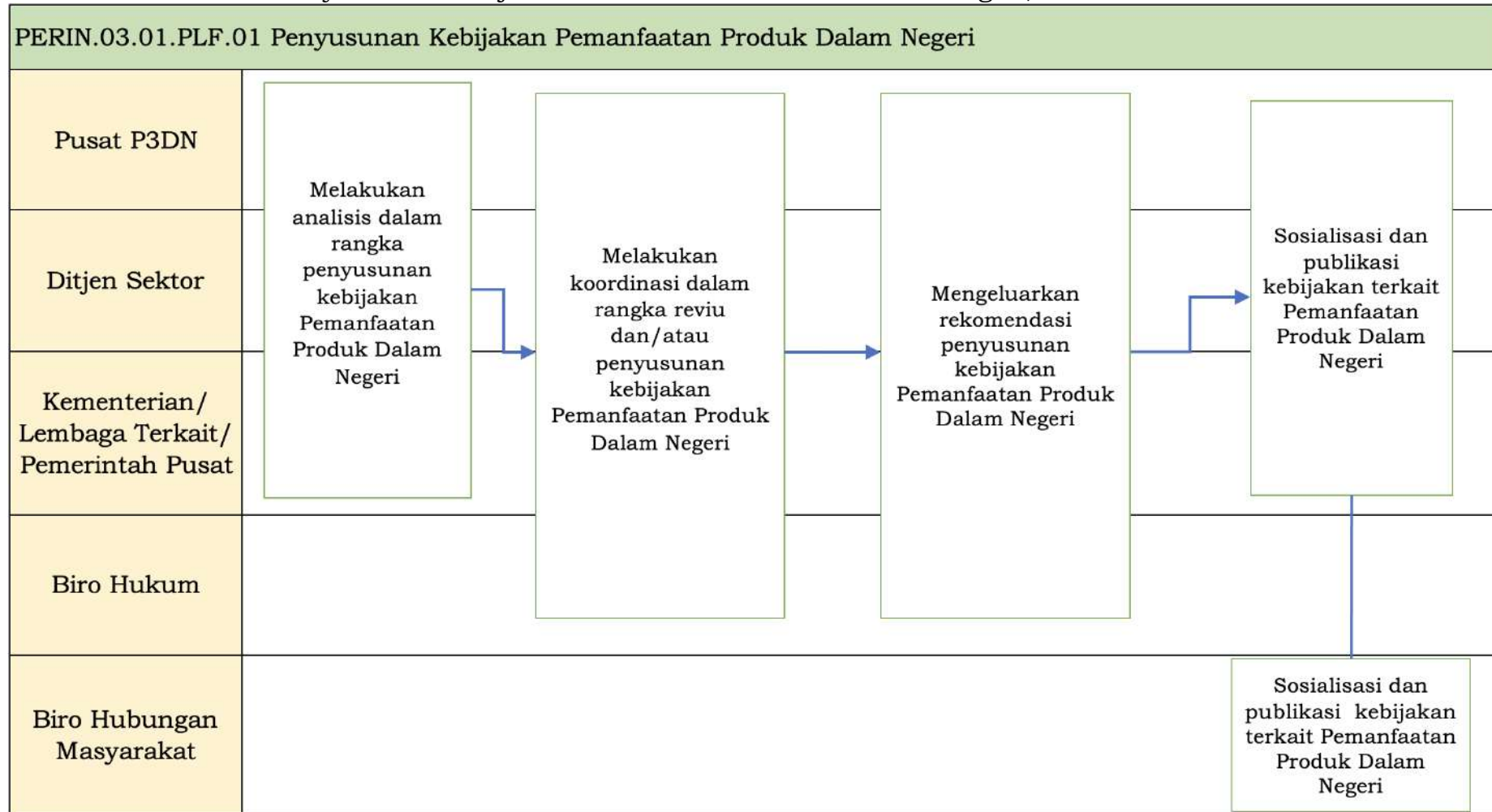
h. PERIN.02.03.PLF.08 Perumusan dan Pelaksanaan Bimtek dan/atau Diklat untuk SDM Transformasi Industri 4.0; dan



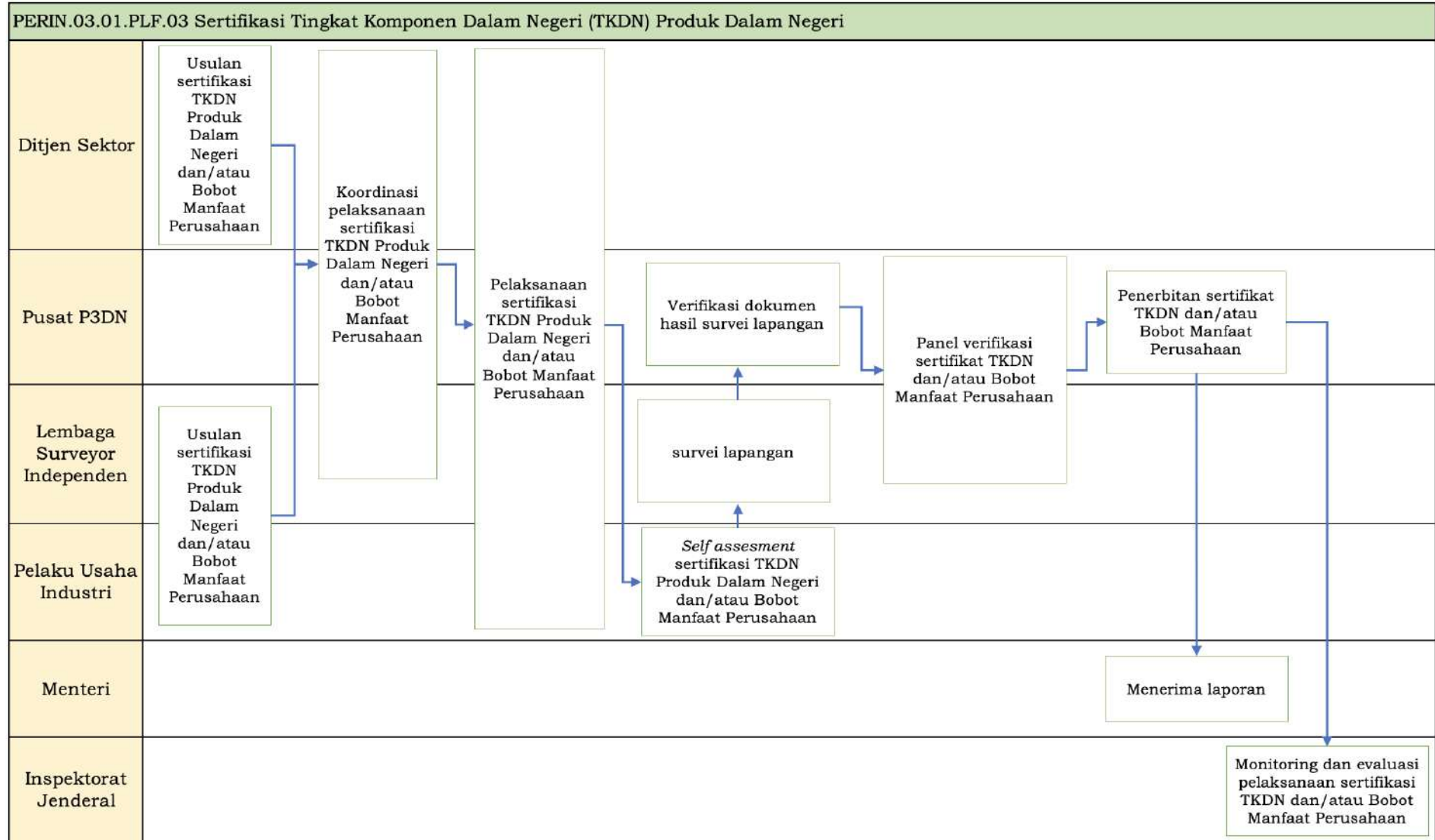
i. PERIN.02.03.PLF.09 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri.



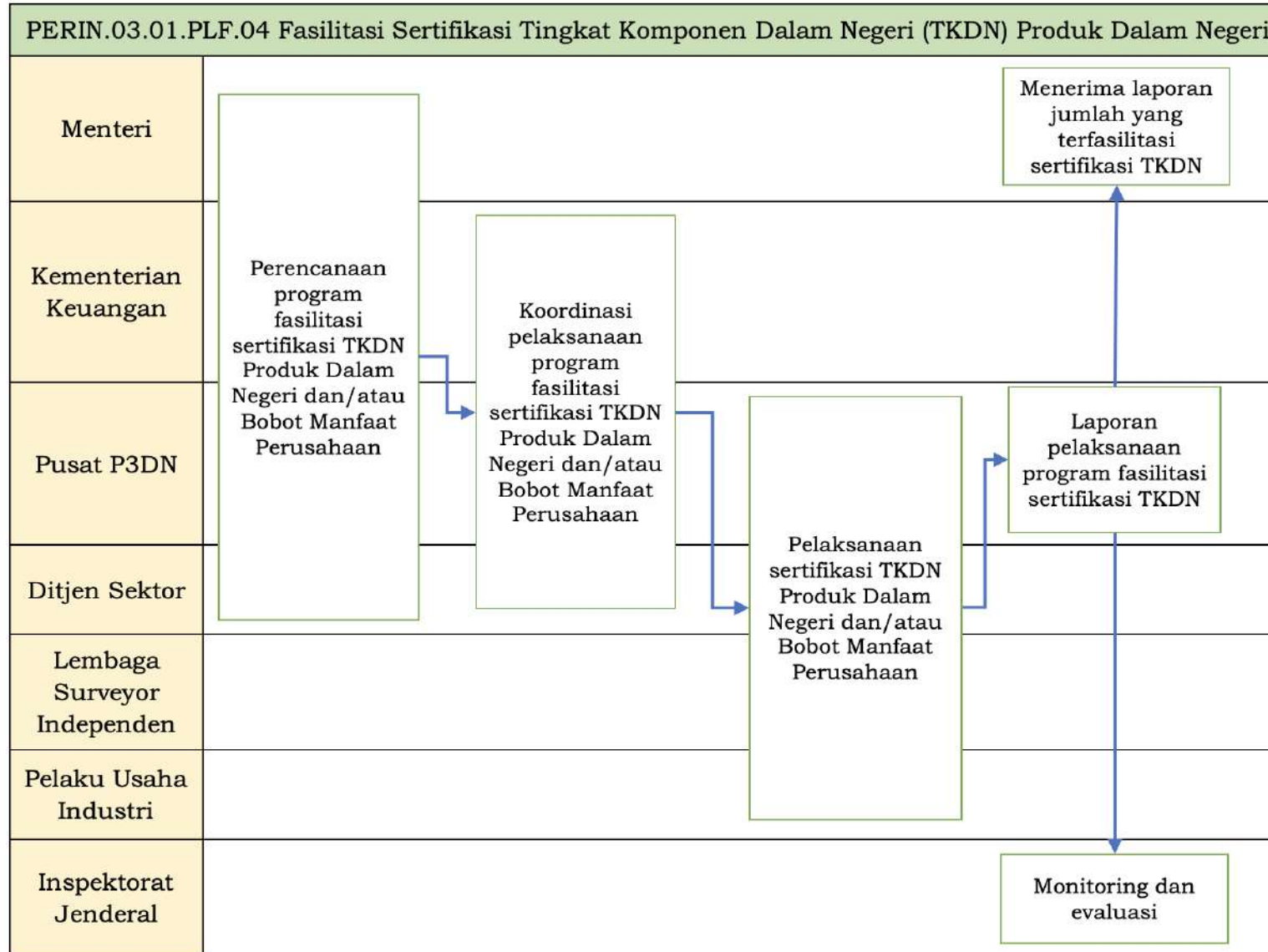
8. Sub-proses PERIN.03.01 Pemanfaatan Produk Dalam Negeri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.03.01.PLF.01 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri;



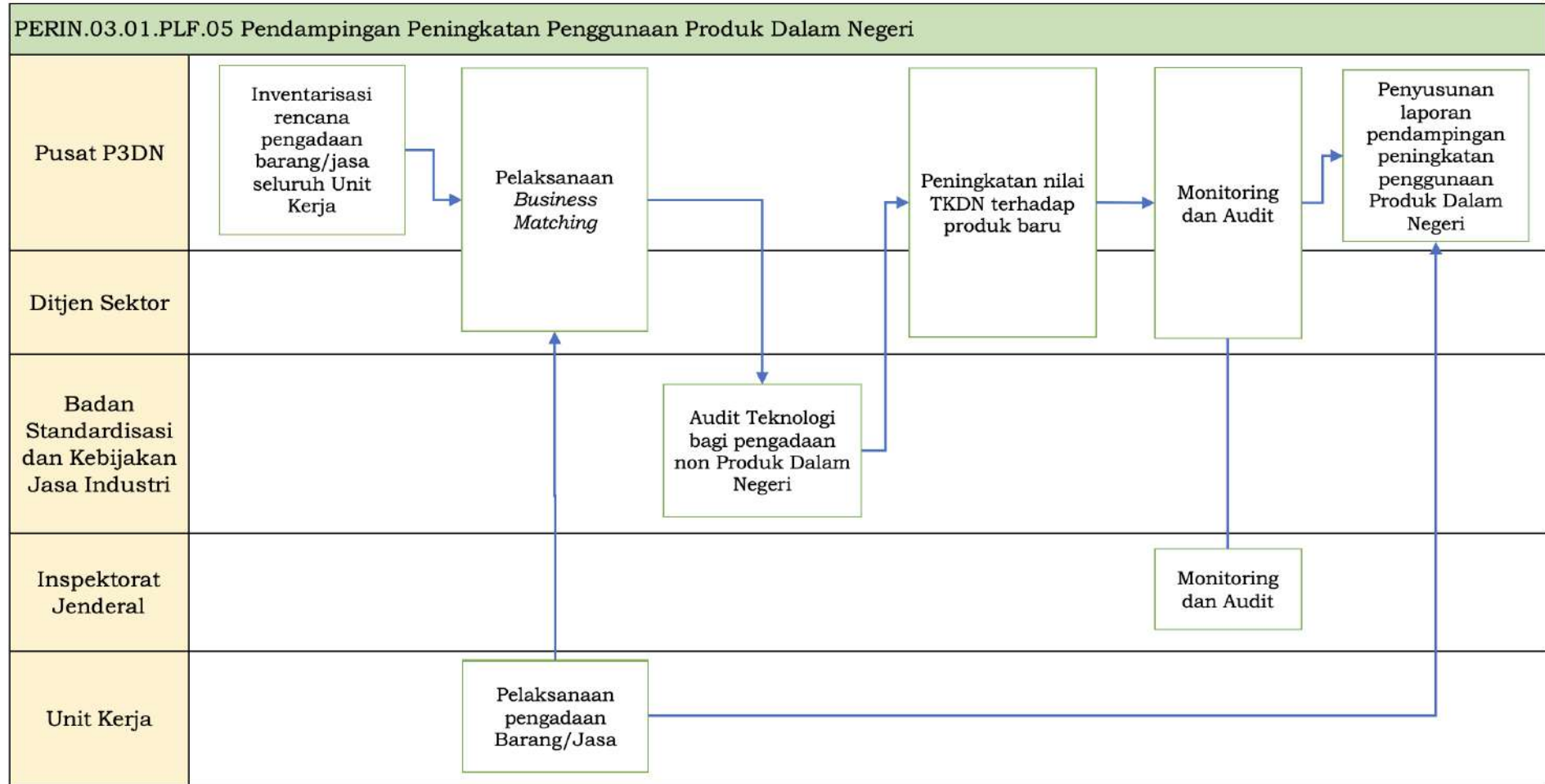
c. PERIN.03.01.PLF.03 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri;



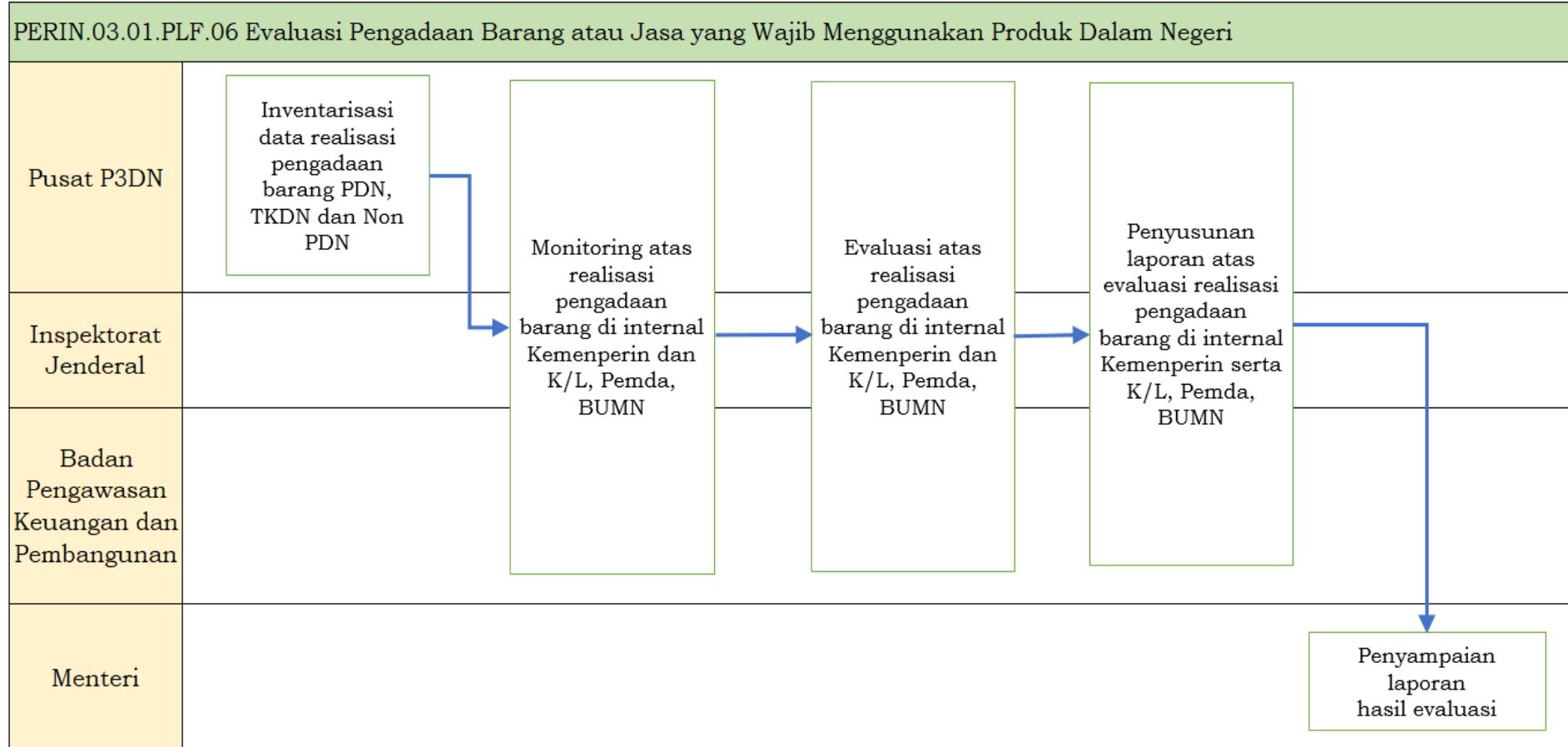
- d. PERIN.03.01.PLF.04 Fasilitas Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Dalam Negeri;



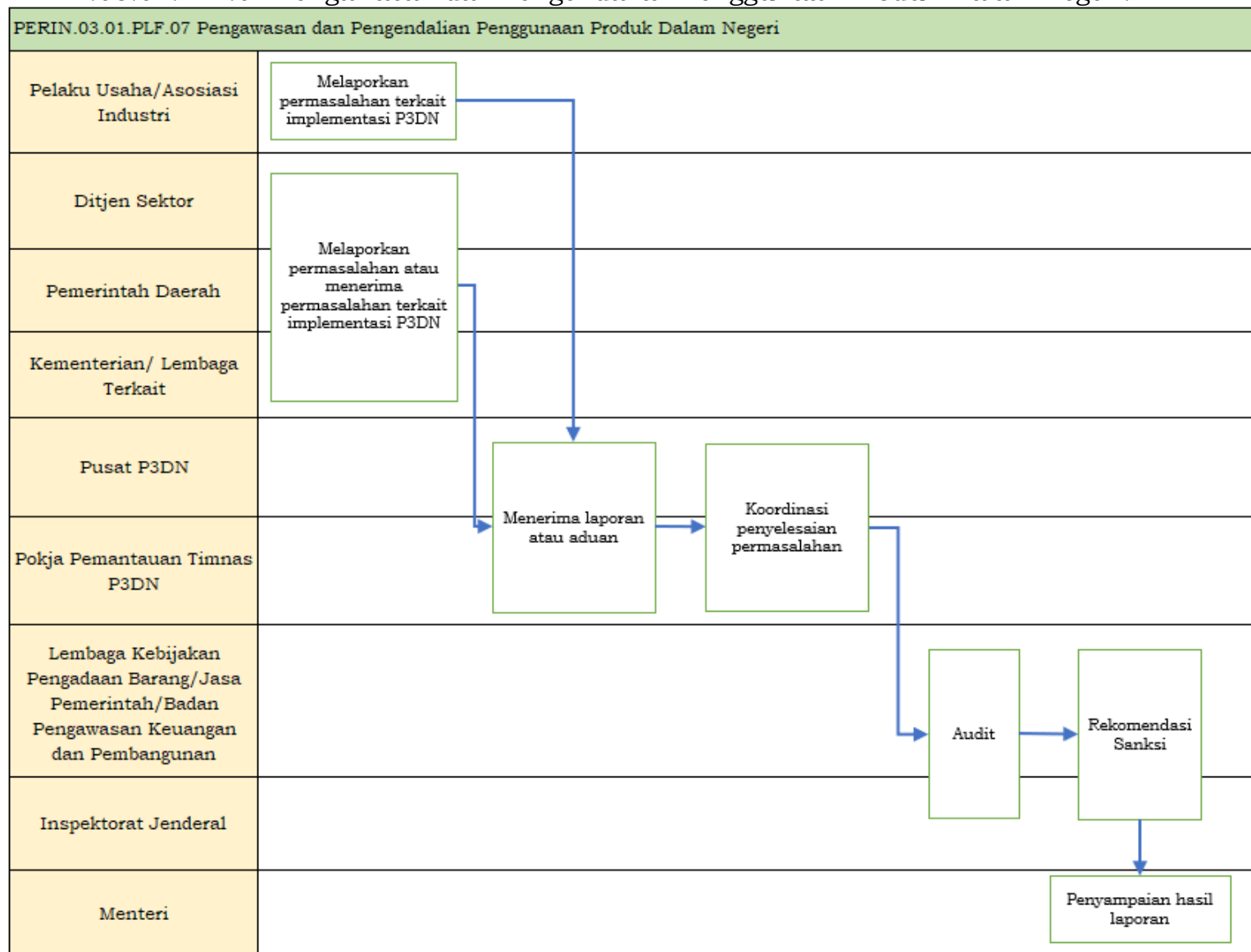
e. PERIN.03.01.PLF.05 Pendampingan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;



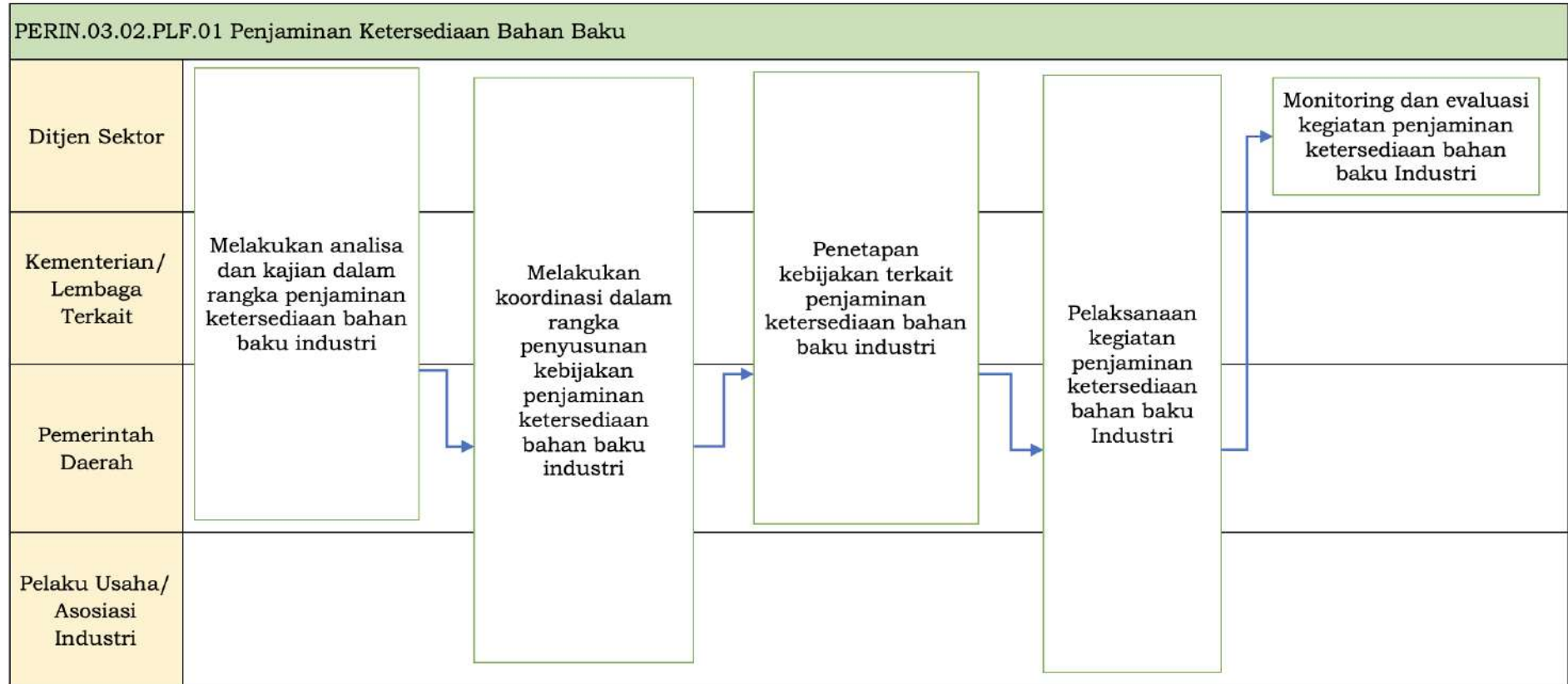
- f. PERIN.03.01.PLF.06 Evaluasi Pengadaan Barang atau Jasa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan



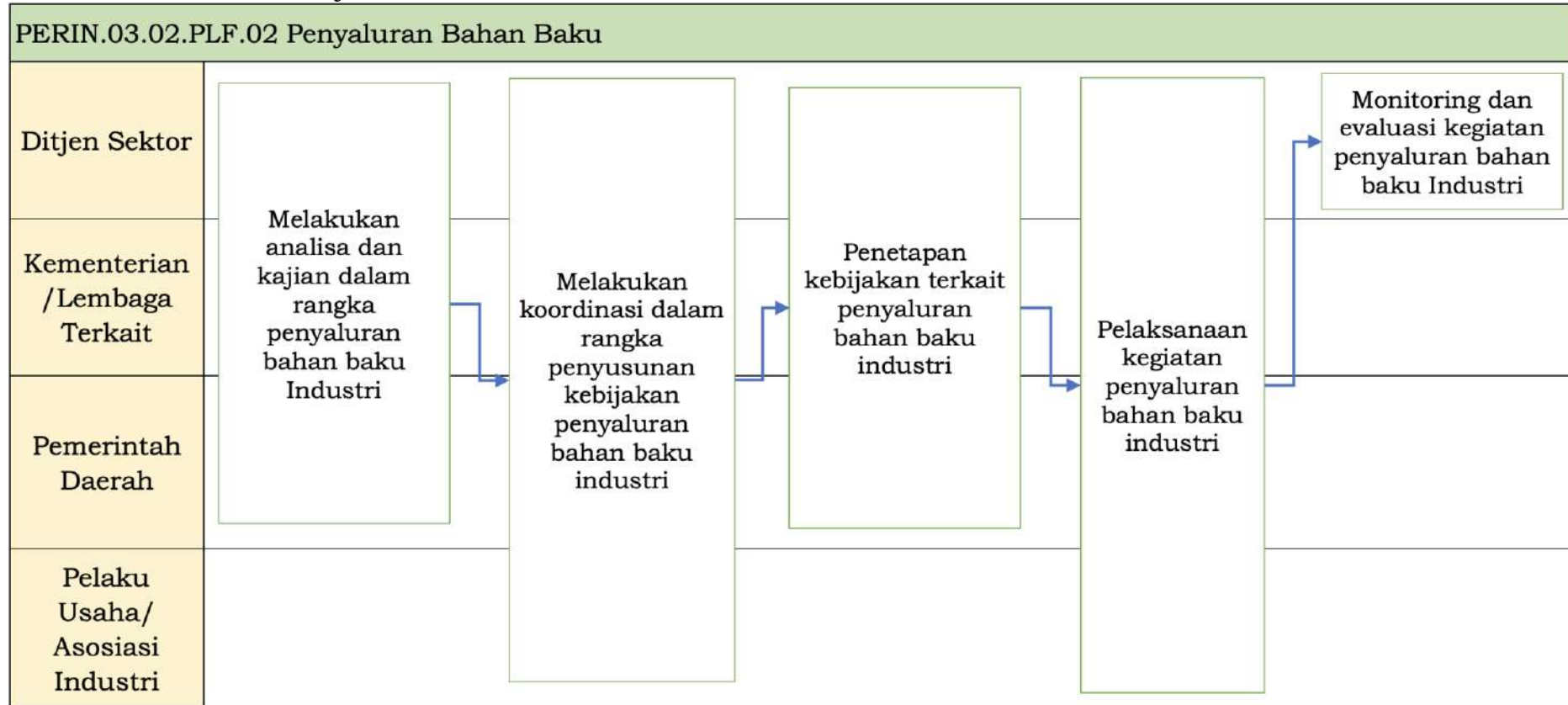
g. PERIN.03.01.PLF.07 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri.



9. Sub-proses PERIN.03.02 Perbaikan Rantai Pasok Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.03.02.PLF.01 Penjaminan Ketersediaan Bahan Baku; dan

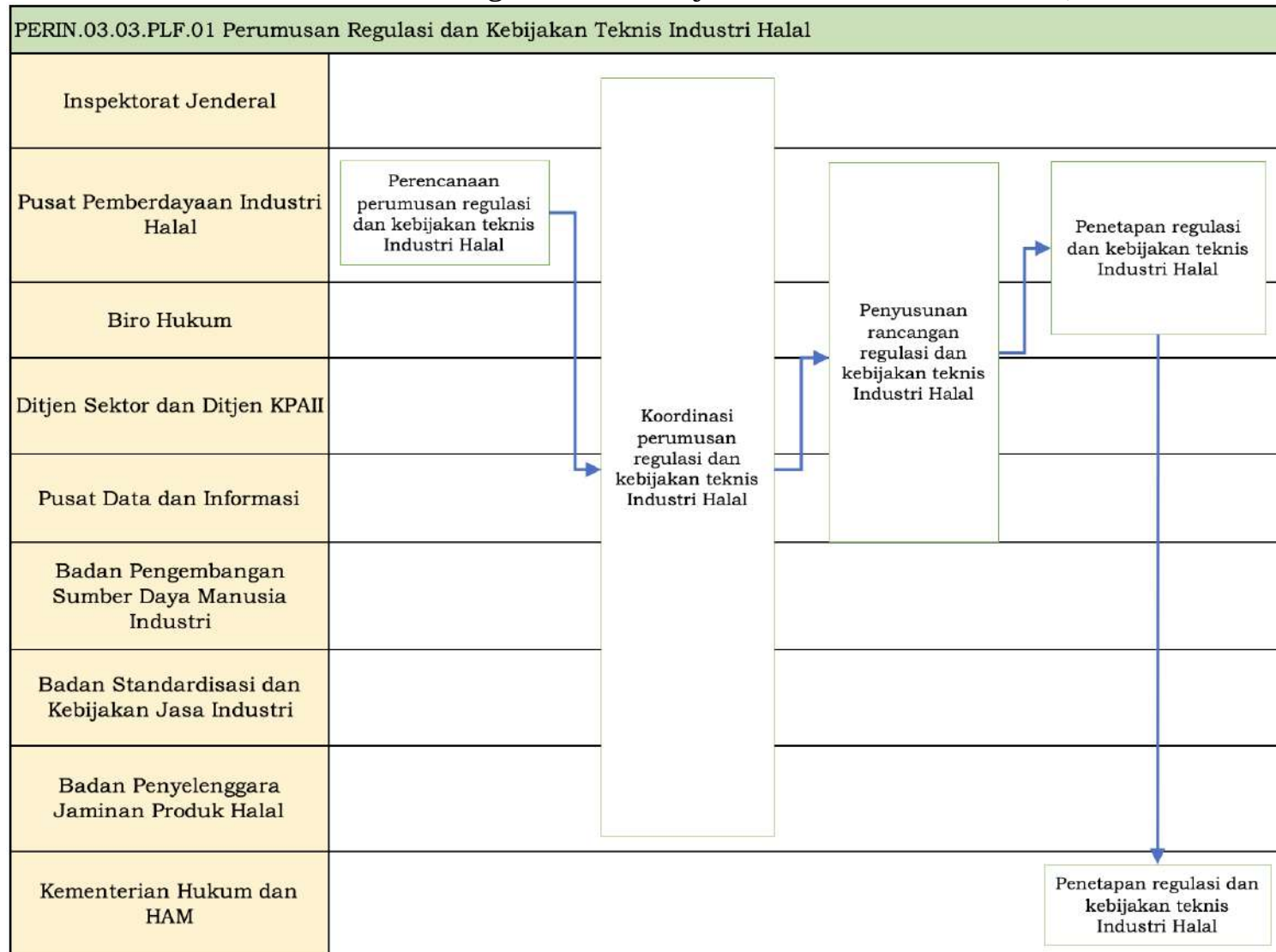


b. PERIN.03.02.PLF.02 Penyaluran Bahan Baku.

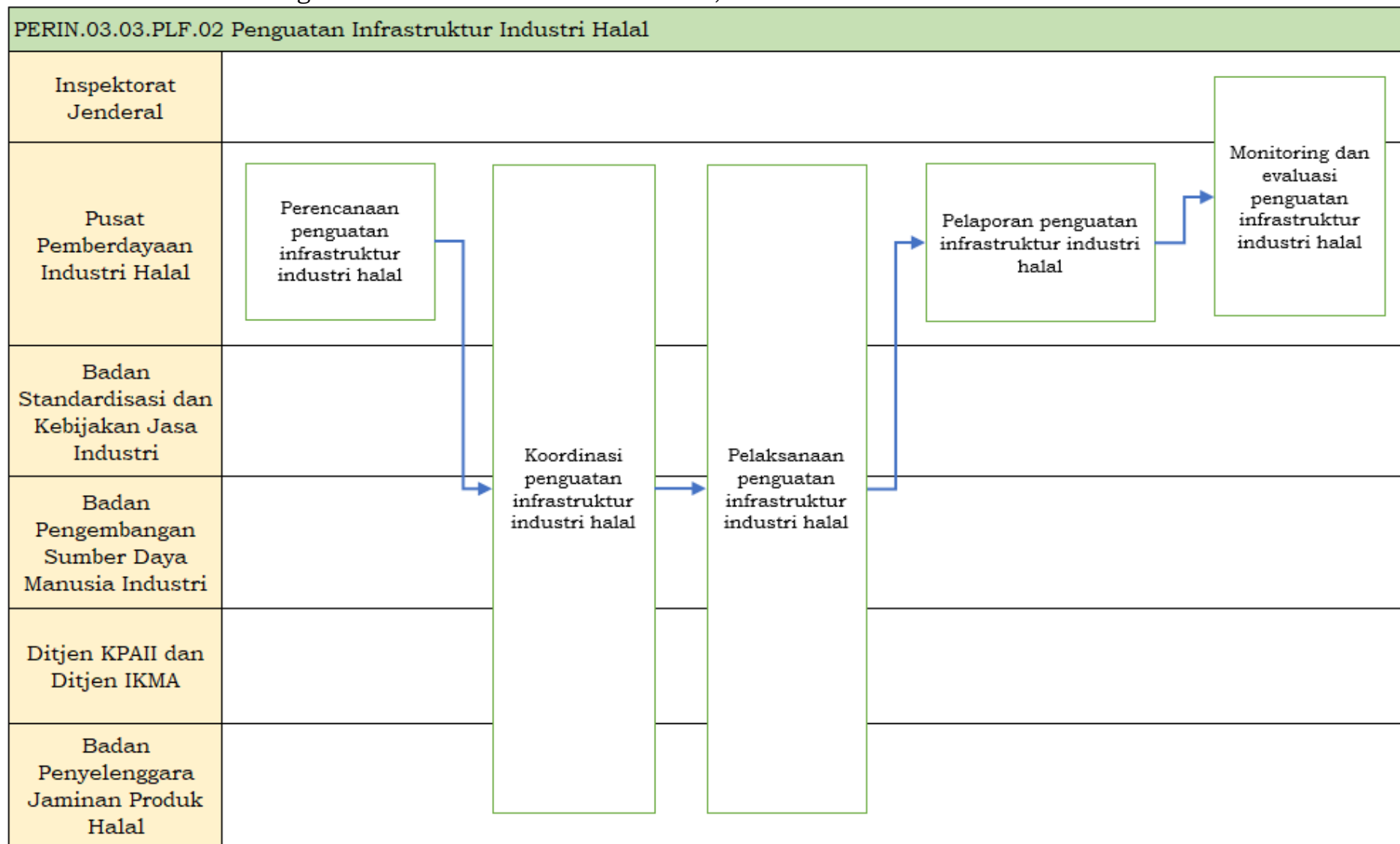


10. Sub-proses PERIN.03.03 Pemberdayaan Industri Halal terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:

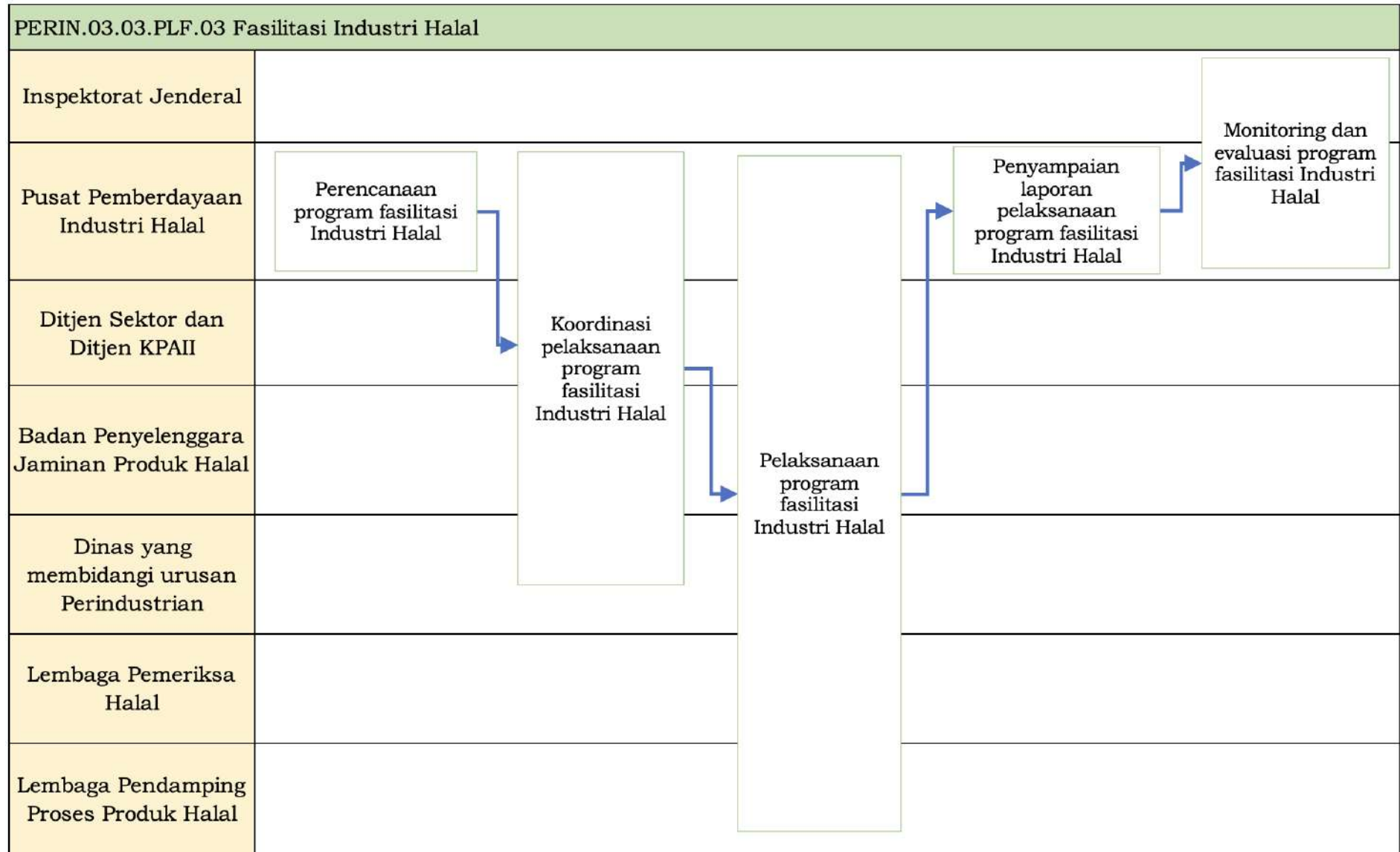
a. PERIN.03.03.PLF.01 Perumusan Regulasi dan Kebijakan Teknis Industri Halal;



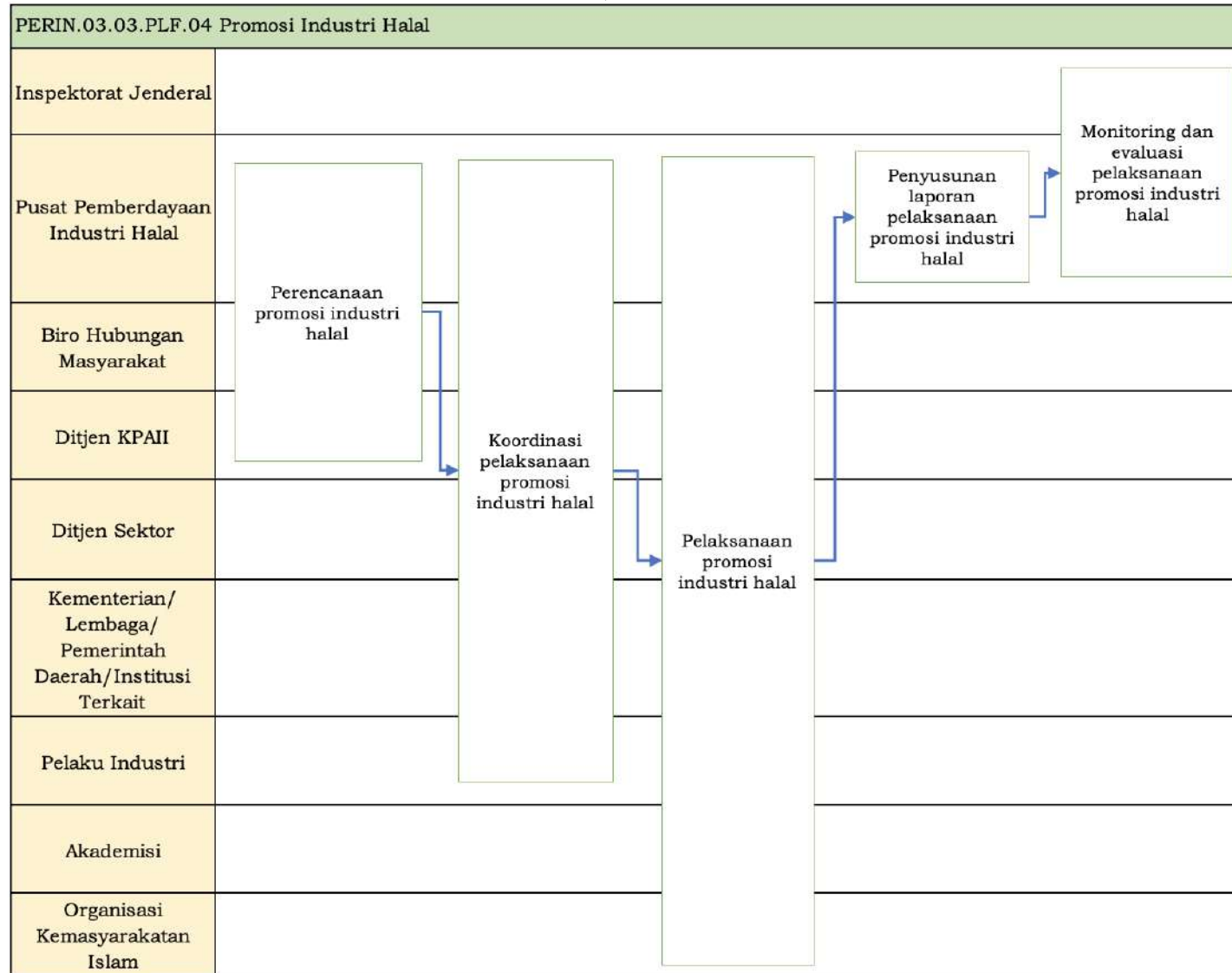
b. PERIN.03.03.PLF.02 Penguatan Infrastruktur Industri Halal;



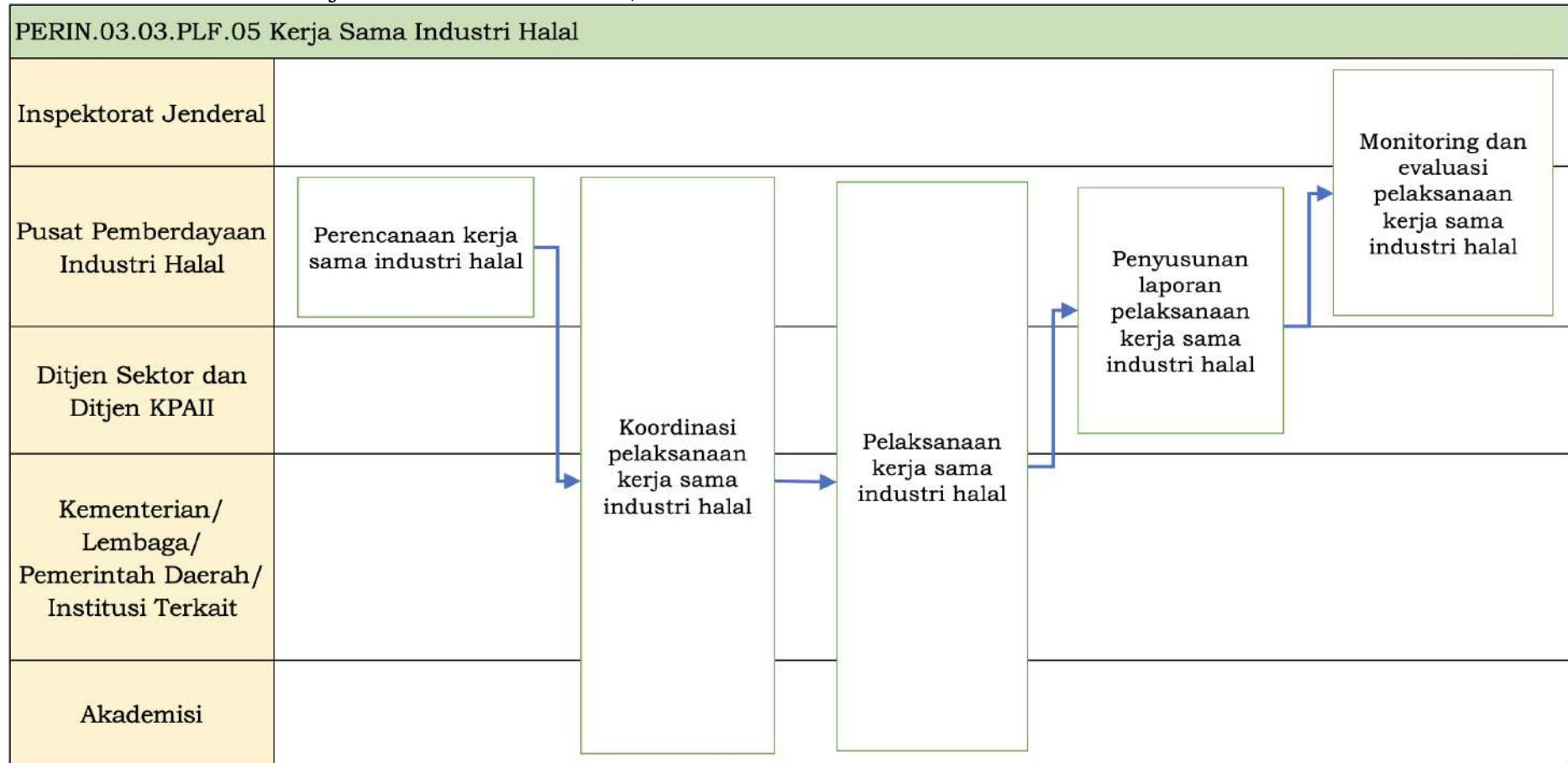
c. PERIN.03.03.PLF.03 Fasilitas Industri Halal;



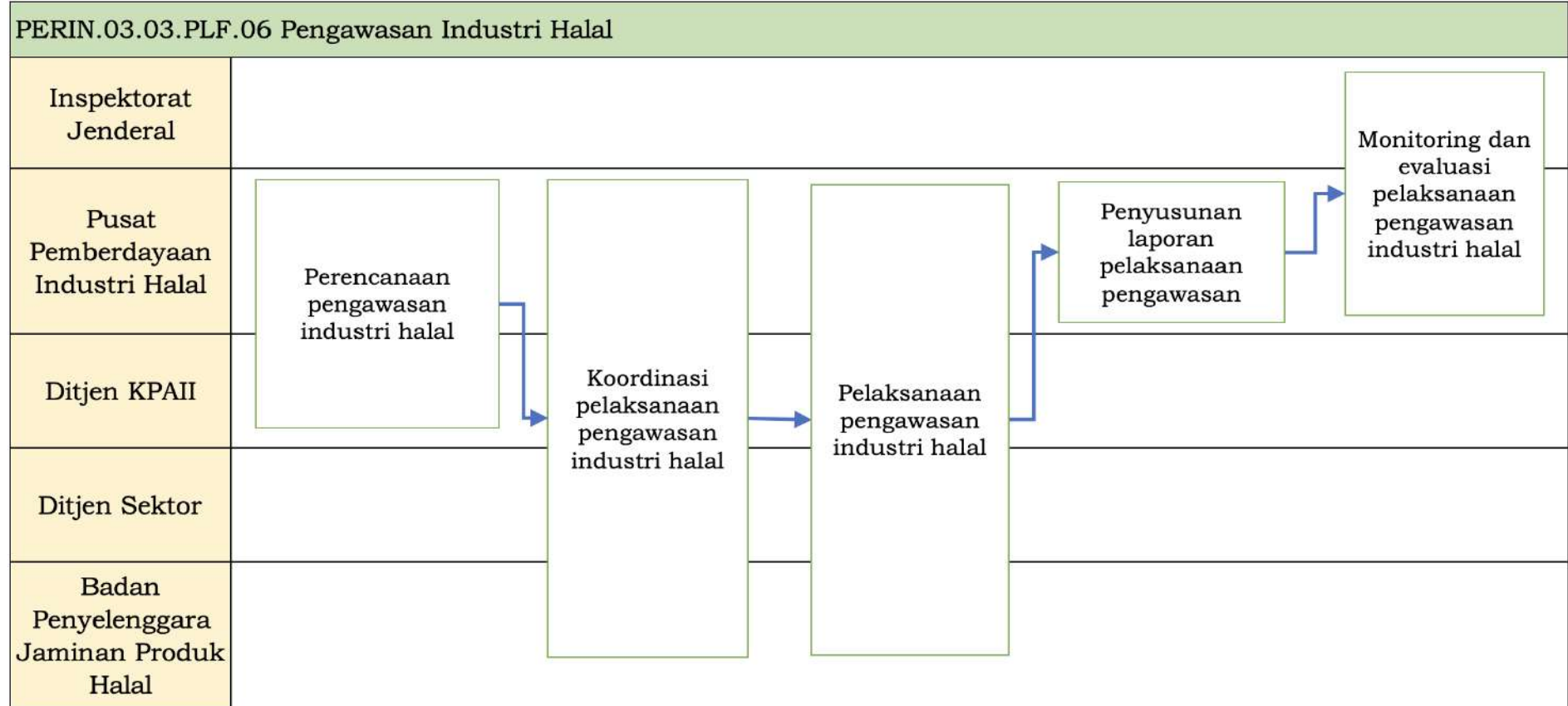
d. PERIN.03.03.PLF.04 Promosi Industri Halal;



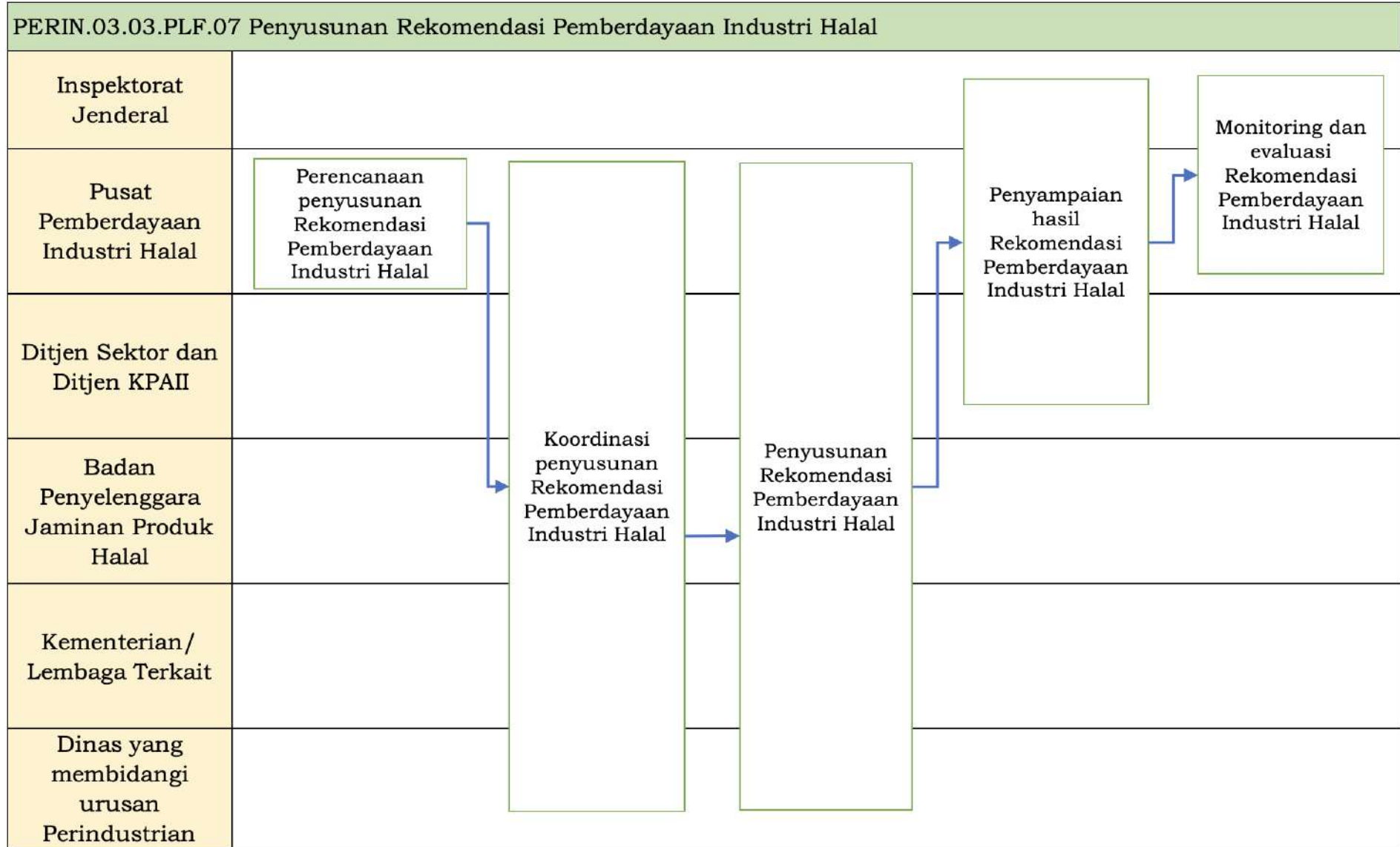
e. PERIN.03.03.PLF.05 Kerja Sama Industri Halal;



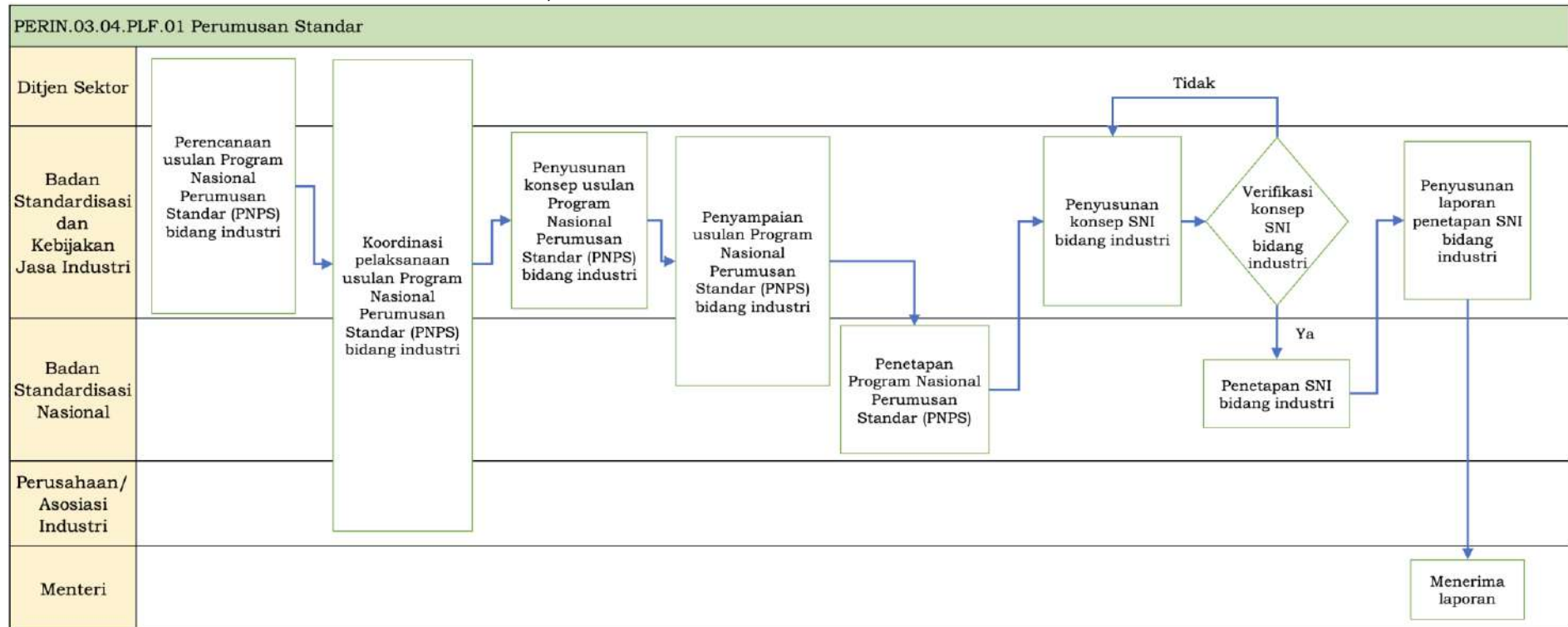
f. PERIN.03.03.PLF.06 Pengawasan Industri Halal; dan



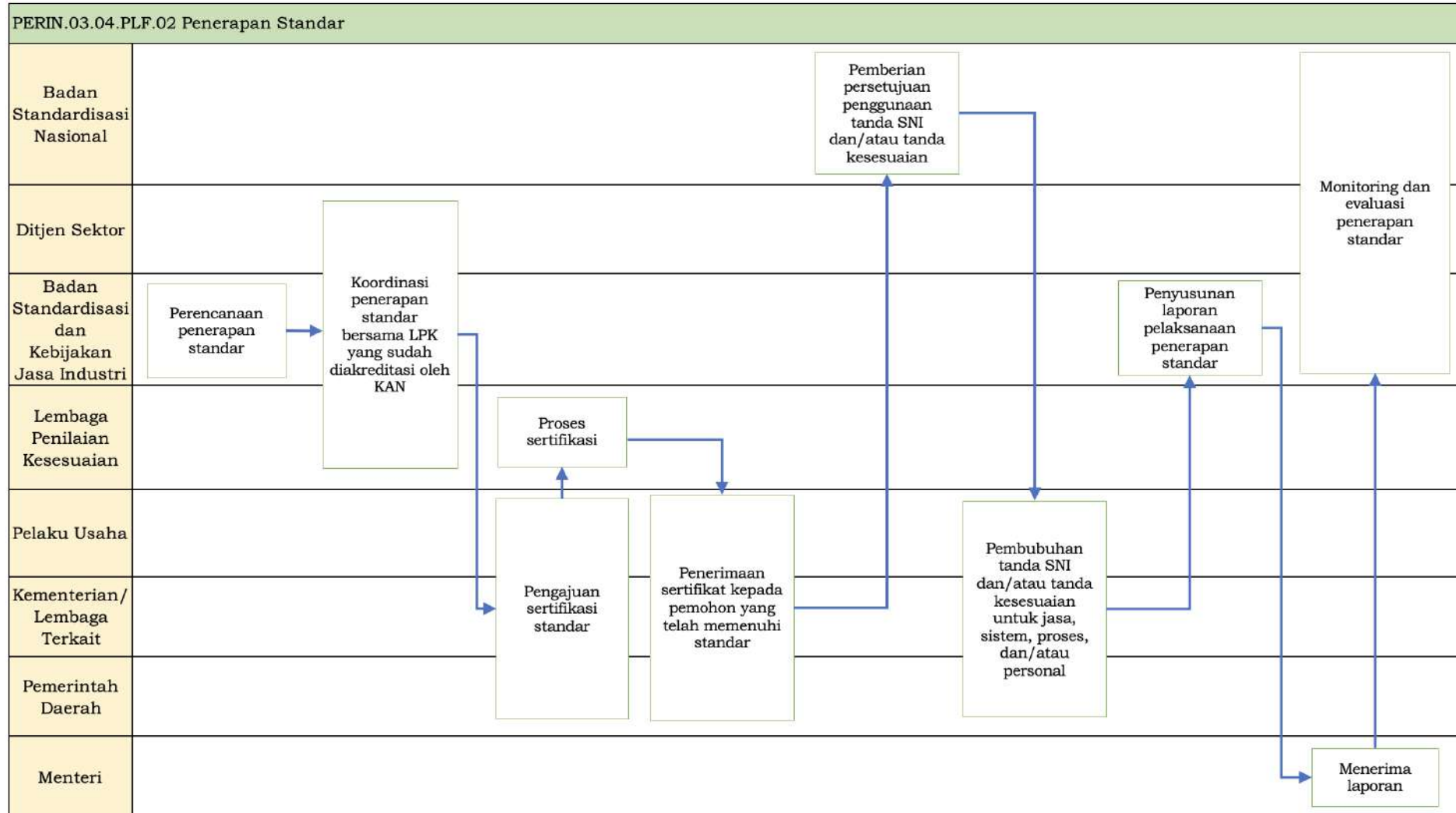
g. PERIN.03.03.PLF.07 Penyusunan Rekomendasi Pemberdayaan Industri Halal.



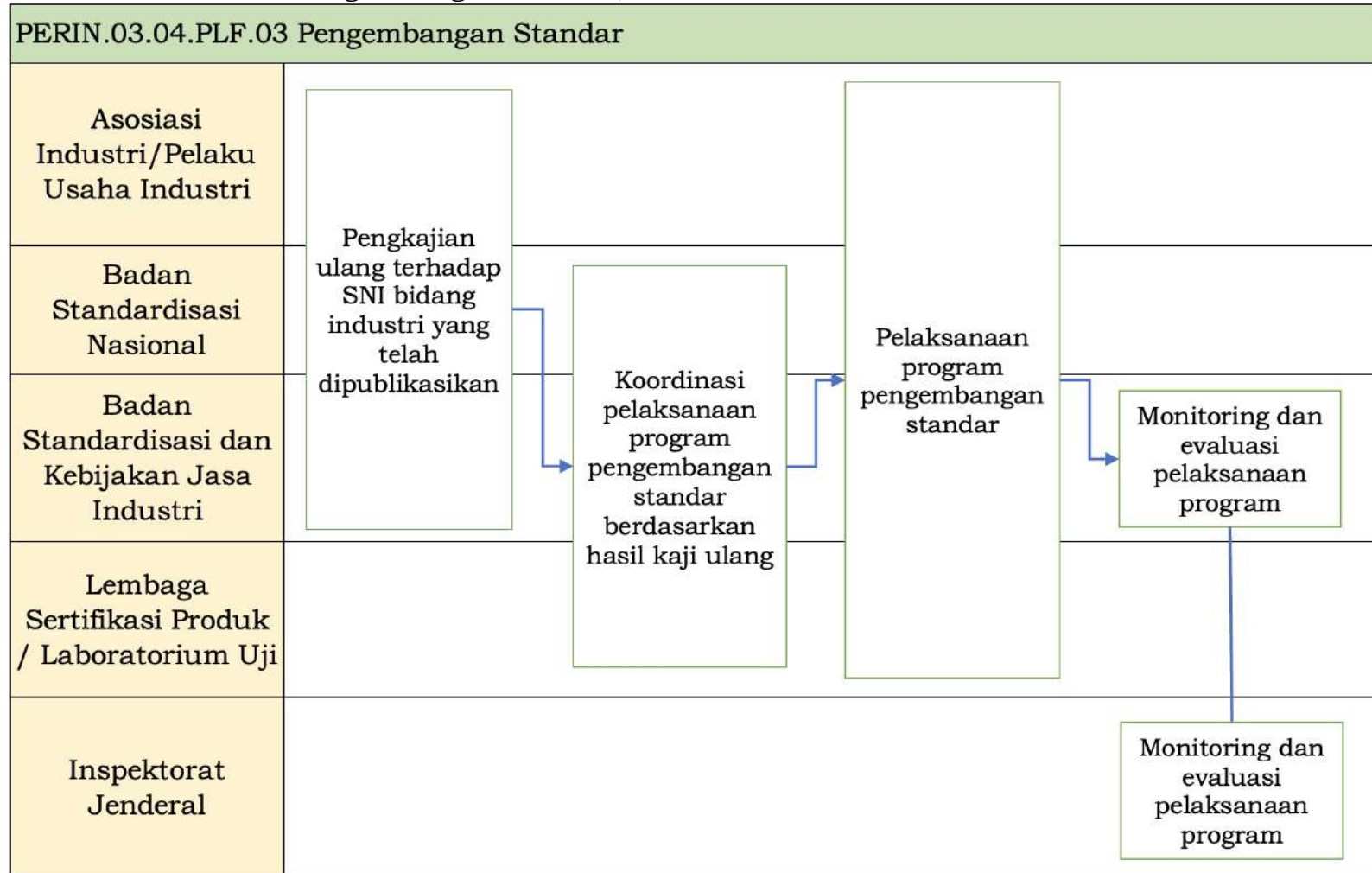
11. Sub-proses PERIN.03.04 Pengembangan Standardisasi Industri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:
a. PERIN.03.04.PLF.01 Perumusan Standar;



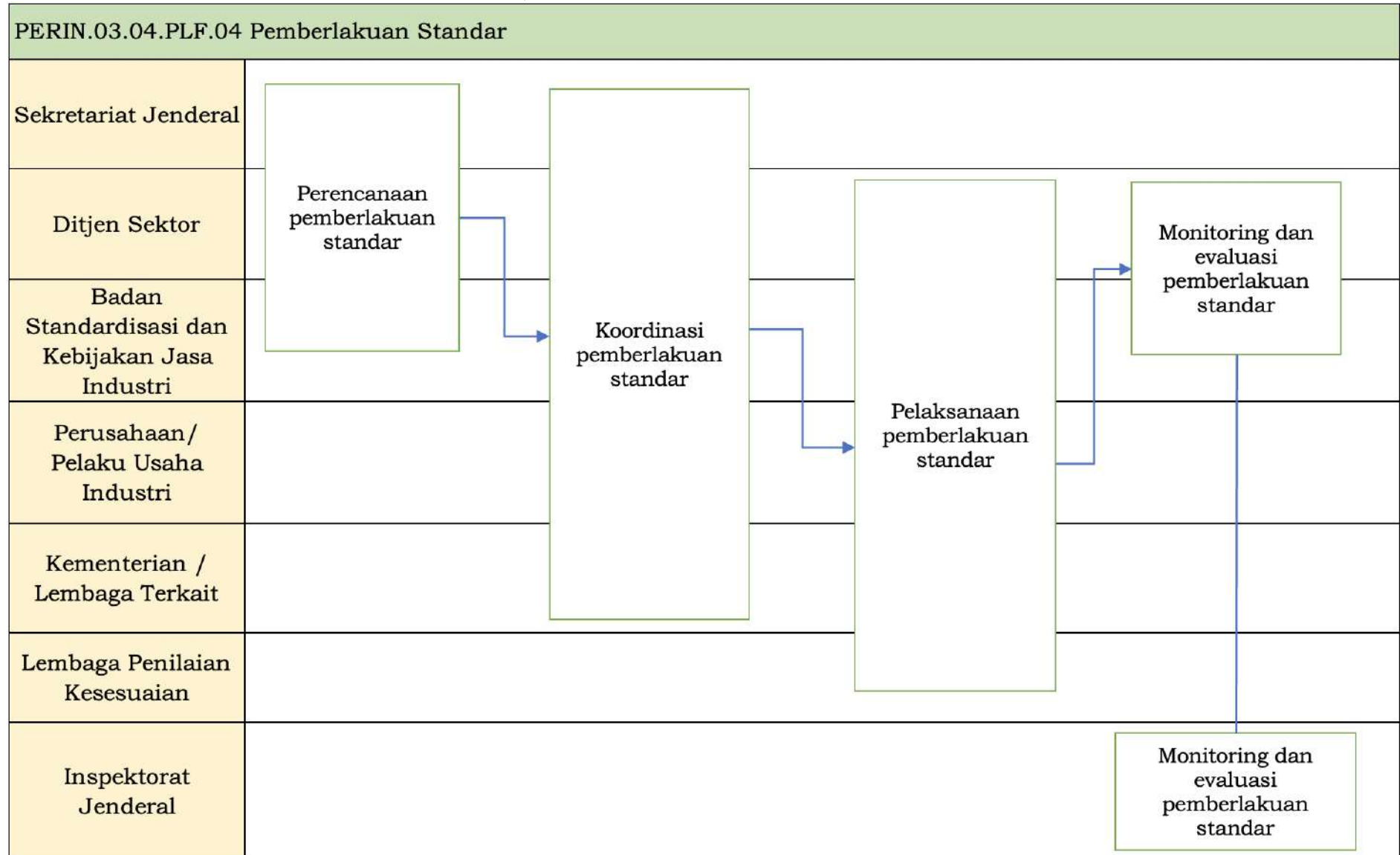
b. PERIN.03.04.PLF.02 Penerapan Standar;



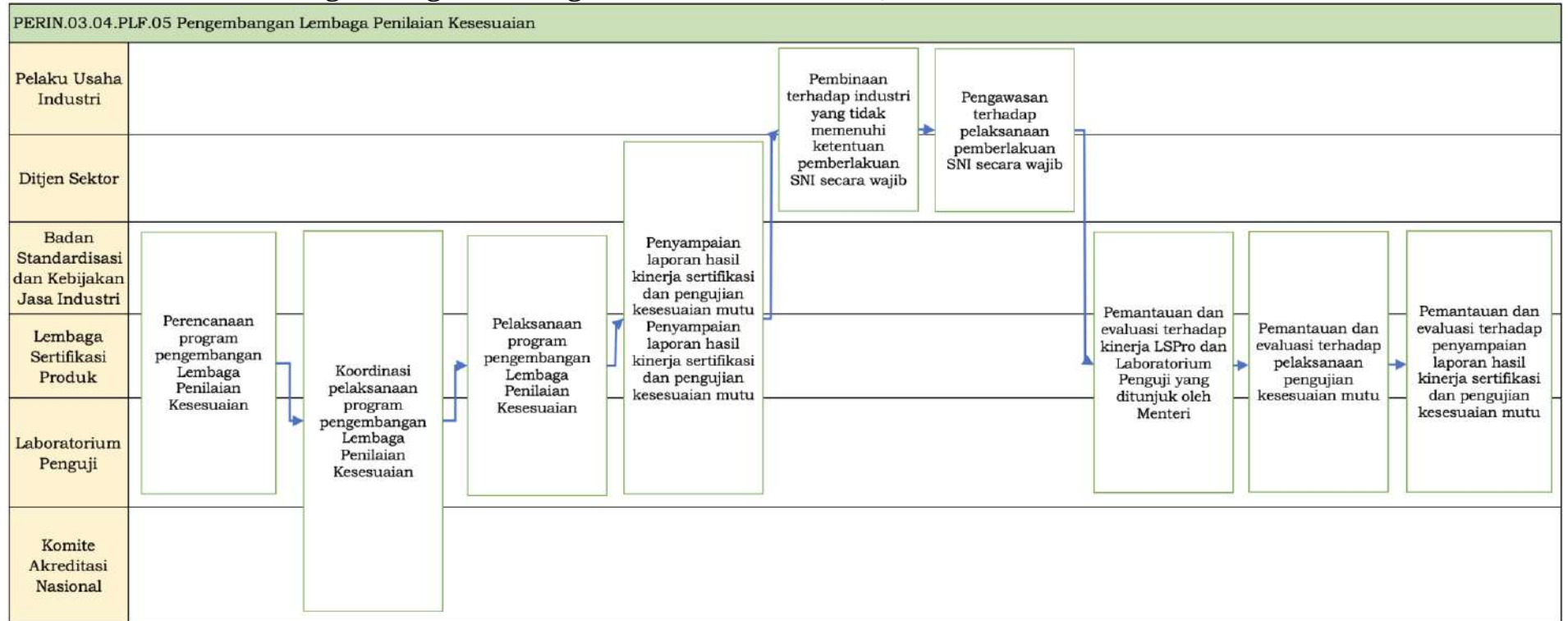
c. PERIN.03.04.PLF.03 Pengembangan Standar;



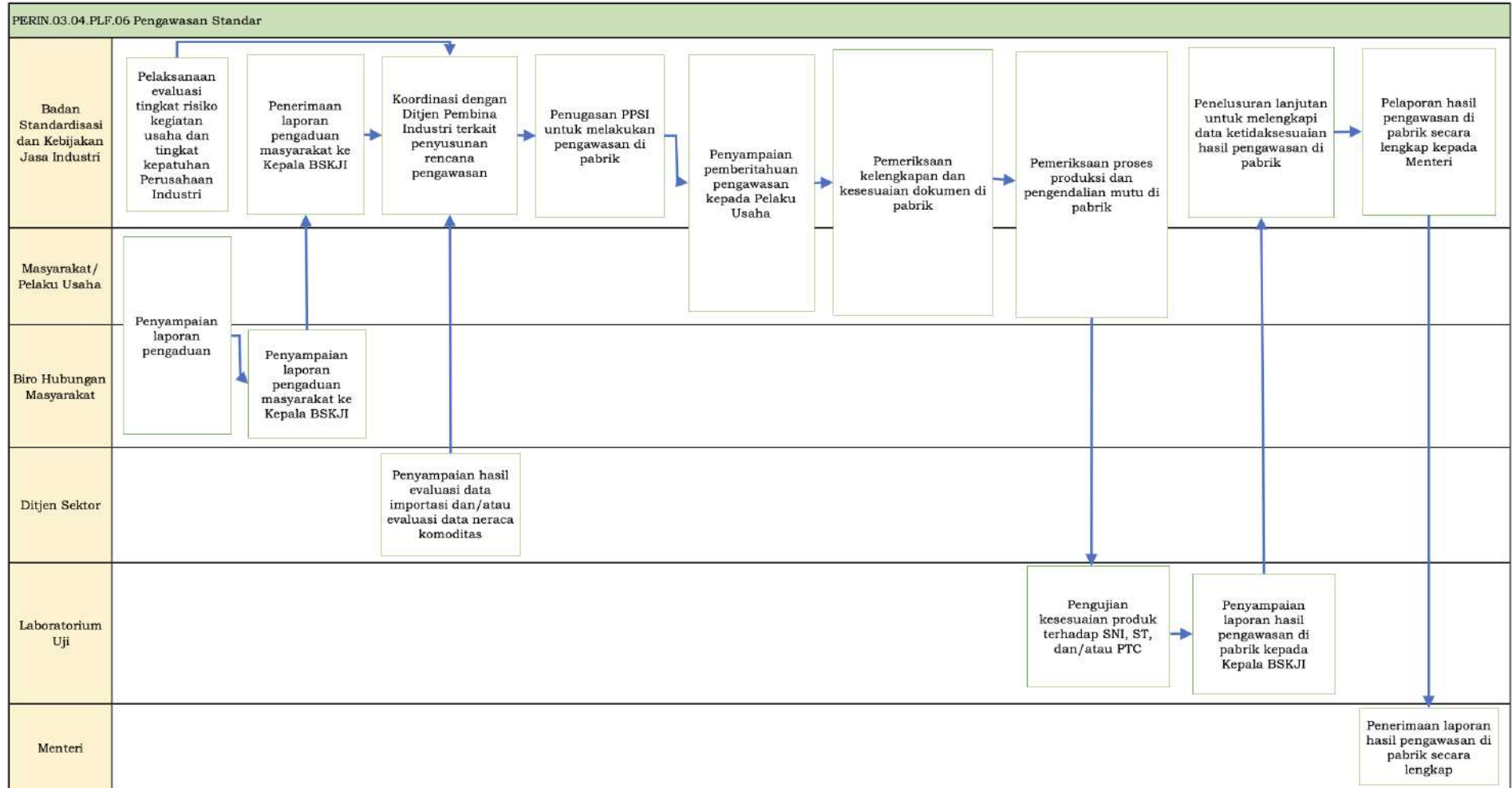
d. PERIN.03.04.PLF.04 Pemberlakuan Standar;



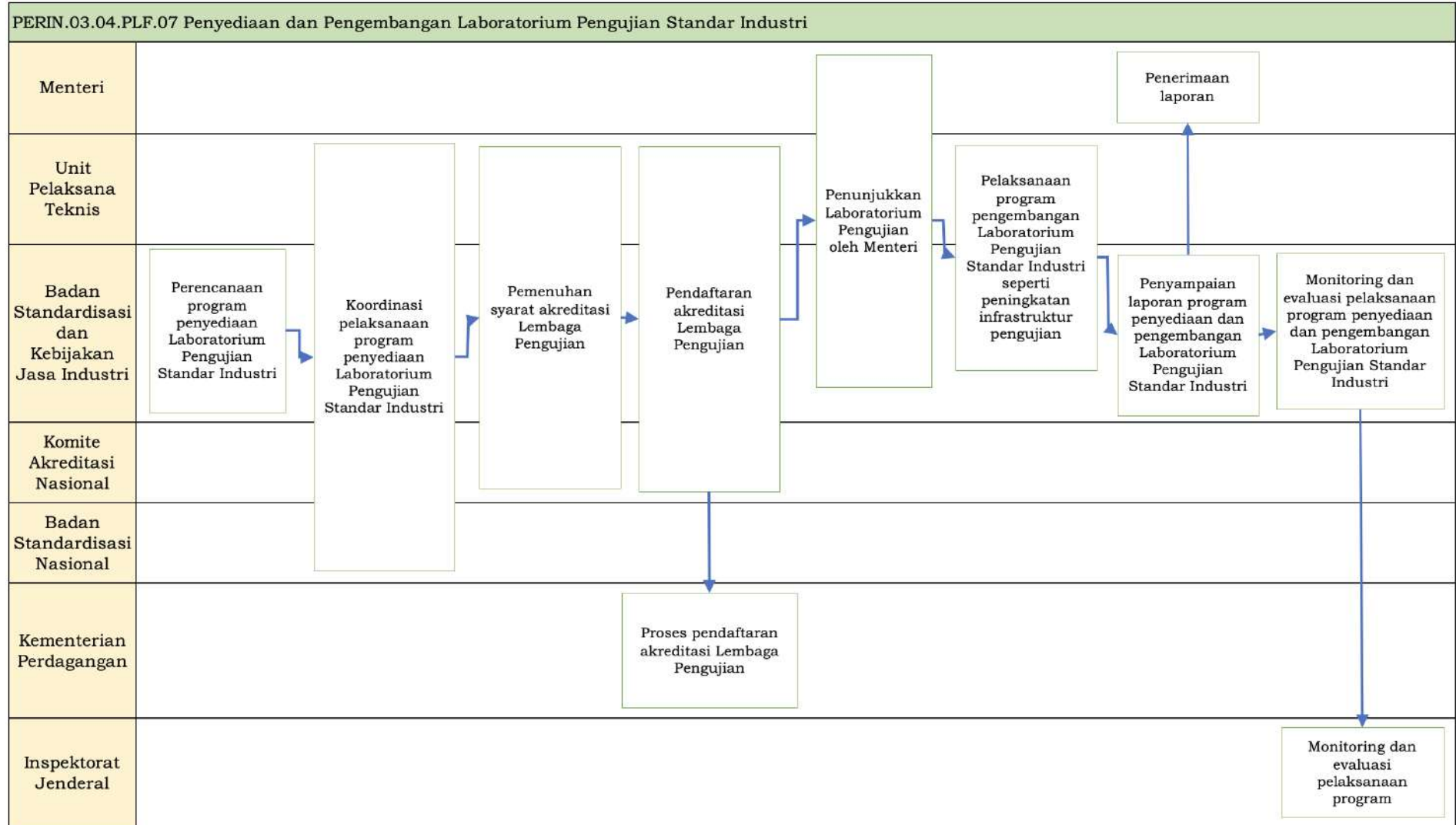
e. PERIN.03.04.PLF.05 Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian;



f. PERIN.03.04.PLF.06 Pengawasan Standar; dan

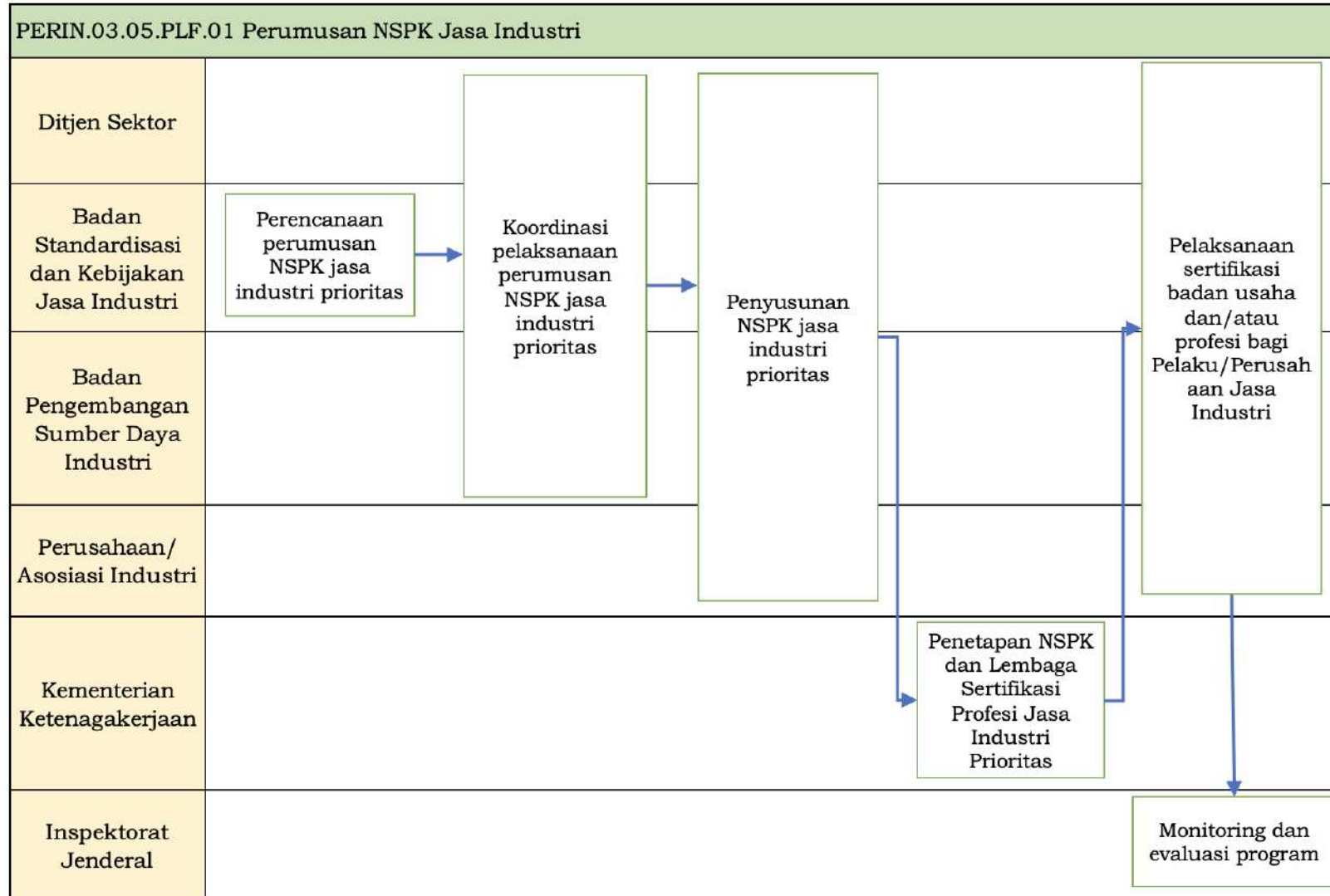


g. PERIN.03.04.PLF.07 Penyediaan dan Pengembangan Laboratorium Pengujian Standar Industri.

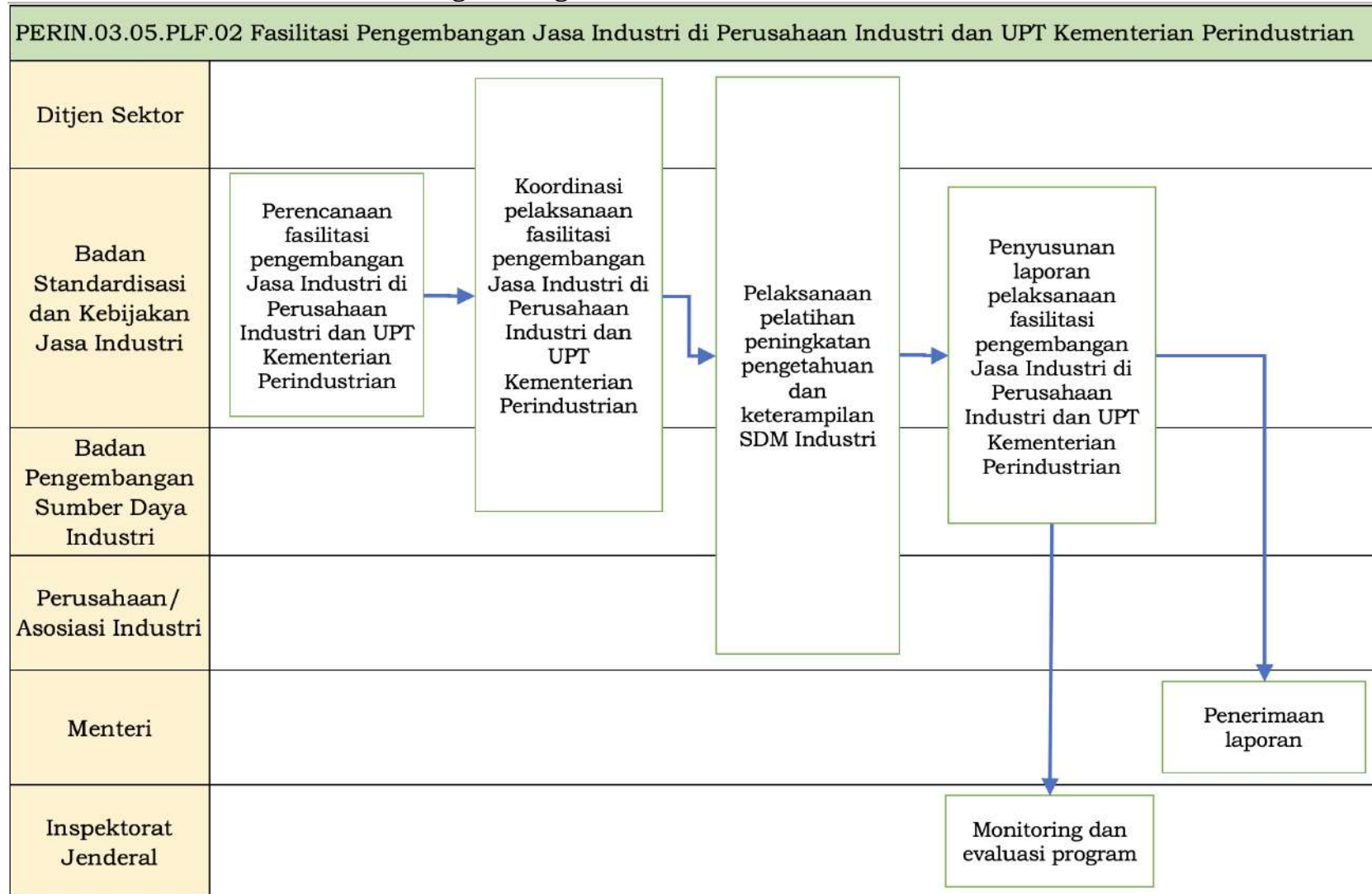


12. Sub-proses PERIN.03.05 Peningkatan Kemampuan Perusahaan Jasa Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.03.05.PLF.01 Perumusan NSPK Jasa Industri; dan

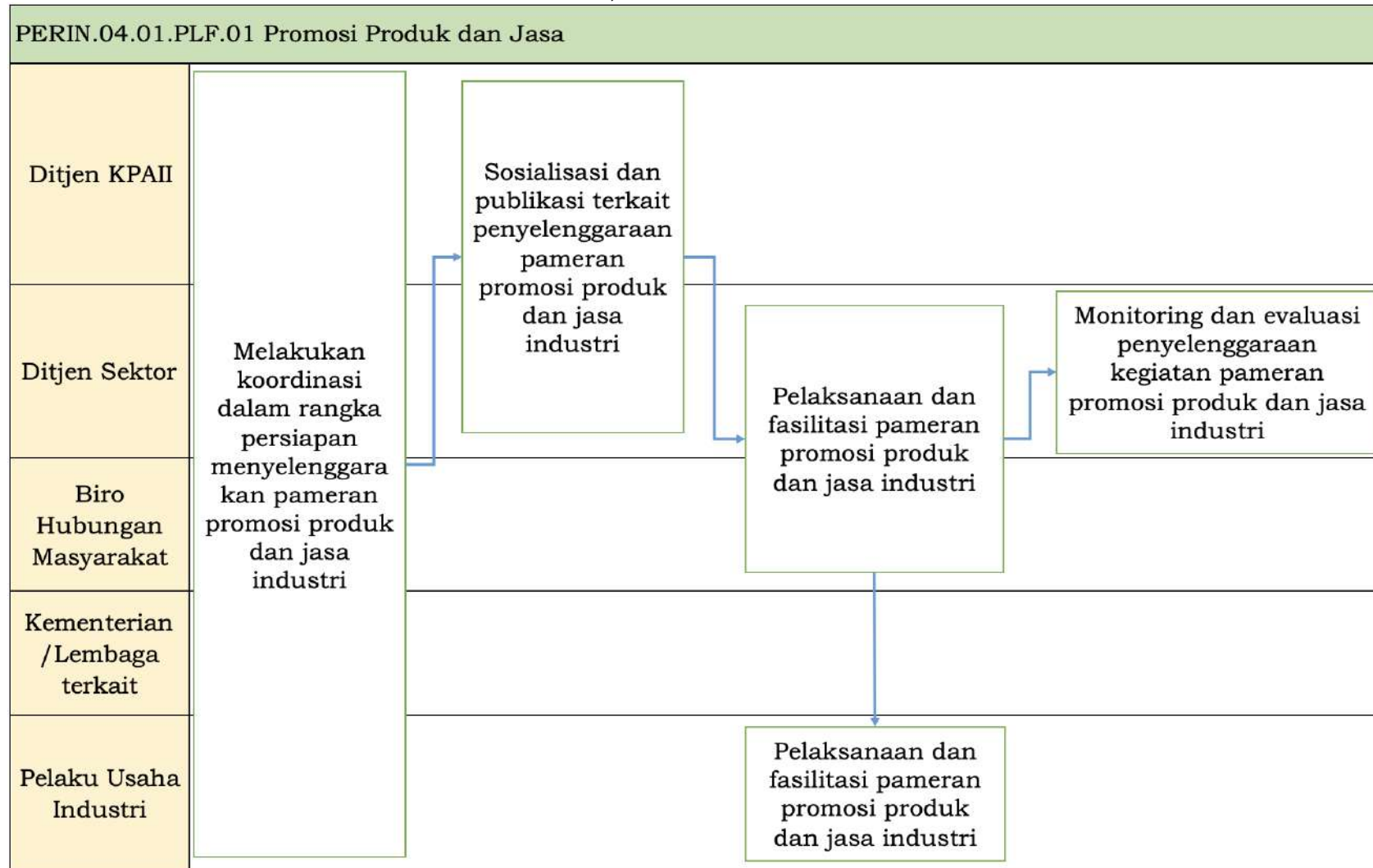


b. PERIN.03.05.PLF.02 Fasilitas Pengembangan Jasa Industri di Perusahaan Industri dan UPT Kementerian Perindustrian.

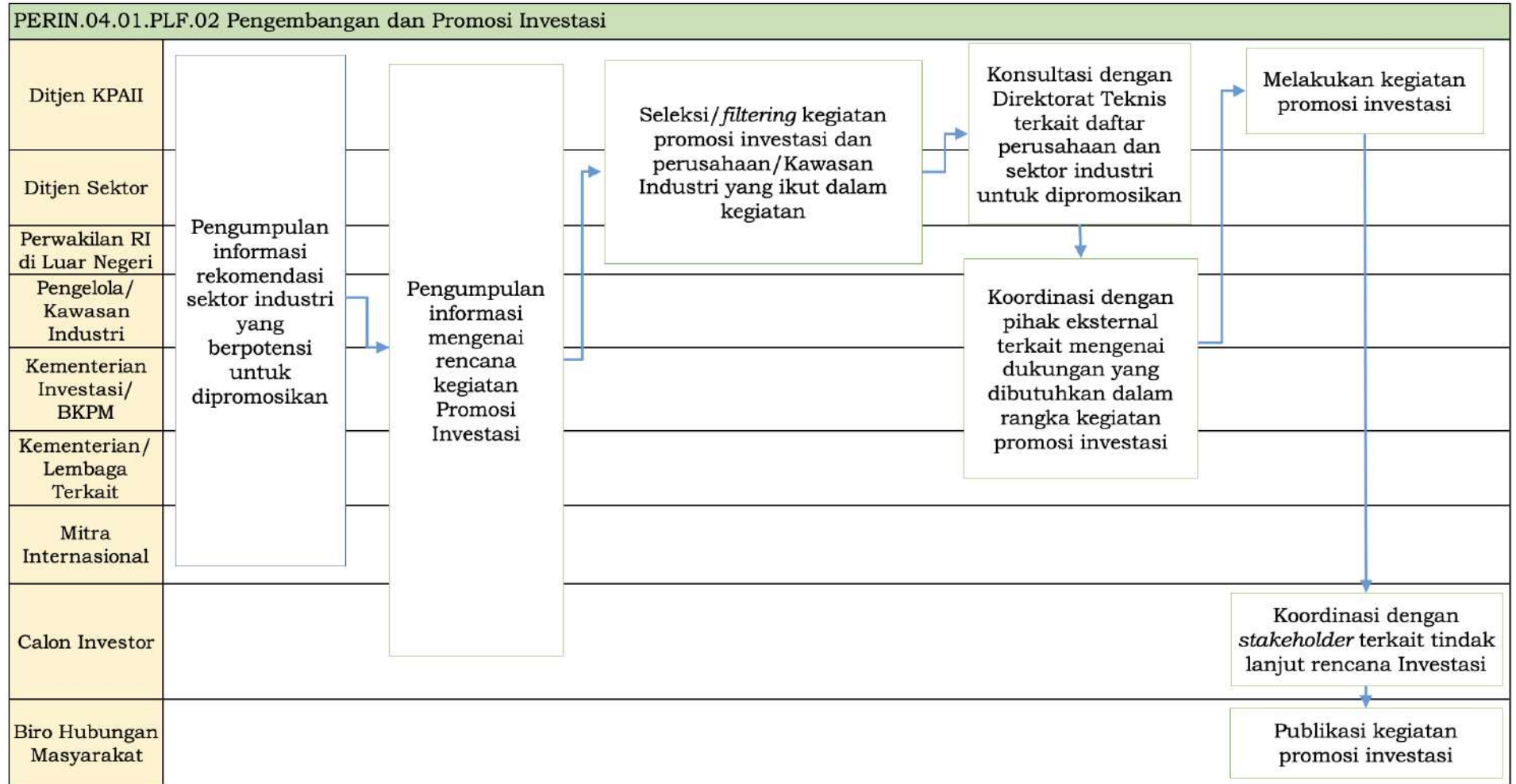


13. Sub-proses PERIN.04.01 Promosi Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:

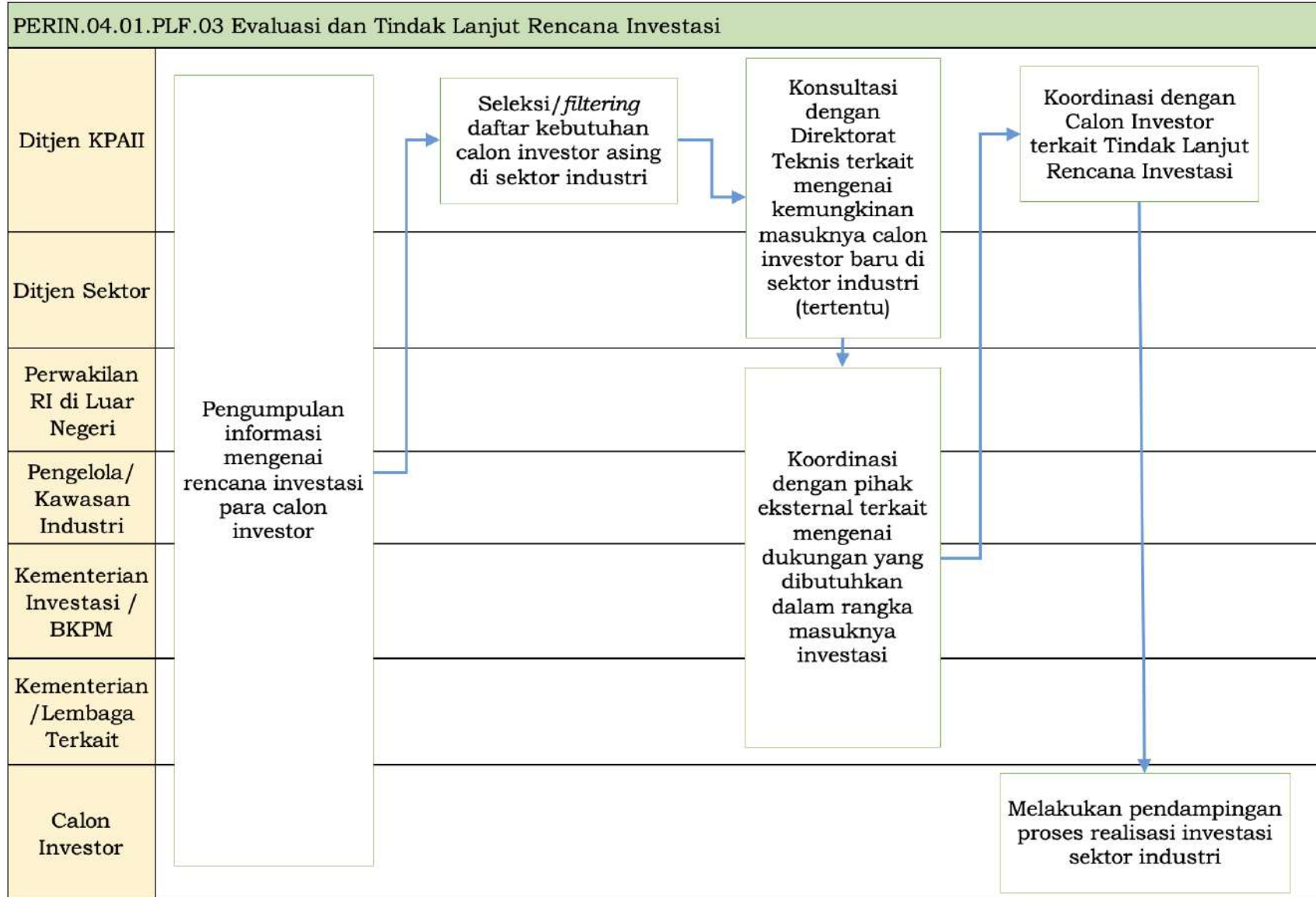
a. PERIN.04.01.PLF.01 Promosi Produk dan Jasa;



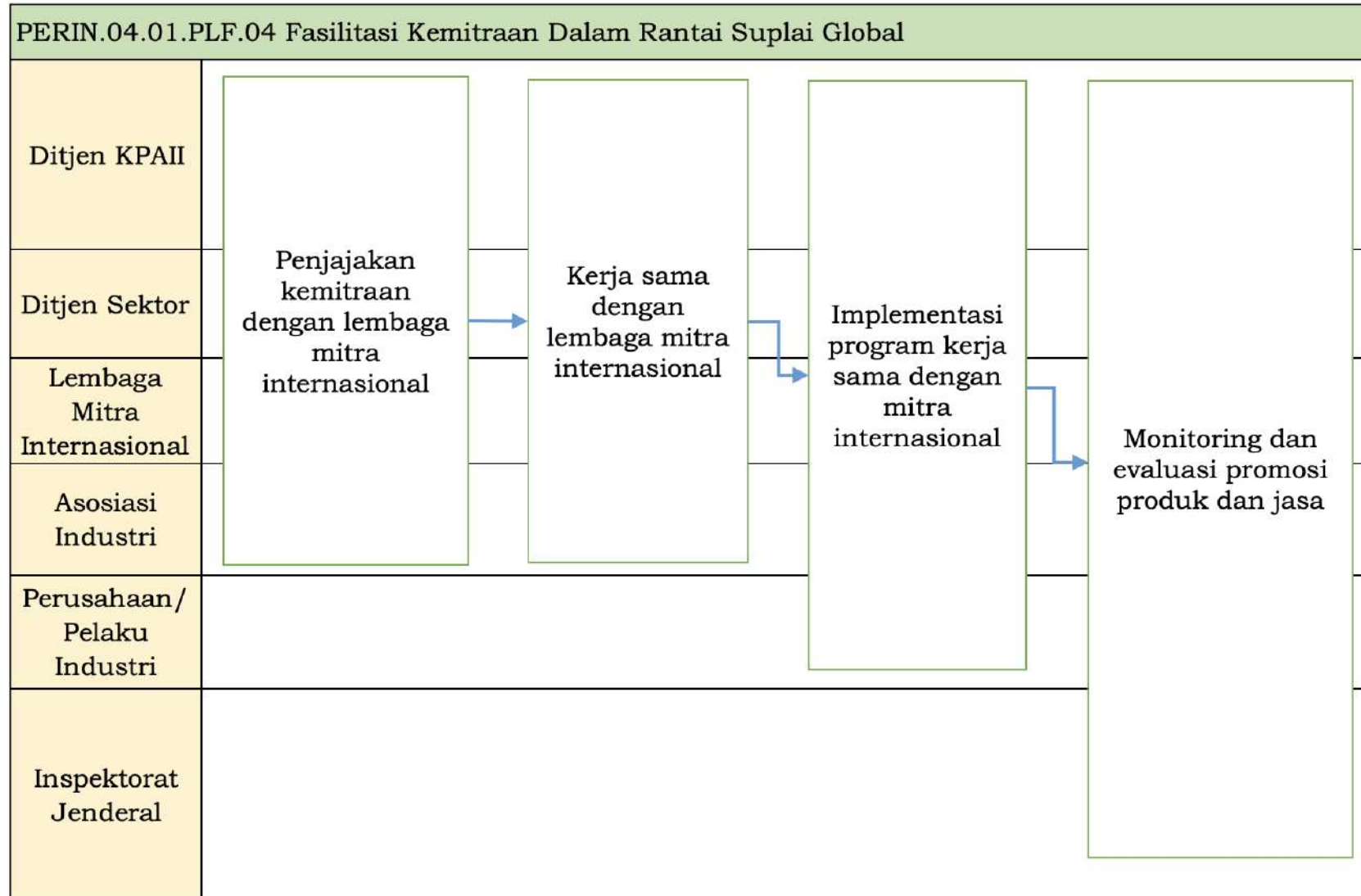
b. PERIN.04.01.PLF.02 Pengembangan dan Promosi Investasi;



c. PERIN.04.01.PLF.03 Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Investasi; dan

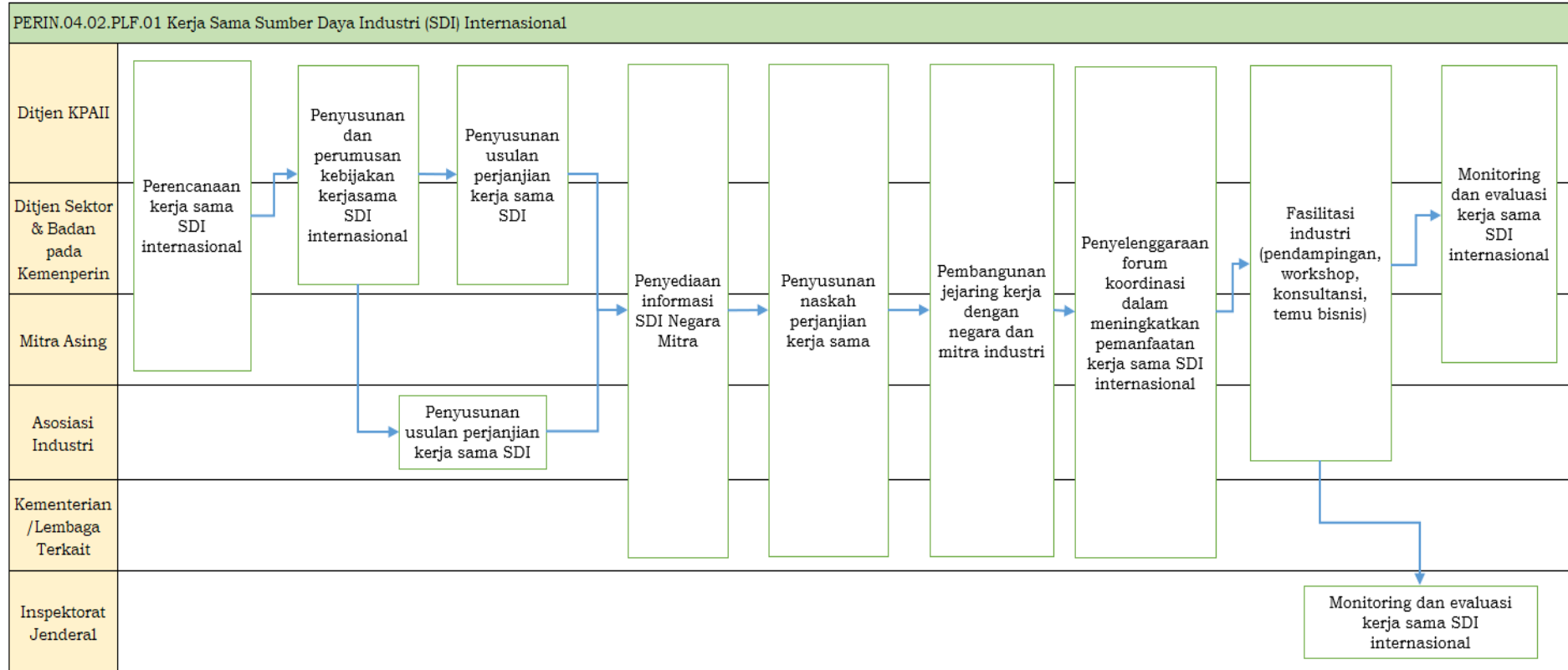


d. PERIN.04.01.PLF.04 Fasilitas Kemitraan Dalam Rantai Suplai Global.

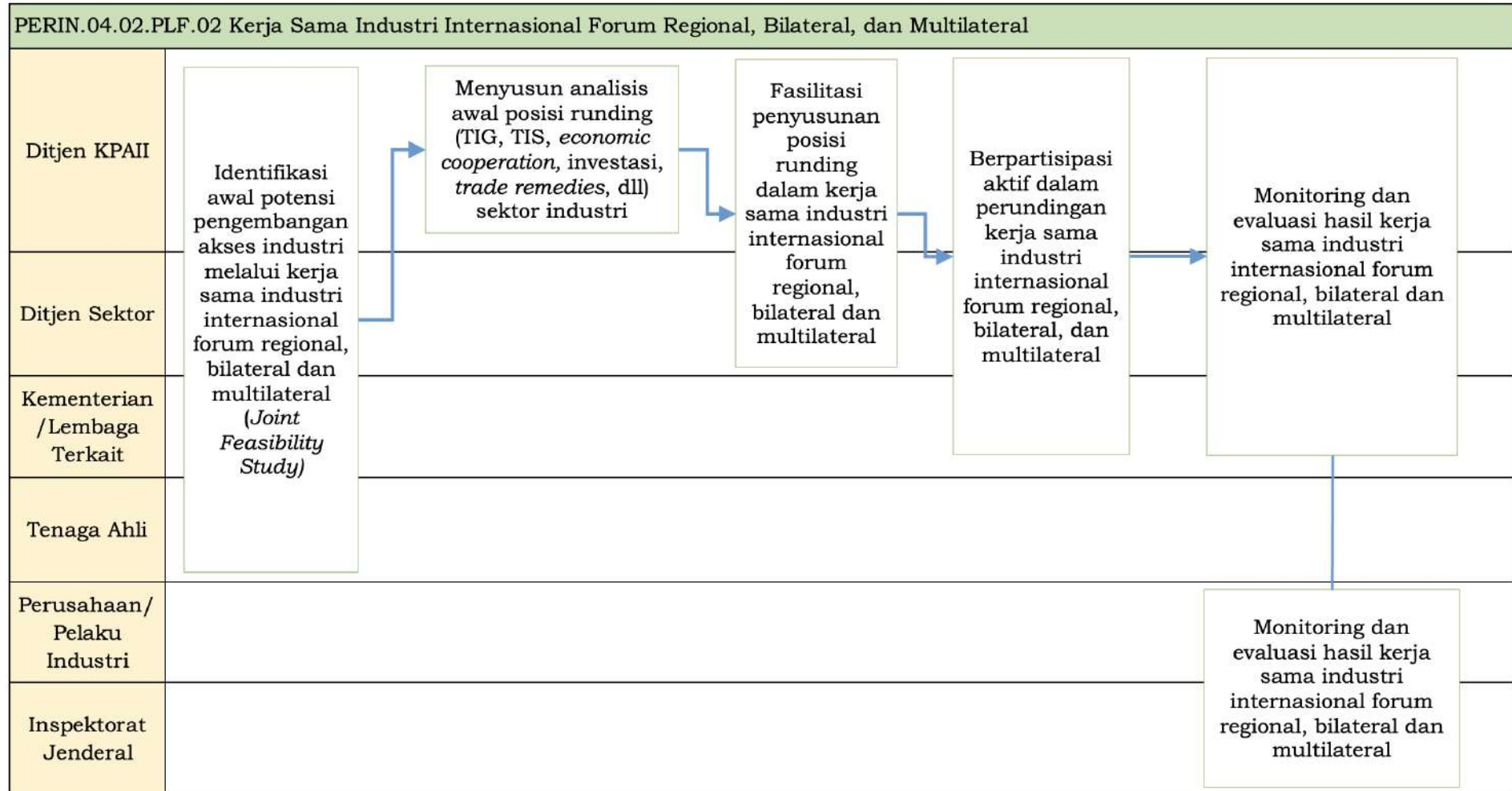


14. Sub-proses PERIN.04.02 Kerja Sama Internasional terdiri atas 5 (lima) peta lintas fungsi sebagai berikut:

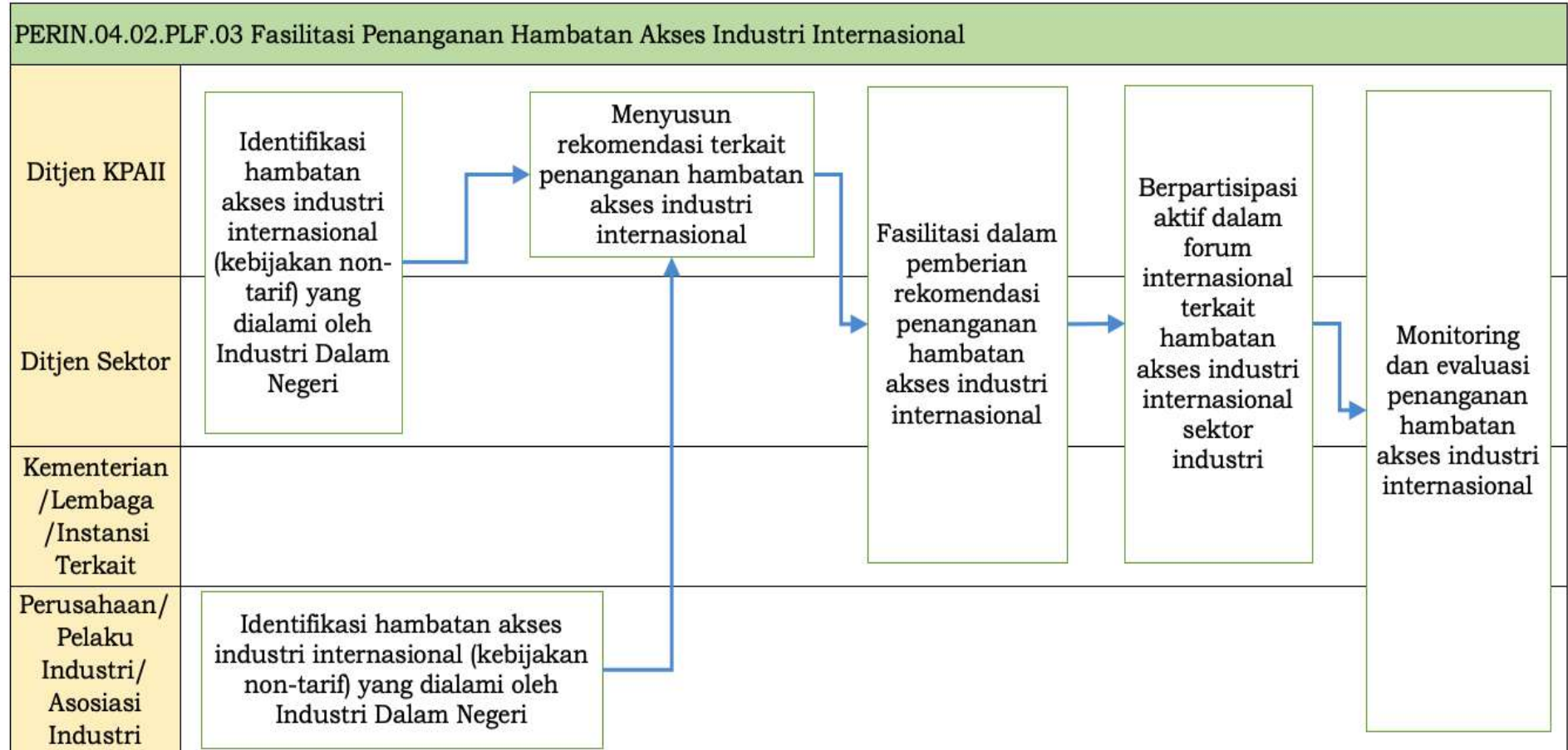
a. PERIN.04.02.PLF.01 Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Internasional;



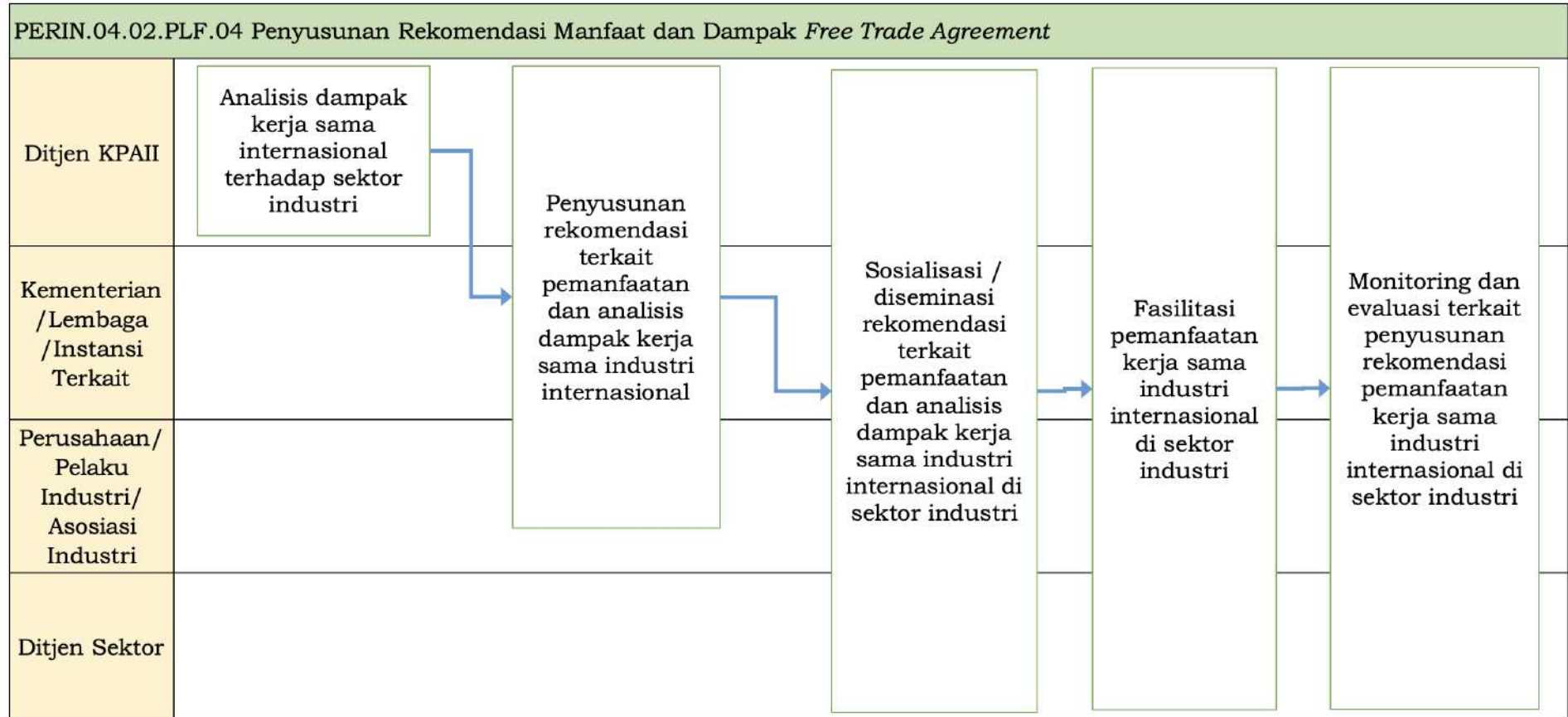
b. PERIN.04.02.PLF.02 Kerja Sama Industri Internasional Forum Regional, Bilateral, dan Multilateral;



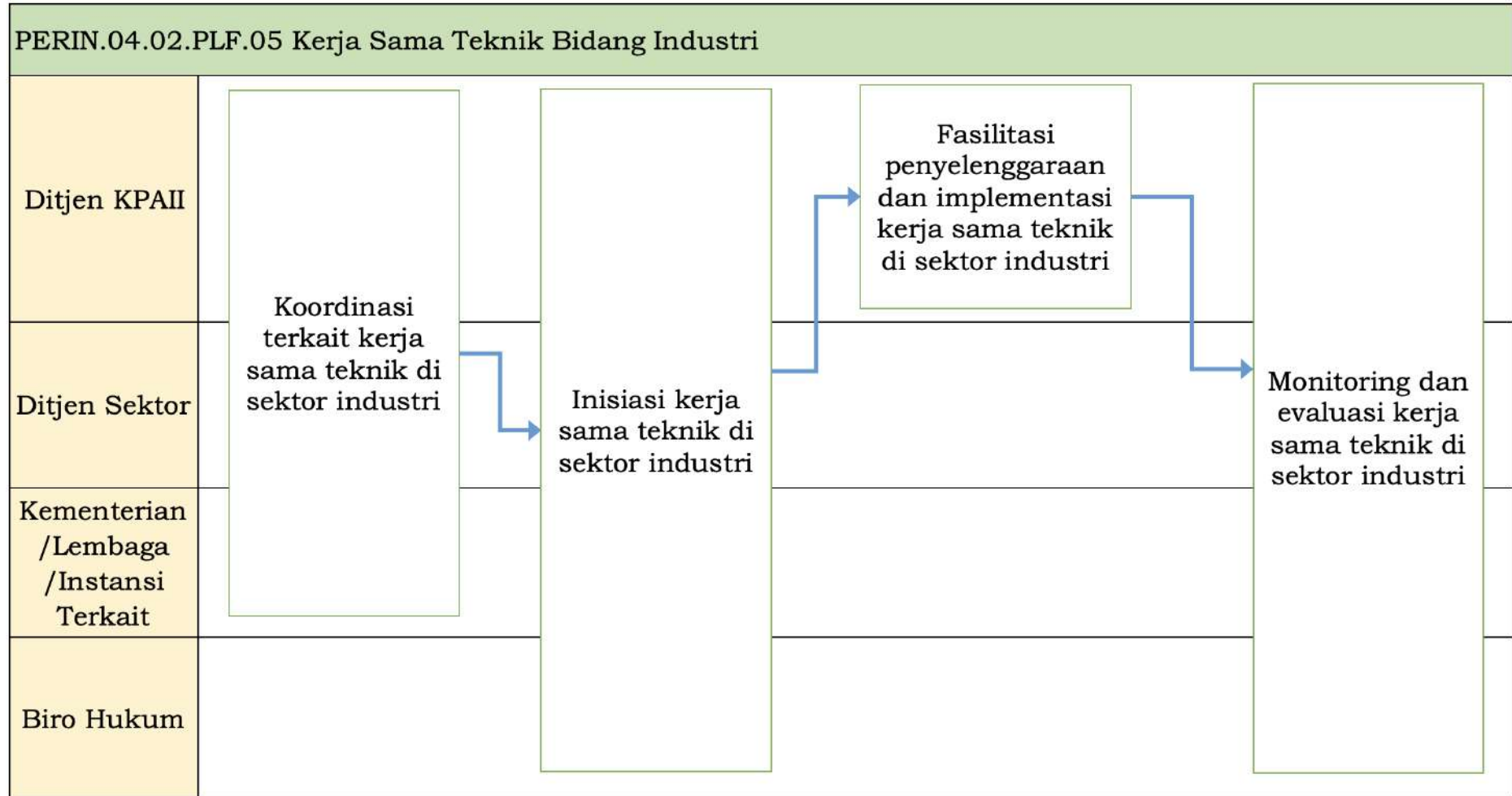
c. PERIN.04.02.PLF.03 Fasilitasi Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional;



d. PERIN.04.02.PLF.04 Penyusunan Rekomendasi Manfaat dan Dampak *Free Trade Agreement*; dan

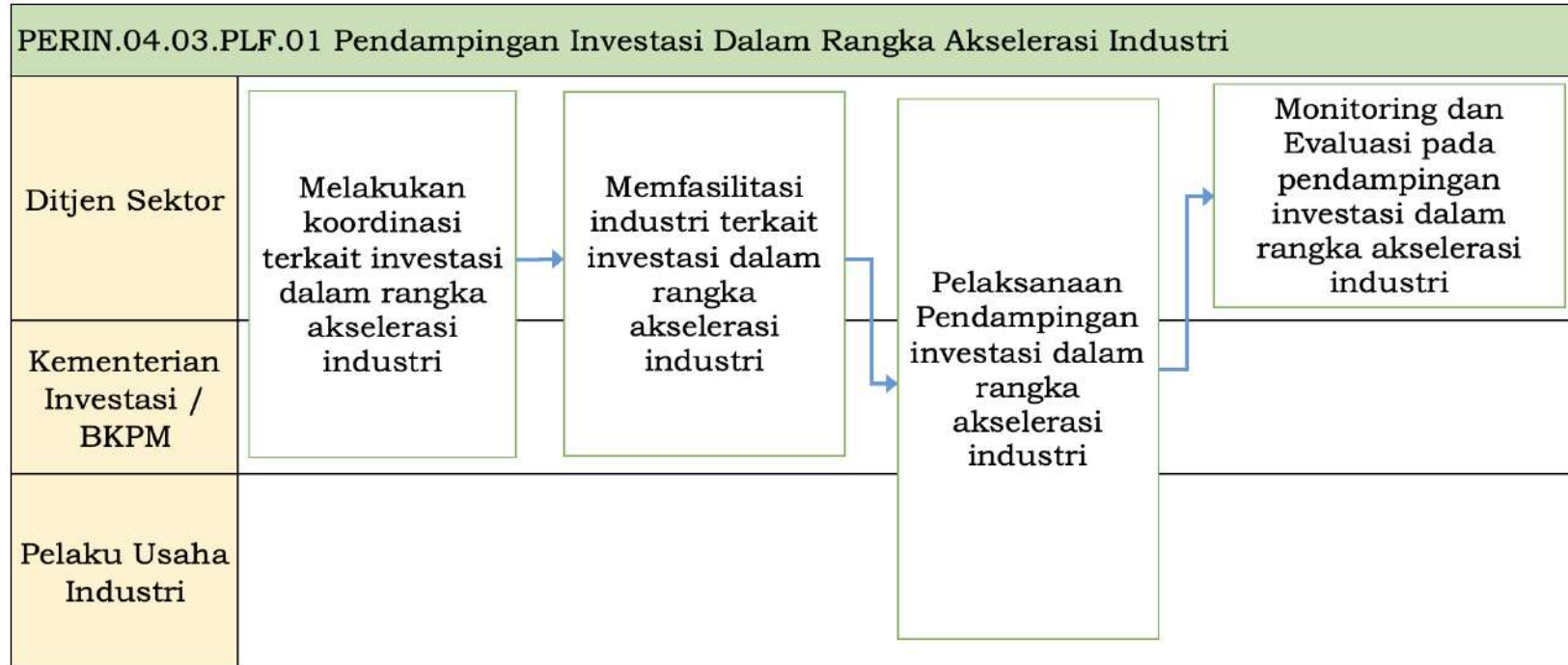


e. PERIN.04.02.PLF.05 Kerja Sama Teknik Bidang Industri.

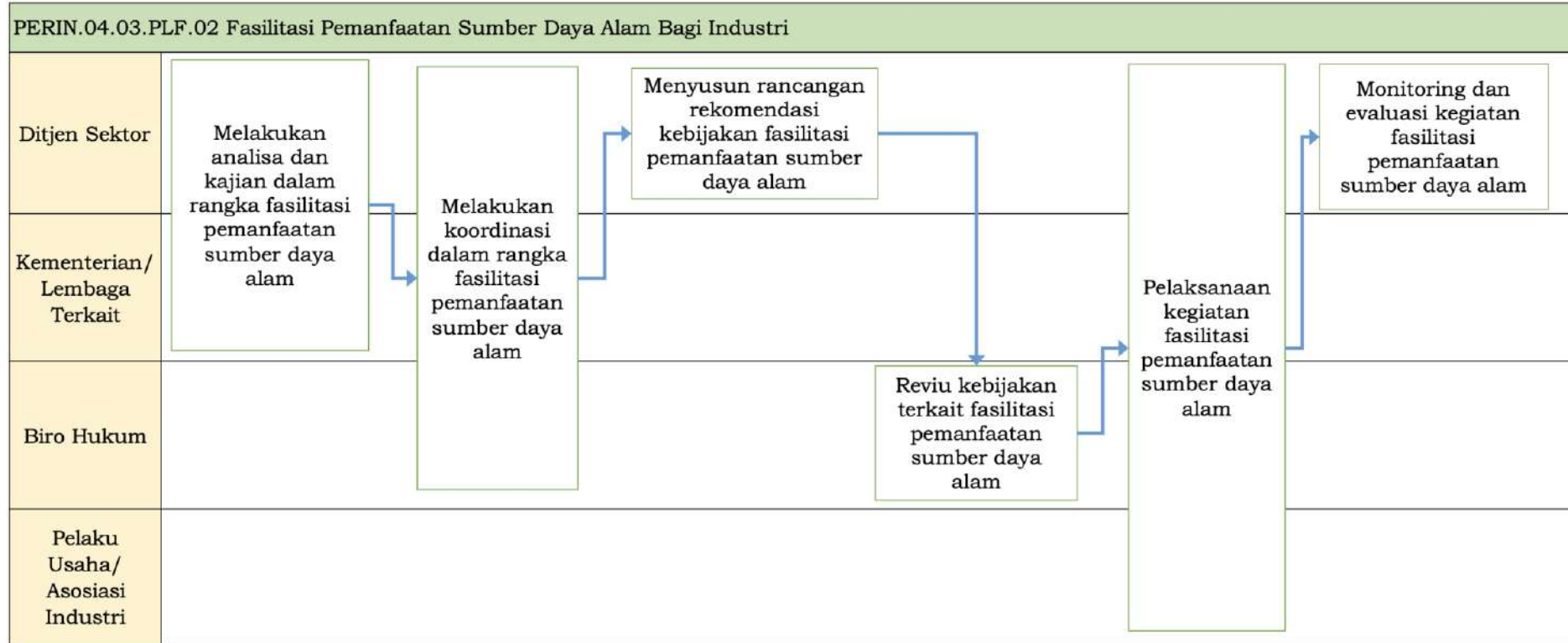


15. Sub-proses PERIN.04.03 Hilirisasi Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.04.03.PLF.01 Pendampingan Investasi Dalam Rangka Akselerasi Industri; dan

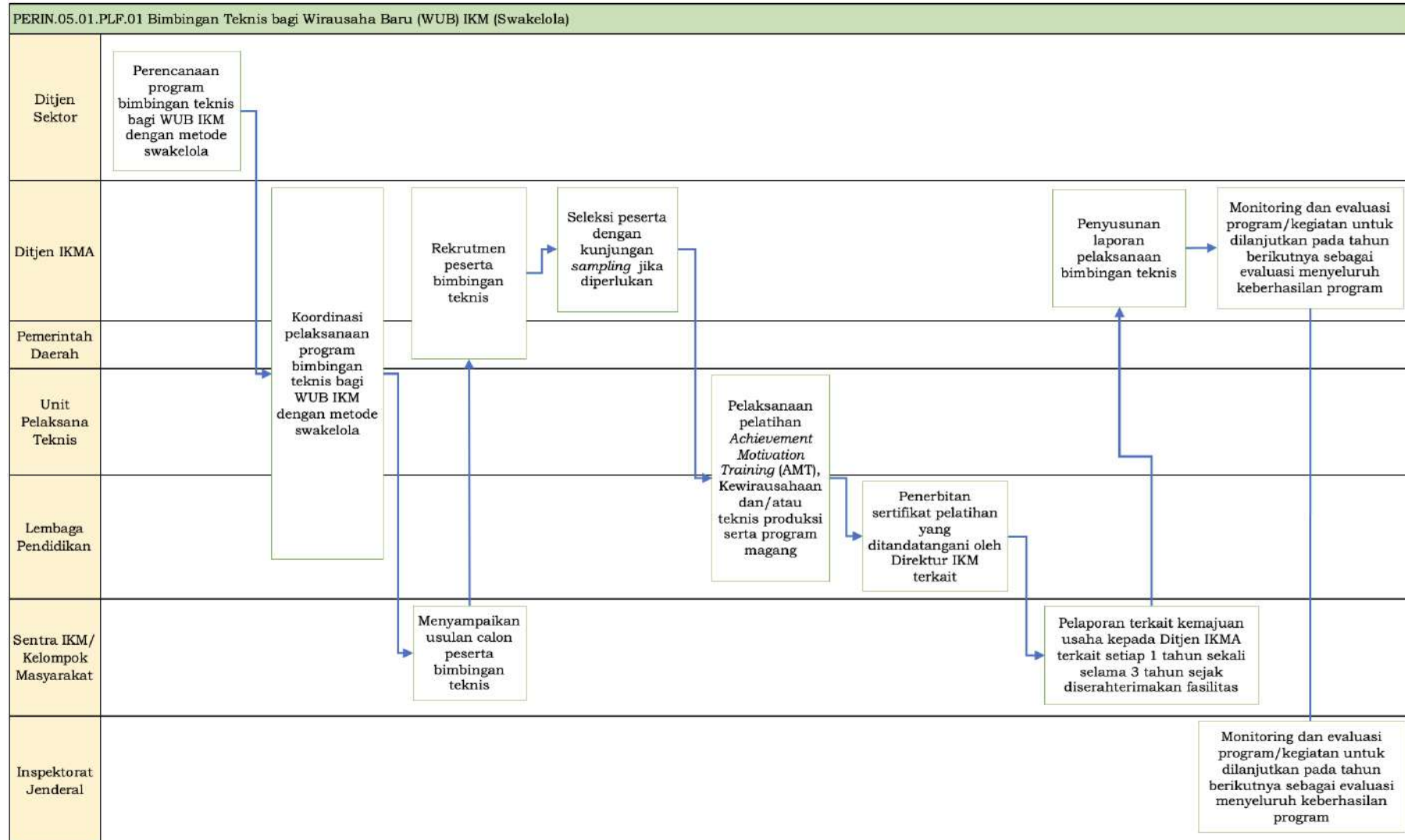


b. PERIN.04.03.PLF.02 Fasilitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bagi Industri.

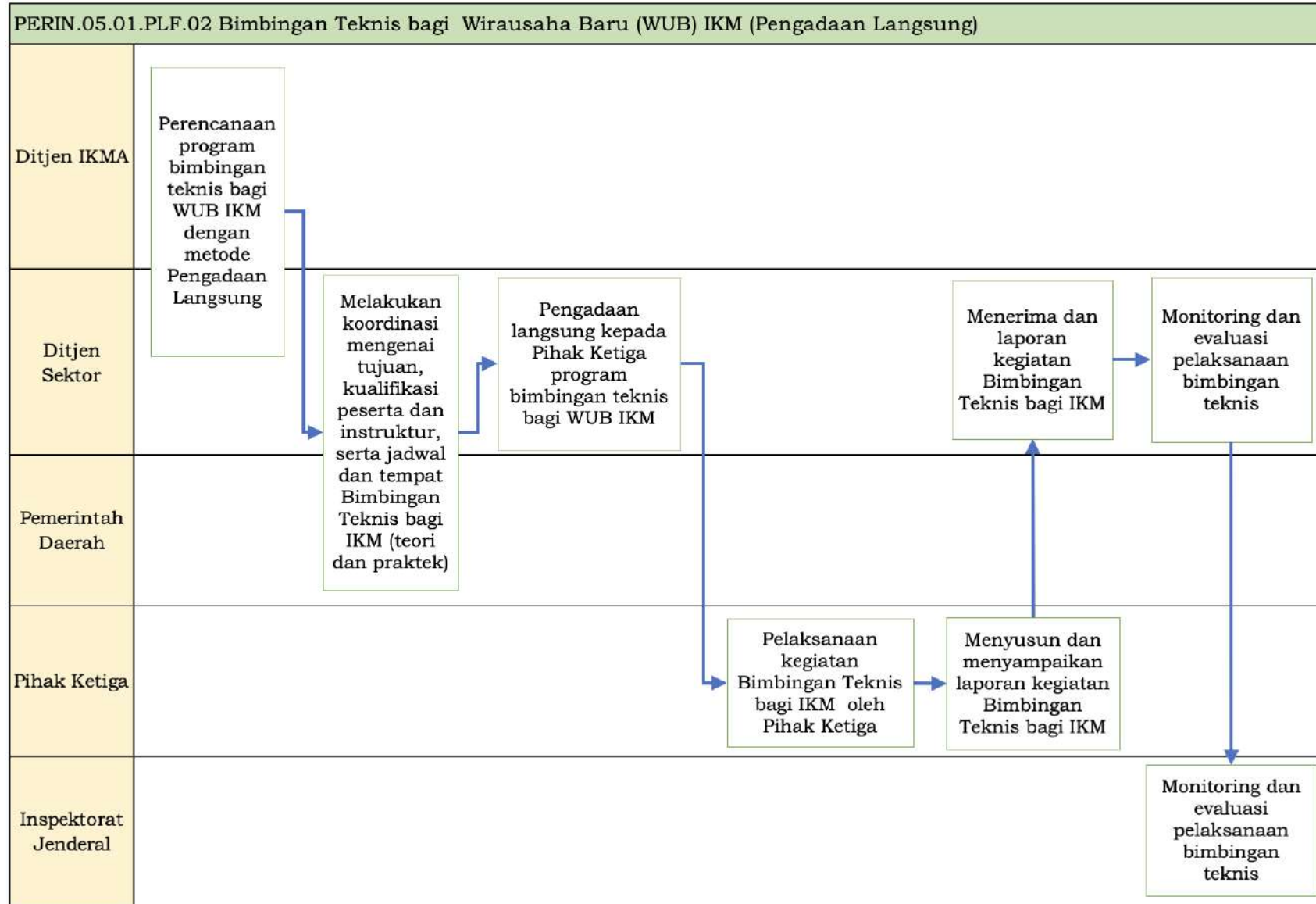


16. Sub-proses PERIN.05.01 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

a. PERIN.05.01.PLF.01 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Swakelola); dan

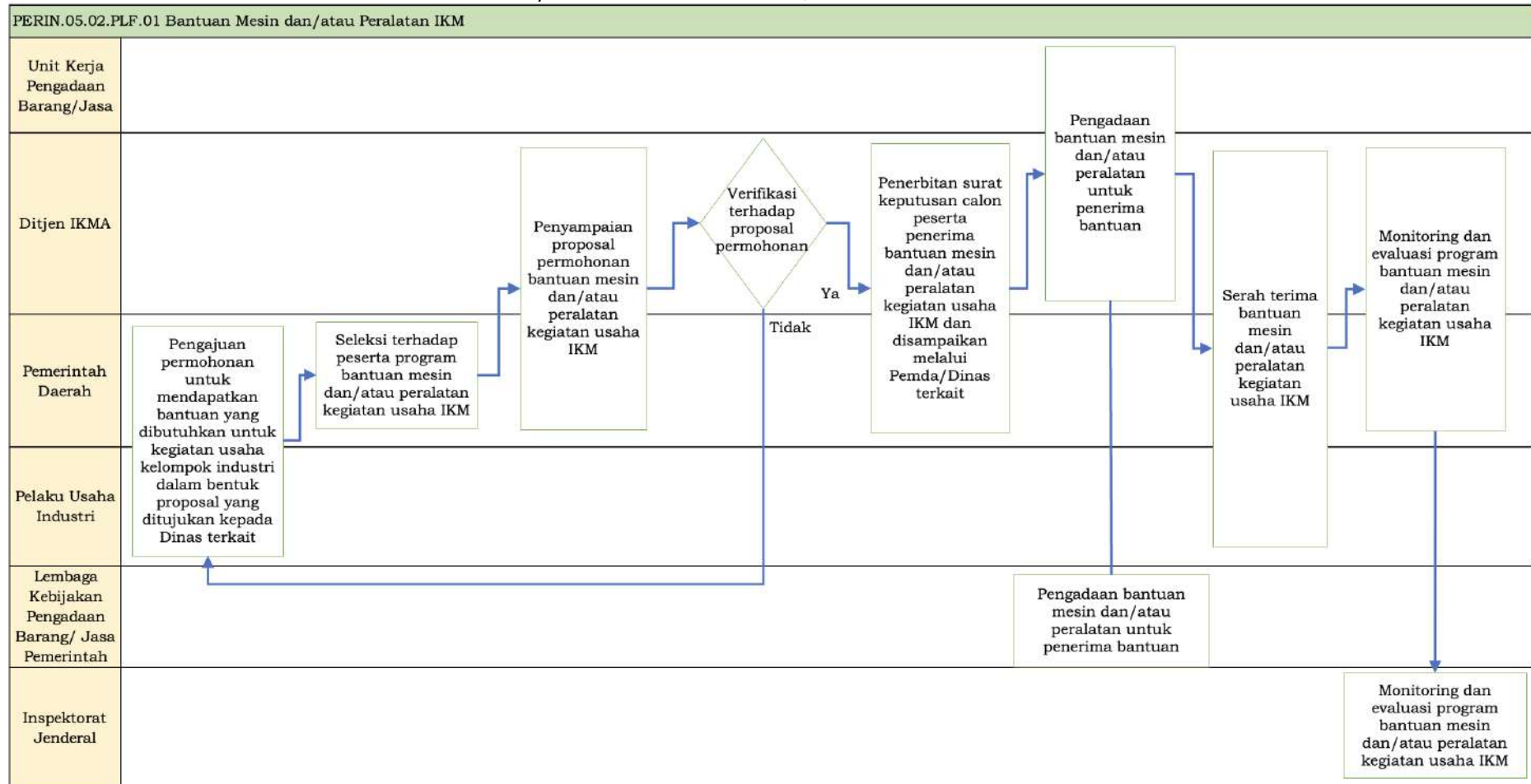


b. PERIN.05.01.PLF.02 Bimbingan Teknis bagi Wirausaha Baru (WUB) IKM (Pengadaan Langsung).

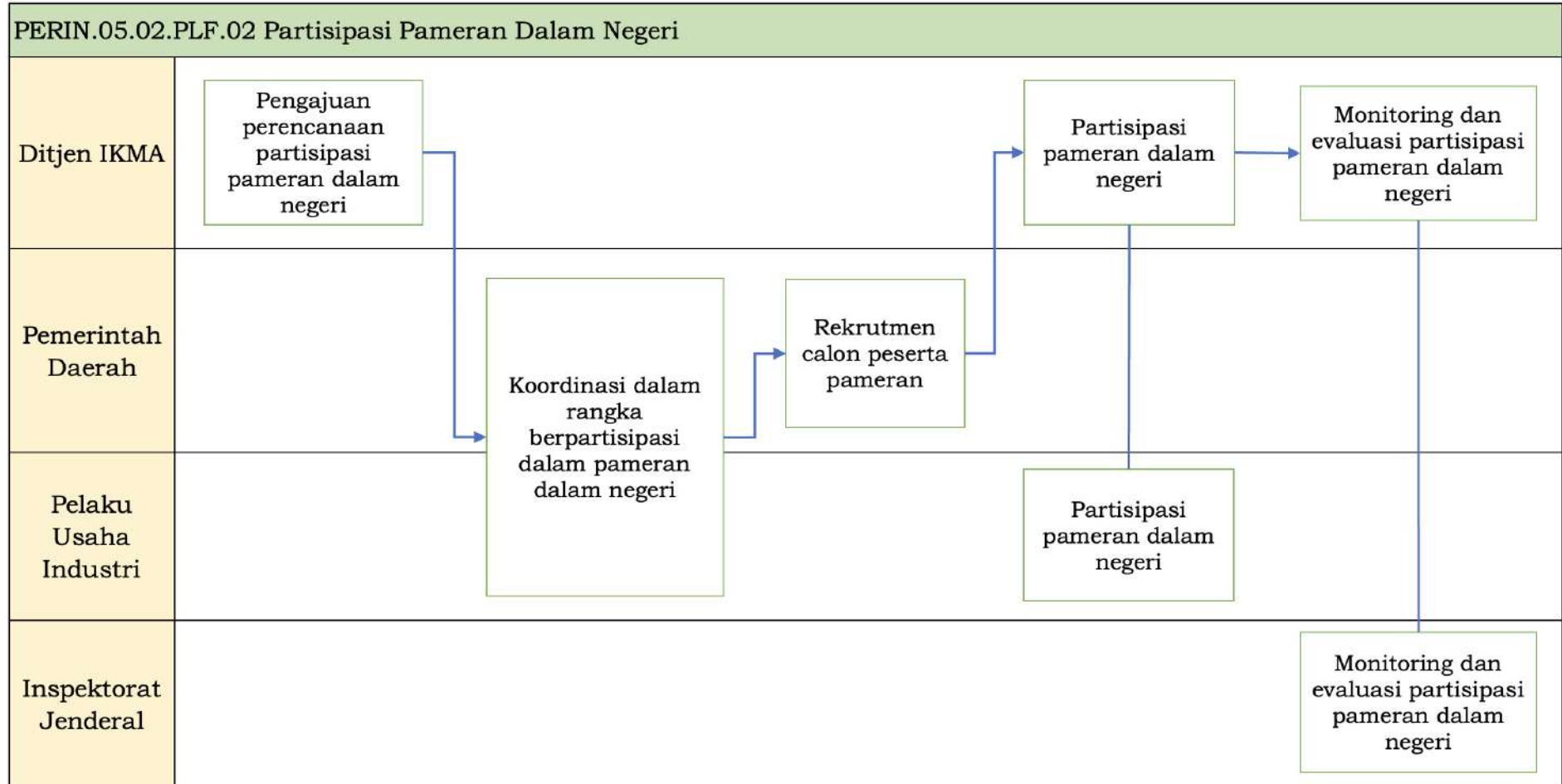


17. Sub-proses PERIN.05.02 Pemberian Fasilitas Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:

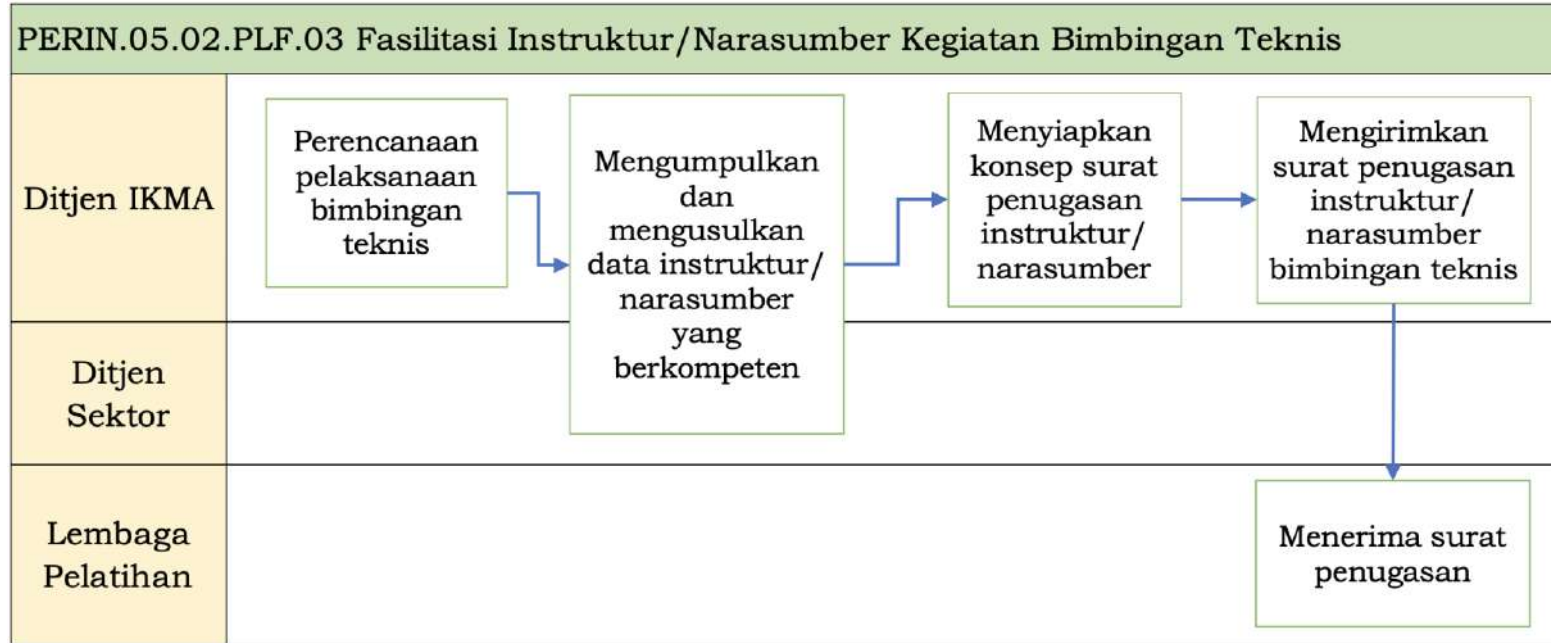
a. PERIN.05.02.PLF.01 Bantuan Mesin dan/atau Peralatan IKM;



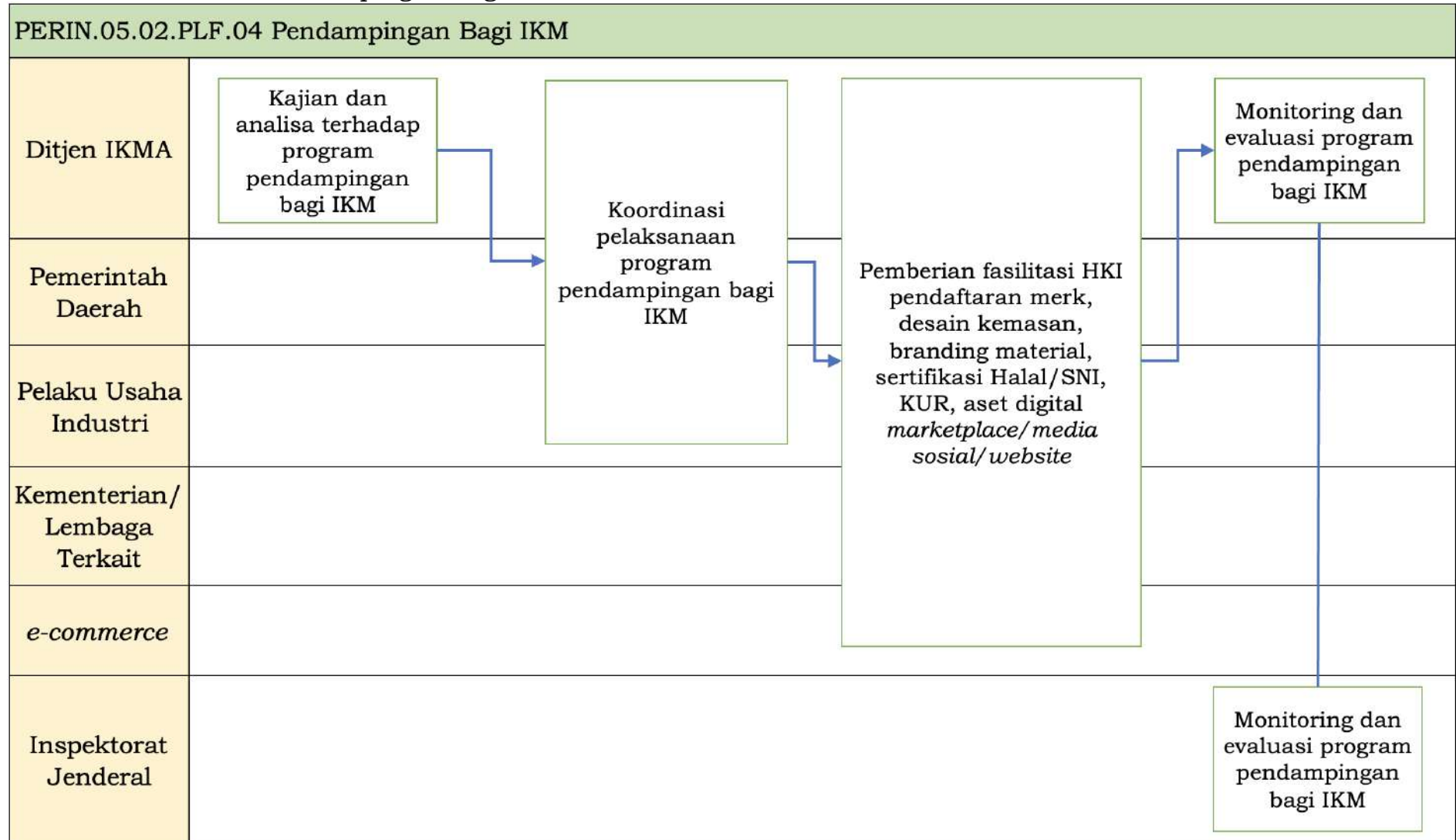
b. PERIN.05.02.PLF.02 Partisipasi Pameran Dalam Negeri;



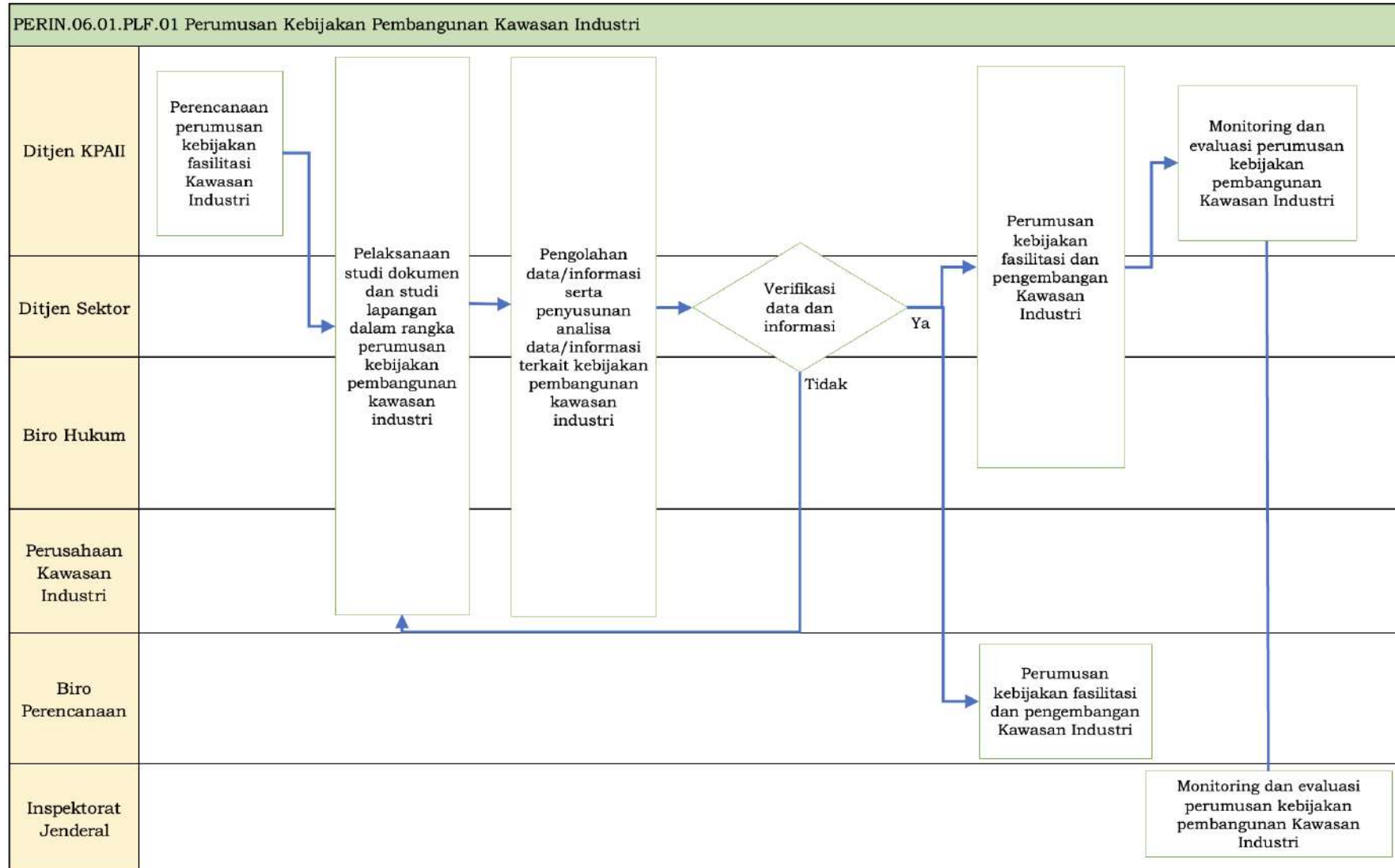
- c. PERIN.05.02.PLF.03 Fasilitasi Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis; dan



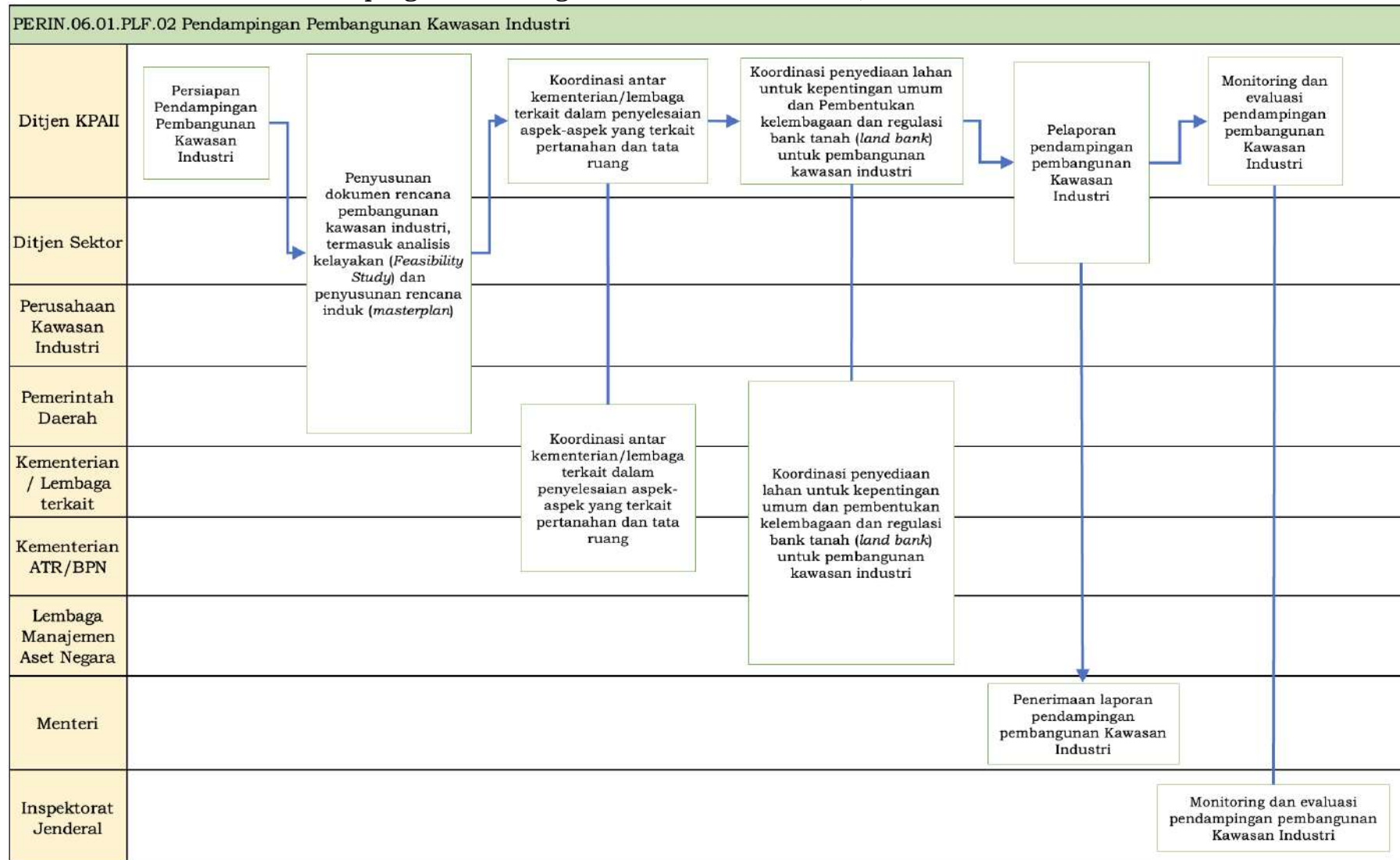
d. PERIN.05.02.PLF.04 Pendampingan Bagi IKM.



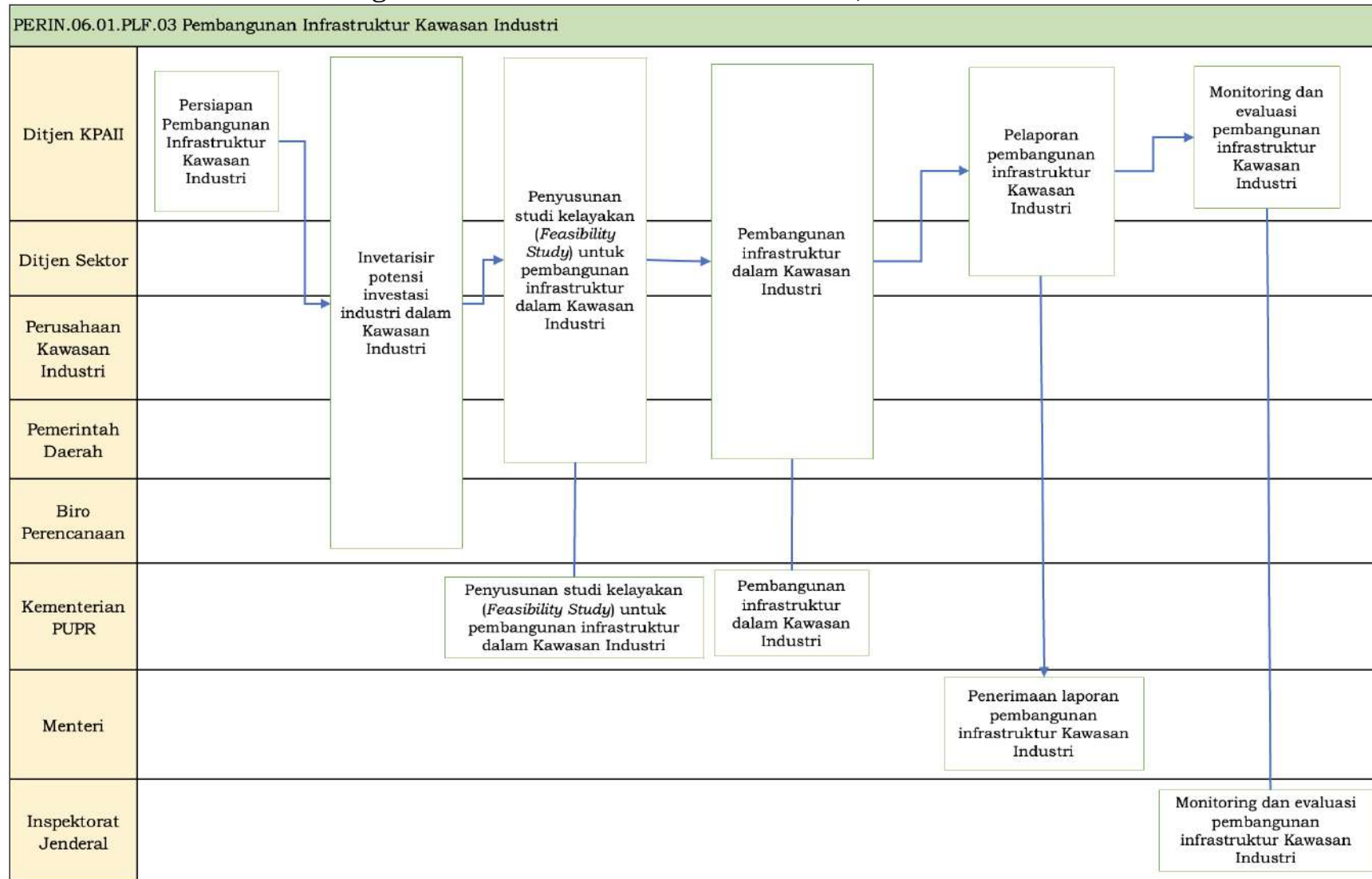
18. Sub-proses PERIN.06.01 Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas 7 (tujuh) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.06.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri;



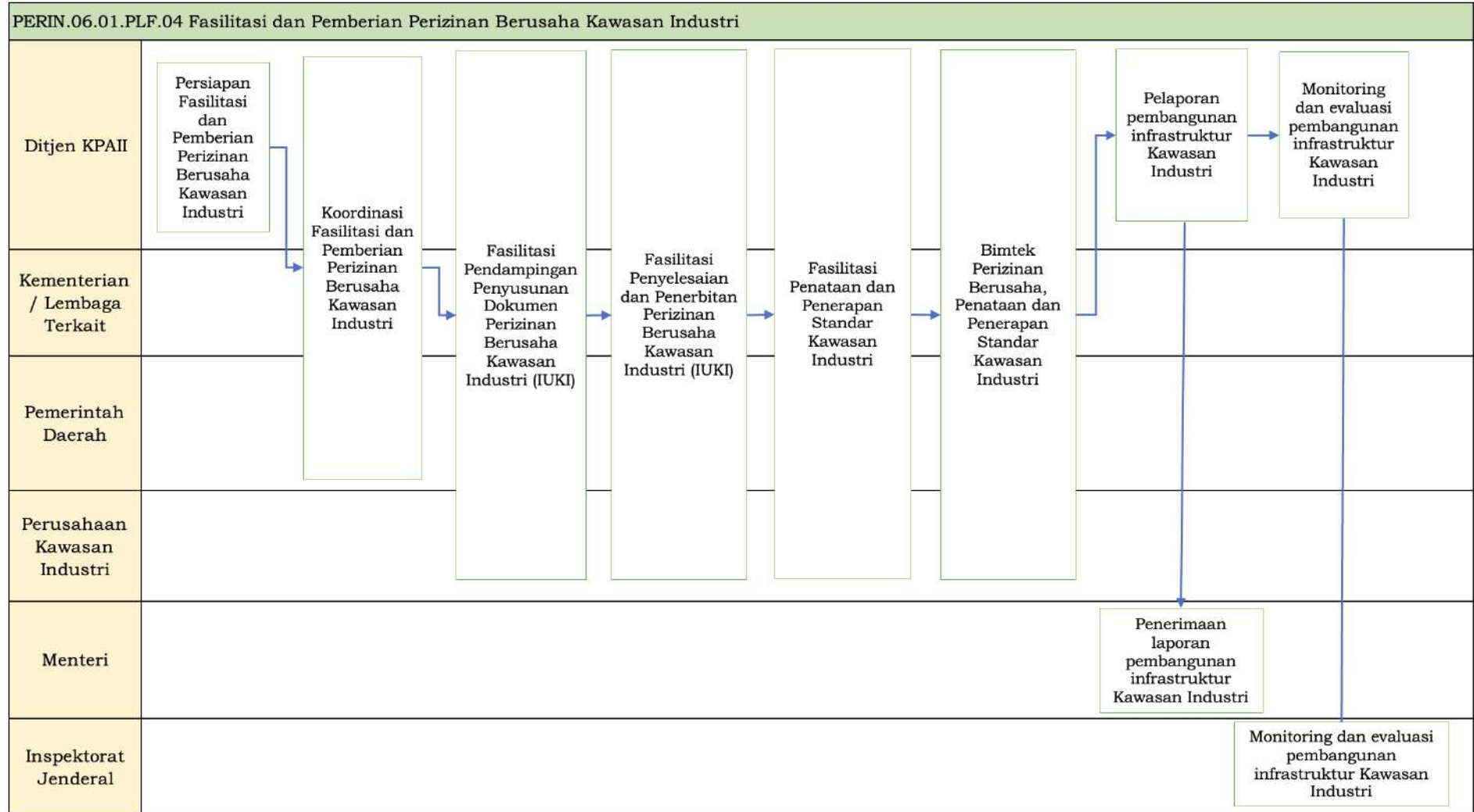
b. PERIN.06.01.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Industri;



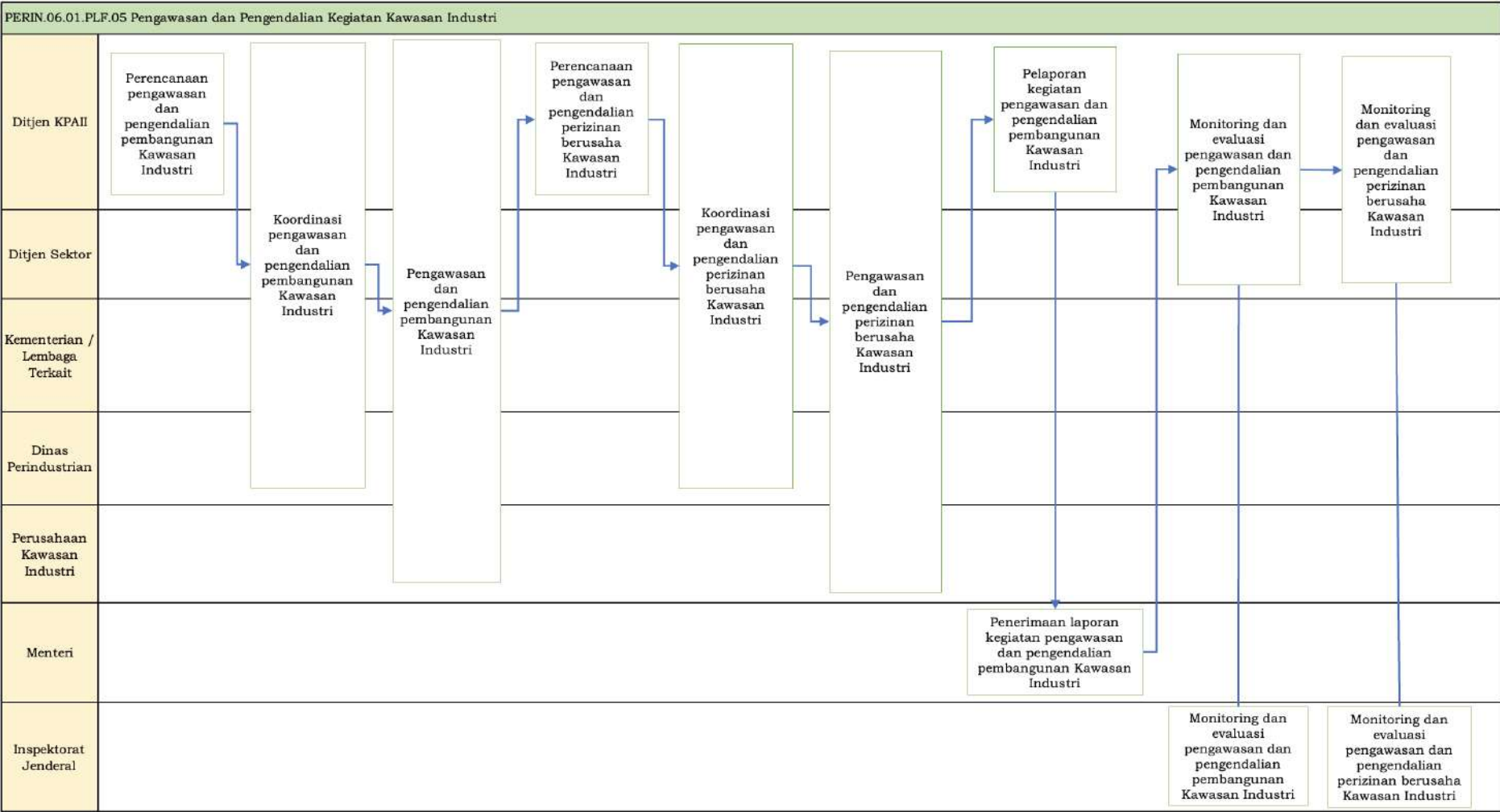
c. PERIN.06.01.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri;



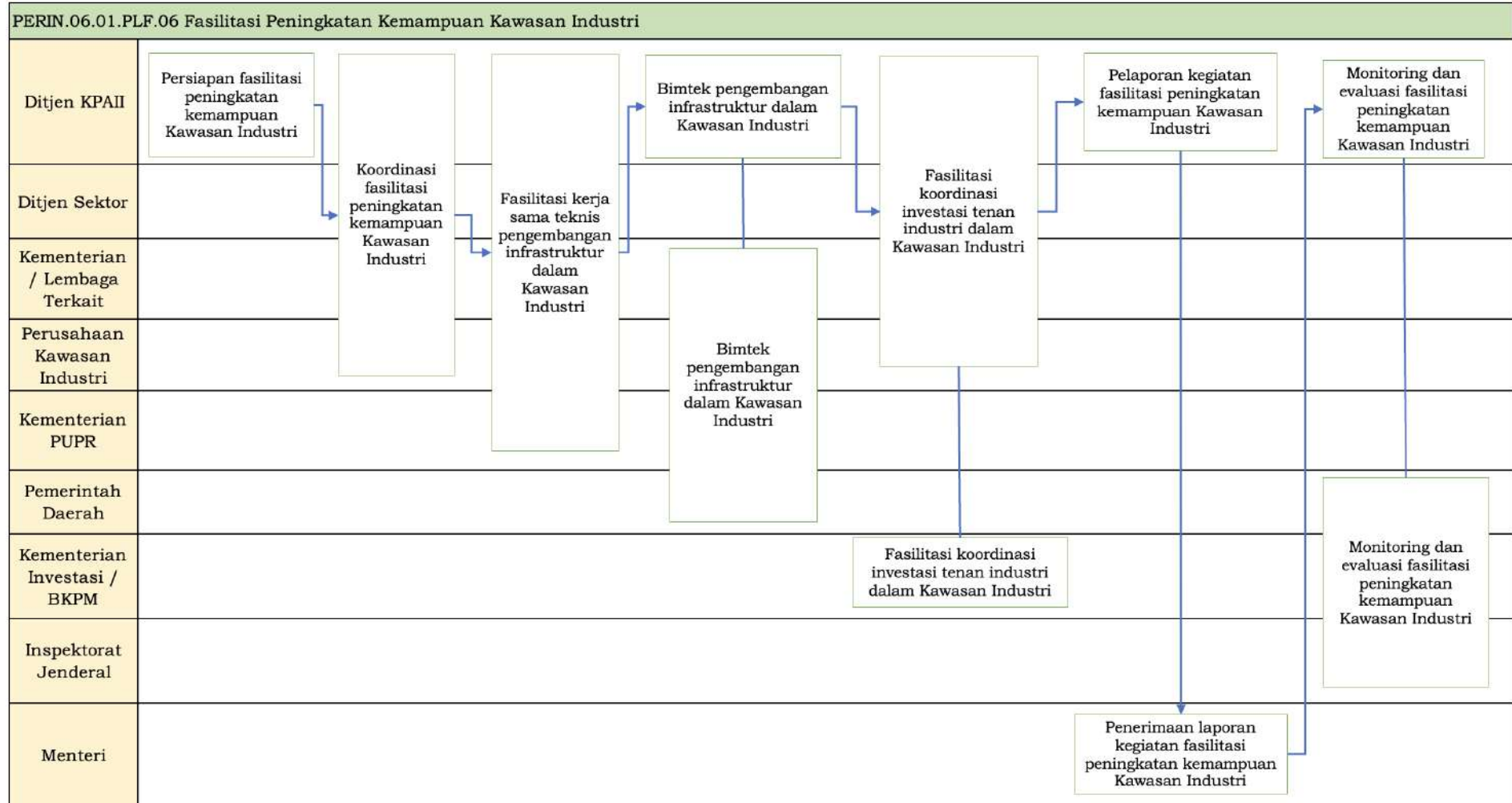
d. PERIN.06.01.PLF.04 Fasilitas dan Pemberian Perizinan Berusaha Kawasan Industri;



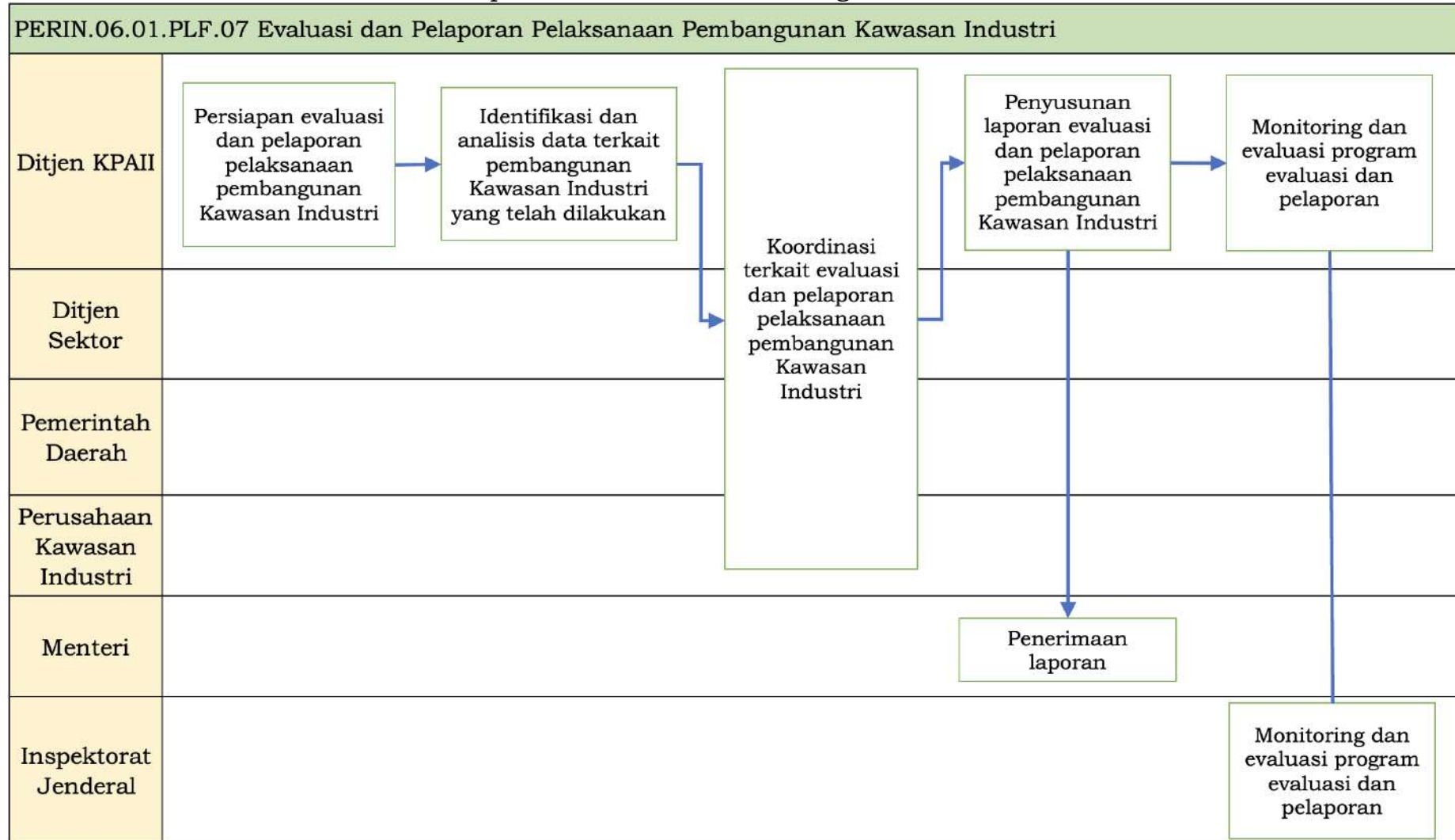
e. PERIN.06.01.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kawasan Industri;



f. PERIN.06.01.PLF.06 Fasilitas Peningkatan Kemampuan Kawasan Industri; dan

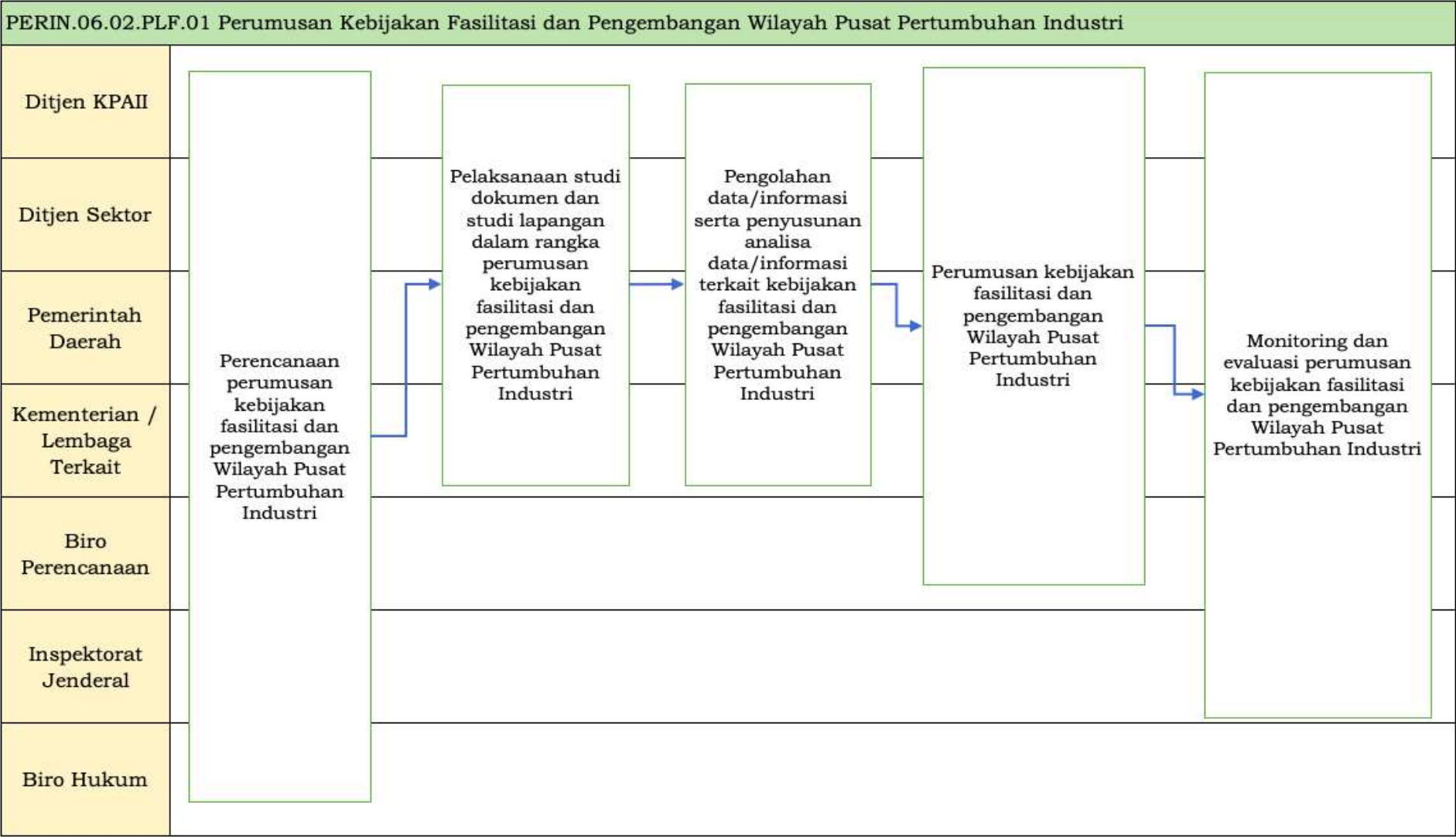


g. PERIN.06.01.PLF.07 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri.

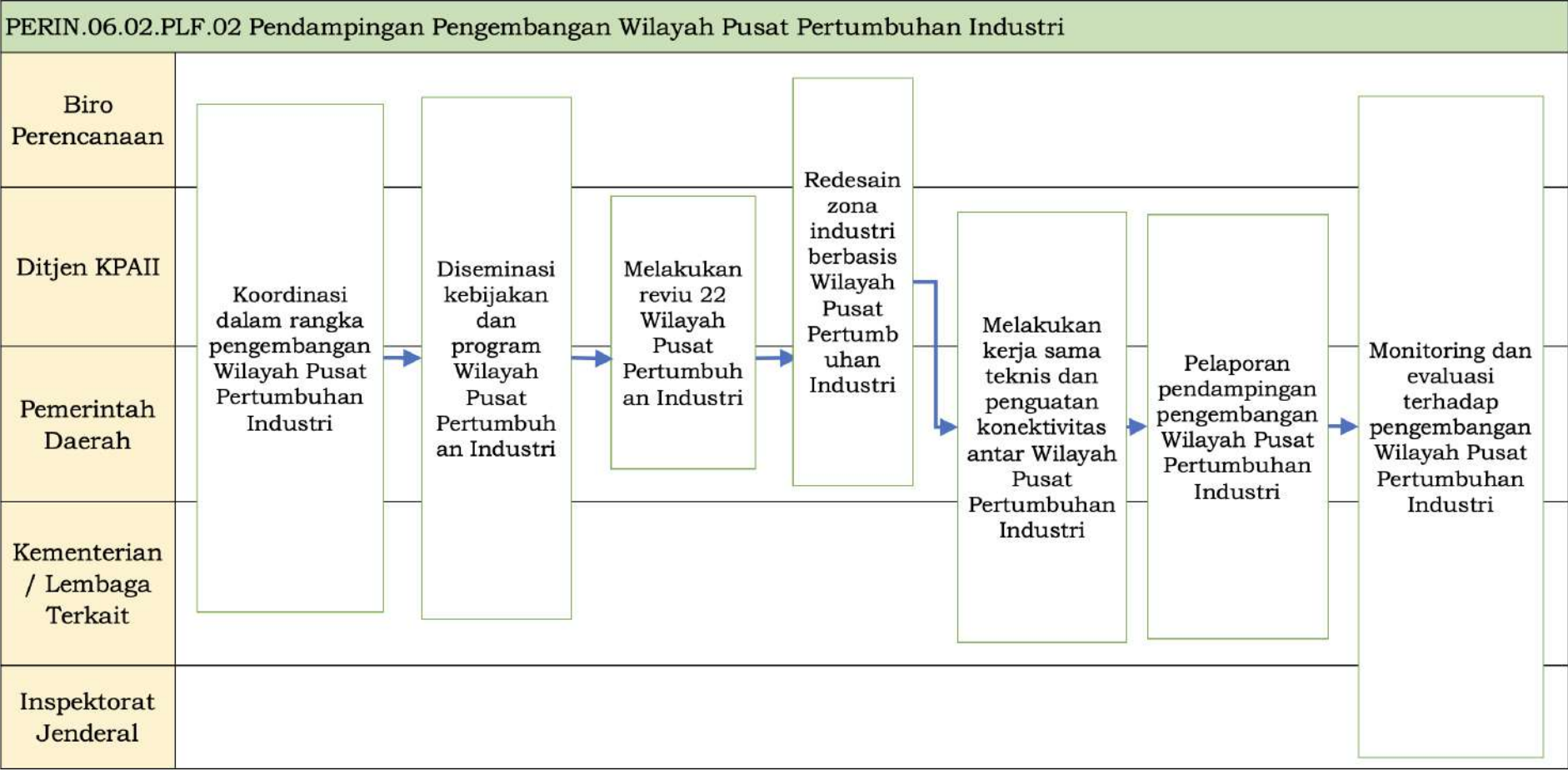


19. Sub-proses PERIN.06.02 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:

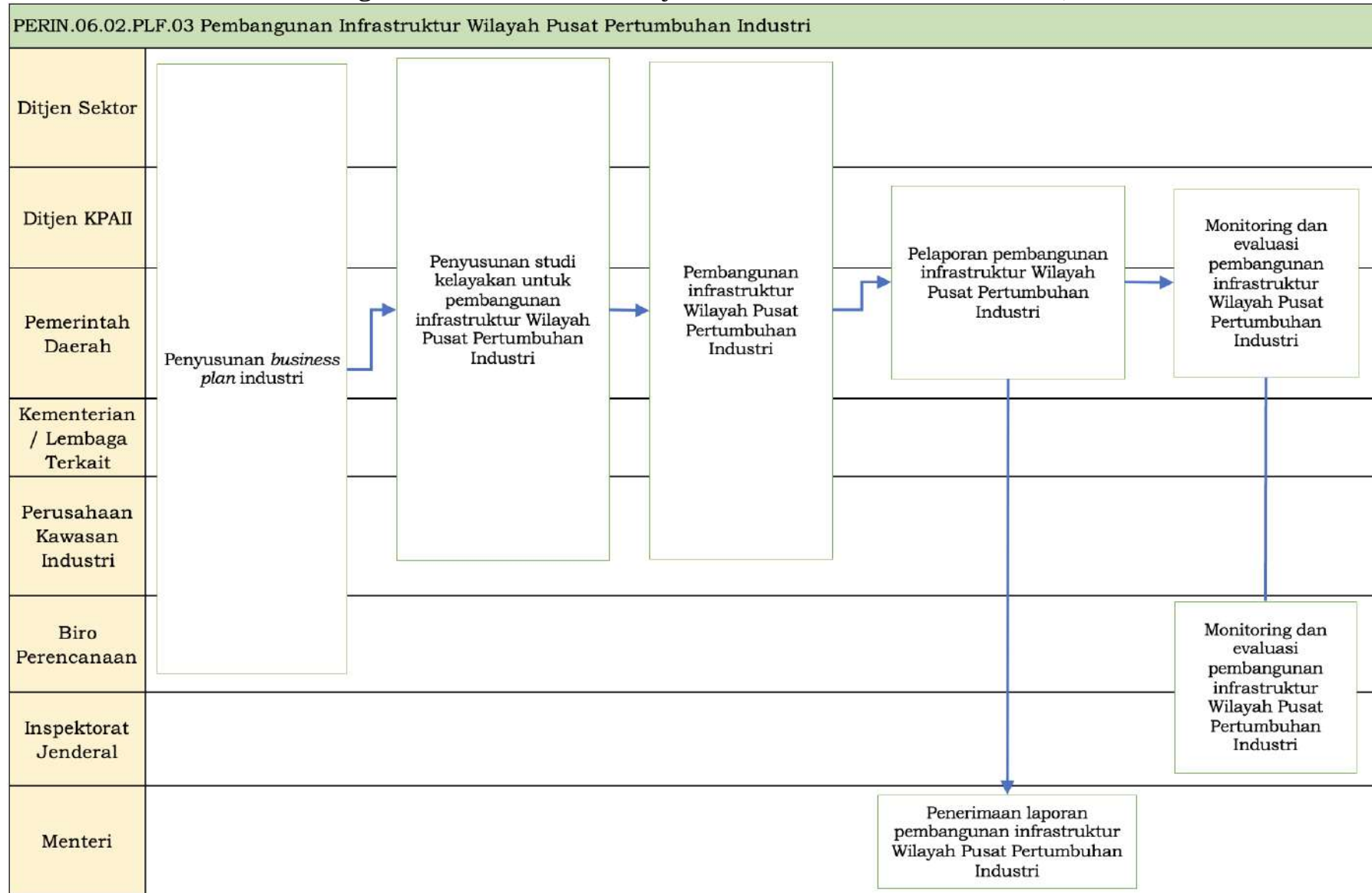
a. PERIN.06.02.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitas dan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;



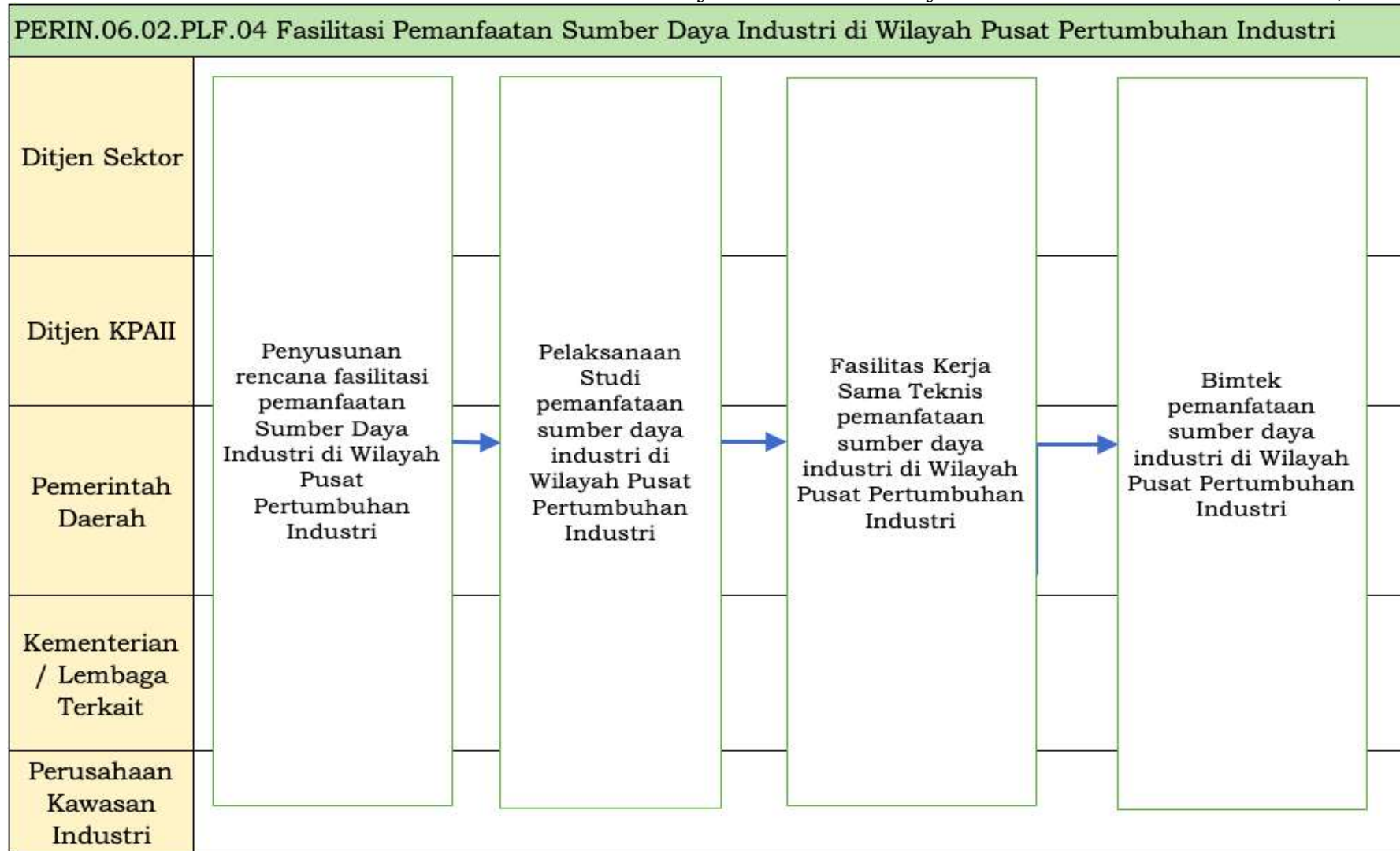
b. PERIN.06.02.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;



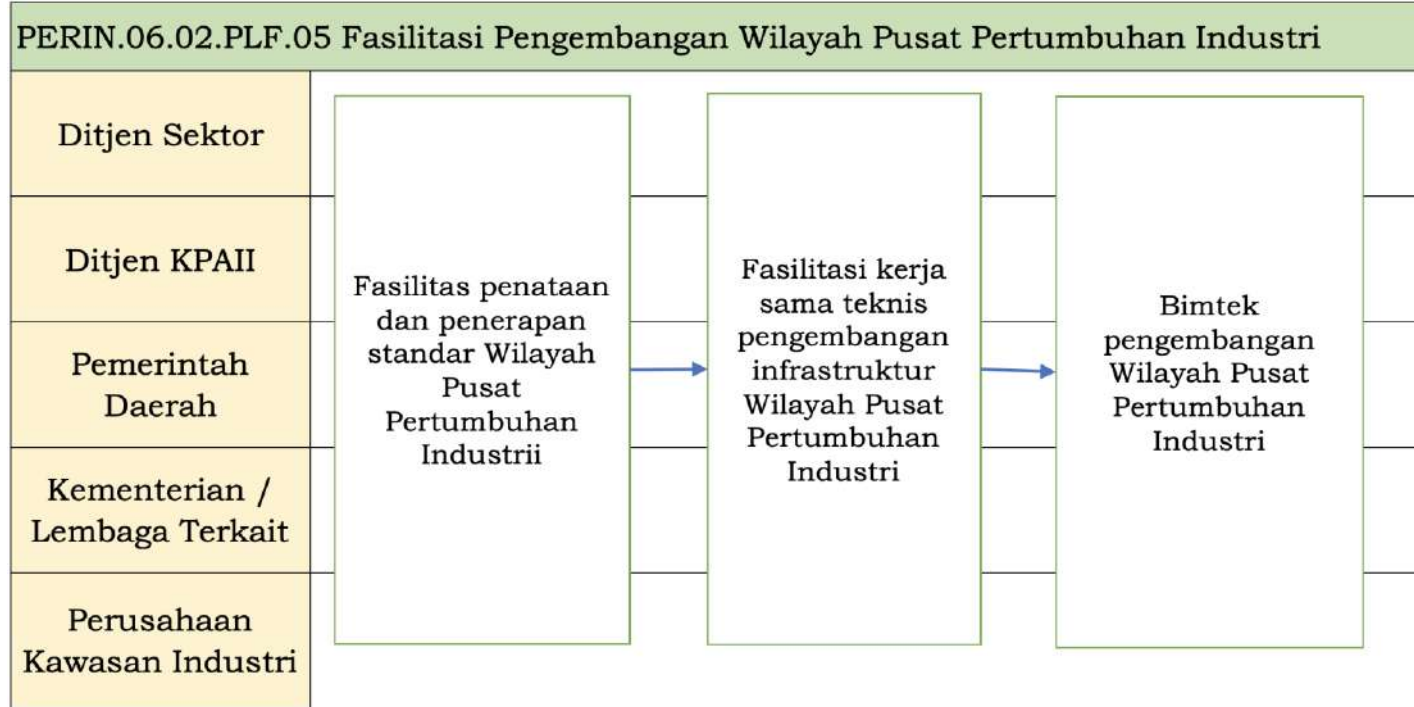
c. PERIN.06.02.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;



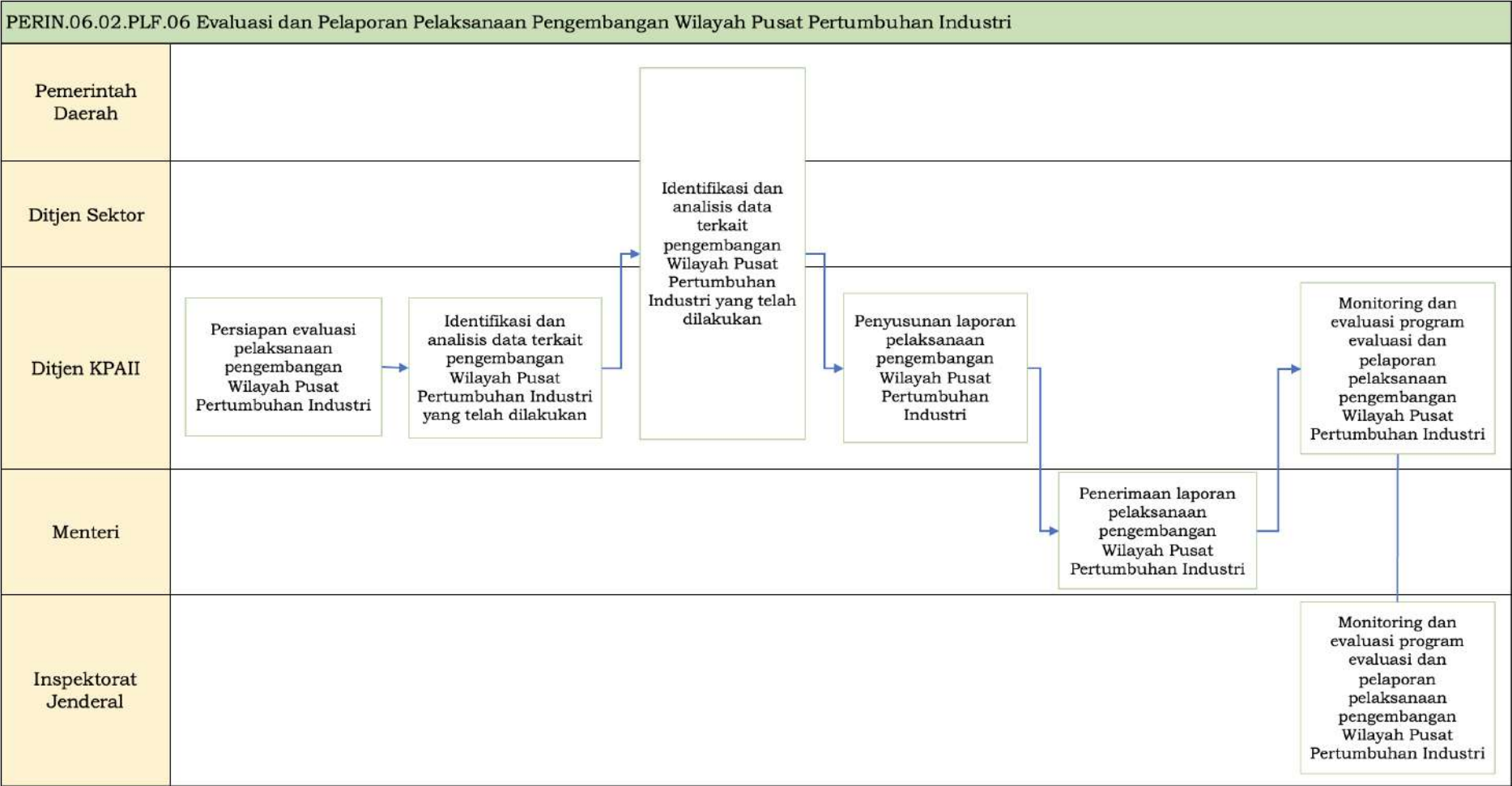
- d. PERIN.06.02.PLF.04 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;



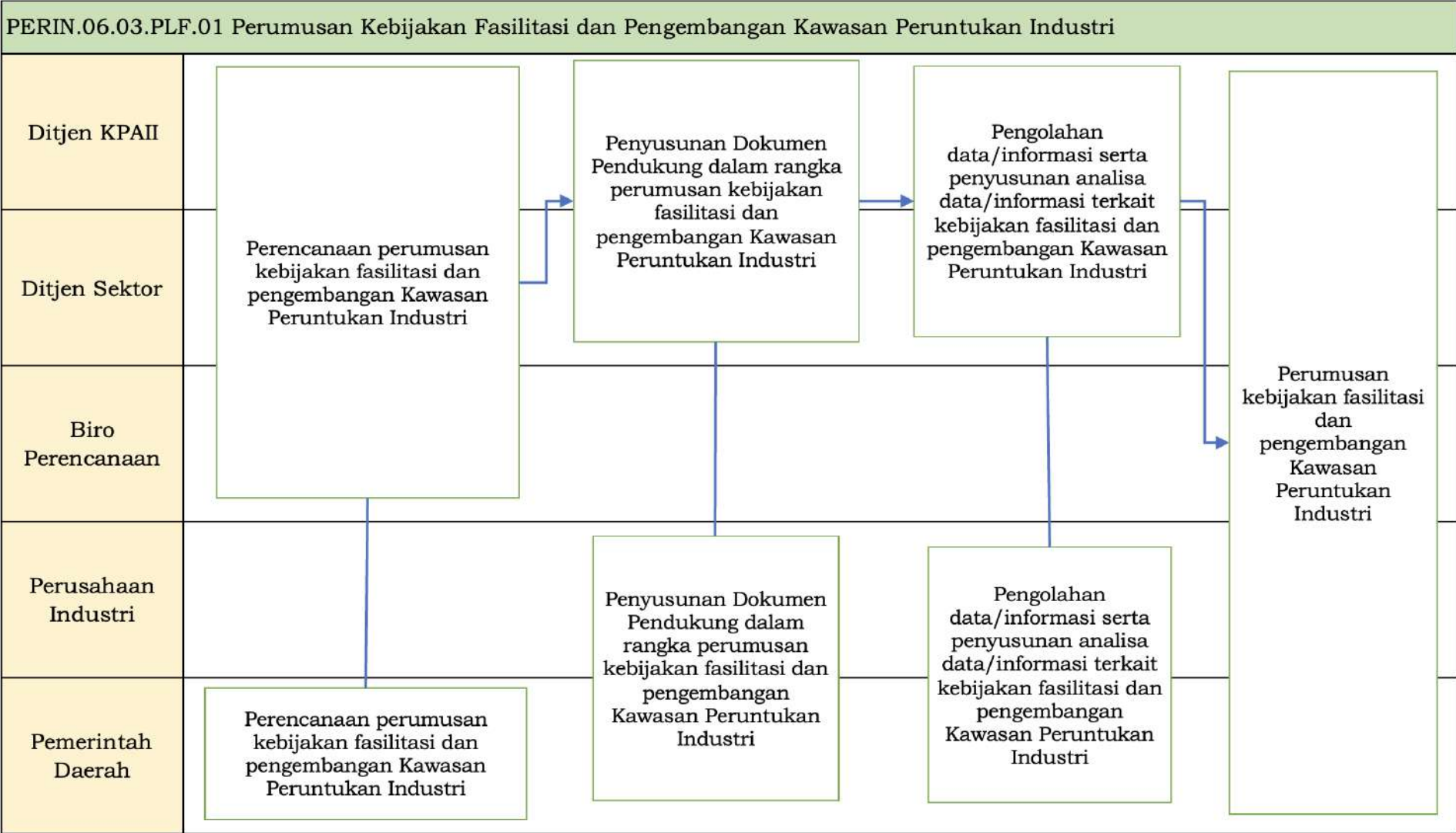
- e. PERIN.06.02.PLF.05 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan



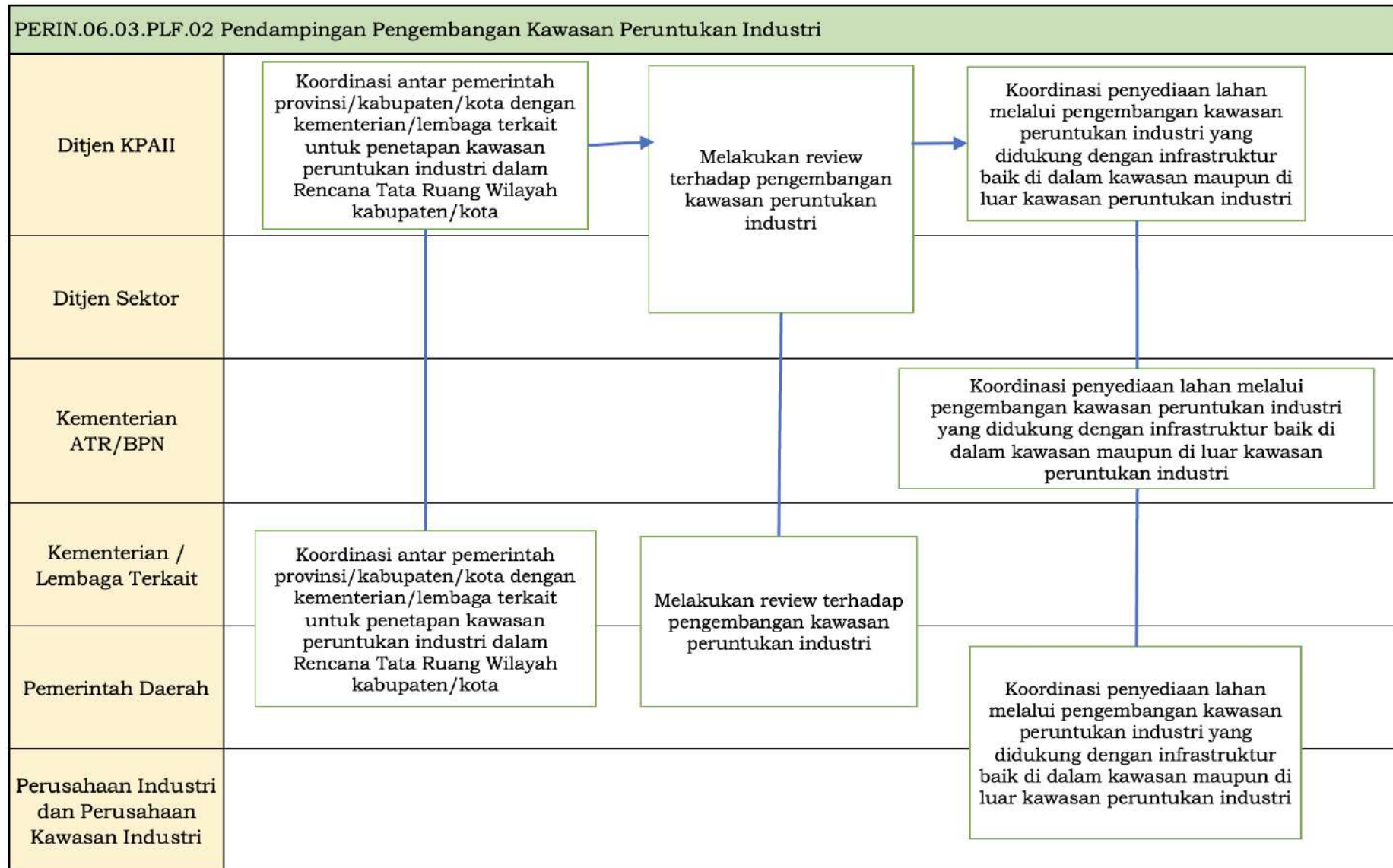
f. PERIN.06.02.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

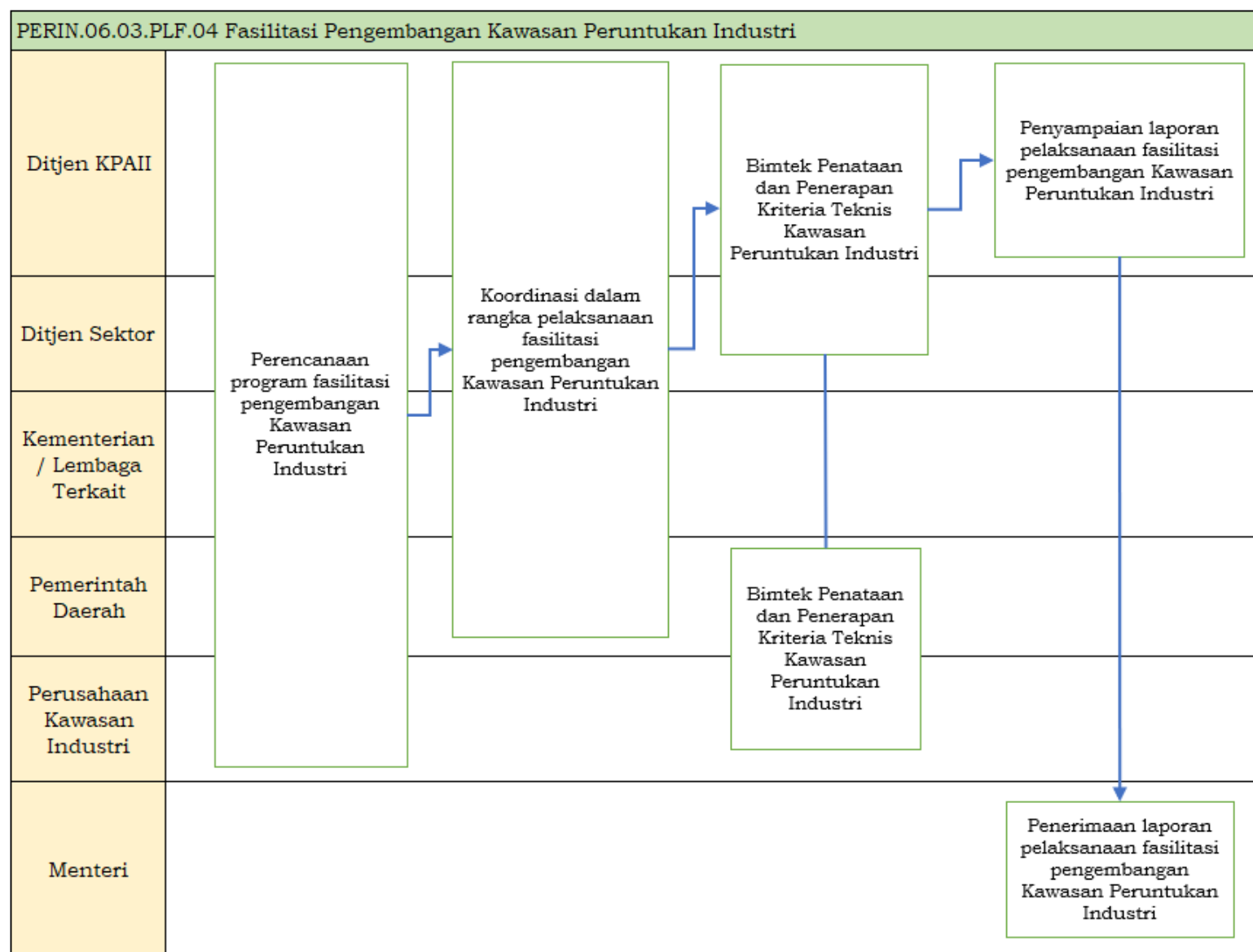


20. Sub-proses PERIN.06.03 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.06.03.PLF.01 Perumusan Kebijakan Fasilitas dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

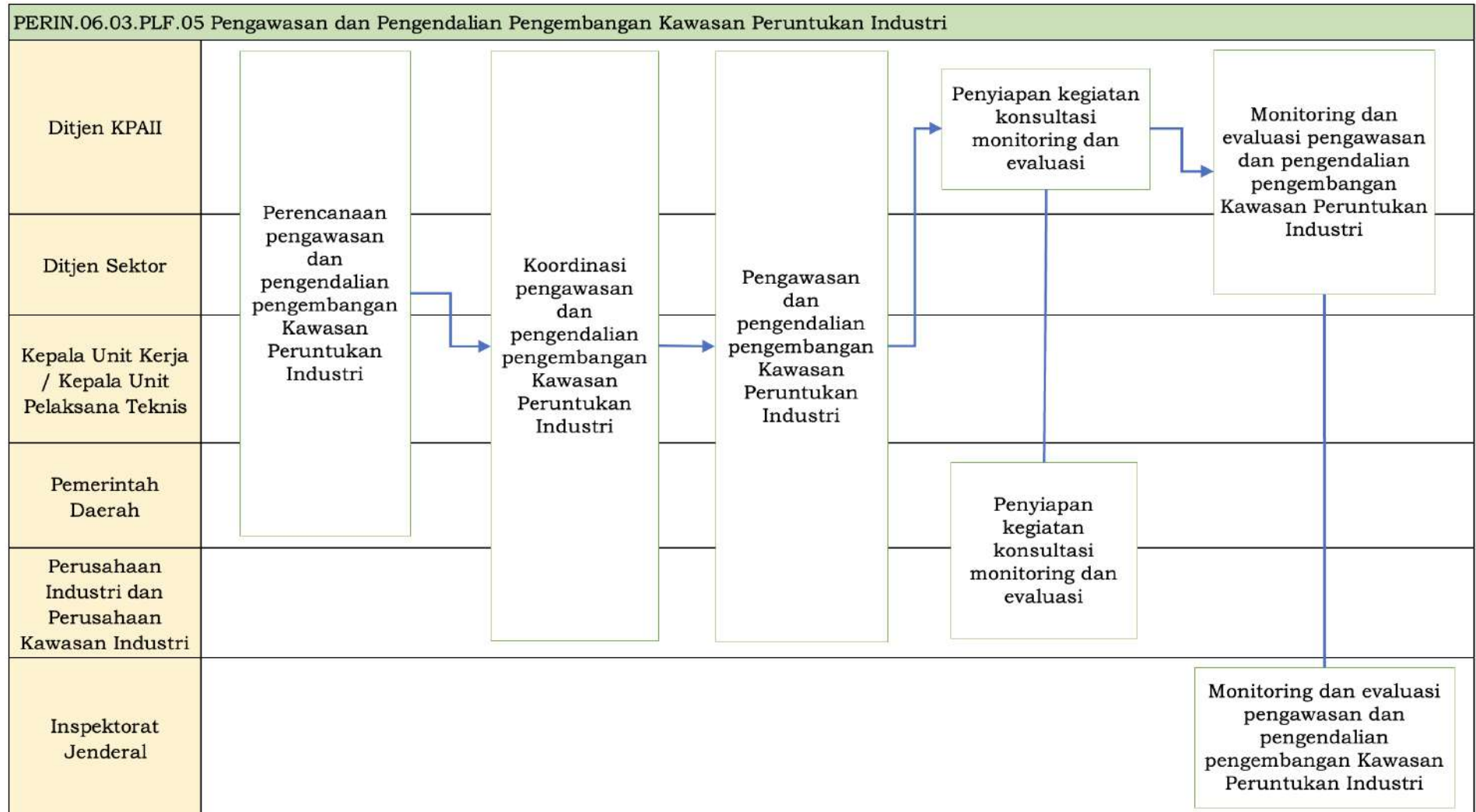


- b. PERIN.06.03.PLF.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

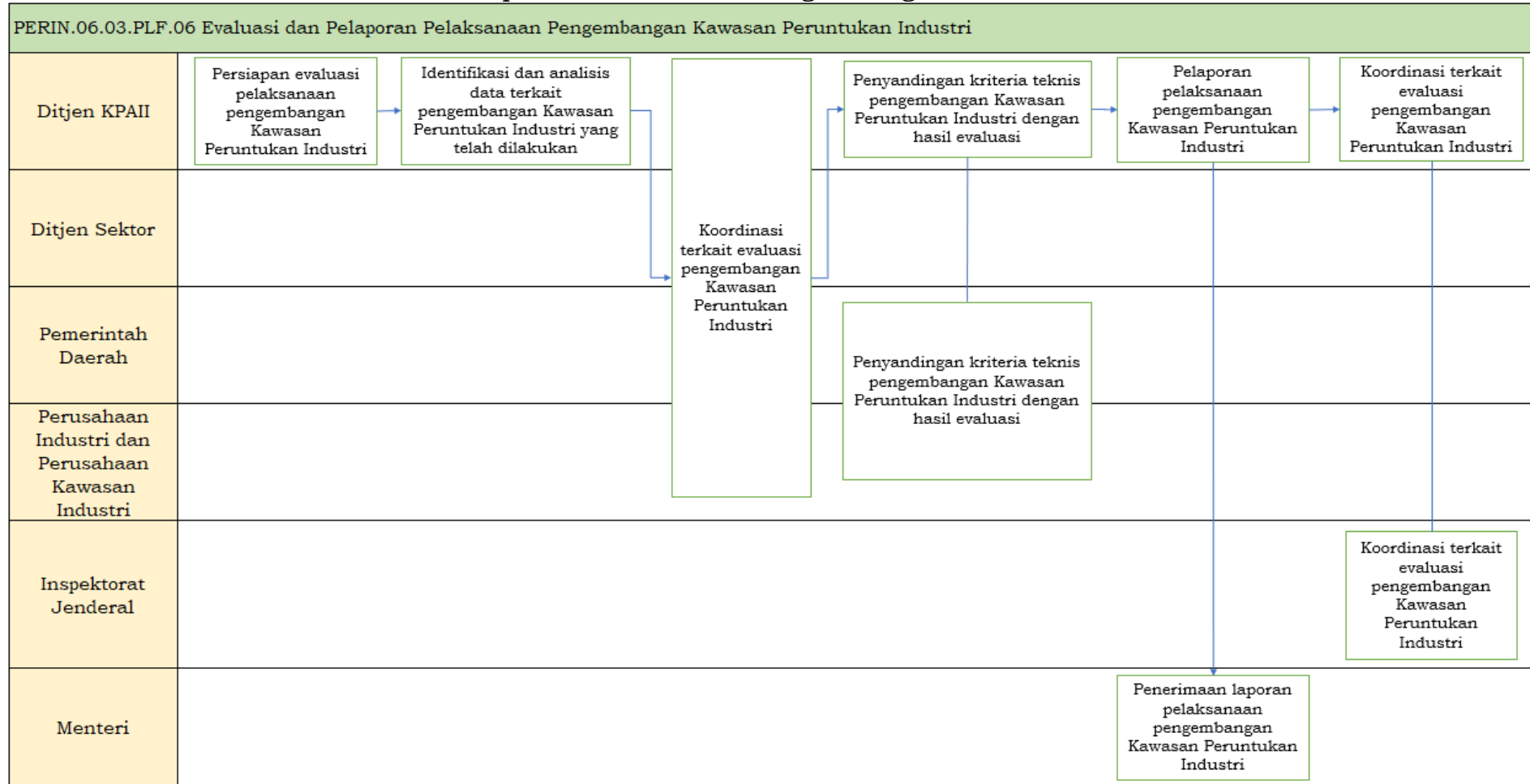




e. PERIN.06.03.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan

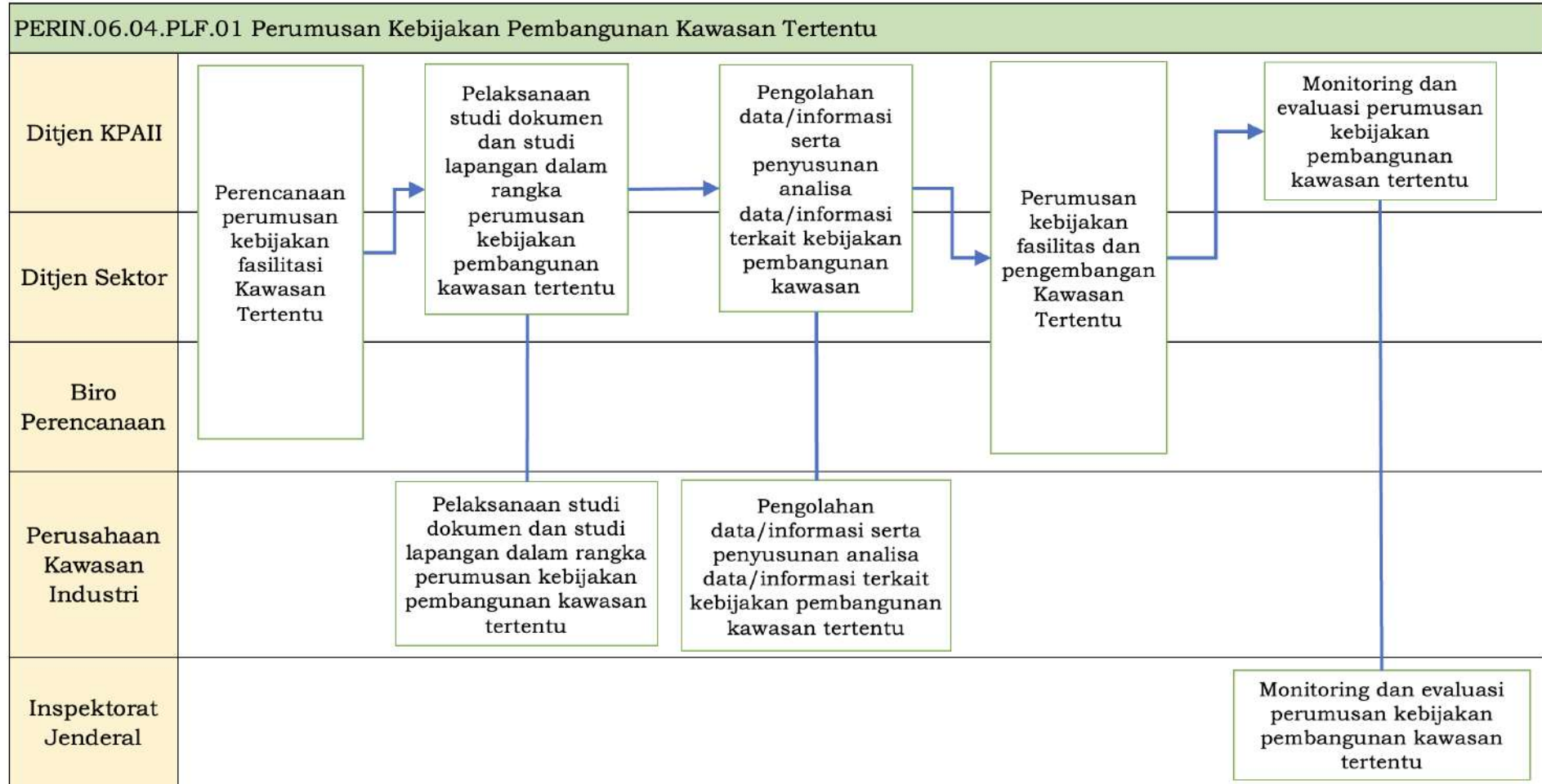


f. PERIN.06.03.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

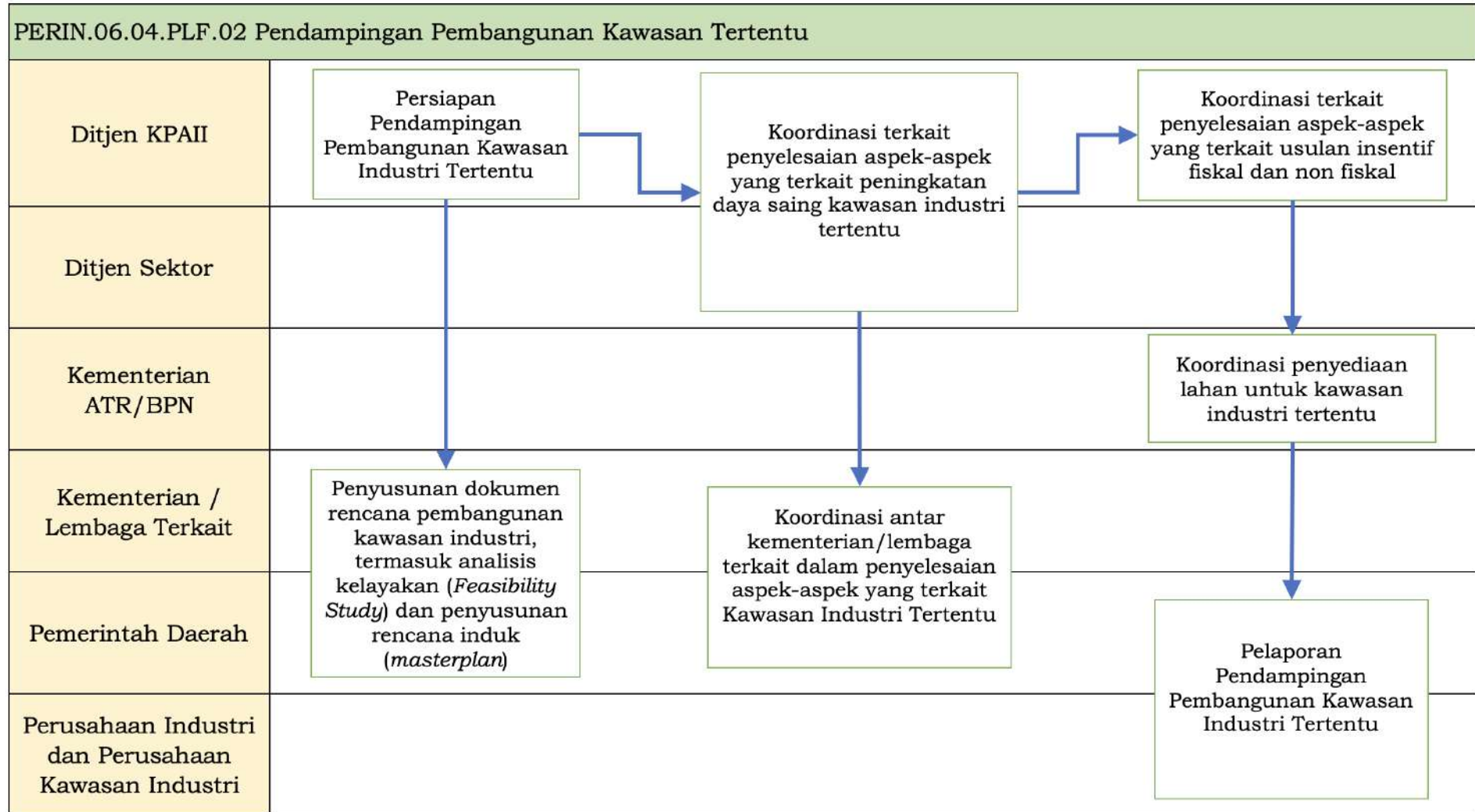


21. Sub-proses PERIN.06.04 Pengembangan Kawasan Tertentu terdiri atas 6 (enam) peta lintas fungsi sebagai berikut:

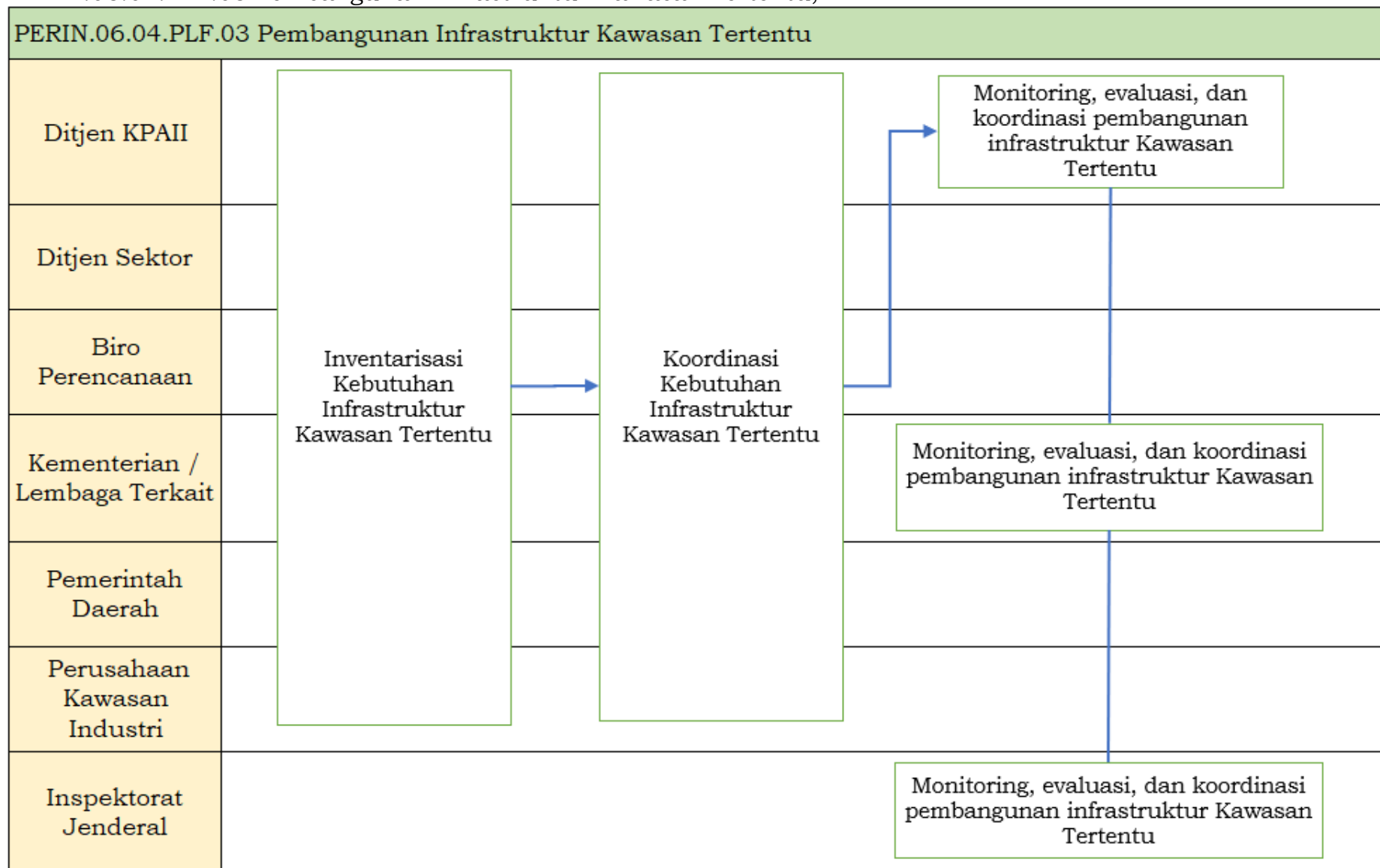
a. PERIN.06.04.PLF.01 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Tertentu;



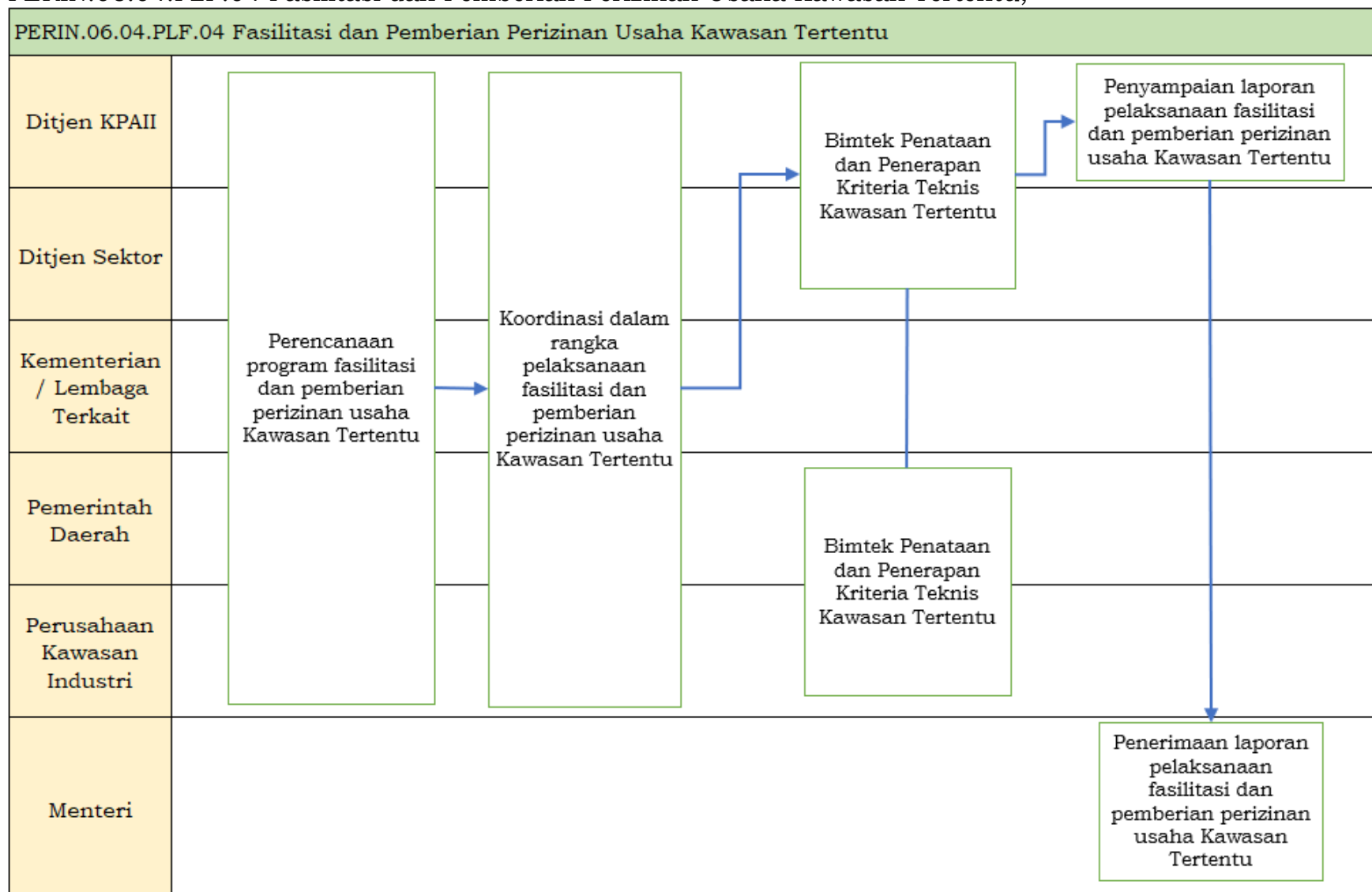
b. PERIN.06.04.PLF.02 Pendampingan Pembangunan Kawasan Tertentu;



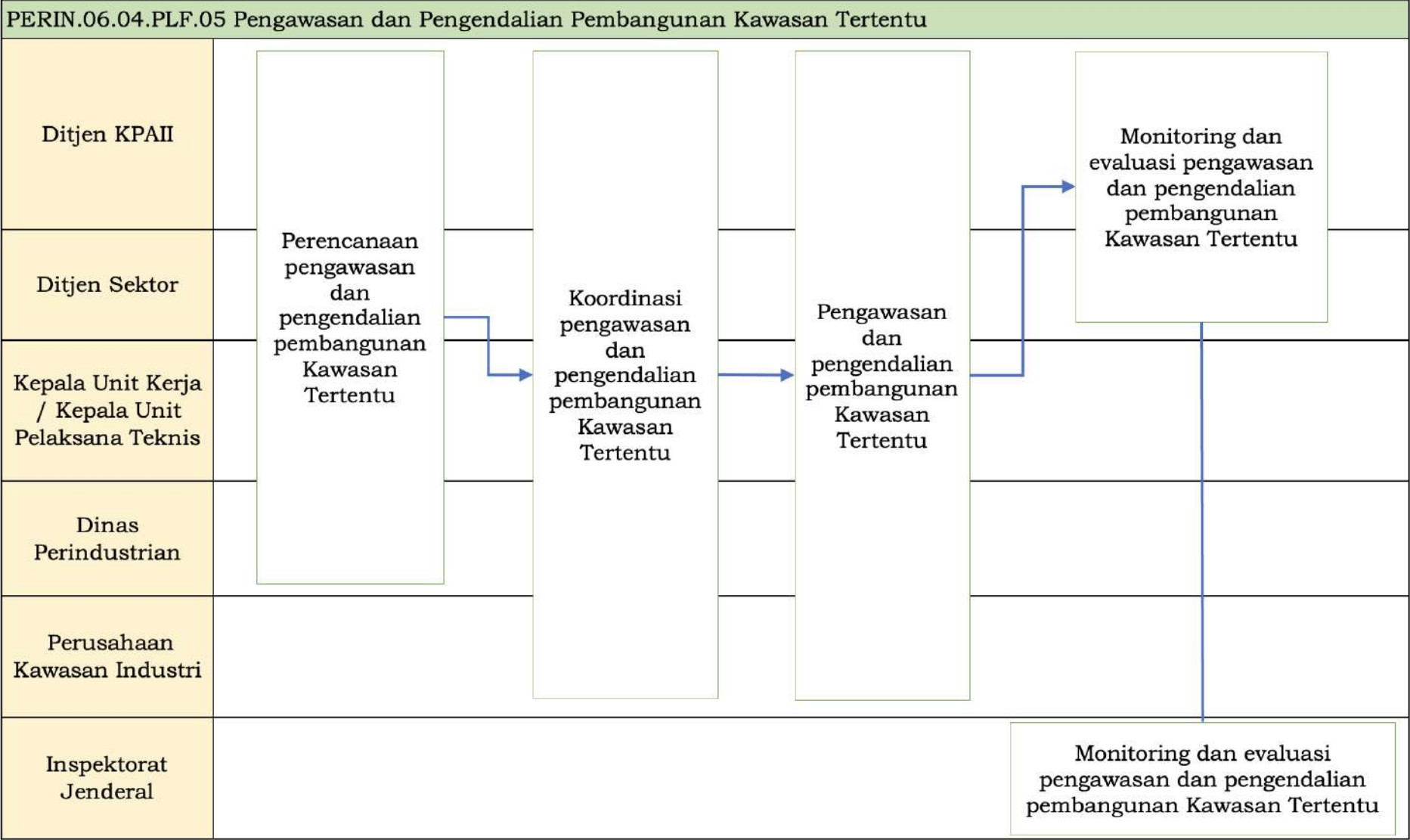
c. PERIN.06.04.PLF.03 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Tertentu;



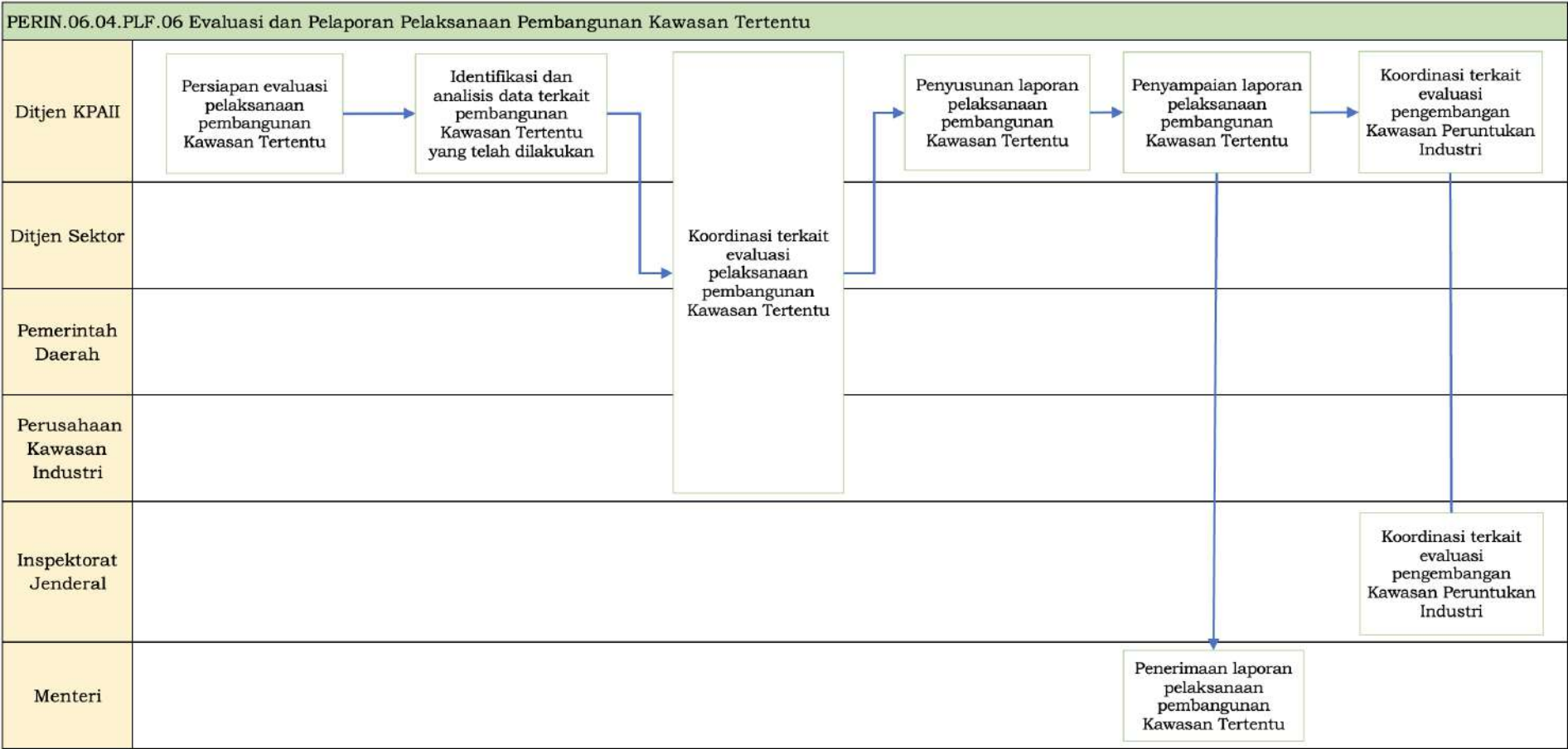
d. PERIN.06.04.PLF.04 Fasilitasi dan Pemberian Perizinan Usaha Kawasan Tertentu;



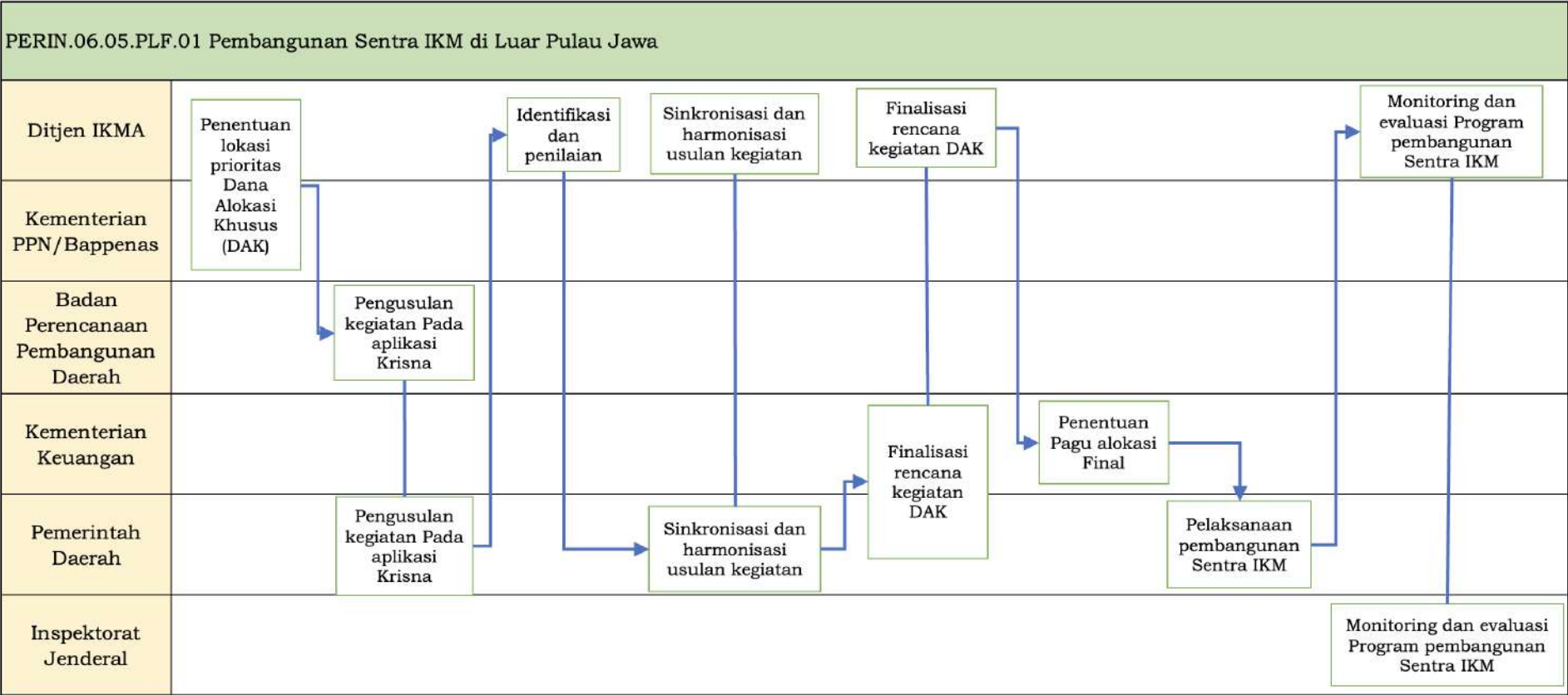
e. PERIN.06.04.PLF.05 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Tertentu; dan



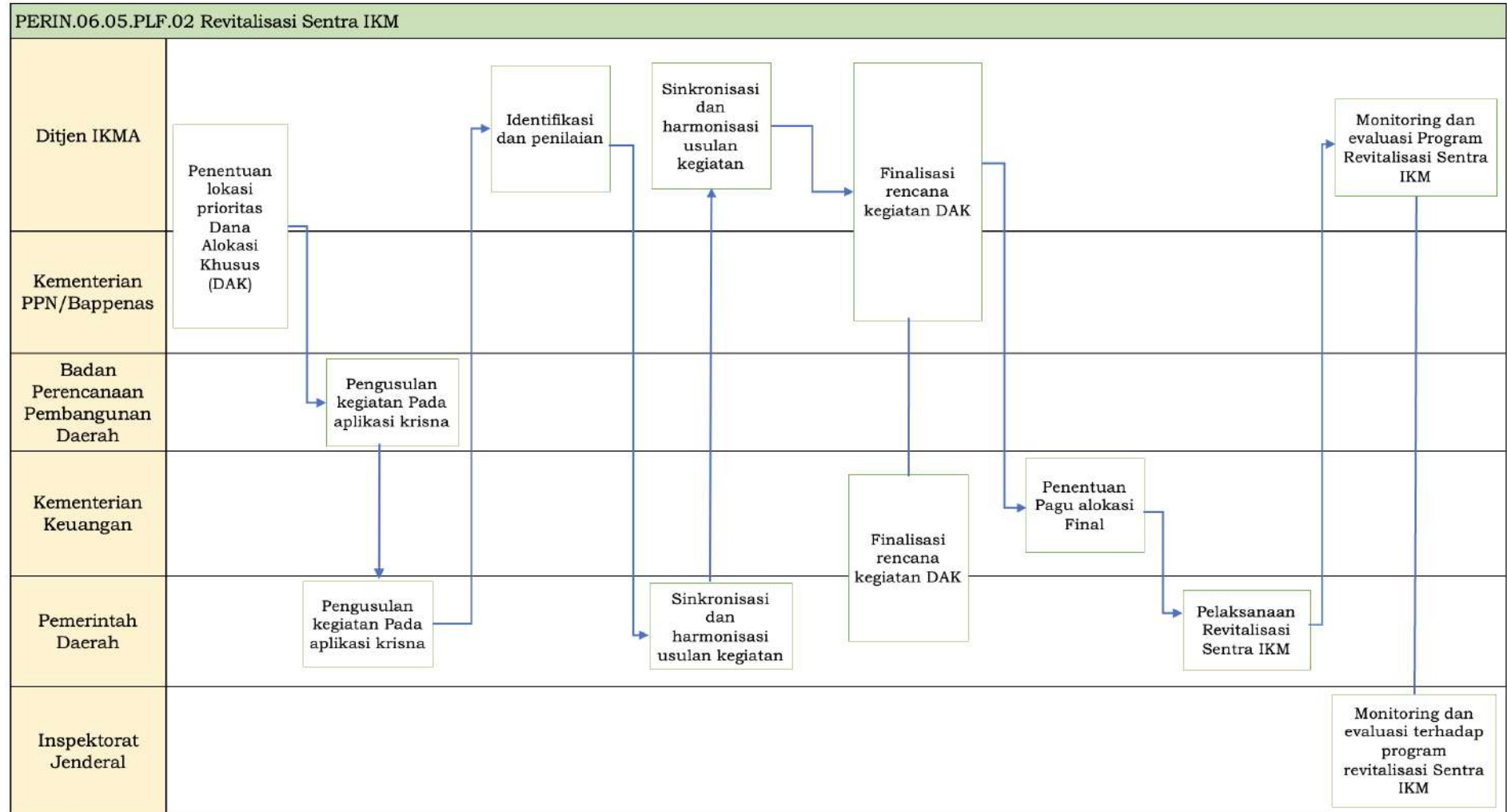
f. PERIN.06.04.PLF.06 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tertentu.



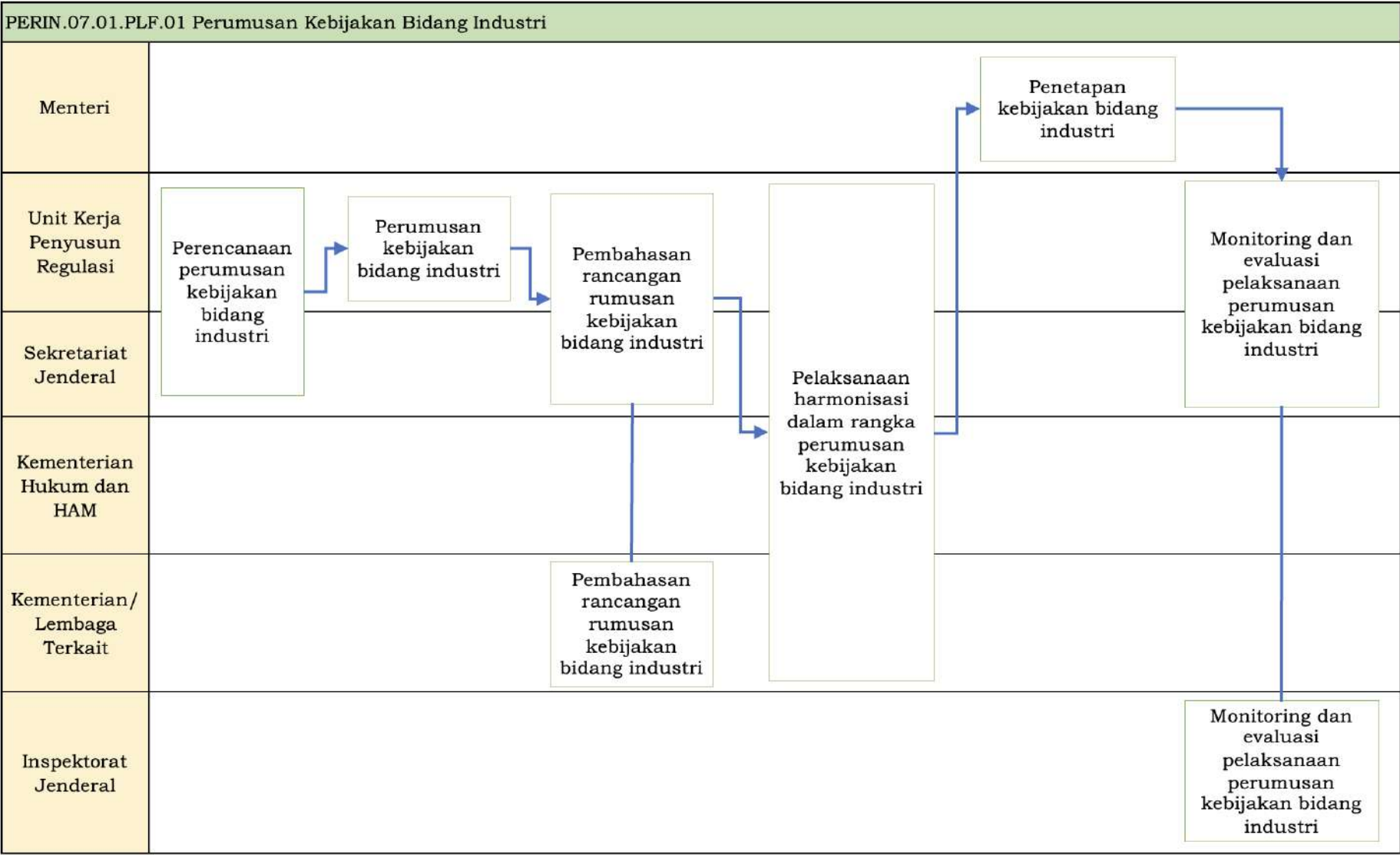
22. Sub-proses PERIN.06.05 Penyebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.06.05.PLF.01 Pembangunan Sentra IKM di Luar Pulau Jawa; dan



b. PERIN.06.05.PLF.02 Revitalisasi Sentra IKM.

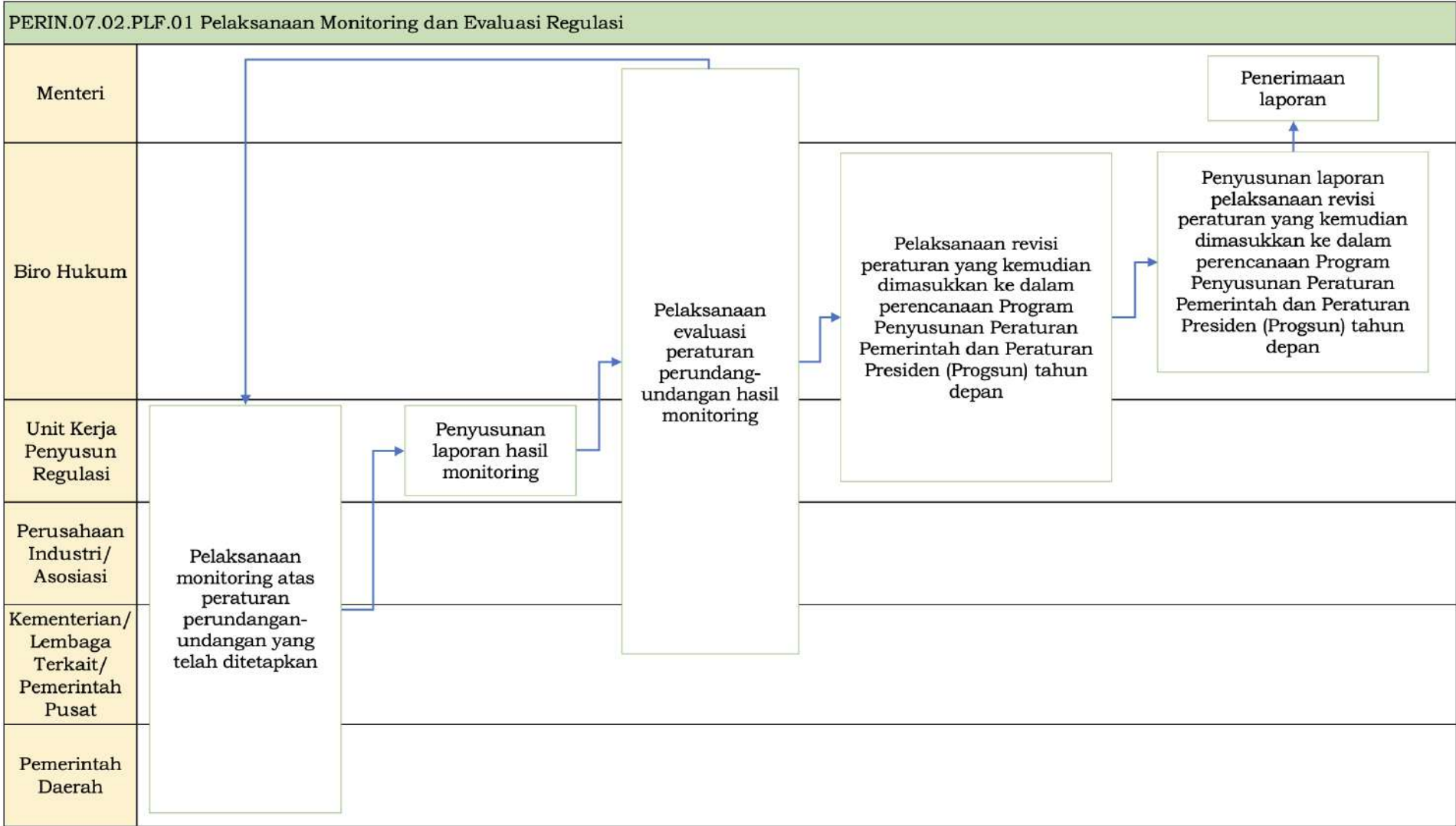


23. Sub-proses PERIN.07.01 Penyediaan Kebijakan Bidang Industri terdiri atas 1 (satu) peta lintas fungsi sebagai berikut:
PERIN.07.01.PLF.01 Perumusan Kebijakan Bidang Industri.

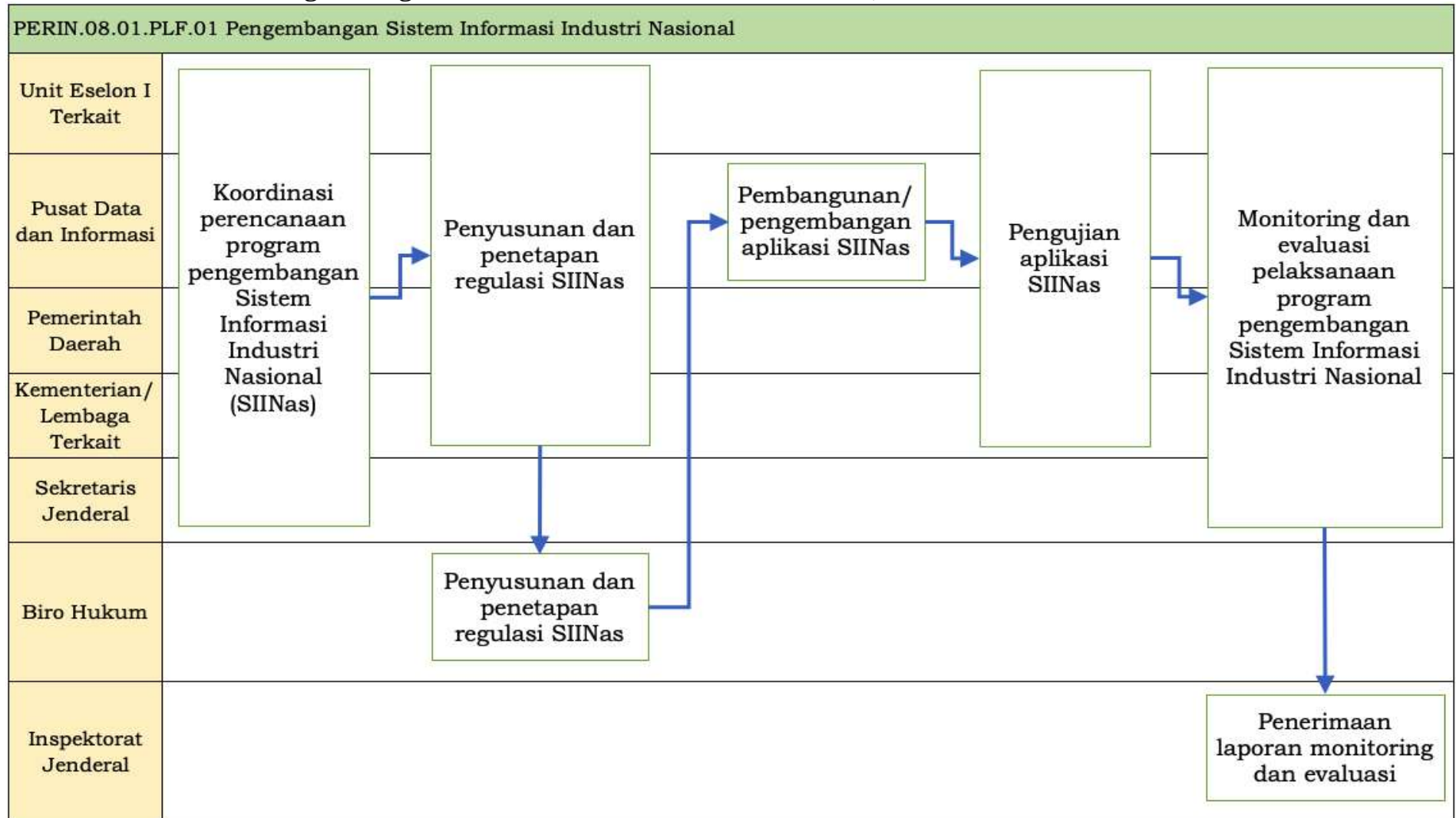


24. Sub-proses PERIN.07.02 Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Regulasi terdiri atas 1 (satu) peta lintas fungsi sebagai berikut:

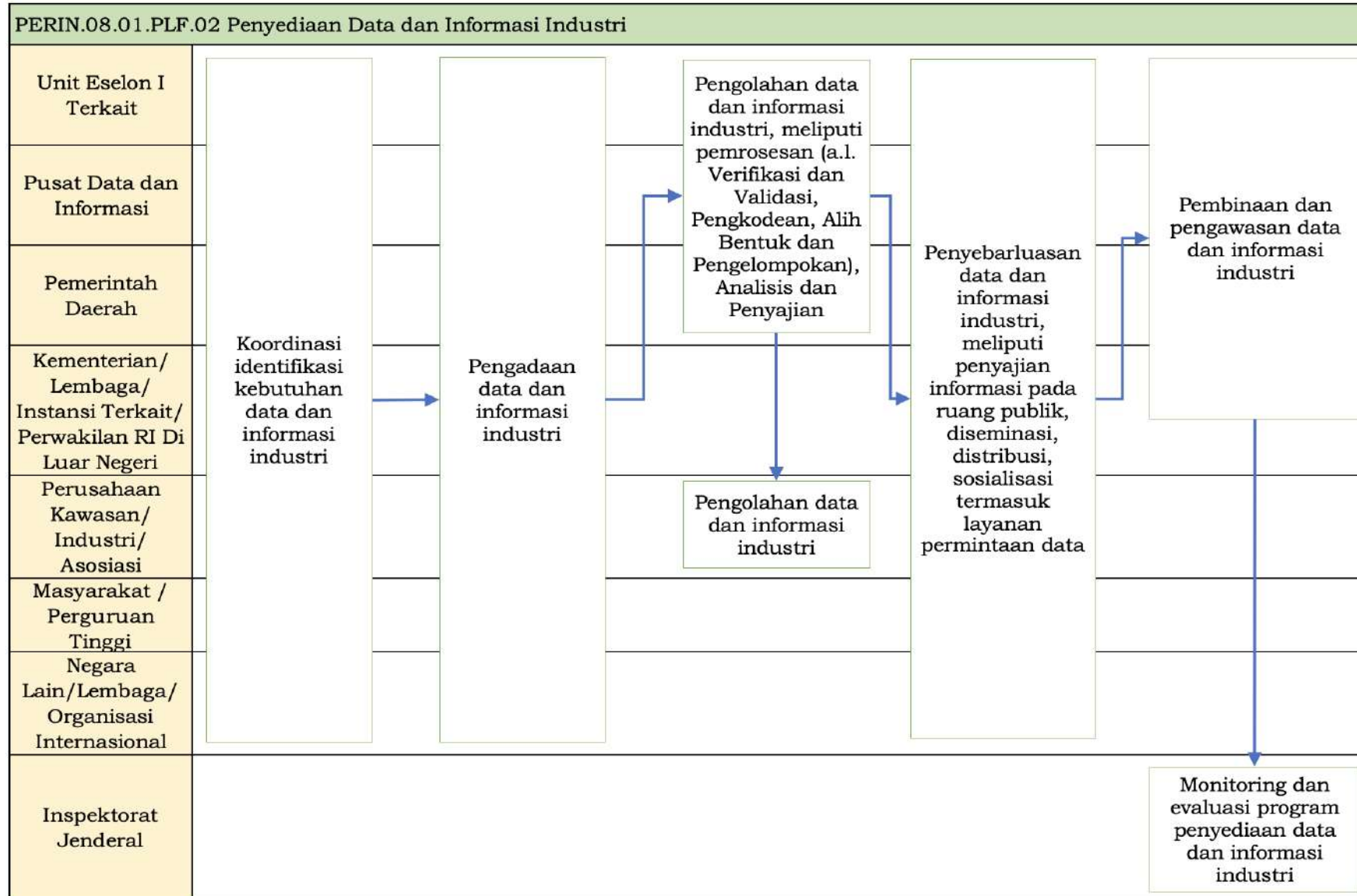
PERIN.07.02.PLF.01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Regulasi.



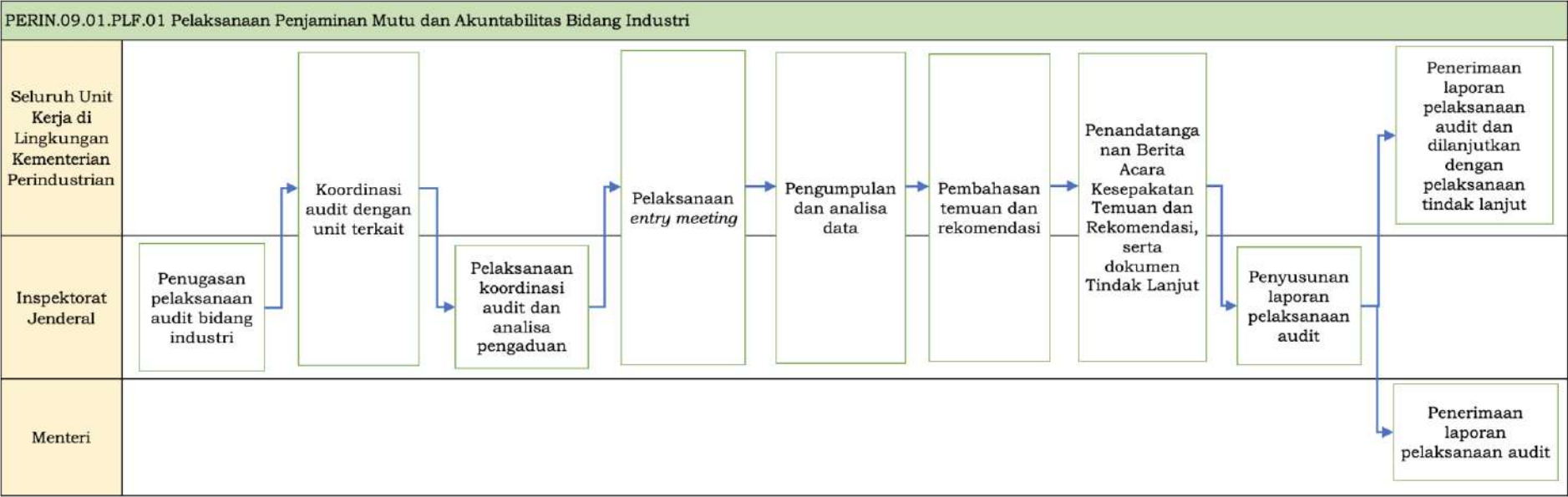
25. Sub-proses PERIN.08.01 Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.08.01.PLF.01 Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional; dan



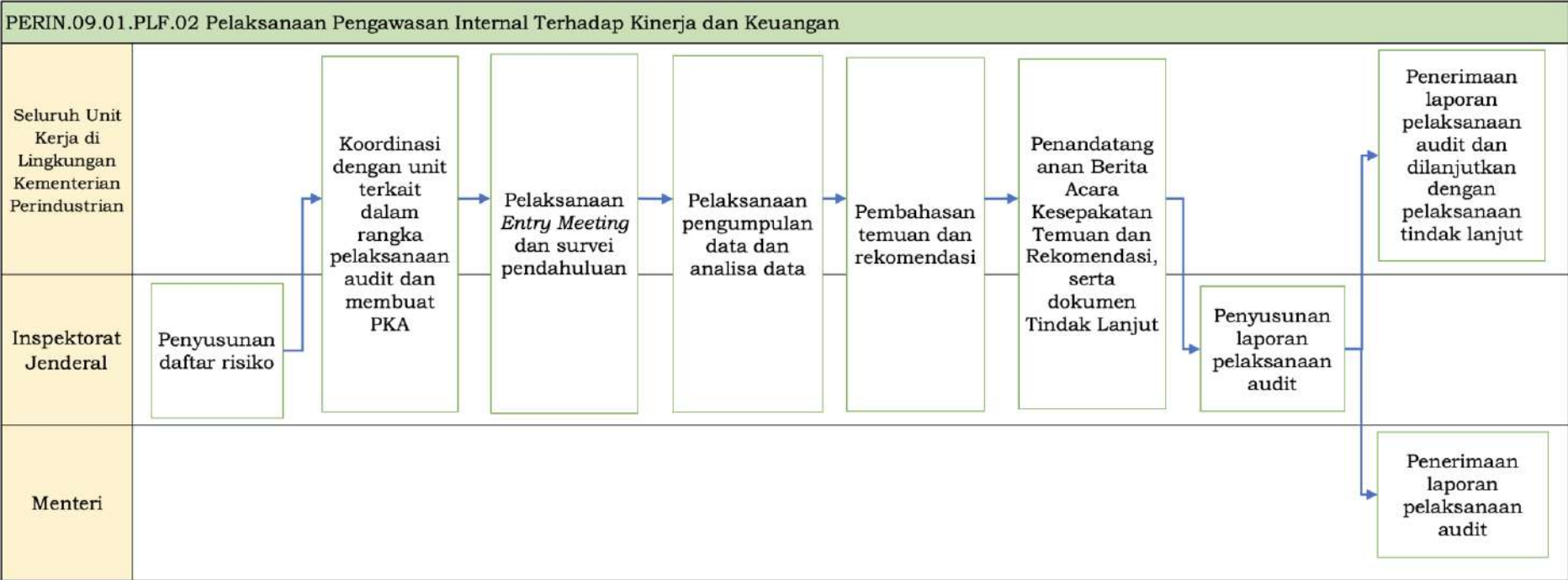
b. PERIN.08.01.PLF.02 Penyediaan Data dan Informasi Industri.



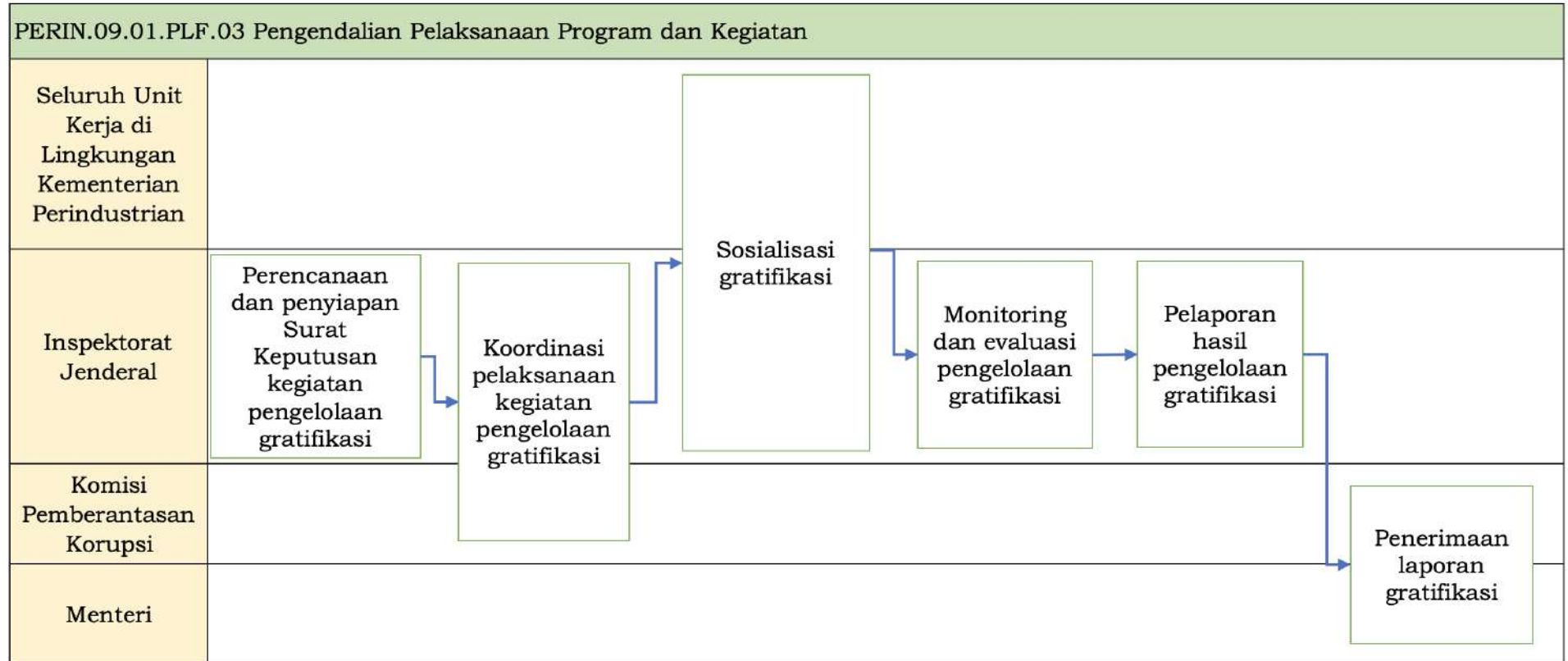
26. Sub-proses PERIN.09.01 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.09.01.PLF.01 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Dan Akuntabilitas Bidang Industri;



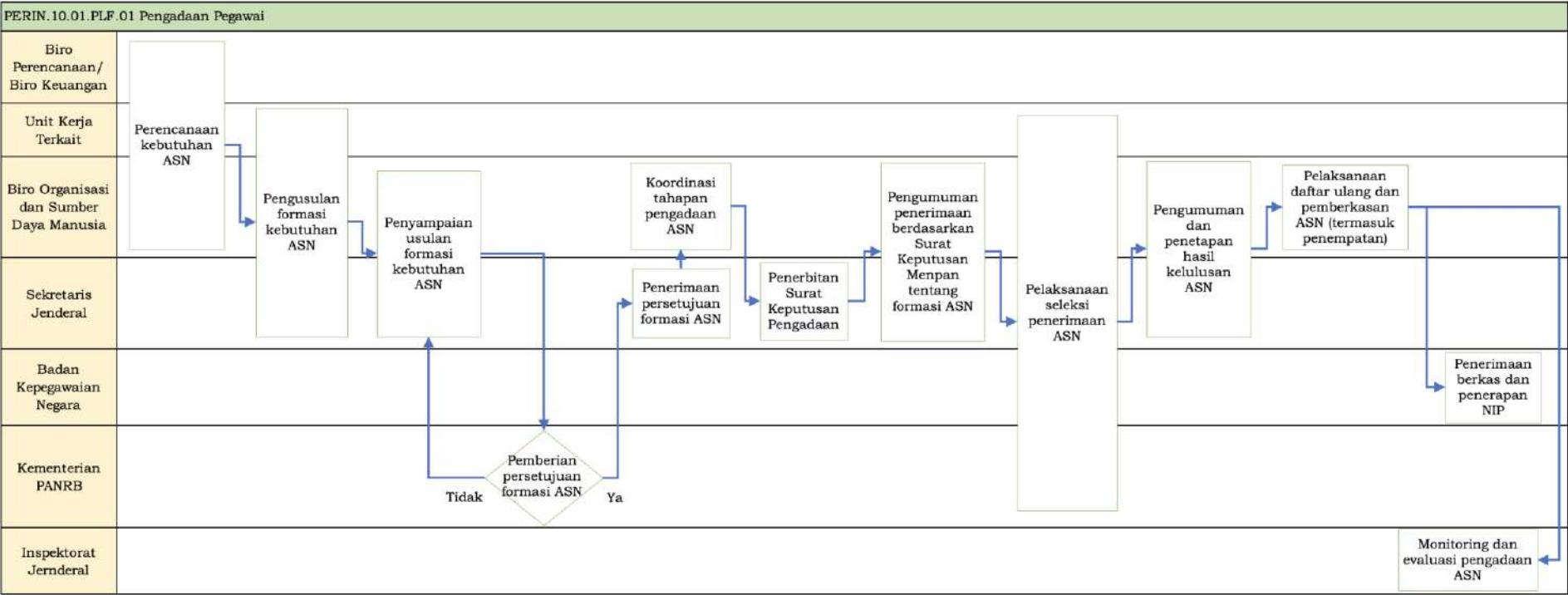
b. PERIN.09.01.PLF.02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan; dan



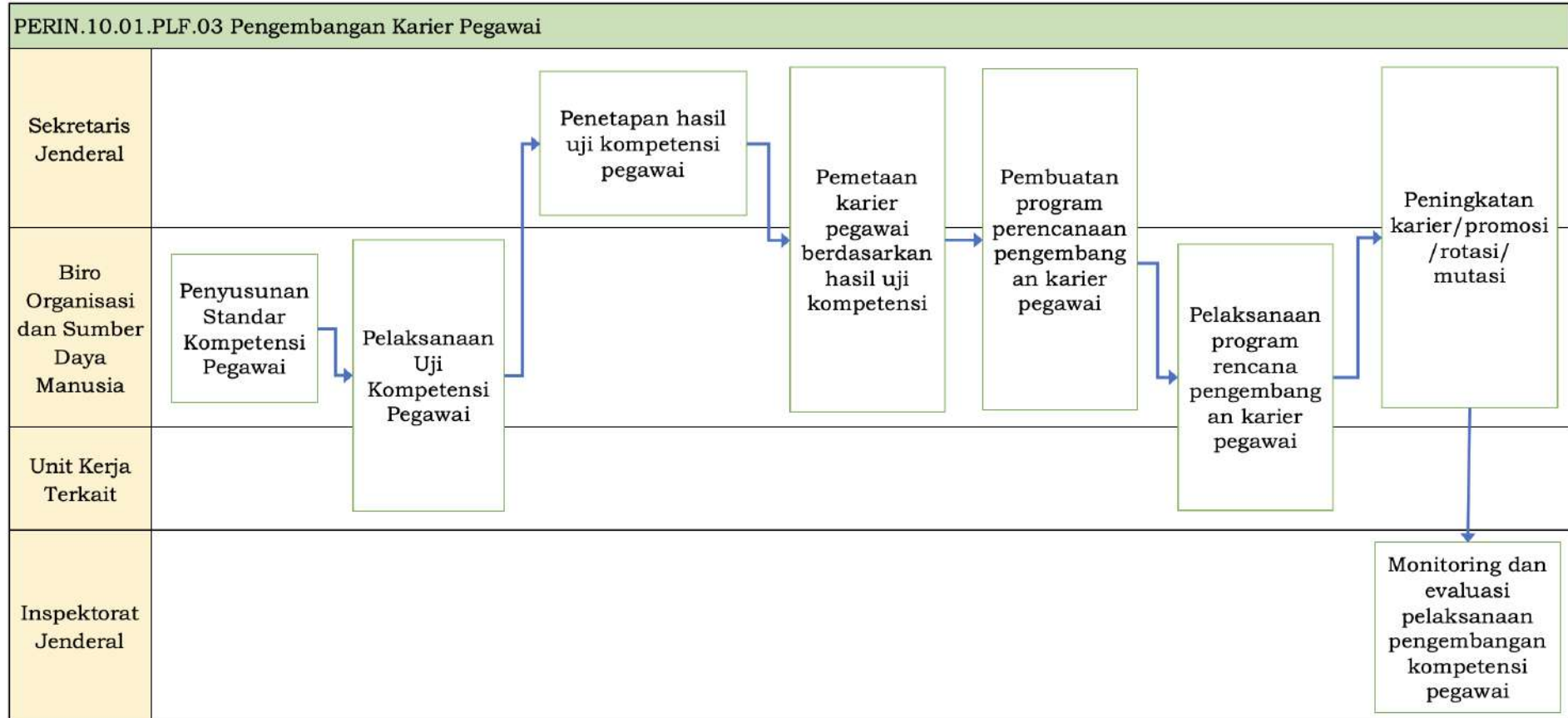
c. PERIN.09.01.PLF.03 Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.



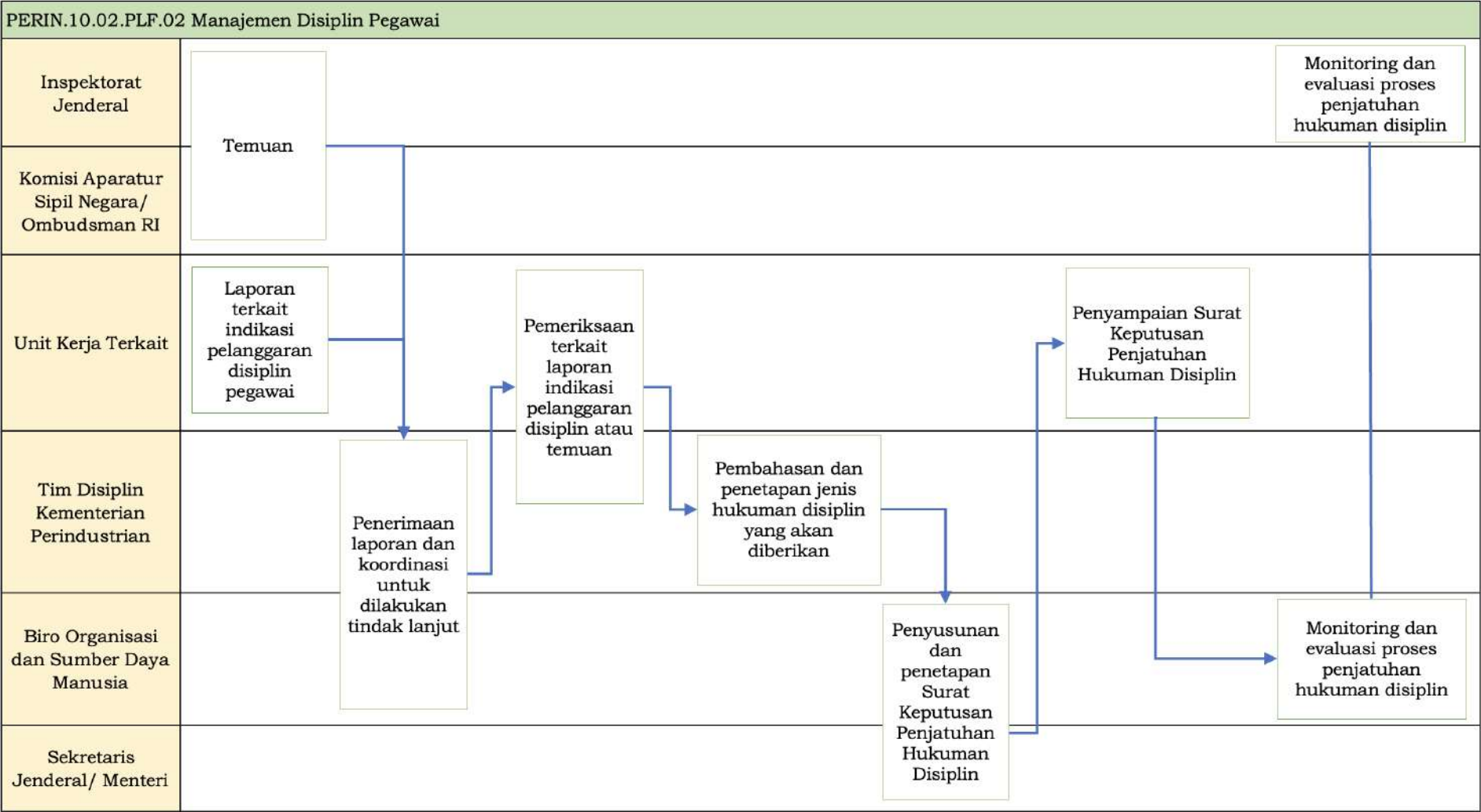
27. Sub-proses PERIN.10.01 Pengembangan ASN terdiri atas 3 (tiga) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.10.01.PLF.01 Pengadaan Pegawai;



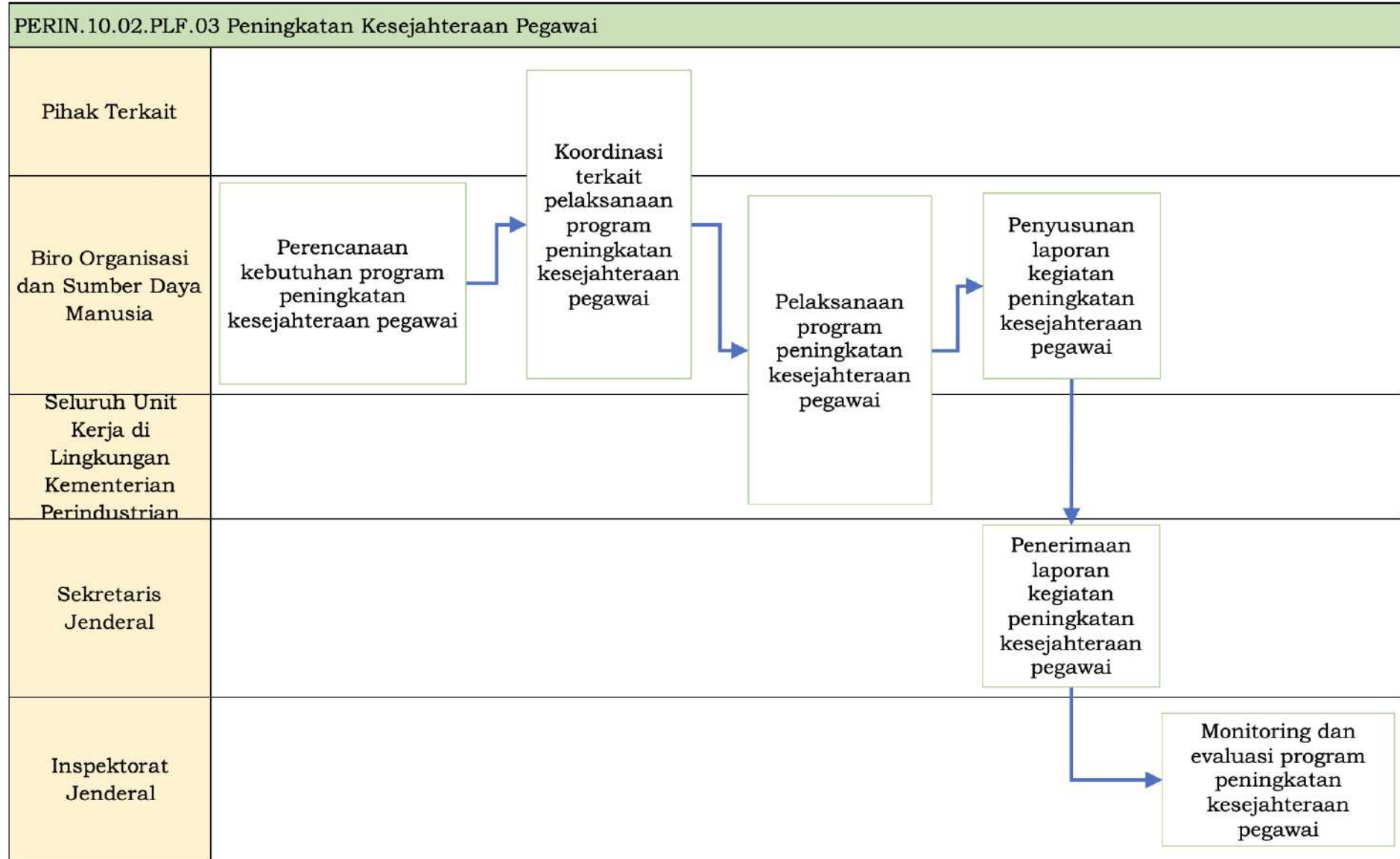
c. PERIN.10.01.PLF.03 Pengembangan Karier Pegawai.



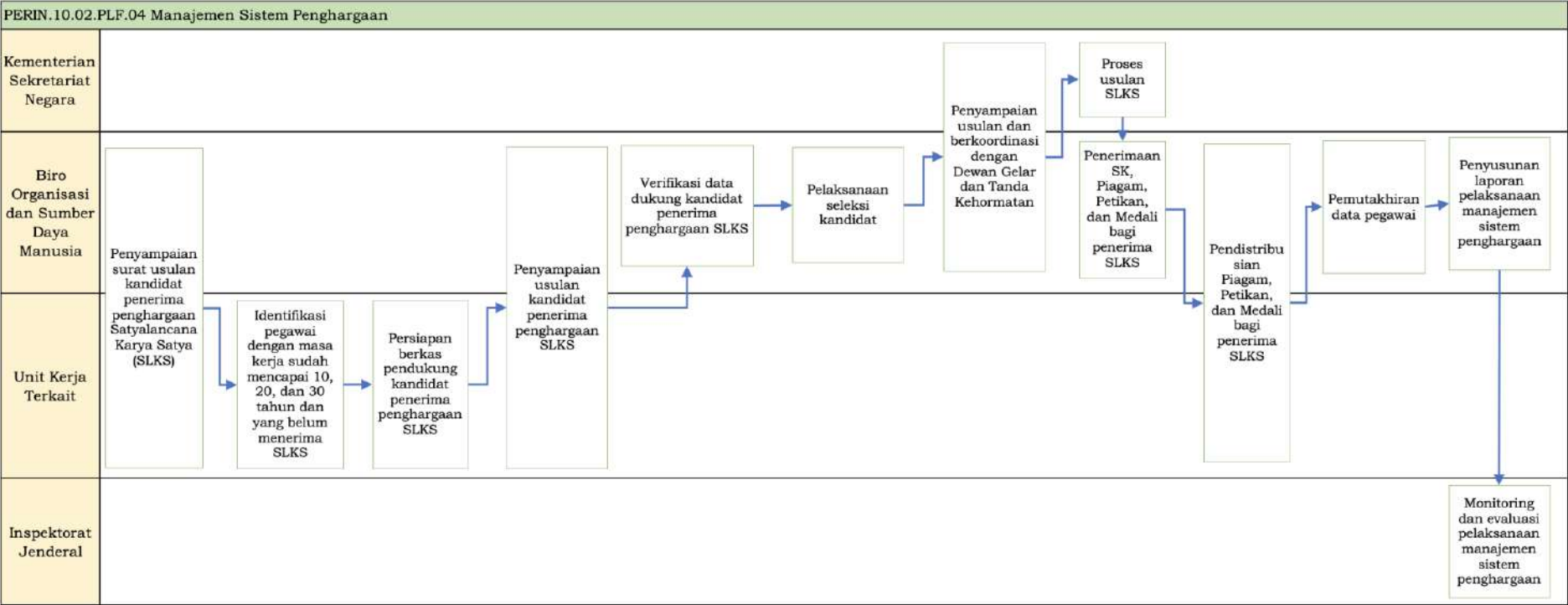
b. PERIN.10.02.PLF.02 Manajemen Disiplin Pegawai;



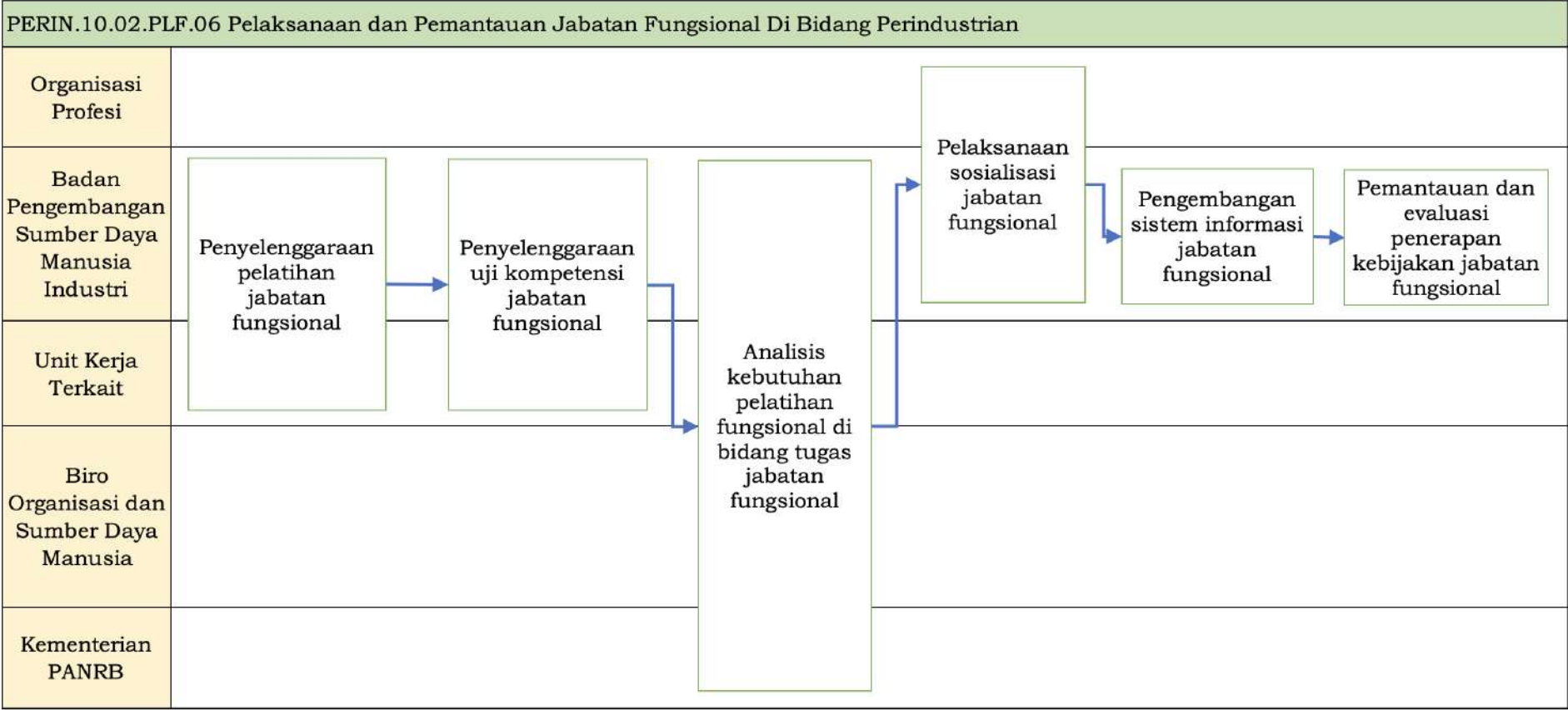
c. PERIN.10.02.PLF.03 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;



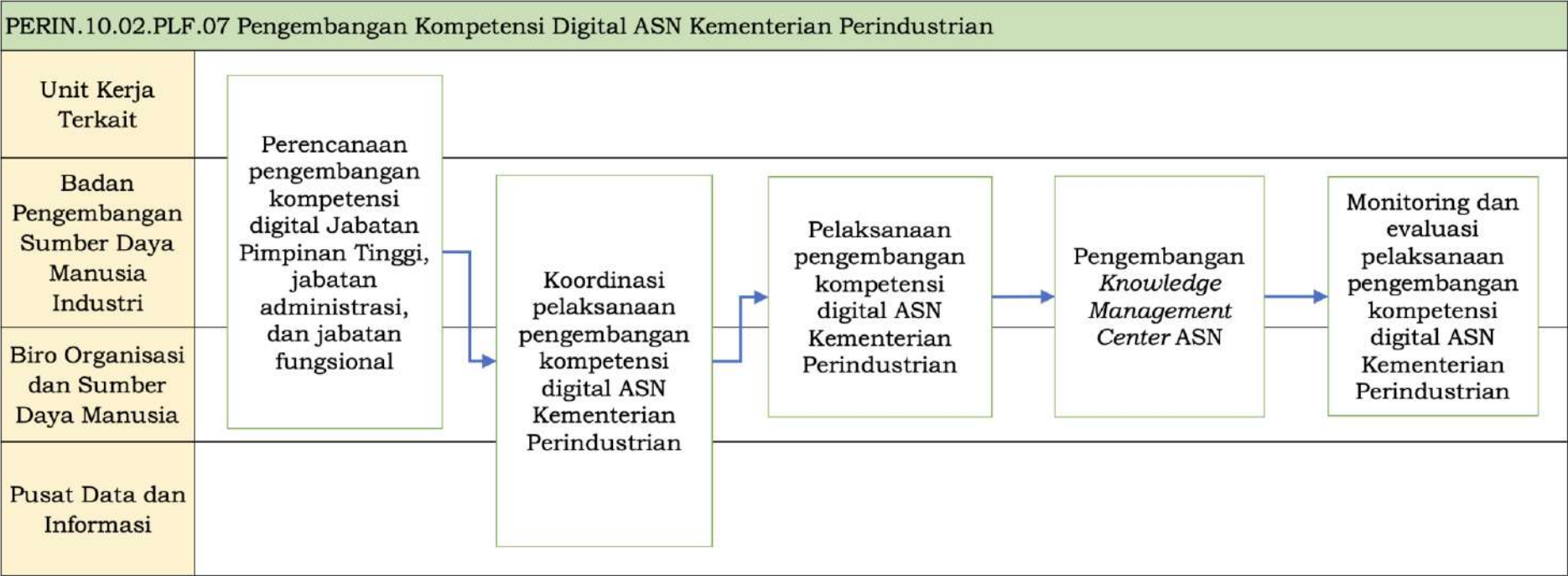
d. PERIN.10.02.PLF.04 Manajemen Sistem Penghargaan;



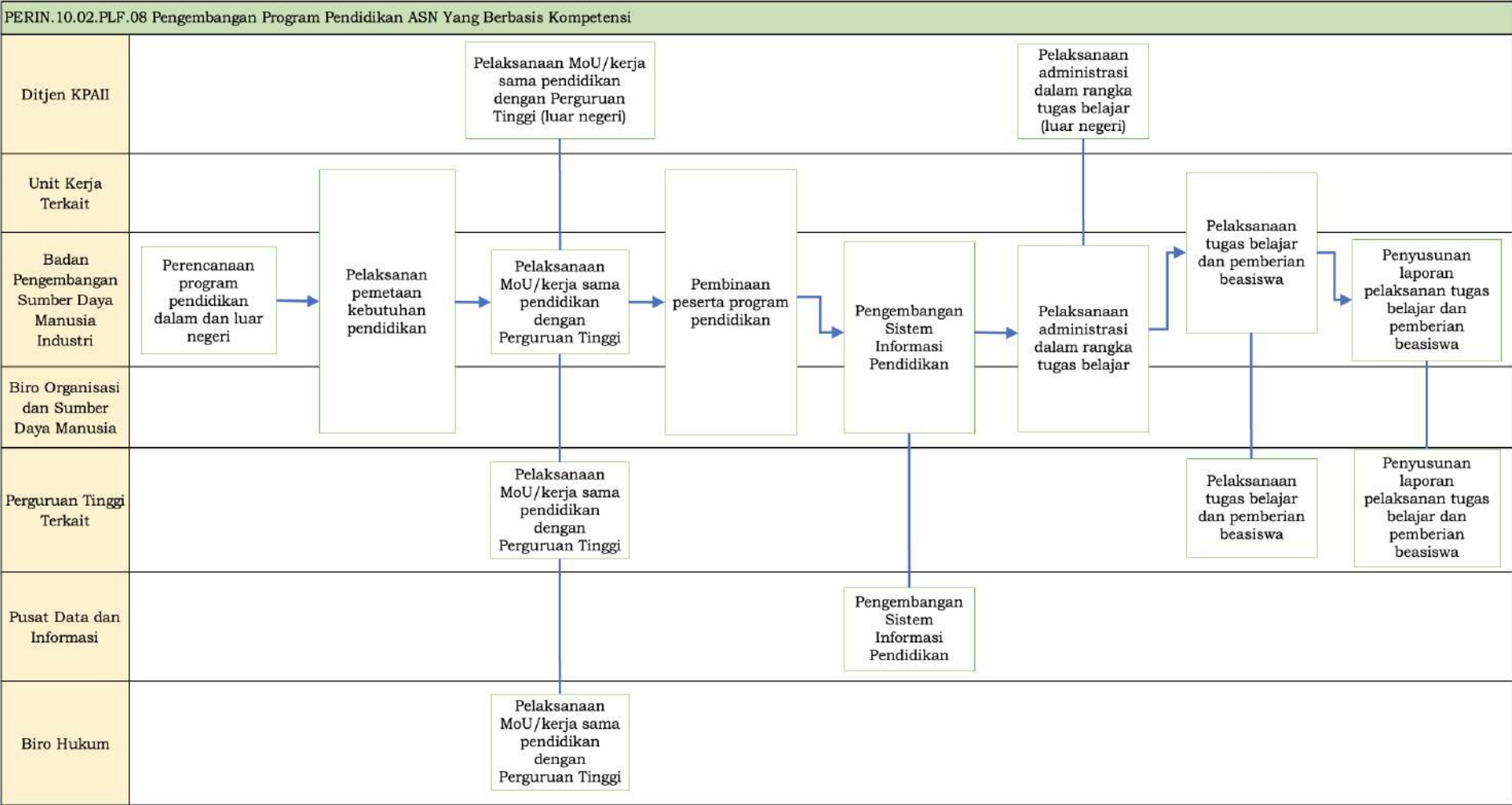
f. PERIN.10.02.PLF.06 Pelaksanaan dan Pemantauan Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian;



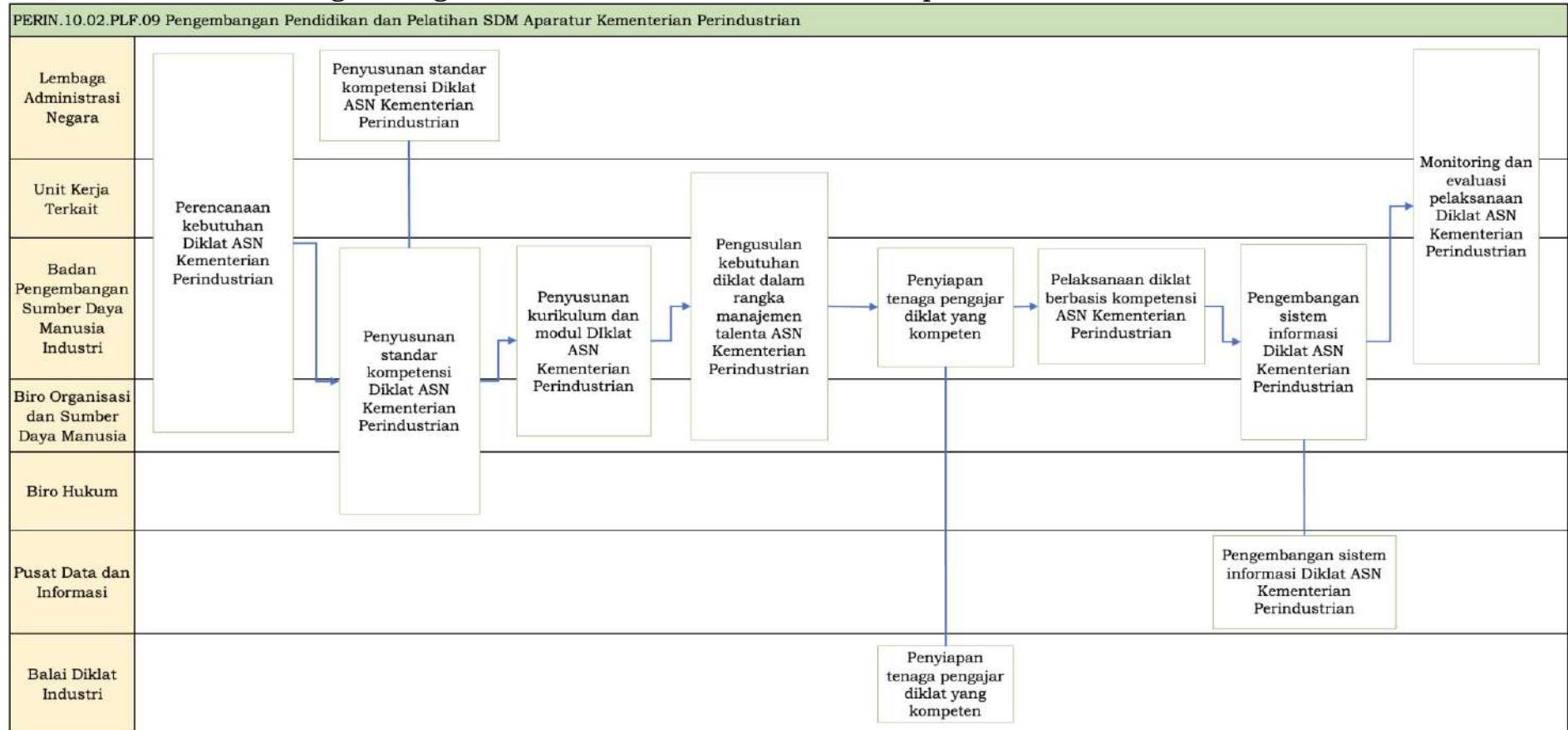
g. PERIN.10.02.PLF.07 Pengembangan Kompetensi Digital ASN Kementerian Perindustrian;



h. PERIN.10.02.PLF.08 Pengembangan Program Pendidikan ASN yang Berbasis Kompetensi; dan

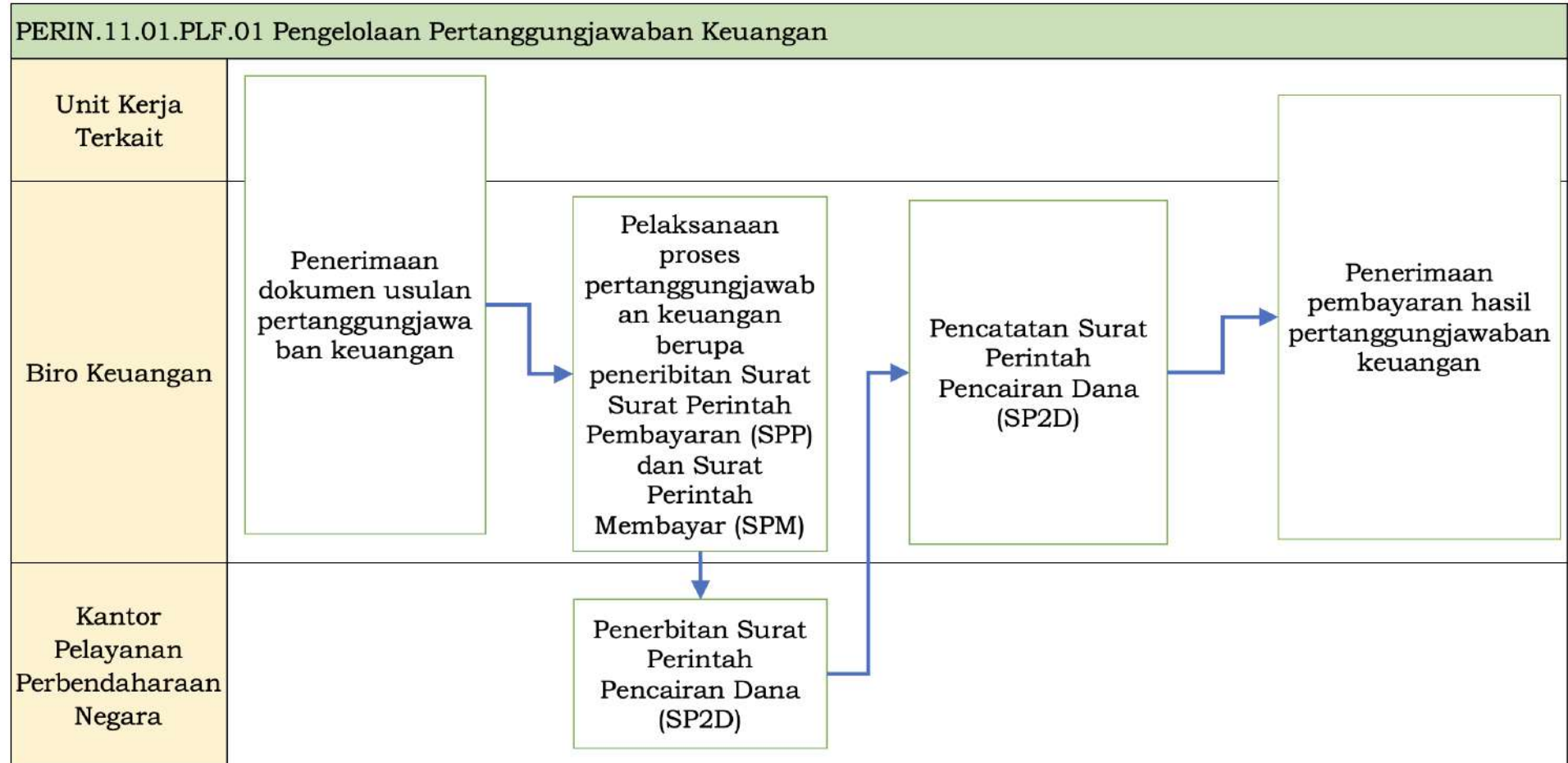


i. PERIN.10.02.PLF.09 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian.

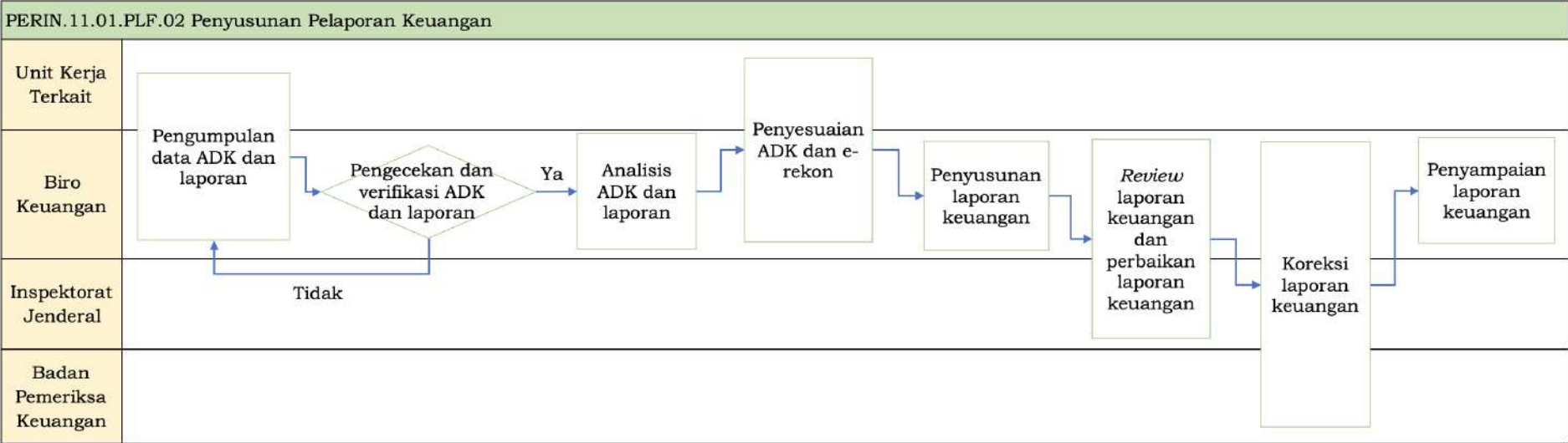


29. Sub-proses PERIN.11.01 Pelaksanaan Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien terdiri atas 14 (empat belas) peta lintas fungsi sebagai berikut:

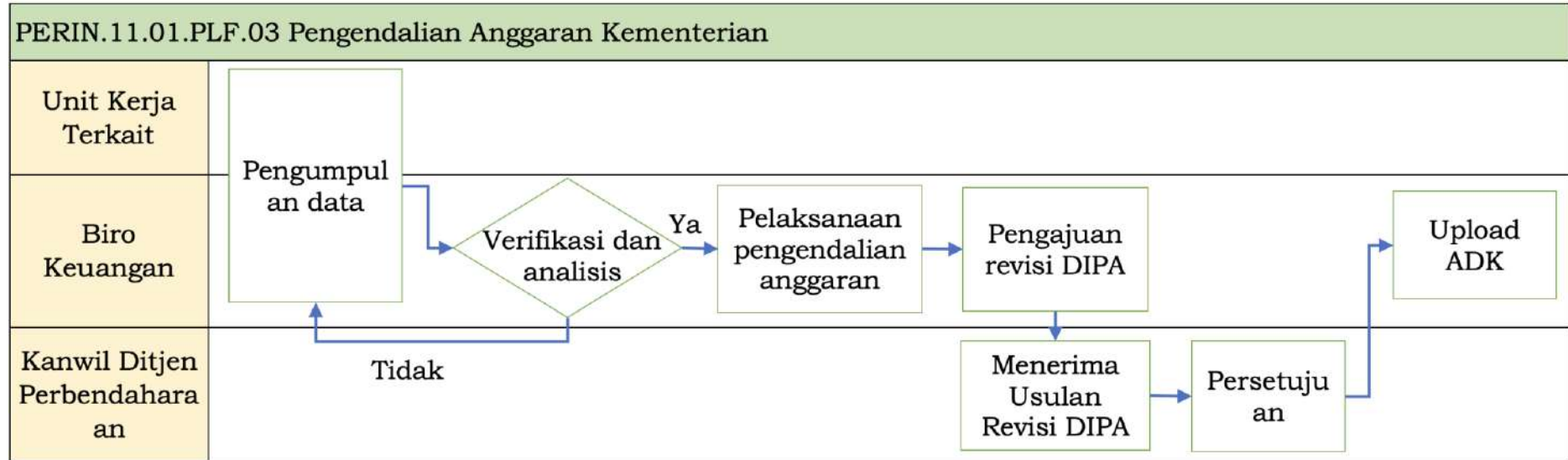
a. PERIN.11.01.PLF.01 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan;



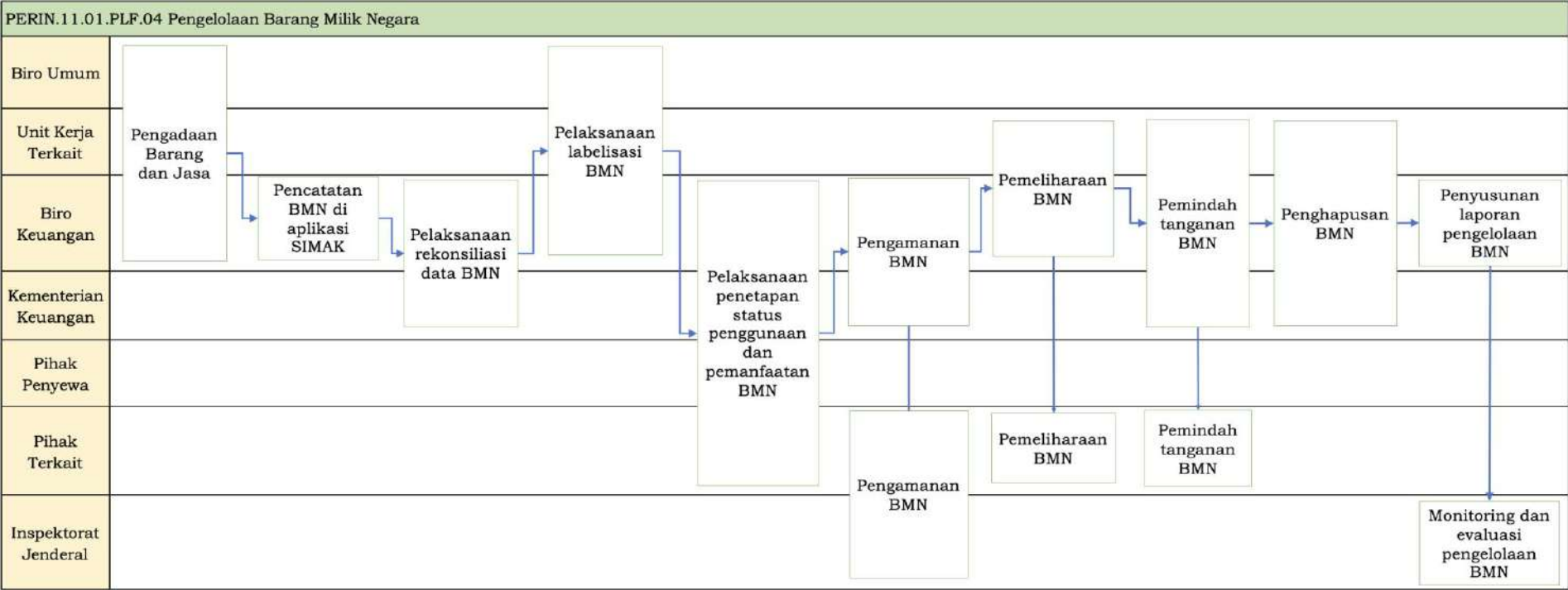
b. PERIN.11.01.PLF.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan;



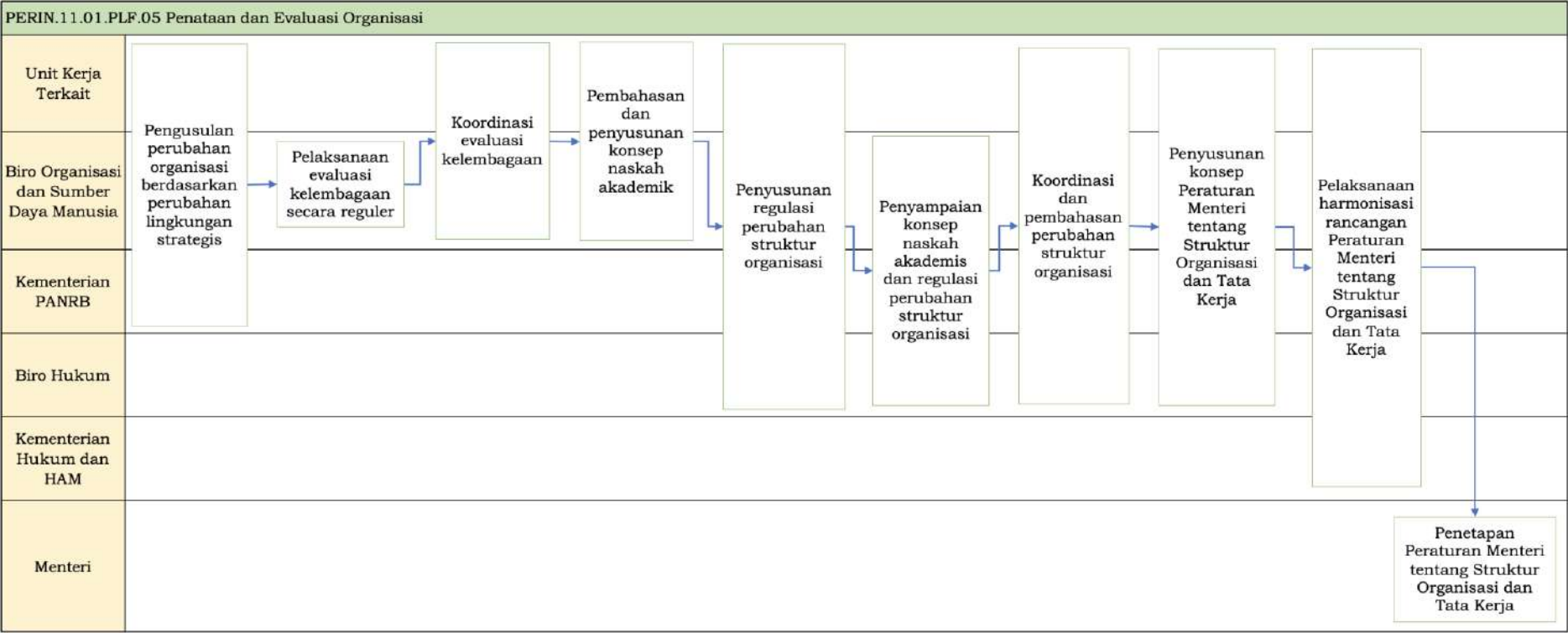
c. PERIN.11.01.PLF.03 Pengendalian Anggaran Kementerian;



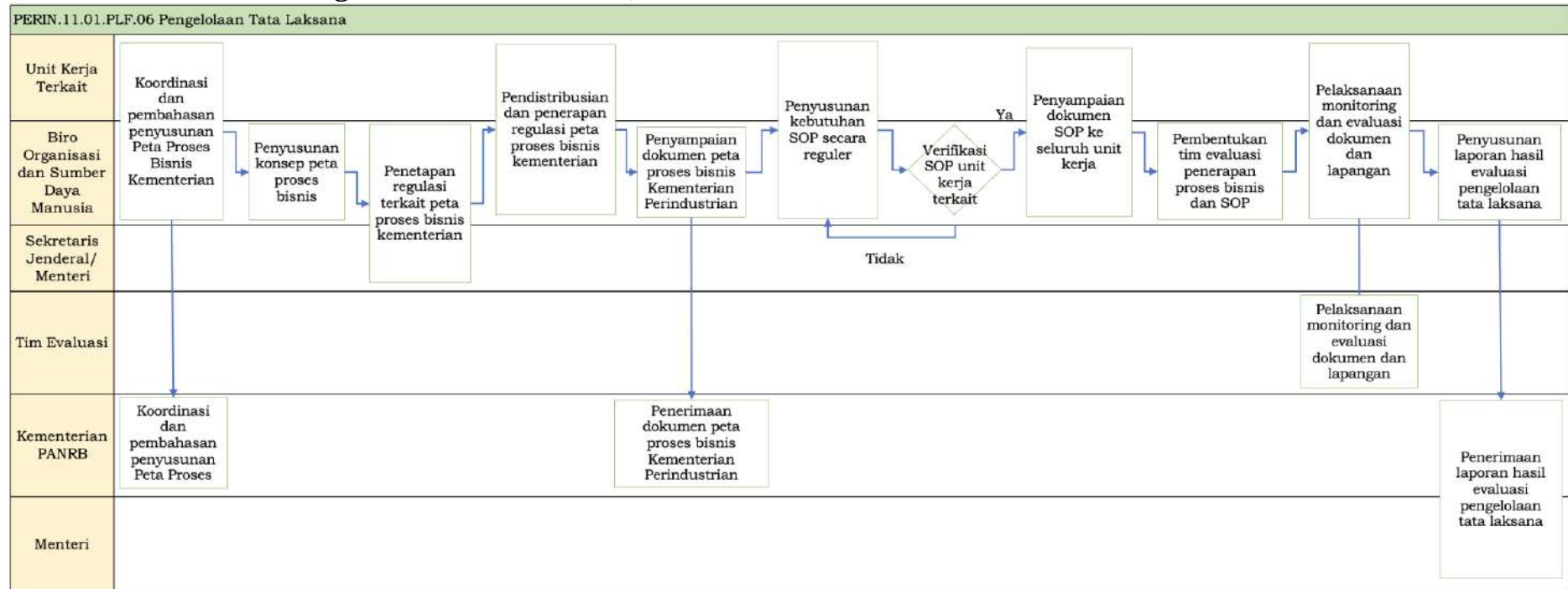
d. PERIN.11.01.PLF.04 Pengelolaan Barang Milik Negara;



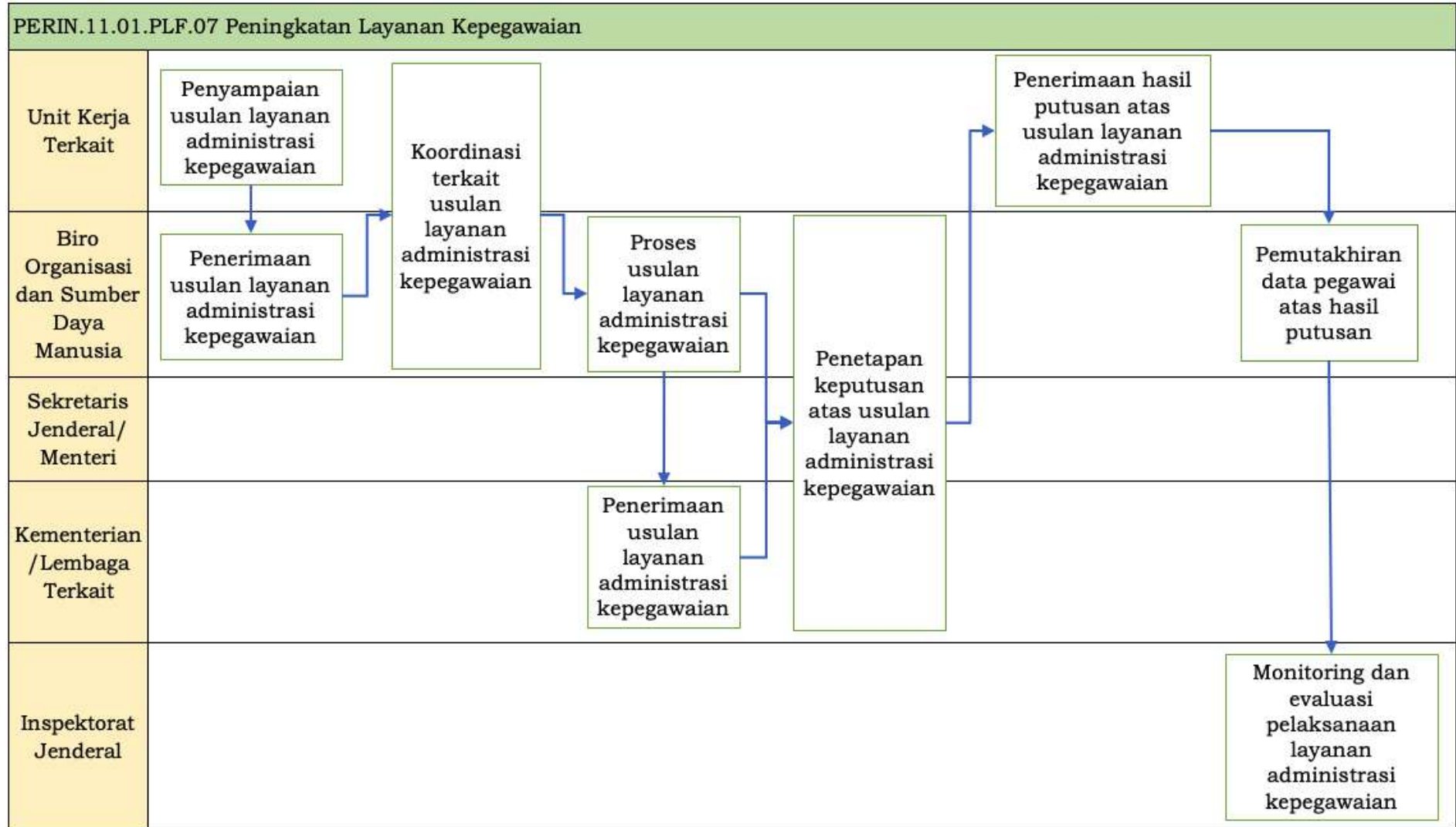
e. PERIN.11.01.PLF.05 Penataan dan Evaluasi Organisasi;



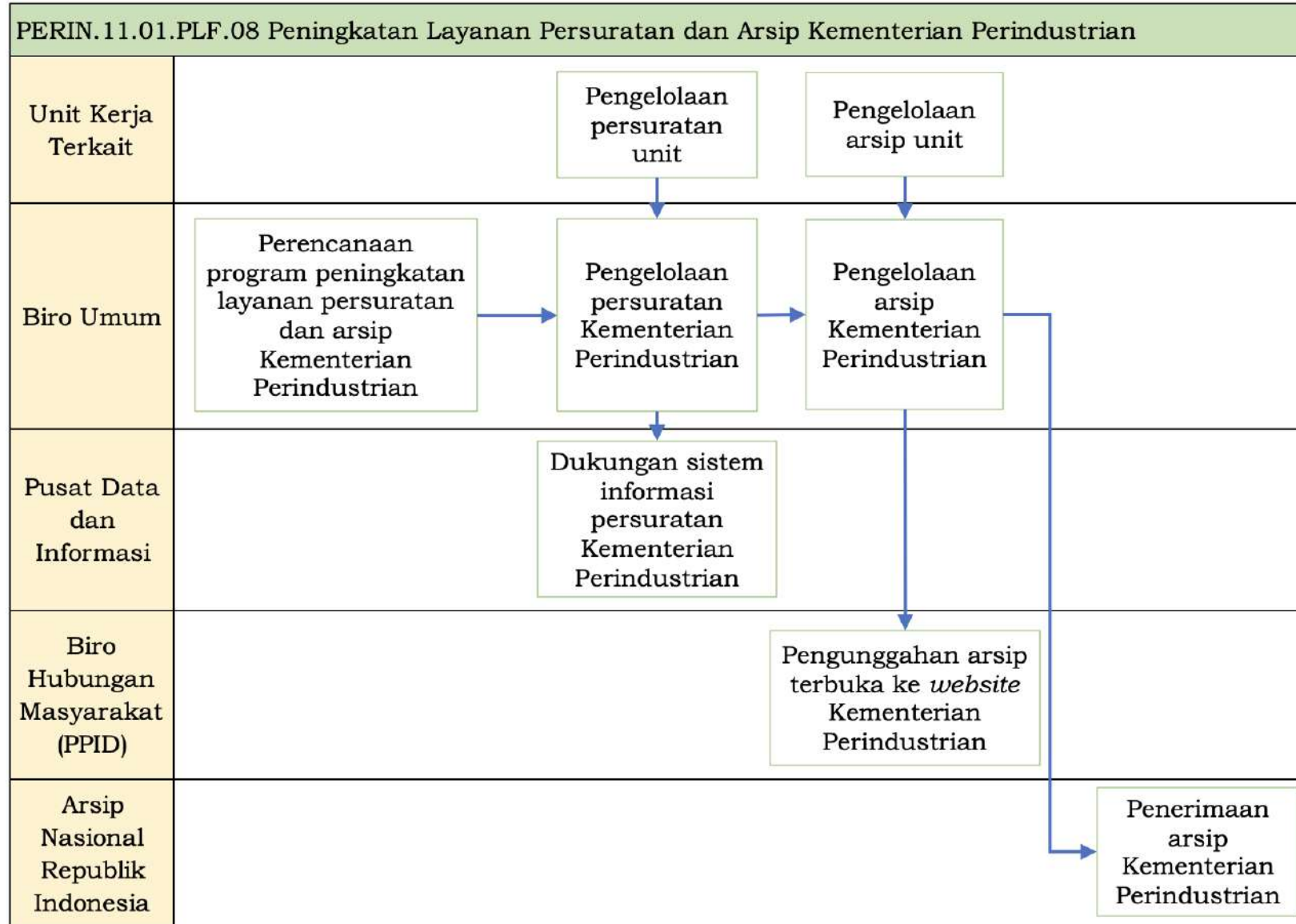
f. PERIN.11.01.PLF.06 Pengelolaan Tata Laksana;



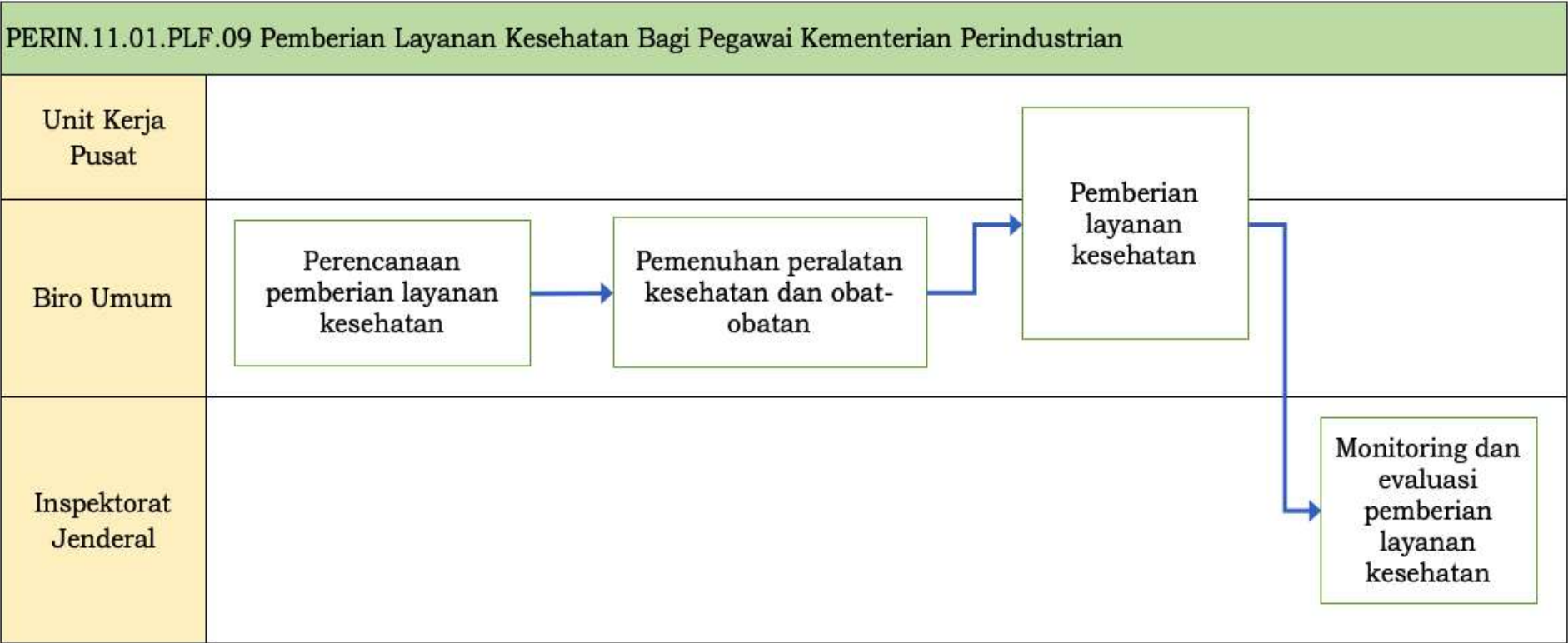
g. PERIN.11.01.PLF.07 Peningkatan Layanan Kepegawaian;



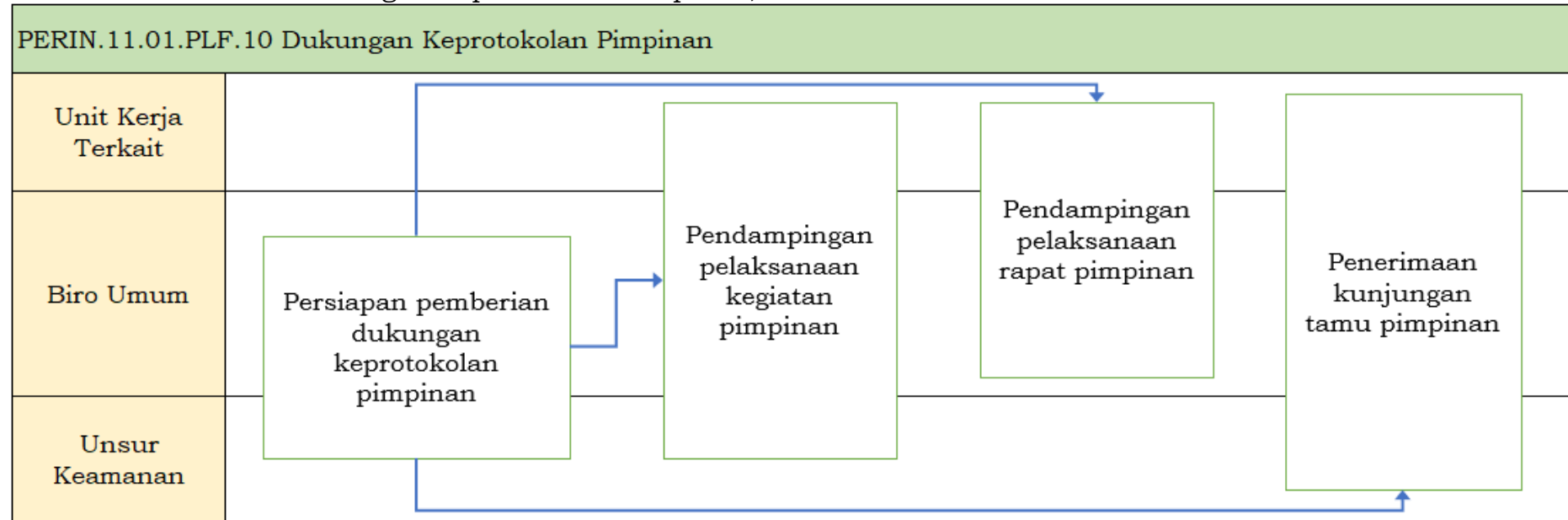
- h. PERIN.11.01.PLF.08 Peningkatan Layanan Persuratan dan Arsip Kementerian Perindustrian;



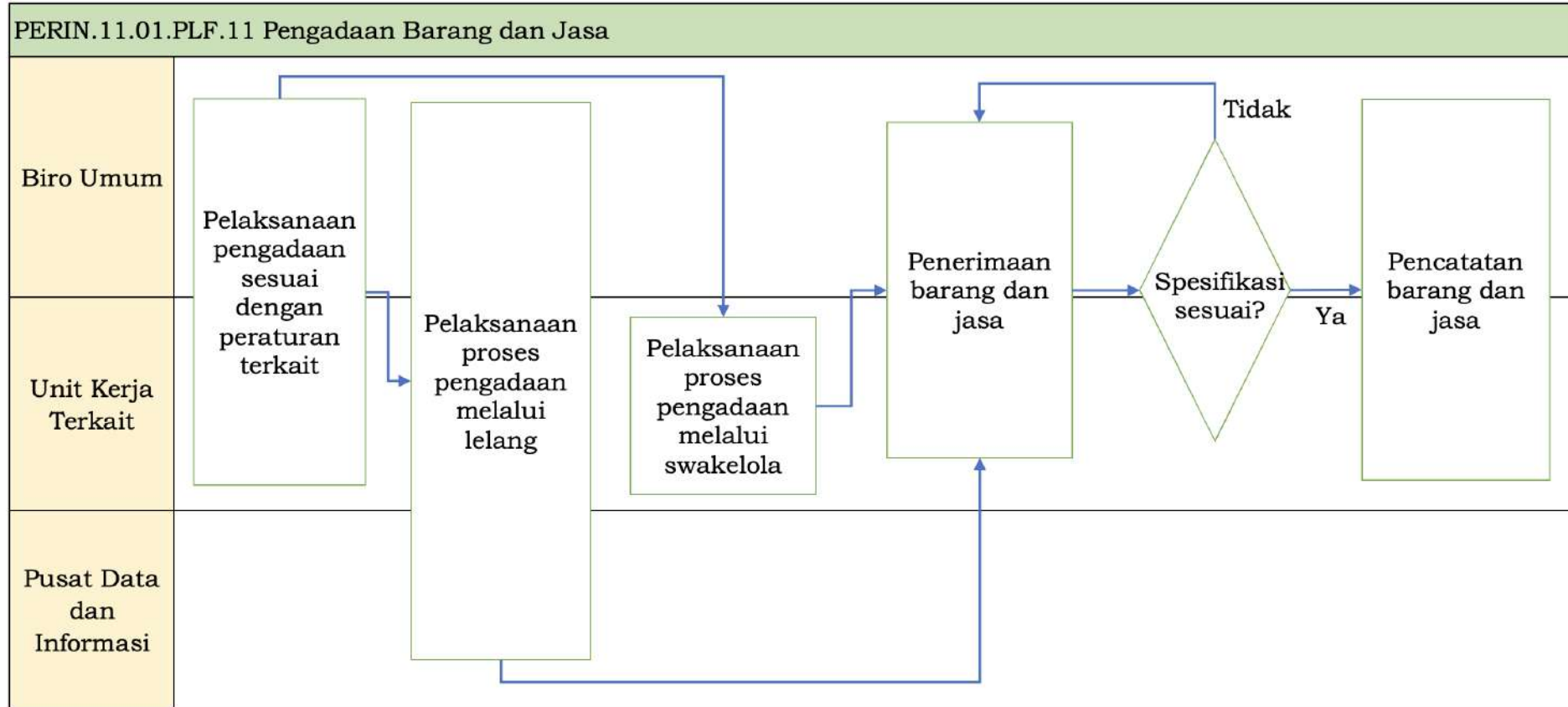
i. PERIN.11.01.PLF.09 Pemberian Layanan Kesehatan Bagi Pegawai Kementerian Perindustrian;



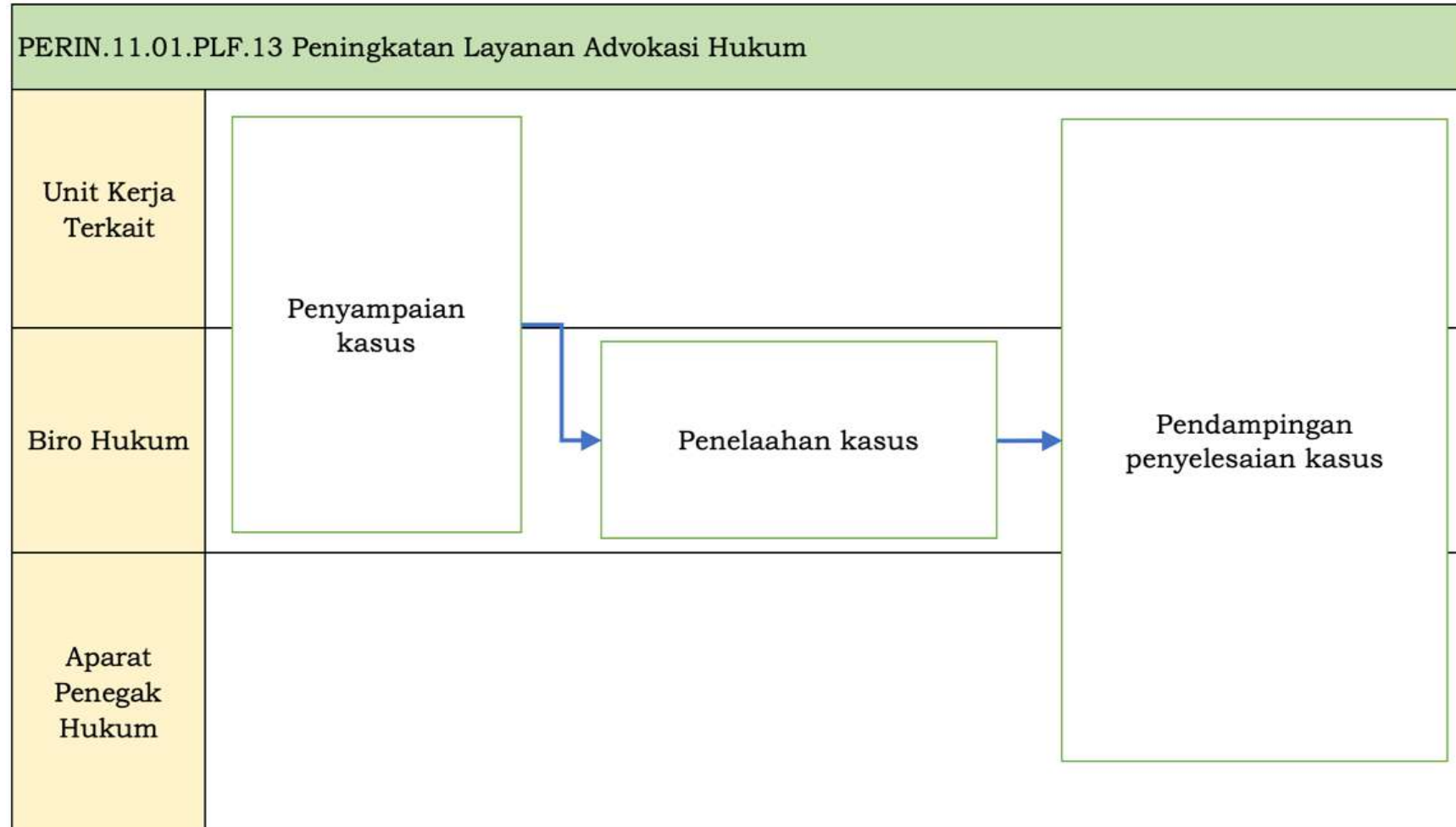
j. PERIN.11.01.PLF.10 Dukungan Keprotokolan Pimpinan;



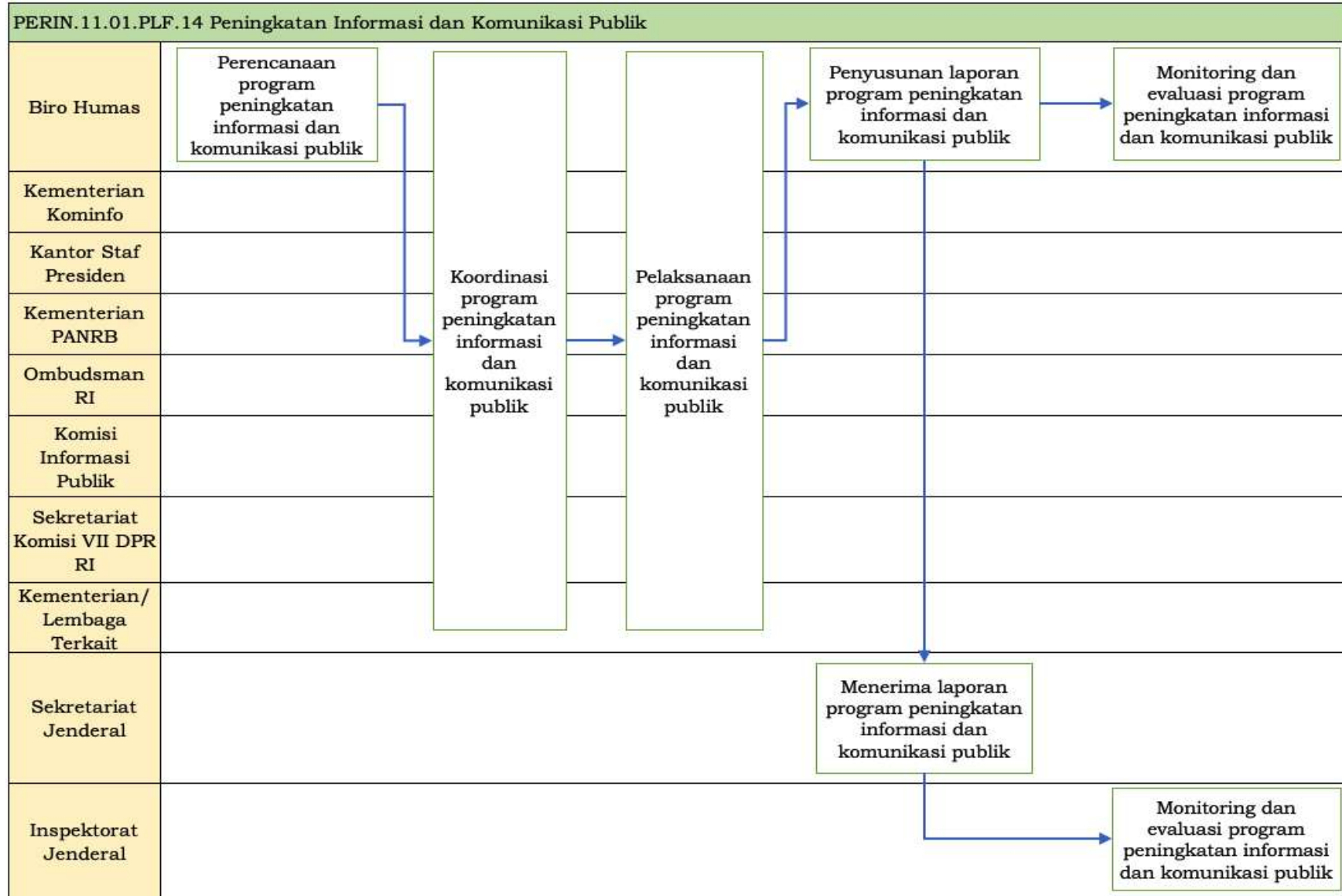
k. PERIN.11.01.PLF.11 Pengadaan Barang dan Jasa; dan



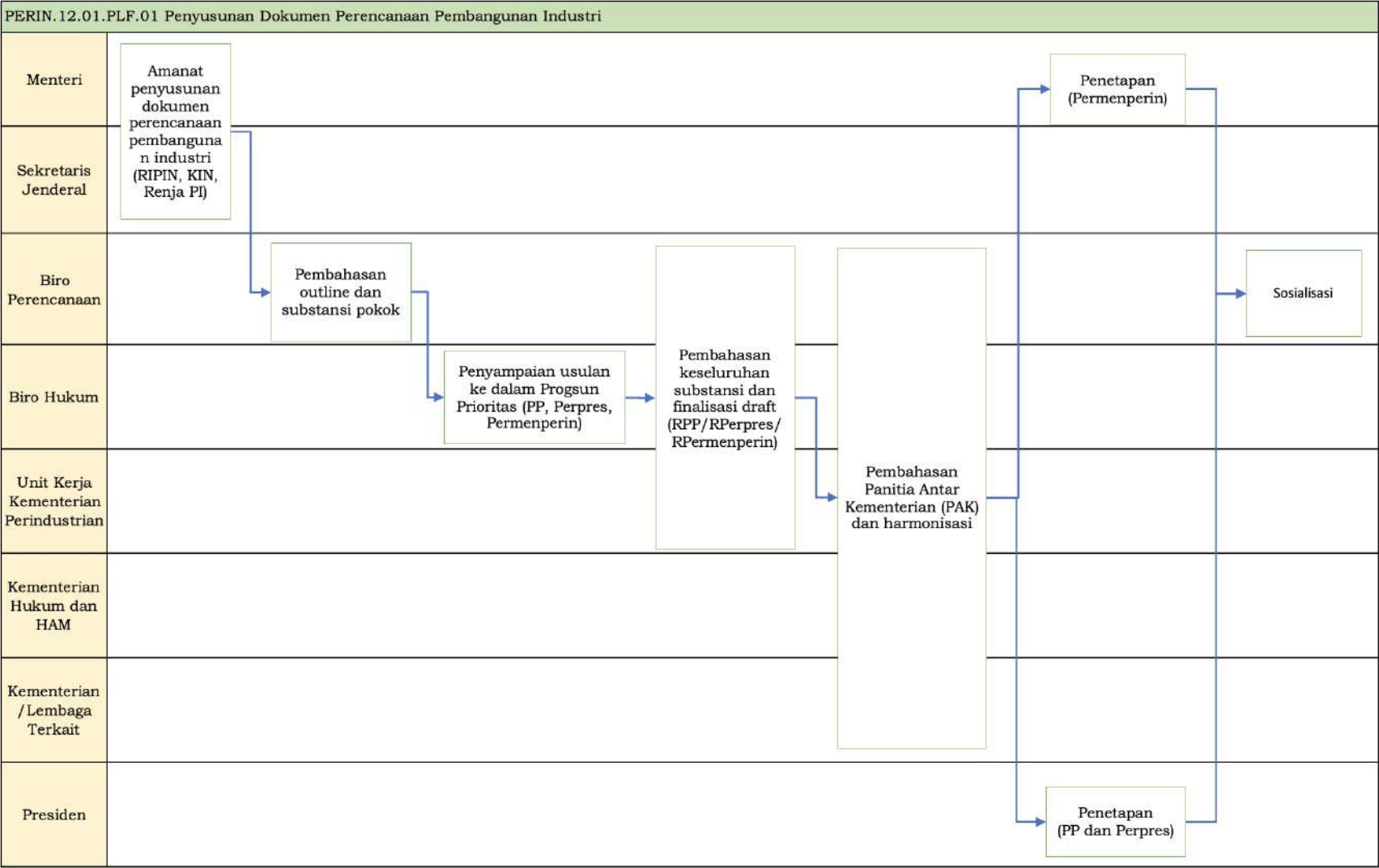
m. PERIN.11.01.PLF.13 Peningkatan Layanan Advokasi Hukum; dan



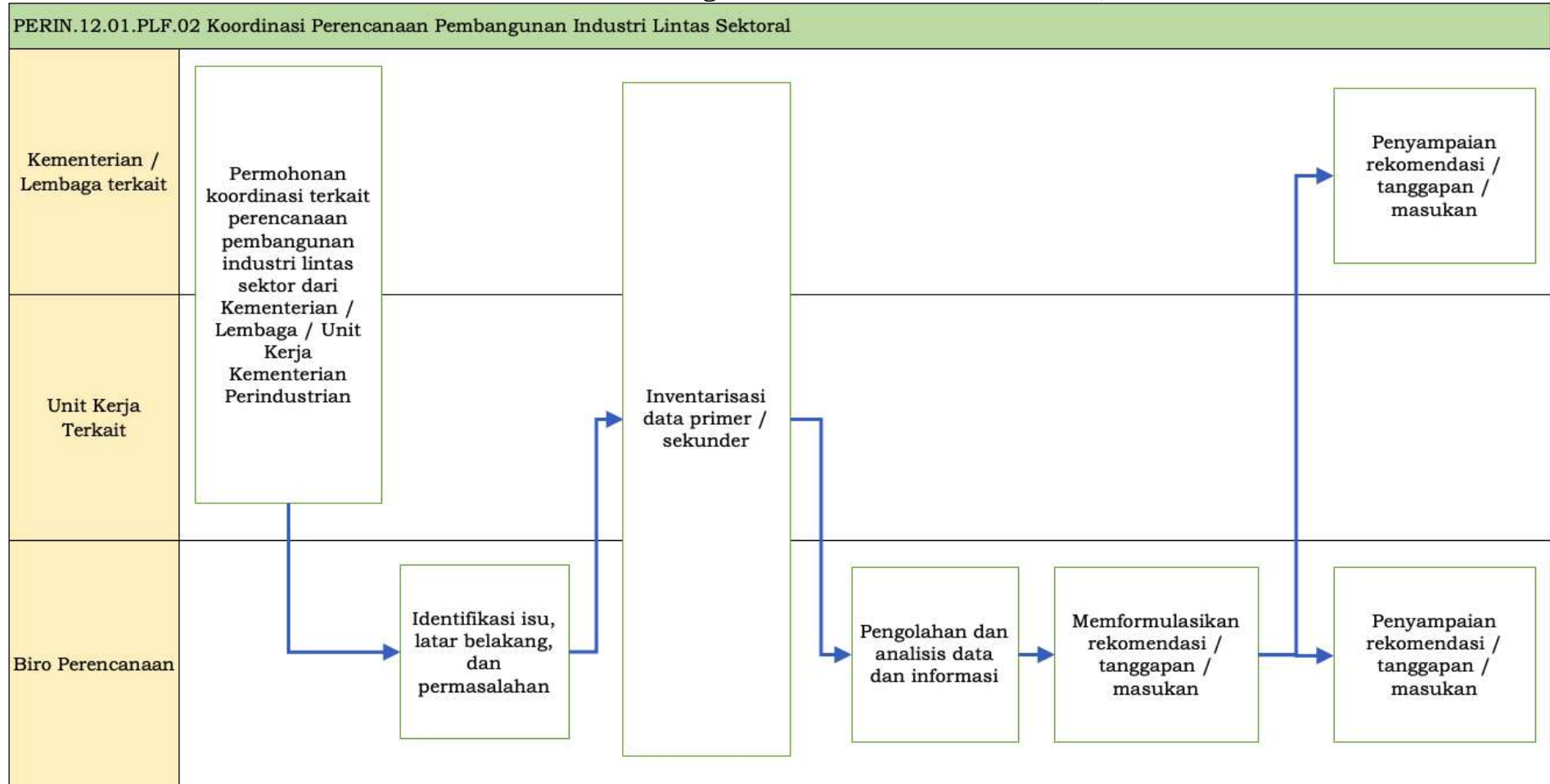
n. PERIN.11.01.14 Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik.



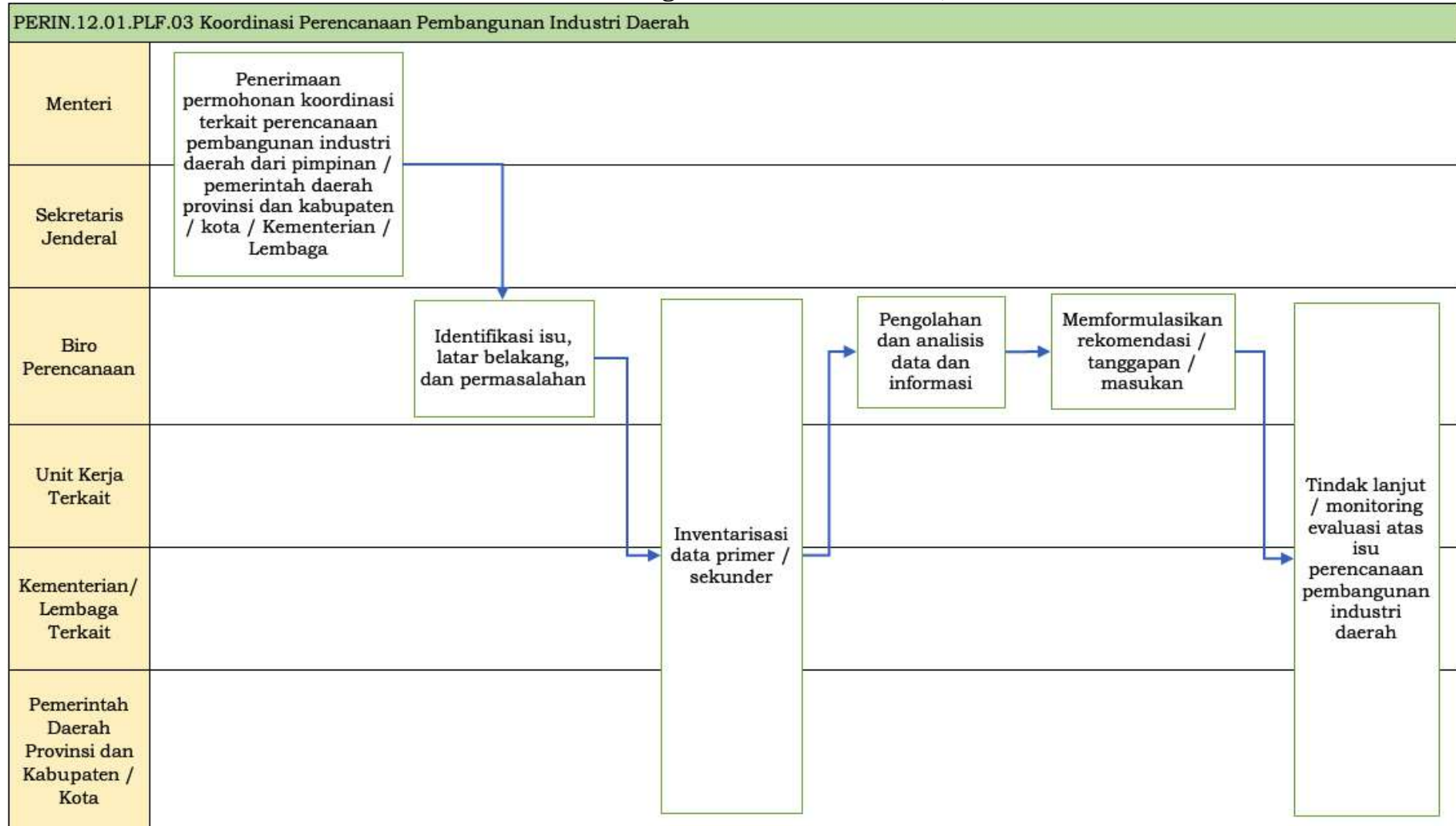
30. Sub-proses PERIN.12.01 Perencanaan Pembangunan Industri terdiri atas 4 (empat) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.12.01.PLF.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri;



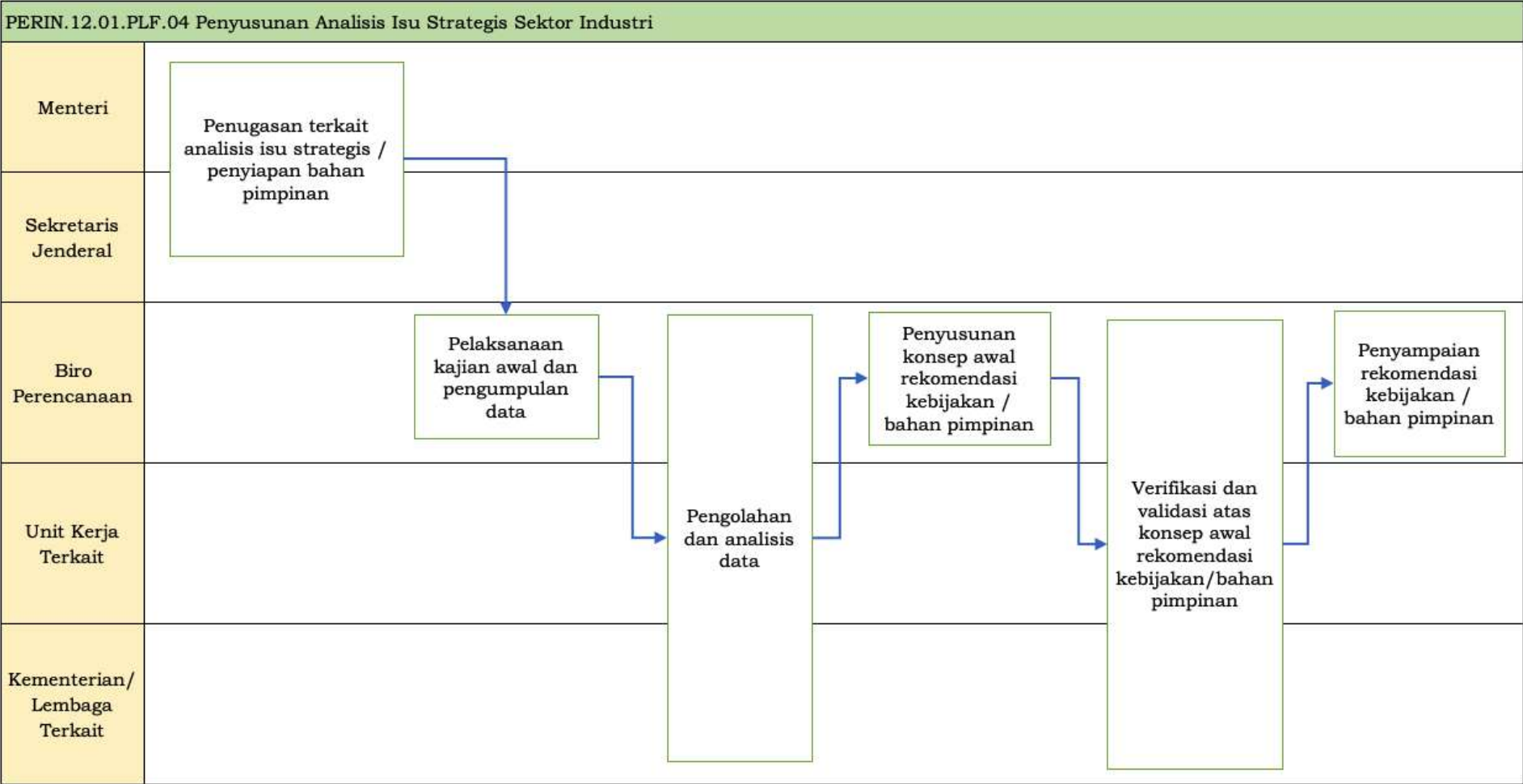
b. PERIN.12.01.PLF.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Lintas Sektoral;



c. PERIN.12.01.PLF.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Daerah; dan

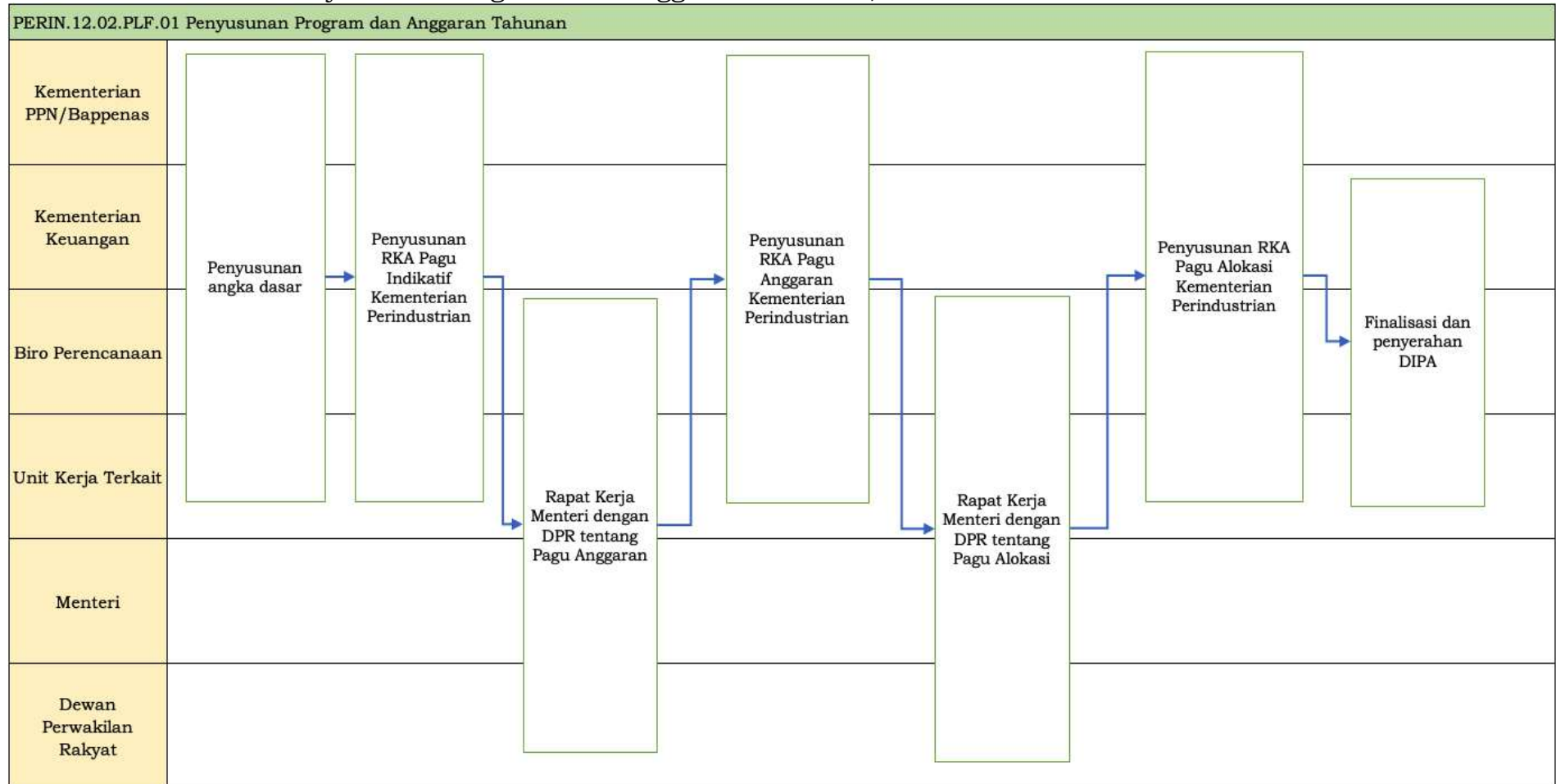


d. PERIN.12.01.PLF.04 Penyusunan Analisis Isu Strategis Sektor Industri.

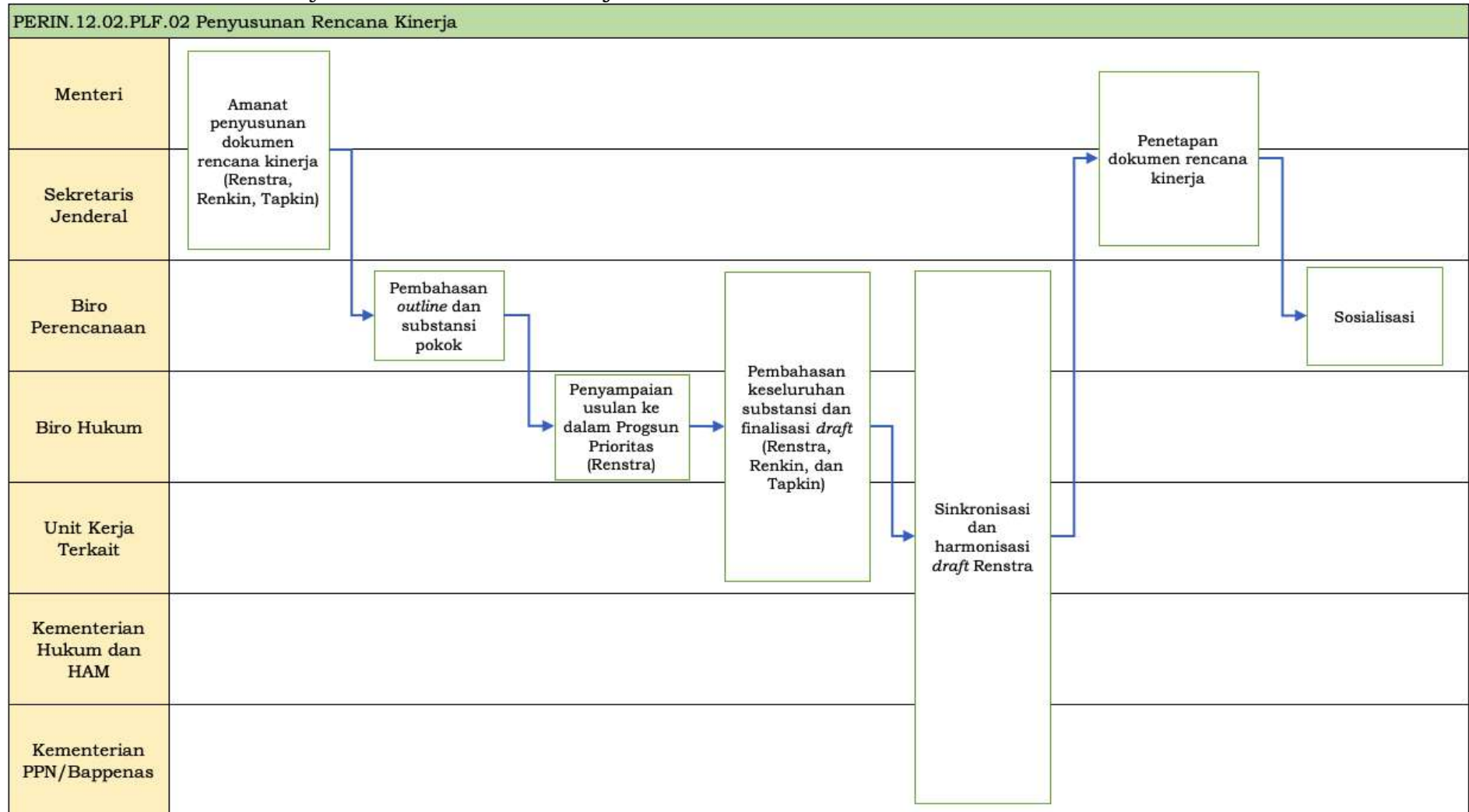


31. Sub-proses PERIN.12.02 Perencanaan Kinerja dan Program terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:

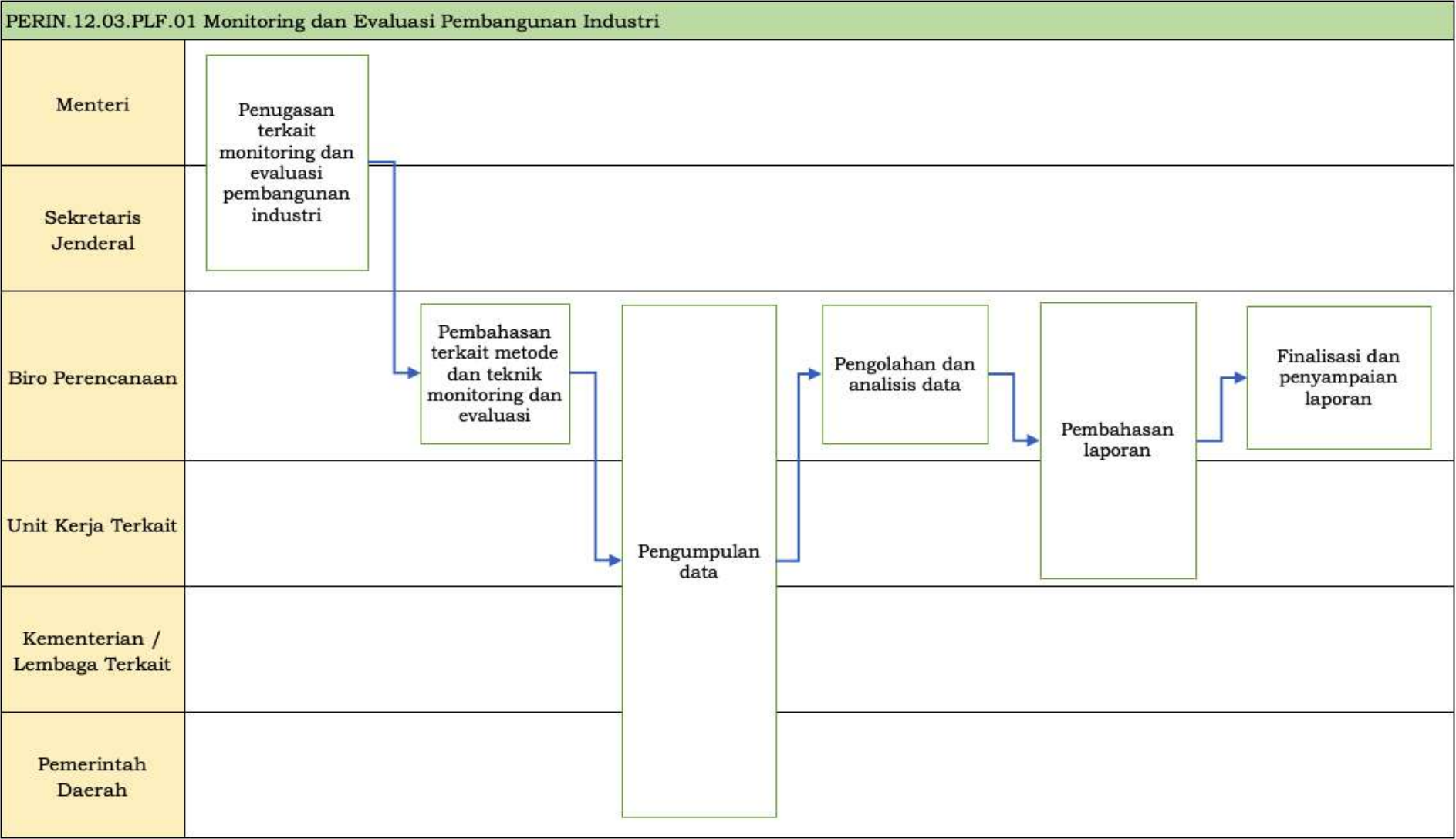
a. PERIN.12.02.PLF.01 Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan; dan



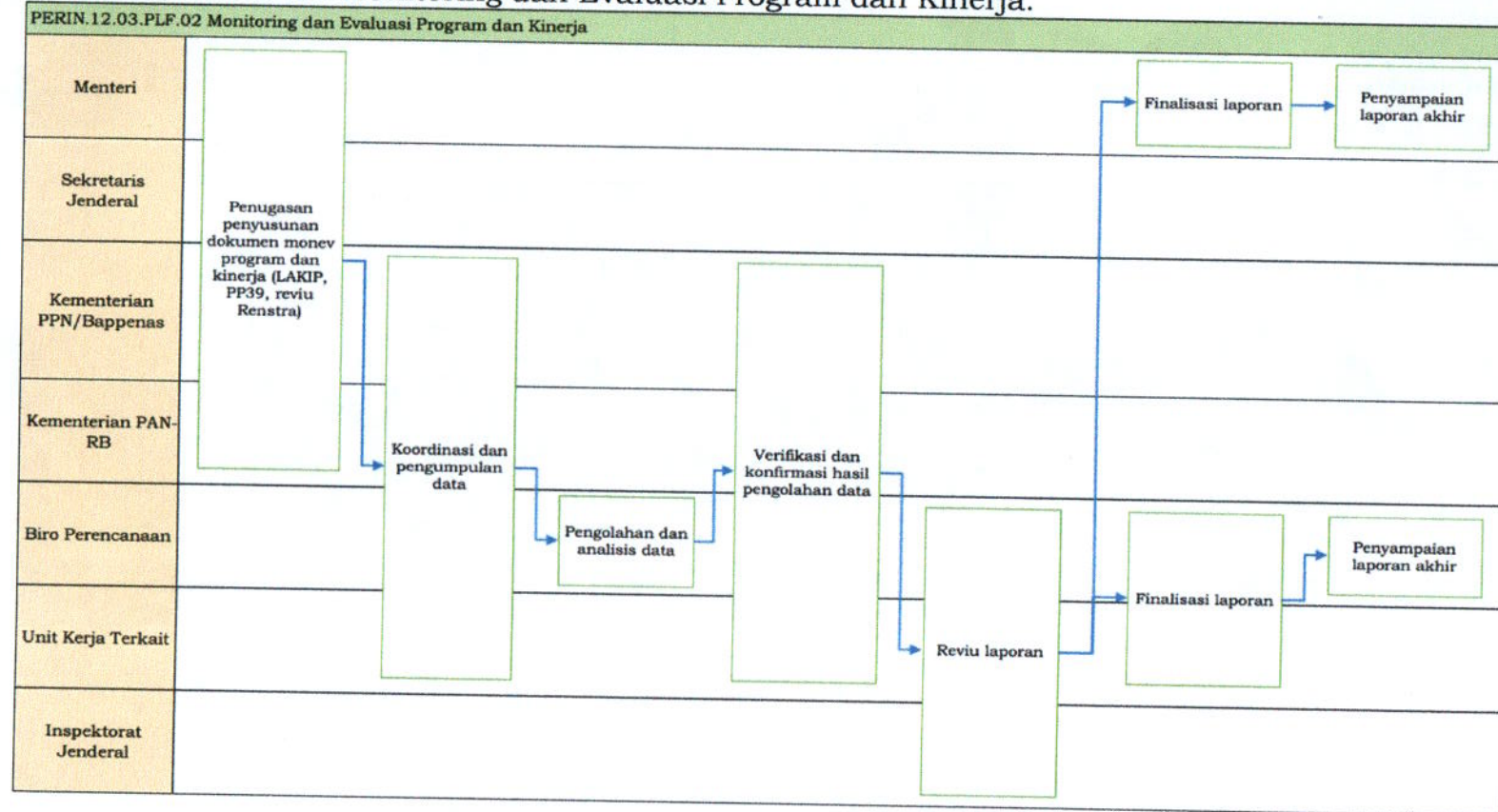
b. PERIN.12.02.PLF.02 Penyusunan Rencana Kinerja.



32. Sub-proses PERIN.12.03 Monitoring dan Evaluasi Program, Kinerja, dan Pembangunan Industri terdiri atas 2 (dua) peta lintas fungsi sebagai berikut:
- a. PERIN.12.03.PLF.01 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Industri; dan



b. PERIN.12.03.PLF.02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kinerja.



Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA